



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

PPAS

**PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

2023



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 053/VIII/PEM.OTDA-NK/2022
08/08/DPRD/2022

TANGGAL : 12 Agustus 2022

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Andi Sudirman Sulaiman, ST**
Jabatan : Gubernur Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jalan Urip Sumohardjo Nomor 269, Makassar
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

2. a. Nama : **A. Ina Kartika Sari, SH., M.Si**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jalan Urip Sumohardjo Nomor 59, Makassar
- b. Nama : **H. Syaharuddin Alrif, S.IP., MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jalan Urip Sumohardjo Nomor 59, Makassar
- c. Nama : **Darmawangsyah Muin, ST., M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jalan Urip Sumohardjo Nomor 59, Makassar
- d. Nama : **H. Ni'matullah, SE., Ak**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jalan Urip Sumohardjo Nomor 59, Makassar
- e. Nama : **Muzayyin Arif, S.Pd.I, M.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jalan Urip Sumohardjo Nomor 59, Makassar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA. 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA. 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA. 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Makassar, 12 Agustus 2022

Gubernur Sulawesi Selatan
Selaku,



PIHAK PERTAMA

Andi Sudirman Sulaiman, ST.

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Selaku,



PIHAK KEDUA

A. Ina Kartika Sari, SH., M.Si
Ketua

H. Syaharuddin Alrif, S.IP., MM
Wakil Ketua

Darmawangsyah Muin, ST., M.Si
Wakil Ketua

H. Ni'matullah, SE., Ak
Wakil Ketua

Muzayyin Arif, S.Pd.I, M.Pd
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

Sampul	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS	1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	3
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	14
2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2.2. Pendapatan Transfer	15
2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	20
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	311
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah	311
4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	393
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya	399
4.4. Belanja Tidak Terduga	400
4.5. Belanja Transfer	401
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	404
5.1. Pembiayaan Daerah	404
BAB VI PENUTUP	408

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada RKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2023 ini, merupakan penjabaran Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 dan bepedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yang dalam penyusunannya tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disusun dengan melakukan sinkronisasi pada kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan pada

Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan telah diinput melalui SIPD.

Berdasarkan muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang penekanannya pada upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung pembangunan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia, maka PPAS Tahun Anggaran 2023, secara substansi telah mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan indikator sasaran dan target yang ingin dicapai pada tahun 2023 termasuk program dan kegiatan prioritas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dirangkum pada masing-masing urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan di dalam satu tahun anggaran.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2023, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara serta penanganan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

Selanjutnya PPAS Tahun Anggaran 2023 dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Perumusan PPAS Tahun Anggaran 2023 merupakan kebijakan pemerintah daerah dengan maksud agar

proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan pusat dan daerah sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, selama kurun waktu satu tahun anggaran ke depan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah untuk:

1. Menyiapkan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan di dalam penyusunan RKA-SKPD yang terjabarkan melalui program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk kemudian disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar Hukum pelaksanaan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, TLN Republik Indonesia Nomor 6177);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 496);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 297);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 1); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 310);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 8);

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 273);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2014 No 2);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Prov. Sulsel Tahun 2014 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah

- Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Prov. Sulsel Tahun 2015 Nomor 10);
 42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 287);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif Dan Pengeluaran Tenak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 288);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
 46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulsel Nomor 290);
 47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
 49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 294);
 50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
 51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
 52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 295);
 53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 No.4, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulawesi Selatan No.299);
 54. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
55. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengawasan Ekosistem Essensial Karst Maros Pangkep (Lembaran Daerah Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulawesi Selatan Nomor 303);
 56. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 304);
 57. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 305);
 58. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 306);
 59. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan Perdesaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 307);
 60. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
 61. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 314);
62. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
 63. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041;
 64. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengurusan Barang Inventaris Milik Daerah. (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
 65. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 150 Tahun 2017 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 150);
 66. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 No. 2);
 67. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 13);
 68. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22).

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Perkembangan realisasi penerimaan pendapatan daerah sampai dengan akhir triwulan I Tahun 2022 menunjukkan tren positif dengan capaian realisasi Rp1,90 Triliun atau 20,61 persen dari target pokok pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp9,22 Triliun. Capaian ini melebihi target realisasi penerimaan pendapatan pada triwulan I yang ditetapkan sebesar 20 persen. Hal ini memberikan harapan penerimaan pendapatan daerah yang lebih baik, adapun catatan peristiwa tren positif ini tidak terlepas dari meningkatnya mobilitas masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat pada momentum Ramadhan dan Idul Fitri di Tahun 2022 ini.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik telah merilis pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan I-2022 terhadap Triwulan I-2021 mengalami pertumbuhan 4,27 persen jika dibandingkan Triwulan I-2021 (*yoy*). Hal ini menunjukkan keberhasilan penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pendapatan Daerah pada tahun 2023 diproyeksikan tetap dapat melanjutkan kinerja positif seiring prospek pemulihan ekonomi di tahun 2022, dengan upaya optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, Tahun Anggaran 2023 pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar Rp9,52 Triliun lebih. Hal ini menunjukkan terdapat kenaikan sebesar Rp304,19 Milyar lebih atau 3,30% dibandingkan target APBD Pokok Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9,22 Trilyun lebih. Pendapatan tersebut terdiri atas 3 (tiga) kelompok penerimaan, yaitu Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp5,241 Trilyun lebih. Penerimaan PAD tersebut ditargetkan terdiri atas penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Pada sektor Pajak Daerah, target penerimaannya dihitung dengan mempertimbangkan potensi Pajak Daerah, asumsi makro dan regulasi yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah. Khusus rencana penerimaan Pajak Rokok masih mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Tahun 2022 sambil menunggu terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Tahun 2023.

Pada jenis penerimaan Retribusi Daerah, akan dilakukan peralihan ke jenis penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah bagi Sebagian besar obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Untuk jenis penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, rencana target disusun berdasarkan estimasi deviden atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada BUMD.

2.2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Transfer Pemerintah Pusat terbagi lagi atas Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah. Total Pendapatan Transfer pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp4,197 Triliun lebih yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat yang

meliputi antara lain Dana Perimbangan yang di dalamnya terdapat Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Komponen Dana Transfer Umum terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sementara Dana Transfer Khusus terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Serta Dana Insentif Daerah yang juga merupakan Transfer dari pemerintah pusat. Adapun rencana target Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum serta rencana target Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik masih mengalami peningkatan dengan asumsi penerimaan 3 tahun terakhir.

Untuk lebih jelasnya Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

**TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN TAHUN 2023**

URAIAN	APBD TA 2022	TARGET TA 2023
Pendapatan Asli Daerah	5.003.467.478.294,00	5.241.732.200.577,00
Pajak Daerah	4.241.919.986.385,00	4.511.520.871.386,00
Retribusi Daerah	53.029.583.800,00	44.269.972.001,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	137.992.055.248,00	151.242.430.015,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	570.525.852.861,00	534.698.927.175,00
Pendapatan Transfer	4.095.273.480.415,00	4.197.489.435.321,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	234.805.960.415,00	254.720.621.639,00
- Bagi Hasil Pajak	188.132.606.415,00	188.132.606.415,00
- Bagi Hasil SDA	46.673.354.000,00	66.588.015.224,00
Dana Alokasi Umum	2.340.040.525.000,00	2.397.835.985.682,00
Dana Alokasi Khusus	1.520.426.995.000,00	1.520.426.995.000,00
Dana Insentif Daerah	-	24.505.833.000,00
Lain - lain Pendapatan yang Sah	124.389.159.861,00	88.099.679.250,00
Hibah	124.389.159.861,00	88.099.679.250,00
Dana Penyesuaian	-	-
Jumlah	9.223.130.118.570,00	9.527.321.315.148,00

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai pagu yang tertuang pada tabel Target Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 khususnya pada Dana Transfer yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU), sementara pada penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tersebut dengan masih mengacu pada target Nilai Pagu tahun lalu, sementara untuk Dana Insentif Daerah yang diasumsikan pada Tahun Anggaran 2023 dengan mengacu pada penerimaan tahun 2021 dengan asumsi di tahun 2022 pemerintah provinsi meraih penilaian opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sesuai dengan regulasi, Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan dengan mengacu rata-rata penerimaan tiga tahun terakhir sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp88,09 Milyar lebih mengalami penurunan sebesar Rp36,28 Miliar lebih atau menurun sebesar 29,17 persen dibandingkan pada Target Pokok 2022 sebesar Rp124,38 Milyar lebih. Penurunan ini diakibatkan telah berakhirnya alokasi hibah dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi Sulawesi Selatan yakni hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* tahun 2022.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan Pendapatan hibah yang merupakan partisipasi yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan

tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2023, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan.

Prioritas pertama Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dijabarkan dalam 39 program prioritas, Prioritas kedua Penguatan Infrastruktur Wilayah yang dijabarkan ke dalam 17 Program, Prioritas ketiga Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan yang dijabarkan ke dalam 26 program, Prioritas keempat Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi yang dijabarkan ke dalam 6 program, Prioritas kelima Pengembangan Manusia yang dijabarkan ke dalam 32 program, Prioritas keenam Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas yang dijabarkan ke dalam 12 program prioritas, dan Prioritas ketujuh Pelestarian Lingkungan Hidup yang dijabarkan ke dalam 17 program prioritas.

Selanjutnya dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2023 ada 7 (tujuh) prioritas pembangunan dengan 58 program prioritas sebagaimana dapat digambarkan dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Indikator	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral
		Program Pengelolaan Hutan	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	Dinas Kehutanan
			Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	
			Persentase Kerusakan Hutan pertahun	
			Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
			Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%):	Dinas Ketahanan Pangan
			* Beras	
			* Jagung	
			* Kedelai	
			Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/hari)	
			Ketersediaan Protein (gr/Kapita/hari)	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Produksi perikanan tangkap	
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan	
			Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	
			Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai produksi perikanan budidaya	
			Produksi perikanan budidaya	
			Persentase ketersediaan benur berkualitas	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Produksi perikanan tangkap	
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan	
			Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	
			Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Indikator	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP (%)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil	Produksi garam rakyat	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	
			Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	
		Program Pengembangan Umkm	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	
			Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan jumlah industri	Dinas Perindustrian
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
			Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	Dinas Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Perdagangan	Dinas Perdagangan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail	
		Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
			Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Indikator	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
			Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	
			Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	
			Persentase Serapan Belanja Daerah	
			Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS	Dinas Perindustrian
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya	Dinas Perdagangan
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurai Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton),	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
			Luas Areal Pengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	
			Produktifitas Padi	
			Produktifitas Jagung	
			Produktifitas Kopi	
			Produktifitas Kakao	
			Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	
			Peningkatan Ketersediaan Pupuk	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai produksi perikanan budidaya	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Produksi perikanan budidaya	
			Persentase ketersediaan benur berkualitas	
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
			Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	
			Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda &	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Indikator	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
			Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	
			Persentase Serapan Belanja Daerah	
			Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	
			Persentase penerbitan KTP	
			Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	
			Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	
		Program Pengendalian Penduduk	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	Dinas Sosial
			Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti(SPM)	
			Persentase warga negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti (SPM)	
			Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti(SPM)	
			Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti	
			Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Indikator	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
			Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana Kb	Persentase PUS peserta KB Aktif	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	% Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	Dinas Pendidikan
			Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	
			Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	
			Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	
			Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	
			Persentase Guru SMA yang bersertifikat	
			Persentase Guru SMK yang bersertifikat	
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase kab/kota Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kab/kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG	
			Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Indikator	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Ks	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	Dinas Sosial
			Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
			Persentase peningkatan prestasi olahraga	
4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
		Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan.	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	
			Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik	Dinas Perpustakaan
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	Dinas Pendidikan
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (SPM)	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Indikator	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	
			Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	
			Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Llalj	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Dinas Perhubungan
			Persentase Layanan Angkutan Darat;	
			Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	
			Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	
			Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	
			Jumlah Terminal Bis terkelola	
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana yang tertangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air Sda	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
			Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
			Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat)	
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan Sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	
			Jumlah pelabuhan strategis provinsi	
			Persentase pelabuhan yang beroperasi	
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
			Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral
			Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Indikator	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
			Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana yang tertangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun B Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Limbah B3	Cakupan limbah yang dikelola	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Kelautan Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil	Produksi garam rakyat	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	
			Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
			Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum
			Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Indikator	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	
			Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	
		Program Penataan Organisasi	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	Biro Kesejahteraan
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Tabel 3.2.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemantapan perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	1.150.000.000	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.142.331.704	
			Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
			Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	BIRO ORGANISASI	4.180.000.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	INSPEKTORAT DAERAH	14.723.830.000	
			Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	INSPEKTORAT DAERAH		
			Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat	INSPEKTORAT DAERAH		
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas)	% Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13.035.250.980	
			Persentase peningkatan capaian kinerja program			
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	8.038.171.374	
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	BIRO HUKUM	5.187.729.020	
			Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	BIRO HUKUM		
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.177.531.111	
			Persentase Desa yang diFasilitasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.091.179.790	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	34.923.430.160	
			Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik			
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1.354.999.800	
2	Penguatan infrastruktur wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	746.629.356.488	
			Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	DINAS PERHUBUNGAN	1.657.568.462	
			Jumlah pelabuhan strategis provinsi	DINAS PERHUBUNGAN		
			Persentase pelabuhan yang beroperasi	DINAS PERHUBUNGAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.896.597.300	
			Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (SPM/Prioritas)	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	108.292.174.400	
			Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.715.004.200	
			Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
			Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	52.040.782.200	

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	2.540.781.800	
			Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal			
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	4.131.748.200	
			Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	74.340.496.920	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	624.784.856	
			Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.832.824.200	
			Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1.269.999.800	
			Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.112.712.930	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial			
4	Akselerasi pembangunan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN spm prioritas	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	DINAS PENDIDIKAN	878.210.767.699	
			Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	DINAS PENDIDIKAN		
			Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	DINAS PENDIDIKAN		

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	DINAS PENDIDIKAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM prioritas	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	DINAS PENDIDIKAN	600.127.100	
			Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	DINAS PENDIDIKAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Prestasi olah raga	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	73.469.172.100	
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga			
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN (Prioritas)	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	DINAS KESEHATAN	1.677.887.000	
			Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	128.555.880	
			Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	UPT RSK GIGI DAN MULUT	99.833.000	
			Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	RSUD LABUANG BAJI	172.500.000	
			Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	RSUD HAJI MAKASSAR	3.621.954.340	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas/SPM)	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	DINAS KESEHATAN	155.824.063.526	
			Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	UPT TRANSFUSI DARAH	6.893.025.988	
			Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	2.077.432.222	
			Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	UPT RSK GIGI DAN MULUT	4.009.074.268	
			Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	RSUD LABUANG BAJI	1.200.000.000	

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	RSUD HAJI MAKASSAR	2.525.000.000	
			Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	RS KHUSUS DAERAH DADI	800.000.000	
			Meningkatnya Kompetensi teknis SDM	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI	1.696.559.443	
			Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	RSUD SAYANG RAKYAT	4.822.854.473	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA	767.852.100	
			Persentase kab/kota yg memenuhi indikator prasyarat PUG	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA		
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA	824.889.024	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.910.853.350	
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan.	BIRO KESEJAHTERAAN	73.928.270.156	
			Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	BIRO KESEJAHTERAAN		
			Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	BIRO KESEJAHTERAAN		
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK	203.729.700	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK	1.187.999.200	

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
		EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
			Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani			
5	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	715.712.200	
			Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.384.623.136	
			Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
			Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2.953.862.600	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	Jumlah DAS yang direhabilitasi	DINAS KEHUTANAN	331.423.100	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.730.198.485	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan limbah yang dikelola	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	5.549.999.754	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	229.997.300	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Produksi garam rakyat	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.969.196.200	
			Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan			
			Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)			
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.565.142.900	

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	DINAS PERHUBUNGAN	3.750.673.645	
			Persentase Layanan Angkutan Darat;	DINAS PERHUBUNGAN		
			Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	DINAS PERHUBUNGAN		
			Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	DINAS PERHUBUNGAN		
			Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	DINAS PERHUBUNGAN		
			Jumlah Terminal Bis terkelola	DINAS PERHUBUNGAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Sampah Perkotaan yang tertangani	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	668.093.099	
6	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Prioritas)	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5.136.586.600	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.715.562.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.341.065.000	
			Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	DINAS KEHUTANAN	10.284.262.300	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	90.000.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	DINAS SOSIAL	4.585.700.000	
			Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	DINAS SOSIAL		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton),	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	211.419.409.350	
			Luas Areal Pengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)			
			Produktifitas Padi			

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Produktifitas Jagung			
			Produktifitas Kopi			
			Produktifitas Kakao			
			Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian			
			Peningkatan Ketersediaan Pupuk			
			Produksi Daging (ton)	DINAS PETERNAKAN	20.117.295.548	
			Produksi Telur (Ton)			
			Produksi Susu (Ton)			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.216.193.600	
			Persentase Posyandu aktif;	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
			Persentase PKK aktif	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	461.190.000	
7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT (%)	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	9.200.000.000	
			Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat (%)			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.121.160.300	
			Produksi perikanan tangkap			
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan			
			Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional			
			Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.195.875.800	
			Produksi perikanan budidaya			
			Persentase ketersediaan benur berkualitas			

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	DINAS KEHUTANAN	13.935.525.020	
			Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan			
			Persentase Kerusakan Hutan pertahun			
			Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan (Rp.)	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	101.283.785.360	
			Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan (Rp.)			
			Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan	DINAS PETERNAKAN	654.999.100	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	912.107.400	
			Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi			
			Persentase Pembinaan mutu produk perikanan			
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	DINAS PERINDUSTRIAN	23.304.427.524	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	1.694.000.000	
TOTAL					2.825.259.753.585	

Tabel 3.3.

Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

NO	PRIORITAS PROVINSI		TUJUAN / SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Pemantapan perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	1.150.000.000	
		2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.142.331.704	
					Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
					Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	BIRO ORGANISASI	4.180.000.000	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	INSPEKTORAT DAERAH	14.723.830.000	
					Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	INSPEKTORAT DAERAH		
					Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat	INSPEKTORAT DAERAH		
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas)	% Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd & APBD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13.035.250.980	
					Persentase peningkatan capaian kinerja program			

NO	PRIORITAS PROVINSI		TUJUAN / SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2		3	4	5	6	7	8
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	8.038.171.374	
				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	BIRO HUKUM	5.187.729.020	
					Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	BIRO HUKUM		
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.177.531.111	
					Persentase Desa yang diFasilitasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		3	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.091.179.790	
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	34.923.430.160	
					Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik			
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1.354.999.800	
2	Penguatan infrastruktur wilayah	4	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	746.629.356.488	
		5	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah		Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		

NO	PRIORITAS PROVINSI		TUJUAN / SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2		3	4	5	6	7	8
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	DINAS PERHUBUNGAN	1.657.568.462	
					Jumlah pelabuhan strategis provinsi	DINAS PERHUBUNGAN		
					Persentase pelabuhan yang beroperasi	DINAS PERHUBUNGAN		
				PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.896.597.300	
					Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (SPM/Prioritas)	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	108.292.174.400	
					Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.715.004.200	
					Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
					Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	52.040.782.200	
					Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	6	Meningkatnya kesejahteraan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	2.540.781.800	

NO	PRIORITAS PROVINSI		TUJUAN / SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2		3	4	5	6	7	8
			masyarakat secara merata	TARIK DESTINASI PARIWISATA				
		7	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah		Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal			
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	4.131.748.200	
					Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)			
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	74.340.496.920	
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	624.784.856	
					Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.832.824.200	
					Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1.269.999.800	
					Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.112.712.930	
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial			
4	Akselerasi pembangunan Sumber Daya Manusia	8	Meningkatkan Kualitas SDM secara	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	DINAS PENDIDIKAN	878.210.767.699	

NO	PRIORITAS PROVINSI		TUJUAN / SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2		3	4	5	6	7	8
			inklusif dan berkarakter	PENDIDIKAN spm prioritas				
		9	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan		Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	DINAS PENDIDIKAN		
					Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	DINAS PENDIDIKAN		
					Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	DINAS PENDIDIKAN		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM prioritas	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	DINAS PENDIDIKAN	600.127.100	
					Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	DINAS PENDIDIKAN		
		10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PersentasePeningkatan Prestasi olah raga	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	73.469.172.100	
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN (Prioritas)	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	DINAS KESEHATAN	1.677.887.000	
					Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	128.555.880	
					Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	UPT RSK GIGI DAN MULUT	99.833.000	
					Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	RSUD LABUANG BAJI	172.500.000	

NO	PRIORITAS PROVINSI		TUJUAN / SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2		3	4	5	6	7	8
					Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	RSUD HAJI MAKASSAR	3.621.954.340	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas/SPM)	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	DINAS KESEHATAN	155.824.063.526	
					Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	UPT TRANSFUSI DARAH	6.893.025.988	
					Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	2.077.432.222	
					Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	UPT RSK GIGI DAN MULUT	4.009.074.268	
					Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	RSUD LABUANG BAJI	1.200.000.000	
					Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	RSUD HAJI MAKASSAR	2.525.000.000	
					Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	RS KHUSUS DAERAH DADI	800.000.000	
					Meningkatnya Kompetensi teknis SDM	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI	1.696.559.443	
					Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	RSUD SAYANG RAKYAT	4.822.854.473	
		11	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA	767.852.100	
					Persentase kab/kota yg memenuhi indikator prasyarat PUG	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN		

NO	PRIORITAS PROVINSI		TUJUAN / SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2		3	4	5	6	7	8
						PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA		
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA	824.889.024	
		12	Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.910.853.350	
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan.	BIRO KESEJAHTERAAN	73.928.270.156	
					Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	BIRO KESEJAHTERAAN		
					Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	BIRO KESEJAHTERAAN		
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK	203.729.700	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK	1.187.999.200	
					Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani			
5	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup	13	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	715.712.200	

NO	PRIORITAS PROVINSI		TUJUAN / SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2		3	4	5	6	7	8
		14	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.384.623.136	
					Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
					Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2.953.862.600	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	Jumlah DAS yang direhabilitasi	DINAS KEHUTANAN	331.423.100	
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.730.198.485	
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan limbah yang dikelola	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	5.549.999.754	
				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	229.997.300	
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Produksi garam rakyat	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.969.196.200	

NO	PRIORITAS PROVINSI		TUJUAN / SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2		3	4	5	6	7	8
					Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan			
					Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)			
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.565.142.900	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	DINAS PERHUBUNGAN	3.750.673.645	
					Persentase Layanan Angkutan Darat;	DINAS PERHUBUNGAN		
					Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	DINAS PERHUBUNGAN		
					Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	DINAS PERHUBUNGAN		
					Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	DINAS PERHUBUNGAN		
					Jumlah Terminal Bis terkelola	DINAS PERHUBUNGAN		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	668.093.099	
6	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	15	Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Prioritas)	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5.136.586.600	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.715.562.000	
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.341.065.000	

NO	PRIORITAS PROVINSI		TUJUAN / SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2		3	4	5	6	7	8
					Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	DINAS KEHUTANAN	10.284.262.300	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	90.000.000	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	DINAS SOSIAL	4.585.700.000	
					Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	DINAS SOSIAL		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton),	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	211.419.409.350	
					Luas Areal Pengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)			
					Produktifitas Padi			
					Produktifitas Jagung			
					Produktifitas Kopi			
					Produktifitas Kakao			
					Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian			
					Peningkatan Ketersediaan Pupuk			
					Produksi Daging (ton)	DINAS PETERNAKAN	20.117.295.548	
					Produksi Telur (Ton)			
					Produksi Susu (Ton)			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.216.193.600	

NO	PRIORITAS PROVINSI		TUJUAN / SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2		3	4	5	6	7	8
				MASYARAKAT HUKUM ADAT				
					Persentase Posyandu aktif;	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
					Persentase PKK aktif	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	461.190.000	
7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	16	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT (%)	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	9.200.000.000	
		17	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah		Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat (%)			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.121.160.300	
					Produksi perikanan tangkap			
					Cakupan Bina Kelompok Nelayan			
					Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional			
					Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.195.875.800	
					Produksi perikanan budidaya			
					Persentase ketersediaan benur berkualitas			
				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	DINAS KEHUTANAN	13.935.525.020	
					Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan			

NO	PRIORITAS PROVINSI		TUJUAN / SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	OPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (Rp)	KET
1	2		3	4	5	6	7	8
					Persentase Kerusakan Hutan pertahun			
					Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan (Rp.)	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	101.283.785.360	
					Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan (Rp.)			
					Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan	DINAS PETERNAKAN	654.999.100	
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	912.107.400	
					Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi			
					Persentase Pembinaan mutu produk perikanan			
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	DINAS PERINDUSTRIAN	23.304.427.524	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	1.694.000.000	
TOTAL							2.825.259.753.585	

Tabel 3.4

Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2024	Praktiran Capaian Target SKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
													Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	%	%	100 %	1,983,986,795,991					100 %	1,972,231,253,894		
1	1	1	01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	2,097,957,500					5 Dokumen	4,345,000,000		
1	1	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	74,811,000	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	330,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	22,688,000	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 Dokumen	23,736,800	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	22,688,000	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	22,688,000	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	22,688,000	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	375,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1,908,657,700	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	340,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	1,970,636,345,195					3 Dokumen	1,956,877,253,894		
1	1	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		13390 Orang/ Bulan	1,969,652,651,195	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	13390 Orang/ Bulan	1,954,487,253,894	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2 Dokumen	0	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	143,880,000	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan		280,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4 Laporan	56,465,700	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	280,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	0	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12 Laporan	715,403,300	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	190,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen	49,945,000	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	340,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0						607,000,000		
1	1	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	0	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	21,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	0	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	42,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	0	Kota Makassar, Tamalaura, Tamalaura	PENDAPATAN ASLI		Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	125,000,000	DINAS PENDIDIKAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penanggung Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
1	1	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0	Kota Makassar, Tamalaneura, Tamalaneura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	210,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0	Kota Makassar, Tamalaneura, Tamalaneura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	75,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0	Kota Makassar, Tamalaneura, Tamalaneura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	9,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Tamalaneura, Tamalaneura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	125,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	laporan		laporan	10 laporan	0						10 laporan	1,848,000,000		
1	1	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0	Kota Makassar, Tamalaneura, Tamalaneura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	28,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Paket	190,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				12 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Orang	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.05	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				12 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.05	8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahgunakan				12 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Orang	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	4 Orang	90,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1190 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1190 Orang	675,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1150 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1150 Orang	670,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
2	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	4,749,746,100						2 Dokumen	4,813,000,000		
1	1	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	36,550,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Paket	775,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	593,543,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Paket	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	37,872,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Paket	900,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Paket	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	133,195,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Paket	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)						
1	1	1	01.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Paket	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	268,450,000	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	380,135,000	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	310,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	8,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	3,300,000,000	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	80,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40,762,000							1,540,000,000	
1	1	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	40,762,000	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang disediakan	Jenis		Jenis	5 Jenis	6,134,735,196						5 Jenis	171,000,000	
1	1	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	27,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,410,775,692	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	65,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4,723,959,504	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	9,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	22 Unit	327,250,000						22 Unit	2,630,000,000	
1	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				29 Unit	177,750,000	Kota Makassar, Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	29 Unit	470,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinasnya				29 Unit	102,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	29 Unit	180,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinasnya				12 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Unit	40,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinasnya				1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	130,000,000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	01.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	22,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	50 Unit	260,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	30 Unit	490,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				18 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	18 Unit	190,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	25,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	5 Unit	240,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Unit	280,000,000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	10 Unit	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	01.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Ha	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase jumlah warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM / Prioritas)	%		%	100 %	878,210,767,699						100 %	899,767,721,082	
						Presentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM/ Prioritas)	%		%	100 %							100 %		
						Presentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM/ Prioritas)	%		%	61,15 %							61,15 %		
						Presentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (Indikator RPJMD pokok) (Prioritas)	%		%	92,20 %							92,20 %		
1	1	2	01.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang di kelola	Sekolah		Sekolah	586 Sekolah	471,708,214,484						586 Sekolah	452,225,000,000	
1	1	2	01.01	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	2 Unit	4,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				21 Ruang	2,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Ruang	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	2,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Ruang	4,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				21 Ruang							21 Ruang		
1	1	2	01.01	4	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun				20 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	4,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	5	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun				21 Ruang	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	6	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun				21 Ruang	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
												Semua Kelurahan								
1	1	2	01.01	7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun				21 Ruang	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	8	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun				21 Ruang	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	9	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun				21 Ruang	3,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				21 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Ruang	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				21 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Ruang	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				21 Unit	1,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Unit	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				21 Unit	743,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Unit	10,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				21 Unit	2,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Unit	6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Unit	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				21 Unit	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Unit	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	18	Pembangunan Ruang/Studut Baca	Jumlah Ruang/Studut Baca yang Telah Dibangun				21 Ruang	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang	4,199,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	25 Ruang	10,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	25 Ruang	5,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	3,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang								25 Ruang		
1	1	2	01.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	2,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang								25 Ruang		
1	1	2	01.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Ruang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang								25 Ruang		
1	1	2	01.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Ruang	6,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang								25 Ruang		
1	1	2	01.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI			Satuan Pendidikan	0 Ruang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang		Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)				25 Ruang		
1	1	2	01.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Ruang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang							25 Ruang		
1	1	2	01.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Ruang	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang							25 Ruang		
1	1	2	01.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Ruang	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang							25 Ruang		
1	1	2	01.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	25 Ruang	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi				25 Unit	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	25 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				25 Unit	2,079,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	25 Unit	10,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi				25 Unit	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	25 Unit	6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi				25 Unit	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	25 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi				25 Unit	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	25 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi				25 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	25 Ruang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				35 Paket	2,500,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	35 Paket	6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	37	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				25 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	25 Paket	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				25 Paket	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	25 Paket	10,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				25 Paket	100,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	25 Paket	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				25 Unit	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	25 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				26 Paket	2,694,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	26 Paket	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				26 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	26 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
1	1	2	01.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				26 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	26 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				26 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	26 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				26 Peserta didik	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	26 Peserta didik	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				26 Paket	231,387,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	26 Paket	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	47	Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian				26 Satuan Pendidikan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	5,075,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				26 Satuan Pendidikan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				26 Peserta Didik	600,014,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	26 Peserta Didik	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Orang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				26 Orang							26 Orang			
1	1	2	01.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Orang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				26 Orang							26 Orang			
1	1	2	01.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				586 Satuan Pendidikan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	586 Satuan Pendidikan	650,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				586 Satuan Pendidikan	358,593,613,384	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	586 Satuan Pendidikan	202,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				586 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	586 Orang	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang di kelola	Sekolah		Sekolah	443 Sekolah	306,273,517,748						443 Sekolah	281,768,669,011		
1	1	2	01.02	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	1 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				20 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				20 Ruang							20 Ruang			
1	1	2	01.02	4	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				20 Ruang	3,499,000,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Masi Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
												Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)							
1	1	2	01.02	5	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				20 Ruang	2,999,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	6	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				20 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
		1	2	01.02	7	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			20 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	8	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				20 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	9	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	792,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Unit	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				20 Unit	2,999,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Unit	4,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	14	Pembangunan Ruang/Studut Baca	Jumlah Ruang/Studut Baca yang Telah Dibangun				20 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi				24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	01.02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi				24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI			Satuan Pendidikan	24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)						
1	1	2	01.02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi				24 Unit	3,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				24 Unit	1,679,040,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Unit	4,093,669,011	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi				24 Unit	3,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi				24 Unit	3,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi				24 Unit	3,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi				24 Ruang	3,499,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				24 Paket	3,000,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	29	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				24 Paket	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				24 Paket	2,984,892,300	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				24 Paket	2,996,921,600	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				24 Unit	3,008,031,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				24 Paket	1,200,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				24 Unit	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				24 Unit	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				24 Unit	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				24 Peserta didik	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Peserta didik	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				24 Paket	199,998,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kabupaten Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1	1	2	01.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian				24 Satuan Pendidikan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	3,075,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	40	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				24 Satuan Pendidikan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				24 Peserta Didik	499,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Peserta Didik	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				24 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Orang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	52,711,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Orang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				24 Orang							24 Orang		
1	1	2	01.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun				24 Unit	2,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	24 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				443 Satuan Pendidikan	101,047,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	443 Satuan Pendidikan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				443 Satuan Pendidikan	217,083,787,748	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	443 Satuan Pendidikan	135,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				443 Orang	101,188,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	443 Orang	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang di kelola	Sekolah		Sekolah	86 Sekolah	100,229,035,467	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				86 Sekolah	165,774,052,071	
1	1	2	01.03	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	1 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				20 Ruang	2,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				20 Ruang	2,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	7	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penangkt Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	1	2	01.03	8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				20 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun				20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun				20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun				20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun				20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun				20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi				22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi				22 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				22 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Main Rencana Tahun 2024		Penangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	1	2	01.03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi				22 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi				22 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi				22 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi				22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi				22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi				22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi				22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi				22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				22 Paket	1,000,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia				22 Paket	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				22 Paket	2,313,870,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				22 Paket	150,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				22 Unit	2,313,870,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				22 Paket	231,387,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				22 Unit	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasngkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	1	2	01.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				22 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				22 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Peserta Didik	3,274,052,071	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				22 Peserta Didik							22 Peserta Didik		
1	1	2	01.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				22 Paket	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Paket	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				22 Satuan Pendidikan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				22 Satuan Pendidikan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				22 Peserta Didik	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Peserta Didik	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				22 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	22 Orang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	299,150,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	0 Orang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				22 Orang							22 Orang		
1	1	2	01.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				86 Satuan Pendidikan	117,598,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	86 Satuan Pendidikan	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				86 Satuan Pendidikan	23,987,158,867	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	86 Satuan Pendidikan	14,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	01.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				86 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	86 Orang	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TK (Prioritas)	%		%	81 %	600,127,100						81 %	4,135,000,000	
						Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama (Prioritas)	%		%	55,60 %							55,60 %		
1	1	3	01.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang ditetapkan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	500,000,000						2 kegiatan	2,600,000,000	
1	1	3	01.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	1 Dokumen	650,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	01.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	1 Dokumen	650,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	01.01	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia				1029 Buku	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	1029 Buku	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	1	3	01.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya				1 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	1 Orang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	01.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						100,127,100							1,835,000,000	
1	1	3	01.02	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				86 Dokumen	100,127,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86 Dokumen	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	3	01.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				86 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86 Dokumen	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1	1	3	01.02	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia				86 Buku	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86 Buku	85,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	3	01.02	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya				86 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86 Orang	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA yang bersertifikat	%		%	52,65 %	20,000,010,000						52,65 %	4,000,000,000	
						Persentase Guru SMK yang bersertifikat	%		%	45,85 %							45,85 %		
					Peminatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Rasio		Rasio	1:1,3 Rasio							1:1,3 Rasio		
1	1	4	01.01		Peminatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	orang		orang	16000 orang	20,000,010,000						16000 orang	4,000,000,000	
1	1	4	01.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1115 Dokumen	20,000,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1115 Dokumen	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	4	01.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1115 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1115 Laporan	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memperoleh Ijin Penyelenggaraan Pendidikan	%		%	100 %	0						100 %	2,100,000,000	
1	1	5	01.01		Penerbitan Ijin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Ijin Pendidikan Menengah yang diterbitkan	Sekolah		Sekolah	24 Sekolah	0						24 Sekolah	750,000,000	
1	1	5	01.01	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				525 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	525 Dokumen	375,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	01.01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				525 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	525 Dokumen	375,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	01.02		Penerbitan Ijin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Ijin Pendidikan Khusus yang diterbitkan	Sekolah		Sekolah	18 Sekolah	0						18 Sekolah	1,350,000,000	
1	1	5	01.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				63 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	63 Dokumen	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	01.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				63 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	63 Dokumen	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	01.02	3	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				63 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	63 Dokumen	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%		%	48,25 %	280,233,300						48,25 %	3,415,000,000	
1	1	6	01.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	Bahasa		Bahasa	2 Bahasa	280,233,300						2 Bahasa	3,415,000,000	
1	1	6	01.01	1	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun				60 Kamus	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	60 Kamus	325,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	1	6	01.01	2	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terjadi Vitalitannya, Terkonservasi dan Terrevitalisasi Kewenangan Provinsi				65 Bahasa	0	Semua Kabupaten Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	65 Bahasa	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6	01.01	3	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastran Daerah Kewenangan Provinsi				70 Publikasi	191,598,100	Semua Kabupaten Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	70 Publikasi	375,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6	01.01	4	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastran Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastran Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan				35 Orang	0	Semua Kabupaten Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	35 Orang	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6	01.01	5	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi				558 Buku	88,635,200	Semua Kabupaten Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	558 Buku	870,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6	01.01	6	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi				558 Peserta Didik	0	Semua Kabupaten Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	558 Peserta Didik	870,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6	01.01	7	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun				30 Dokumen	0	Semua Kabupaten Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Pendidikan	30 Dokumen	425,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										236,559,788,802						180,878,812,294	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LUP	%	100% 100% 0% %	75,381,961,476					100% 100% 0% %	96,505,707,126		
1	2	1	01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100 %	442,434,400					100 %	419,837,655	
1	2	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	176,836,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	3 Dokumen	140,958,936	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	18,694,500	Kota Makassar, Tamalauwa, Tamalauwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	1 Dokumen	19,629,225	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	19,800,000	Kota Makassar, Tamalauwa, Tamalauwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	1 Dokumen	20,790,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	17,729,800	Kota Makassar, Tamalauwa, Tamalauwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	1 Dokumen	18,616,500	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	16,651,100	Kota Makassar, Tamalauwa, Tamalauwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	1 Dokumen	17,483,844	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	192,723,000	Kota Makassar, Tamalauwa, Tamalauwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	6 Laporan	202,359,150	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100 %	63,468,685,171					100 %	89,619,479,880	
1	2	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				532 Orang/ Bulan	63,116,799,771	Kota Makassar, Tamalauwa, Tamalauwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	532 Orang/ Bulan	89,250,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	20,253,000	Kota Makassar, Tamalauwa, Tamalauwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	12 Dokumen	21,265,650	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	270,725,500	Kota Makassar, Tamalauwa, Tamalauwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	100 Dokumen	284,261,880	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	5,171,900	Kota Makassar, Tamalauwa, Tamalauwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	2 Laporan	5,430,600	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				19 Laporan	50,563,000	Kota Makassar, Tamalana, Tamalana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulel	19 Laporan	53,091,150	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5,172,000	Kota Makassar, Tamalana, Tamalana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulel	1 Dokumen	5,430,600	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	%		%	100 %	159,999,110					100 %	168,000,000		
1	2	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	49,999,900	Kota Makassar, Tamalana, Tamalana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulel	1 Dokumen	52,500,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	109,999,210	Kota Makassar, Tamalana, Tamalana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulel	1 Laporan	115,500,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	(Nilai)		(Nilai)	89 (Nilai)	1,807,273,892					89 (Nilai)	2,111,793,262		
1	2	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Provinsi Sulel	0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				26 Dokumen	1,807,273,892	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Provinsi Sulel	26 Dokumen	1,928,043,262	DINAS KESEHATAN
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	2	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	0	Kota Makassar, Tamalana, Tamalana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Provinsi Sulel	30 Orang	105,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	0	Kota Makassar, Tamalana, Tamalana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Provinsi Sulel	100 Orang	78,750,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%		%	100 %	864,743,756					100 %	663,123,404		
1	2	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	149,499,750	Kota Makassar, Tamalana, Tamalana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	15 Paket	126,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	353,709,306	Kota Makassar, Tamalana, Tamalana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	36 Paket	157,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	80,000,000	Kota Makassar, Tamalana, Tamalana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Paket	84,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	31,545,900	Kota Makassar, Tamalana, Tamalana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	7 Paket	33,123,404	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	249,988,800	Suma Kab./kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	262,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	65,000,000					100 %	68,250,000		
1	2	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	65,000,000	Kota Makassar, Tamalana, Tamalana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulel	3 Paket	68,250,000	DINAS KESEHATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasang Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	01.08		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	2	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	859,878,648						100 %	3,066,722,925	
1	2	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	859,878,648	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	12 Laporan	3,066,722,925	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	7,713,946,499						100 %	388,500,000	
1	2	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				34 Unit	299,990,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	34 Unit	315,000,000	DINAS KESEHATAN
		2	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	7,344,401,499	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	69,555,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	1 Unit	73,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbagikan dan diringkaskan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%		%	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	155,824,063,526						100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	67,180,615,258	
1	2	2	01.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	%		%	100 %	123,221,467,002						100 %	36,071,474,759	
1	2	2	01.01	1	Pembangunan Rumah Sakit Berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	114,155,556,456	Kab. Bone, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulsel	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	01.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1021 Unit	149,997,215	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulsel	1021 Unit	21,249,375,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	01.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1063 Unit	448,600,000	Kab. Bone, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulsel	1063 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	01.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara				25 Unit	87,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulsel	25 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	01.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara				14 Unit	362,887,700	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulsel	14 Unit	732,560,875	DINAS KESEHATAN
1	2	2	01.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	285,958,000	Sempu Kab/Kota, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulsel	1 Dokumen	300,255,900	DINAS KESEHATAN
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	01.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				3 Paket	7,730,967,631	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulsel	3 Paket	13,789,282,984	DINAS KESEHATAN
													DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian						
1	2	2	01.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan layanan kesehatan UKP dan UKM Rujukan	%		%	100 %	31,545,692,524						100 %	29,999,391,399	
1	2	2	01.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi sesuai Standar				91015 orang	1,276,987,200	Sempu Kab/Kota, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas		Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kab/Kota Dinas Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Badan 24 Kab/Kota,	91015 orang	1,321,592,790	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Pemerang Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				0 Orang		Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Hibah Berdaya Saing			Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	0 Orang		
1	2	2	01.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3826 Orang	1,375,640,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Facilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	3826 Orang	1,522,247,160	DINAS KESEHATAN	
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							
1	2	2	01.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	1,416,373,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Facilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	1 Dokumen	1,692,579,124	DINAS KESEHATAN	
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							
1	2	2	01.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				1 Dokumen	258,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Facilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	1 Dokumen	271,005,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	21,927,097,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Facilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	1 Dokumen	21,162,304,695	DINAS KESEHATAN	
													DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penguatan- Penguatan Intervensi Stunting							
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							
1	2	2	01.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	163,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Facilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	1 Dokumen	171,780,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	380,495,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Facilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	1 Dokumen	399,519,855	DINAS KESEHATAN	
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							
1	2	2	01.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Anahan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Anahan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1,140,000,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Facilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	1 Dokumen	1,274,080,710	DINAS KESEHATAN	
													Hibah							
1	2	2	01.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1,107,776,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Facilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	1 Dokumen	1,181,373,900	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	169,136,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Facilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	1 Dokumen	179,704,980	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Facilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/Kota, Baduta 24 Kab/Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	1 Dokumen	15,750,000	DINAS KESEHATAN	
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan,								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
													Semua Kelurahan							
													Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	2	2	01.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis				130 Orang	1,149,493,100		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/ Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/ Kota, Budata 24 Kab/ Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	130 Orang	155,358,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	01.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	172,750,300		Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/ Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/ Kota, Budata 24 Kab/ Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	1 Dokumen	199,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	01.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	158,332,600		Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/ Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/ Kota, Budata 24 Kab/ Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	1 Dokumen	151,252,500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	01.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	781,609,624		Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/ Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/ Kota, Budata 24 Kab/ Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	1 Dokumen	248,842,685	DINAS KESEHATAN
1	2	2	01.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	53,300,000		Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab/ Kota Dinkes Provinsi, Pengelola Program Kab/ Kota, Budata 24 Kab/ Kota, Lintas Program, Lintas Sektor, Perusahaan, ASN Dinkes Provinsi, Masyarakat	1 Dokumen	52,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	01.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan ketersediaan data dan informasi kesehatan	%		%	100 %	191,904,000							100 %	201,499,200	
1	2	2	01.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	131,904,000		Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kabupaten/ Kota, Masyarakat	1 Dokumen	138,499,200	DINAS KESEHATAN
1	2	2	01.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	60,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kabupaten/ Kota, Masyarakat	3 Dokumen	63,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	01.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	%		%	100 %	865,000,000							100 %	908,250,000	
1	2	2	01.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				31 Unit	740,000,000		Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Kab/ Kota, Fasilitas Pelayanan Kesehatan	31 Unit	777,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	01.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan				0 Unit	125,000,000		Kota Makassar, Tamaleneura, Tamaleneura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Kab/ Kota, Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Unit	131,250,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan				31 Unit									31 Unit	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan	Penduduk		Penduduk	23/100.000 Penduduk	1,677,887,000							23/100.000 Penduduk	13,311,782,085	
1	2	3	01.01		Pencapaian Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Cakupan pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan	%		%	100 %	325,006,000							100 %	11,891,256,300	
1	2	3	01.01	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasayukuh)				27510 Orang	325,006,000		Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	5. Pembangunan manusia	Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kabupaten/ Kota, Dinkes Provinsi, Pengelola Program SDMK	27510 Orang	11,891,256,300	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penasugkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	2	3	01.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM	%		%	100 %	1,352,881,000	Semua Kelurahan		Dinas Kesehatan Saing			100 %	1,420,525,785	
1	2	3	01.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				564 Orang	926,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Tenaga Kesehatan Kab/Kota, Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan, Pengelola Program SDKM	564 Orang	972,594,735	DINAS KESEHATAN
1	2	3	01.02	2	Pembiinan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembiinan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				5 Dokumen	426,601,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Tenaga Kesehatan Kab/Kota, Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan, Pengelola Program SDKM	5 Dokumen	447,931,050	DINAS KESEHATAN
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	%		%	100 %	539,376,300						100 %	587,345,115	
1	2	4	01.01		Penerbitan Pengakuan Pedagog Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang diterbitkan	% pengakuan Pedagog Besar Farmasi Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang diterbitkan	%		%	100 %	539,376,300						100 %	587,345,115	
1	2	4	01.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan				189 Sarana	475,376,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Pedagog Besar Farmasi (PBF) Cabang, Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan PKRT, Tenaga Kesehatan, Tenaga Kefarmasian	189 Sarana	499,145,115	DINAS KESEHATAN
1	2	4	01.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik				1 Dokumen	64,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Pedagog Besar Farmasi (PBF) Cabang, Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan PKRT, Tenaga Kesehatan, Tenaga Kefarmasian	1 Dokumen	88,200,000	DINAS KESEHATAN
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	% Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	%		%	85% (20 Kab/Kota) %	3,136,500,500						85% (20 Kab/Kota) %	3,293,362,610	
1	2	5	01.01		Advokat, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan pelaksanaan advokat, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	%		%	100 %	470,947,200						100 %	494,497,500	
1	2	5	01.01	1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	470,947,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Lintas Program, Lintas Sektor, Organisasi Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat Umum	1 Dokumen	494,497,500	DINAS KESEHATAN
1	2	5	01.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Tersebarluasnya informasi PHBS melalui berbagai media	%		%	100 %	1,202,807,000						100 %	1,262,977,882	
1	2	5	01.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1,202,807,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Lintas Program, Lintas Sektor, Organisasi Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat Umum, Tenaga Edukator	1 Dokumen	1,262,977,882	DINAS KESEHATAN
1	2	5	01.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	1,462,746,300						100 %	1,535,887,228	
1	2	5	01.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				1 Dokumen	1,462,746,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Dinkes Kab/Kota, Tim Pokjama Posyandu	1 Dokumen	1,535,887,228	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						7,755,398,478							19,011,000,000	
1	2	1			PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						862,372,490							1,881,000,000	
1	2	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							240,000,000	
1	2	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	0				5. Pembangunan manusia		1 Paket	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		200 Orang	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						315,000,000							681,000,000	
1	2	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kota Makassar, Tamalaeura, Tamalaeura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		1 Paket	21,000,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket								0 Paket	
1	2	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		1 Paket	120,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Penanggung Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
1	2	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		1 Paket	40,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		1 Paket	5,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	60,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		2 Paket	125,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		1 Paket	5,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	10,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		1 Laporan	45,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		30 Laporan	320,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30,000,000						80,000,000		
1	2	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	30,000,000	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		3 Unit	80,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						347,372,490						460,000,000		
1	2	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	197,372,490	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		12 Laporan	210,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	150,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		12 Laporan	250,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						170,000,000						420,000,000		
	2	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		1 Unit	80,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya				8 Unit	170,000,000	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		8 Unit	300,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	0	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		15 Unit	40,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						6,893,025,988						16,980,000,000		
1	2	2	01.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						2,853,814,108						11,250,000,000		
1	2	2	01.01	4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	0	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		1 Unit	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan sarana, Prasarana dan Alat kesehatan				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		1 Unit	270,000,000	DINAS KESEHATAN	
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				0 Unit						0 Unit			
1	2	2	01.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				8000 Unit	865,000,000	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		8000 Unit	3,500,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	0	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		4 Unit	140,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan				1 Paket	60,000,000	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		1 Paket	150,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara				6 Unit	0	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		6 Unit	150,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara				3 Unit	0	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		3 Unit	40,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				3 Paket	1,928,814,108	Kota Makassar, Tamalunra, Tamalunra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		3 Paket	6,000,000,000	DINAS KESEHATAN	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													Nasional	Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	2	01.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rajukan, UKM dan UKM Rajukan Tingkat Daerah Provinsi						300,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021		Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
												Target 2023		Pagu Indikatif		Lokasi				Prioritas		Kelompok Sasaran		Target		Pagu Indikatif					
																												Nasional	Daerah		
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		14		15		16		17	
1	2	3	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										312,737,785														820,000,000		
1	2	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						4 Paket		13,402,500					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				4 Paket		35,000,000		DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 Paket		100,040,650					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						4 Paket		150,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						4 Paket		27,946,635					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						4 Paket		80,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						4 Paket		13,350,000					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						4 Paket		20,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 Laporan		97,480,000					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						12 Laporan		35,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan		60,518,000					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						12 Laporan		500,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										55,331,900														200,000,000		
1	2	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						11 Unit		55,331,900					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						11 Unit		200,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,134,860,442														800,000,000		
1	2	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan		438,909,450					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						12 Laporan		400,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan		695,950,992					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						12 Laporan		400,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										344,061,000														600,000,000		
1	2	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Diayarkan Pajanya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diayarkan Pajanya						8 Unit		344,061,000					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						8 Unit		600,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										2,077,432,222														2,700,000,000		
1	2	2	01.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										1,589,320,462														2,000,000,000		
1	2	2	01.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan						3 Unit		1,031,537,962					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						3 Unit		1,000,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	2	01.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara						3 Unit		557,782,500					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						3 Unit		1,000,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	2	01.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										231,000,000														400,000,000		
1	2	2	01.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						2 Dokumen		0					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						2 Dokumen		200,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	2	01.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan						2 Dokumen		231,000,000					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						2 Dokumen		200,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	2	01.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										287,111,760													300,000,000			
1	2	2	01.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NIM) Pelayanan Kesehatan						3 Unit		287,111,760					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						3 Unit		300,000,000		DINAS KESEHATAN		
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										128,555,880														35,000,000		
1	2	3	01.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										128,555,880														35,000,000		
1	2	3	01.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat						1 Orang		128,555,880					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)						1 Orang		35,000,000		DINAS KESEHATAN		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										0														0		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										0														0		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										0														0		
1	2	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0														0		
1	2	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0 Dokumen		0					PENDAPATAN ASLI							0 Dokumen		0		DINAS KESEHATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
													DAERAH (PAL)						
1	2	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0							0	
1	2	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0							0	
1	2	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							0	
1	2	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0							0	
1	2	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0						0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0							0	
1	2	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0							0	
1	2	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0							0	
1	2	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0						0 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						0							0	
1	2	2	01.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						0							0	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19		
1	2	2	01.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan			0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	0	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					0						0			
1	2	2	01.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0						0			
	2	2	01.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan			0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	0	DINAS KESEHATAN	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					0						0			
1	2	3	01.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					0						0			
1	2	3	01.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					12,209,338,280						30,847,068,030			
1	2	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8,100,428,012						22,597,068,030			
1	2	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0						13,597,068,030			
1	2	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			90 Orang/ Bulan	0	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90 Orang/ Bulan	13,597,068,030	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	01.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					8,100,428,012						9,000,000,000			
1	2	1	01.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	8,100,428,012	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	Pendapatan dari BLUD				1 Unit Kerja	9,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					4,009,074,268						7,500,000,000			
1	2	2	01.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2,899,833,800						6,500,000,000			
1	2	2	01.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit			2 Unit	0	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan			5 Unit	2,899,833,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	4,500,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			6 Dokumen	0	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Dokumen	1,500,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	01.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1,109,240,468						1,000,000,000			
1	2	2	01.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			12 Dokumen	1,109,240,468	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					99,833,000						750,000,000			
1	2	3	01.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					99,833,000						750,000,000			
1	2	3	01.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			90 Orang	99,833,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90 Orang	750,000,000	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					145,217,677,569						0			
1	2	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					143,846,177,569						0			
1	2	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					284,500,000						0			
1	2	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	120,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	0	RSUD LABUANG BAJI	
1	2	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	65,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	RSUD LABUANG BAJI	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	80,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	4,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	5,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	6,500,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	4,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Mamejeng Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						69,333,084,153							0	
1	2	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			8610 Orang/ Bulan	69,290,084,153	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8610 Orang/ Bulan	0	RSUD LABUANG BAJI
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	2	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1400 Dokumen	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1400 Dokumen	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	6,500,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Pemeriksaan			2 Dokumen	6,500,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD			18 Laporan	30,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Laporan	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0							0	
1	2	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			3 Laporan	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							0	
1	2	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0 Paket	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	0	RSUD LABUANG BAJI
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			600 Paket							600 Paket		
1	2	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12 Dokumen	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			15 Orang	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Orang	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						100,000,000							0	
1	2	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			45 Laporan	100,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45 Laporan	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah						0							0	
1	2	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			25 Unit	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Unit	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.08	Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah						4,127,593,416							0	
1	2	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	4,127,593,416	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah						0							0	
1	2	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 Unit	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	01.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						70,000,000,000							0	
1	2	1	01.10	1	Pelayanan dan Penujang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penujang Pelayanan			1 Unit Kerja	70,000,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit Kerja	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	2		PROGRAM PEMERULAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,200,000,000							0	
1	2	2	01.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP						1,200,000,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
														11	12					14
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
					Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi															
1	2	2	01.01	2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)				3 Unit	0	RSUD LABUANG BAJI	
1	2	2	01.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)				30 Unit	0	RSUD LABUANG BAJI	
1	2	2	01.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Up dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara				50 Unit	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)				50 Unit	0	RSUD LABUANG BAJI	
1	2	2	01.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan				2 Paket	1,200,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	DBH Cukai Hasil Tembakau (GHT)				2 Paket	0	RSUD LABUANG BAJI	
		2	2	01.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara				3 Unit	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)				3 Unit	0	RSUD LABUANG BAJI
1	2	2	01.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				2 Paket	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)				2 Paket	0	RSUD LABUANG BAJI	
1	2	2	01.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						0							0		
1	2	2	01.02	9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)				2 Dokumen	0	RSUD LABUANG BAJI	
1	2	2	01.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						0							0		
1	2	2	01.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)				1 Dokumen	0	RSUD LABUANG BAJI	
1	2	2	01.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						0							0		
1	2	2	01.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinasnya				1 Unit	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)				1 Unit	0	RSUD LABUANG BAJI	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						172,500,000							0		
1	2	3	01.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						0							0		
1	2	3	01.01	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	0	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)				2 Orang	0	RSUD LABUANG BAJI	
1	2	3	01.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						172,500,000							0		
1	2	3	01.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				50 Orang	172,500,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)				50 Orang	0	RSUD LABUANG BAJI	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						105,661,612,828							141,849,061,434		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						99,814,688,488							104,204,518,034		
1	2	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						82,632,206,565							86,322,065,653		
1	2	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				293 Orang/ Bulan	52,632,206,565		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		293 Orang/ Bulan	56,322,065,653	RSUD HAJI MAKASSAR	
													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik					
													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik					
													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik					
															1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik					
															1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik					
															1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik					
															1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik					
															1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	1	01.10		Peningkatan Pelayanan BLUD									46,882,451,923			47,882,452,381				
1	2	1	01.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							12 Unit Kerja	46,882,451,923		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	12 Unit Kerja	47,882,452,381	RSUD HAJI MAKASSAR	
																PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				
																Pendapatan dari BLUD	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				
																	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				
																	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									2,825,000,000					125,000,000		
1	2	2	01.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									2,420,000,000					0		
1	2	2	01.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit							0 Unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	0	RSUD HAJI MAKASSAR	
1	2	2	01.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan							0 Unit	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	0	RSUD HAJI MAKASSAR	
1	2	2	01.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan							0 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	0	RSUD HAJI MAKASSAR	
1	2	2	01.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara							0 Unit	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	0	RSUD HAJI MAKASSAR	
1	2	2	01.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara							0 Unit	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	0	RSUD HAJI MAKASSAR	
1	2	2	01.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi									40,000,000					50,000,000		
1	2	2	01.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							12 Dokumen	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	50,000,000	RSUD HAJI MAKASSAR	
1	2	2	01.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									65,000,000					75,000,000		
1	2	2	01.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinasnya							12 Unit	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	12 Unit	75,000,000	RSUD HAJI MAKASSAR	
1	2	3			PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									3,621,954,340					37,219,543,400		
1	2	3	01.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									3,621,954,340					37,219,543,400		
1	2	3	01.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat							1830 Orang	3,621,954,340		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia	1830 Orang	37,219,543,400	RSUD HAJI MAKASSAR	
																PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia				
																	5. Pembangunan manusia				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									91,890,731,080					190,882,670,169		
1	2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									90,790,731,080					123,017,685,587		
1	2	1	01.02		PROGRAM PERUKUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									48,834,125,824					65,347,737,265		
1	2	1	01.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Pembangunan manusia	5880 Orang Bulan	65,347,737,265	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,956,605,256					5,169,948,322		
1	2	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12 Laporan	1,956,605,256		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia	12 Laporan	5,169,948,322	RS KHUSUS DAERAH DADI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	1	01.10		Peningkatan Pelayanan BLUD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		
												Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	Penasang Daerah
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								31,603,587,985						42,135,818,210	
1	2	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								31,603,587,985						42,135,818,210	
1	2	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								16,414,620,369						25,905,818,210	
1	2	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						162 Orang/ Bulan	16,414,620,369		Dana Transfer Umum-Dana Abseas Umum			162 Orang/ Bulan	25,905,818,210	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0						0	
1	2	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25 laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 laporan	0	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,588,937,616						3,100,000,000	
1	2	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 laporan	600,000,000	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	1,588,937,616		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	2,500,000,000	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0						0	
1	2	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan						6 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Unit	0	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	0	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	0	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	01.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								13,600,000,000						13,130,000,000	
1	2	1	01.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						1 Unit Kerja	13,500,000,000		Pendapatan dari BLUD			1 Unit Kerja	13,130,000,000	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								0						0	
1	2	2	01.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								0						0	
1	2	2	01.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan						10 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Unit	0	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	2	01.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan						10 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Unit	0	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	2	01.01	12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan						5 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Unit	0	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	2	01.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Diperbaiki Sesuai Standar						50 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50 Unit	0	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	2	01.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Diperbaiki						10 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Unit	0	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	2	01.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Diperbaiki						4 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Unit	0	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	2	01.04		Penerbitan Iain Rumah Sakir Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								0						0	
1	2	2	01.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (BNM) Pelayanan Kesehatan						1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	0	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								0						0	
1	2	3	01.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								0						0	
1	2	3	01.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat						30 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30 Orang	0	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	3	01.02	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	0	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								69,563,009,419						41,071,667,461	
1	2	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								64,740,154,946						39,071,667,461	
1	2	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								35,243,826,199						35,239,900,232	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17					
1	2	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				260 Orang/ Bulan	35,243,826,199		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				260 Orang/ Bulan	35,239,900,232	RSUD SAYANG RAKYAT	
1	2	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertakutannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	3,827,841,396						12 Laporan	3,831,767,229		
1	2	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	798,077,340		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	798,093,051	RSUD SAYANG RAKYAT	
1	2	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3,029,764,056		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	3,033,674,178	RSUD SAYANG RAKYAT	
1	2	1	01.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						25,668,487,351							0		
1	2	1	01.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	25,668,487,351		Pendapatan dari BLUD			1 Unit Kerja	0	RSUD SAYANG RAKYAT		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						4,822,854,473							2,000,000,000		
1	2	2	01.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						4,822,854,473							2,000,000,000		
1	2	2	01.01	3	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	0						1 Unit	0	RSUD SAYANG RAKYAT	
1	2	2	01.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1 Unit	2,000,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				1 Unit	2,000,000,000	RSUD SAYANG RAKYAT	
1	2	2	01.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				7 Unit	2,822,854,473		DH Cukai Hasil Tembakau CHTD				7 Unit	0	RSUD SAYANG RAKYAT	
													Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik							
1	2	2	01.01	12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	0	RSUD SAYANG RAKYAT	
1	2	2	01.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				15 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	0	RSUD SAYANG RAKYAT	
1	2	2	01.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	0	RSUD SAYANG RAKYAT	
1	2	2	01.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara				10 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	0	RSUD SAYANG RAKYAT	
1	2	2	01.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara				10 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	0	RSUD SAYANG RAKYAT	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0							0		
1	2	3	01.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						0							0		
1	2	3	01.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				50 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	0	RSUD SAYANG RAKYAT	
1	2	3	01.02	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				10 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Dokumen	0	RSUD SAYANG RAKYAT	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1,072,286,124,273							2,155,621,270,091		
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						77,362,068,753							82,221,348,027		
1	3	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%	100 %	983,332,600							100 %		
						Presentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	%		%	100 %								100 %		
1	3	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	516,154,800		Kota Makassar, Panakkukang, Masele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	535,328,640	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	25,570,000		Kota Makassar, Panakkukang, Masele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	32,119,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Menu Rencana Tahun 2024		Pemerkuat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Daerah			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17					
1	3	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	44,050,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	35,752,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	32,670,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	34,303,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
		3	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	47,060,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	38,913,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	135,640,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	110,418,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	182,187,800	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	166,096,350	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	56,466,672,632						100 %	60,350,876,594		
1	3	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				560 Orang/ Bulan	55,852,177,432	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	560 Orang/ Bulan	59,964,822,994	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	96,960,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	50,778,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	9,600,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	5,116,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	62,080,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	58,434,600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	436,285,200	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	262,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	9,570,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	4 Dokumen	8,925,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengalihan aset	%		%	100 %	507,805,600						100 %	585,942,000		
1	3	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	43,120,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	405,285,600	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	525,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pernaklat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17					
1	3	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	59,400,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	39,942,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan daerah	Rupiah		Rupiah	8000000000 Rupiah	347,154,800					8000000000 Rupiah	357,000,000			
1	3	1	01.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	320,123,800	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	336,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daernh	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	27,031,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	Poin		Poin	90 Poin	1,070,375,000					90 Poin	28,087,500			
	3	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1250 Paket	966,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1250 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	84,375,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	28,087,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	20,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	10 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	%		%	100 %	3,486,881,933					100 %	4,349,915,591			
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,796,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Paket	86,747,850	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	1,551,196,333	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	13 Paket	2,550,529,541	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
													Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat							
1	3	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	113,114,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	20 Paket	52,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	228,500,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	100 Paket	157,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	274,575,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	242,638,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koorniasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1,208,700,600	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	1,155,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	105,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	2,869,962,500					100 %	4,153,002,459			
1	3	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	500,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	546,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
													Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat							
1	3	1	01.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Dsedidakan				1 Unit	1,313,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	1,501,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
													Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat							
1	3	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	200,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	1 Paket	184,926,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
													Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat							
1	3	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dsedidakan				3 Unit	856,562,500	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	3 Unit	1,920,576,459	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
													Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat							
1	3	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	%		%	100 %	6,965,603,688					100 %	6,880,129,013			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
1	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4,063,221,600	Kota Makassar, Panakkukang, Masele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	3,386,082,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	120,600,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	178,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,781,782,088	Kota Makassar, Panakkukang, Masele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	3,015,547,013	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	4,664,680,000						100 %	4,863,763,380		
1	3	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peritran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Peritranannya				109 Unit	3,970,180,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	109 Unit	4,023,763,380	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Lokasi	694,500,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pendapatan Rihah dari Pemerintah Pusat			Aparatur Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan	3 Lokasi	840,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	%		%	100 %	103,482,000,200						100 %	108,978,401,764		
1	3	2	01.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Sungai/Danau/Waduk/ Embung yang ditangani	Lokasi		Lokasi	4 Lokasi	8,024,715,800						4 Lokasi	8,582,801,764		
						Persentase ketersediaan perencanaan dan pengemasan rekam Sumber Daya Air	%		%	100 %							100 %			
1	3	2	01.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				8 Dokumen	2,122,000,000	Kab. Jeneponto, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Sulawesi Selatan	8 Dokumen	2,222,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
												Kab. Wajo, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan								
1	3	2	01.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				4 Unit	2,117,617,800	Kab. Jeneponto, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	4 Unit	2,310,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
												Kab. Wajo, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan								
1	3	2	01.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				300 M	767,124,000	Kab. Jeneponto, Bangkale, Pallenggu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Sulawesi Selatan	300 M	853,236,764	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	2	01.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				1 Unit	2,059,963,200	Kab. Pinrang, Patampanna, Malimpuung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	1 Unit	2,152,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	2	01.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	317,127,600	Sempu Kab/Kota, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Sulawesi Selatan	1 Dokumen	315,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	2	01.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				40 Lembaga	346,929,600	Sempu Kab/Kota, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan		Masyarakat Sulawesi Selatan	40 Lembaga	355,015,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasugkat Daerah Penanggung Jawab
											Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
1	3	2	01.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinst yang Ditingkatkan Kapasitasya				2 Lembaga	293,953,600	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Sulawesi Selatan	2 Lembaga	375,049,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	2	01.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	m		m	360.982 m	95,487,284,400						360.982 m	100,392,600,000		
1	3	2	01.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				18 Dokumen	10,299,308,000	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan	18 Dokumen	10,995,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	2	01.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dihangun				11000 Meter	15,074,337,600	Kab. Bone, Lapparaja, Ujung Lamuru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Penguatan infrastruktur wilayah		Masyarakat Sulawesi Selatan	11000 Meter	15,802,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	2	01.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2083 Meter	2,568,260,400	Kab. Bulukumba, Gantungan, Bonto Nyieleng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan	2083 Meter	2,677,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	2	01.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				39924 Meter	52,361,644,000	Kab. Bone, Telu Siattinge, Lanca	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan	39924 Meter	55,062,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
												Kab. Bone, Bengo, Sella	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pemukiman							
												Kab. Enrekang, Curio, Curio								
												Kab. Gowa, Bontomatene, Borongloe								
												Kab. Luwu, Suli, Marante								
												Kab. Luwu, Walewang, Uluara, Basseo								
												Kab. Luwu, Bajo Barat, Sumpang								
												Kab. Luwu Uluara, Masamba, Bone								
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Marang, Puyung								
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Minasa Tene, Semua Kelurahan								
												Kab. Sijaja, Sijaja Selatan, Sangantarti								
												Kab. Sijaja, Sijaja Biring, Batu Bedarang								
1	3	2	01.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				1 Bendung	15,077,012,200	Kab. Bone, Mare, Batu Gading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Penguatan infrastruktur wilayah		Masyarakat Sulawesi Selatan	1 Bendung	15,802,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	2	01.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan				40 Lokasi	32,931,000	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Sulawesi Selatan	40 Lokasi	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	2	01.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air				40 Lokasi	43,791,200	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan	40 Lokasi	52,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota (SPM)	%		%	100 %	52,040,782,200						100 %	55,322,930,000		
						Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	%		%	100 %							100 %			
1	3	3	01.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota yang dibina	Kab./Kota		Kab./Kota	24 Kab./Kota	52,040,782,200						24 Kab./Kota	55,322,930,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021		Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab													
														Target 2023		Paga Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif												
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
						Perentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyulnan air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota (SPM)		%		%	100 %																								
1	3	3	01.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional					1 Dokumen	1,869,183,600	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Aparatur Dinas PUTR, Dinas Kab./Kota dan Masyarakat	1 Dokumen	2,640,750,000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG														
1	3	3	01.01	3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional					1100 Liter/Detik	50,049,999,800	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Aparatur Dinas PUTR, Dinas Kab./Kota dan Masyarakat	1100 Liter/Detik	52,552,500,000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG														
1	3	3	01.01	7	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM					4 Kab/Kota	30,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Aparatur Dinas PUTR, Dinas Kab./Kota dan Masyarakat	4 Kab/Kota	31,500,000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG														
1	3	3	01.01	8	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM					24 Kab./Kota	91,598,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Aparatur Dinas PUTR, Dinas Kab./Kota dan Masyarakat	24 Kab./Kota	98,180,000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG														
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Pembinaan Layanan TPA Kab/Kota		%		%	100 %	49,999,000									100 %	31,500,000													
1	3	4	01.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Kab/Kota yang dibina		Kab./Kota		Kab./Kota	24 Kab./Kota	49,999,000									24 Kab./Kota	31,500,000													
1	3	4	01.01	8	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan pengelolaan persampahan					24 Kab/Kota	49,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Pemerintah Kabupaten/Kota	24 Kab/Kota	31,500,000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG														
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota (SPM)		%		%	100 %	49,999,000									100 %	52,500,000													
					Perentase warga negam yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM)			%		%	93.55 %										93.55 %														
1	3	5	01.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah kab/kota yang dibina		Kab./Kota		Kab./Kota	24 Kab./Kota	49,999,000									24 Kab./Kota	52,500,000													
1	3	5	01.01	7	Pengembangan SIM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kabupaten/Kota mendapatkai pengembangan SIM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik					24 Kab/Kota	49,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Pemerintah Kabupaten/Kota	24 Kab/Kota	52,500,000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG														
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Perentase Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi		%		%	16 %	30,000,000									16 %	30,000,000													
1	3	6	01.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah lokasi sistem drainase yang dikelola dan dikembangkan		Kab./Kota		Kab./Kota	4 Kab./Kota	30,000,000									4 Kab./Kota	30,000,000													
1	3	6	01.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan					1 Dokumen	30,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Sulawesi Selatan	1 Dokumen	30,000,000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG														
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Perentase Bangunan Pemerintah Yang di Fasilitasi		%		%	100 %	41,954,730,800									100 %	44,780,275,000													
1	3	8	01.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah lokasi bangunan gedung yang difasilitasi		Lokasi		Lokasi	8 Lokasi	41,954,730,800									8 Lokasi	44,780,275,000													
					Perentase ketersediaan layanan teknis bangunan gedung			%		%	100 %										100 %														
1	3	8	01.01	1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemantauan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemantauan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					10 Lokasi	41,837,580,800	Kab. Bone, Pinre, Mappe Sangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	10 Lokasi	44,672,775,000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG														
													Kota Makassar, Maros, Mattoangin																						
													Kota Makassar, Maros, Panambungan																						
													Kota Makassar, Panakkukang, Panabangka																						
													Kota Makassar, Panakkukang, Tamemawang																						
													Kota Makassar, Biringkanaya, Pui																						
1	3	8	01.01	6	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi					1 Dokumen	58,894,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	52,500,000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG														
1	3	8	01.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara					1 Dokumen	58,256,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	55,000,000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG														
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya		Kawasan		Kawasan	5 Kawasan	74,016,032,920									5 Kawasan	88,265,650,000													
					Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya			Kawasan		Kawasan	8 Kawasan										8 Kawasan														
1	3	9	01.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penataan kawasan dan lingkungan		%		%	100 %	74,016,032,920									100 %	88,265,650,000													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	3	9	01.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	853,373,400	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	630,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	9	01.01	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				20 Laporan	5,717,654,320	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	20 Laporan	7,295,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		3	9	01.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			7 Lokasi	67,050,006,000	Kab. Maros, Simbang, Jentiana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	7 Lokasi	79,742,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kota Makassar, Maros, Panambungan							
												Kota Makassar, Tallo, Lembo							
												Kota Makassar, Panakkukang, Panakkang							
												Kota Makassar, Biringkanaya, Sudang							
1	3	9	01.01	7	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				0 Dokumen	394,999,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	0 Dokumen	598,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				19 Dokumen							19 Dokumen		
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	%		%	75.09 %	719,085,323,800						75.09 %	1,773,262,112,550	
						Perentase jalan provinsi dalam kondisi mampu	%		%	80 %							80 %		
1	3	10	01.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang pemasangan ruas jalan	Km		Km	112.5 Km	719,085,323,800						112.5 Km	1,773,262,112,550	
						Perentase ketersediaan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan	%		%	100 %							100 %		
1	3	10	01.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				1 Dokumen	194,912,200	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	105,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	10	01.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				1 Dokumen	40,224,400	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	42,253,260	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	10	01.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	1,849,330,400	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	1,942,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	10	01.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				33.6 Km	128,248,539,200	Kab. Luwu, Basse, Sangattepe, Mappetajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	33.6 Km	152,512,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Pinrang, Lembang, Bettene							
												Kab. Kepulauan Selayar, Bantokkayu, Patirene							
												Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo							
												Kab. Tana Toraja, Matimbong, Baleri, Loppa							
												Kota Makassar, Maros, Panambungan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	3	10	01.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi/ditingkatkan				56.8 KM	409,567,324,600	Kab. Barru, Tanete Raja, Harau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	56.8 KM	367,605,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Bone, Kajuaa, Gona	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik						
												Kab. Bone, Lirureng, Tanah Barae							
												Kab. Bone, Lirureng, Matene Batu							
												Kab. Gowa, Somba Upa, Pacenengene							
												Kab. Gowa, Bungaya, Mangrupang							
												Kab. Gowa, Petalaseang, Pattallasang							
												Kab. Jeneponto, Kelara, Tolo Utara							
												Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Bungaya, Manalla							
												Kab. Sidenreng Rappang, Telu Limpen, Basila							
												Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Maru							
												Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Anabarnae							
												Kab. Sinjai, Sinjai Borong, Bonto Katuru							
												Kab. Soppeng, Mariorawo, Marioraja							
												Kab. Soppeng, Lillirata, Gabung							
												Kab. Soppeng, Lillirata, Ummu							
												Kab. Soppeng, Lillirata, Baringeng							
												Kab. Soppeng, Lillirata, Masing							
												Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo							
												Kab. Wajo, Belawa, Wele							
												Kab. Wajo, Maniragajo, Daulimpo							
												Kab. Wajo, Bola, Uluantala							
												Kab. Wajo, Penrang, Walanga							
												Kota Makassar, Panakkukang, Panakkang							
												Kota Makassar, Manggala, Antang							
												Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Perumpanai							
1	3	10	01.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				120 KM	97,456,908,000	Kab. Sinjai, Sinjai Barat, Batu Lempangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	120 KM	102,701,859,290	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Tana Toraja, Bontu Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Masi Rencana Tahun 2024		Penangkat Daerah Penanggung Jawab
											Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
												Akresi Umum								
												Kota Makassar, Mariso, Mario	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
1	3	10	01.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				50 meter	50,454,399,200	Kab. Luwu Utara, Sumpang, Sabrang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	50 meter	53,907,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
												Kab. Kepulauan Selayar, Bontolukayu, Pailitereng								
												Kab. Soppeng, Lalabata, Ompu								
												Kab. Wajo, Sumpang, Tolotomeng								
												Kota Makassar, Mariso, Panambungan								
1	3	10	01.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				50 Meter	1,016,420,000	Kota Makassar, Mariso, Panambungan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	50 Meter	1,065,750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	10	01.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase ketersediaan material tanggap darurat				100 %	694,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	472,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	10	01.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				30 Dokumen	629,387,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	30 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	10	01.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				30 Dokumen	28,933,028,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	30 Dokumen	28,224,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%		%	100 %	1,261,325,000						100 %	1,050,000,000		
1	3	11	01.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi	Orang		Orang	300 Orang	600,450,000						300 Orang	315,000,000		
1	3	11	01.01	3	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli				1 Dokumen	136,140,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Dinas PUTR Provinsi dan Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	11	01.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan				200 Orang	464,310,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Dinas PUTR Provinsi dan Masyarakat	200 Orang	315,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	11	01.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Cakupan terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi provinsi yang aktif dengan data terbaru	%		%	100 %	116,100,000						100 %	0		
1	3	11	01.02	3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI				80 Orang	116,100,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Dinas PUTR Provinsi dan Masyarakat	80 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	11	01.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi berkinerja baik	%		%	100 %	544,775,000						100 %	735,000,000		
1	3	11	01.03	2	Pengawasan dan Evaluasi Terbit Usaha, Terbit Pengelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi				4 Laporan	544,775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	4 Laporan	735,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Pemanfaatan Ruang	%		%	90 %	2,953,862,600						90 %	1,629,552,750		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	3	12		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	3	12	01.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen RTRW/RTR yang disusun/ ditetapkan	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	1,371,815,000						3 Dokumen	825,000,000	
						Jumlah Dokumen Tata Ruang yang disusun / ditetapkan	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen							3 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Tata Ruang yang disusun / ditetapkan	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen							3 Dokumen		
1	3	12	01.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perbup selain RTRW Provinsi			7 Dokumen	901,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat	7 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12	01.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			4 Dokumen	470,615,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat	4 Dokumen	525,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	3	12	01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase layanan perencanaan tata ruang	%	%	100 %	329,993,000						100 %	346,500,000	
1	3	12	01.02	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RKTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RKTR Kabupaten/Kota			10 Dokumen	329,993,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	346,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12	01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase layanan informasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	%	%	100 %	453,918,800						100 %	329,600,250	
1	3	12	01.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			4 Dokumen	174,582,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat	4 Dokumen	142,852,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12	01.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang			2 Dokumen	279,336,000	Kota Makassar, Panakkajene, Marale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat	2 Dokumen	186,747,750	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12	01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase wilayah yang dikendalikan pemanfaatan ruangnya	%	%	100 %	798,135,800						100 %	428,452,900	
1	3	12	01.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Pengendalian Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Pengendalian Hukum Bidang Penataan Ruang			2 Dokumen	384,087,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	2 Dokumen	196,402,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	3	12	01.04	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			5 Kasus	216,148,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	5 Kasus	127,050,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12	01.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			4 Dokumen	197,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	4 Dokumen	105,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					5,735,349,696							5,791,115,114	
1	3	1			PROGRAM PERURUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	%	100 %	4,557,937,096						100 %	4,499,615,114	
1	3	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	%	%	100 %	51,319,800						100 %	52,500,000	
1	3	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Laporan	8,676,000	Kab. Gowa, Somba Upu, Bontol Bontol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Wilayah Sungai Jeneberang	1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	42,643,800	Kab. Gowa, Somba Upu, Bontol Bontol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Wilayah Sungai Jeneberang	4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%	%	100 %	35,373,800						100 %	31,500,000	
1	3	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	35,373,800	Kab. Gowa, Somba Upu, Bontol Bontol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT WS Jeneberang	12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan aset	%	%	100 %	24,543,800						100 %	21,000,000	
1	3	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	24,543,800	Kab. Gowa, Somba Upu, Bontol Bontol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	%	%	100 %	5,532,000						100 %	7,362,600	
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4,010,000	Kab. Gowa, Somba Upu, Bontol Bontol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	5,262,600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1,522,000	Kab. Gowa, Somba Upu, Bontol Bontol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	%	%	100 %	4,441,167,696						100 %	4,387,252,514	
1	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	60,582,000	Kab. Gowa, Somba Upu, Bontol Bontol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	89,488,980	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	3	1	01.08	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	3	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4,380,585,696	Kab. Gowa, Somba Upa, Bonto Bontea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	4,297,763,534	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan layanan irigasi pada Di Kewenangan Provinsi	Ha		Ha	17594 Ha	1,177,412,600						17594 Ha	1,291,900,000	
1	3	2	01.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara	unit		unit	12 unit	1,177,412,600						12 unit	1,291,900,000	
						Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	meter		meter	169003 meter							169003 meter		
1	3	2	01.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				80 KM	1,052,114,800	Kab. Barru, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan pada WS Jeneberang	80 KM	1,050,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Bulukumba, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan							
												Kab. Maros, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan							
												Kab. Sijua, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan							
												Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan							
1	3	2	01.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				23 Bendung	82,313,800	Kab. Barru, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan pada WS Jeneberang	23 Bendung	241,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Bulukumba, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan							
												Kab. Maros, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan							
												Kab. Sijua, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan							
												Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan							
1	3	2	01.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air				13 DI	42,984,000	Kab. Barru, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan pada WS Jeneberang	13 DI	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Bulukumba, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Sernua Kecamatan,							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
														11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							2,996,038,476					2,944,456,654		
1	3	1			PROGRAM PERURANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%		100 %	1,867,297,676					100 %	1,810,456,654	
1	3	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	%		%		100 %	65,987,600					100 %	52,500,000	
1	3	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RSA-SKPD	Jumlah Dokumen RSA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RSA-SKPD				1 Laporan	34,048,800	Kab. Pinrang, Patampunua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT WS Saddang	1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	31,908,800	Kab. Pinrang, Patampunua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	UPT WS Saddang	4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%		%		100 %	30,458,800						100 %	31,500,000
1	3	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD				12 Laporan	30,458,800	Kab. Pinrang, Patampunua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT WS Saddang	12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan aset	%		%		100 %	30,911,600						100 %	21,000,000
1	3	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30,911,600	Kab. Pinrang, Patampunua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	%		%		100 %	7,728,924						100 %	8,116,500
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,728,924	Kab. Pinrang, Patampunua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	6,016,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kab. Pinrang, Patampunua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	%		%		100 %	1,732,240,752						100 %	1,697,340,154
1	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,800,000	Kab. Pinrang, Patampunua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	15,598,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,721,440,752	Kab. Pinrang, Patampunua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	1,681,741,354	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan layanan irigasi pada DI Kewenangan Provinsi	Ha		Ha		12160 Ha	1,128,740,800						12160 Ha	1,134,000,000
1	3	2	01.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara	unit		unit		8 unit	1,128,740,800						8 unit	1,134,000,000
						Panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara dan diperbaiki	meter		meter		86121 meter							86121 meter	
1	3	2	01.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Diperbaiki dan Dipelihara				80 Km	1,005,584,400	Kab. Enrekang, Sempu Kecamatan, Sempu Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan pada WS Saddang	80 Km	1,050,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Pinrang, Sempu Kecamatan, Sempu Kabupaten							
												Kab. Sidenreng Rappang, Sempu Kecamatan, Sempu Kabupaten							
												Kab. Toraja Utara, Sempu Kecamatan, Sempu Kabupaten							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	3	2	01.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				8 Bendung	80,172,400	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan pada WS Sadding	8 Bendung	84,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	3	2	01.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air				7 Di	42,984,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan pada WS Sadding	7 Di	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													3,927,070,938	
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERSATAN RUANG						4,201,133,032							2,698,570,938	
1	3	1			PROGRAM PERURUTAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,830,096,032						100 %	2,698,570,938	
1	3	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	%		%	100 %	106,910,800						100 %	52,500,000	
1	3	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Laporan	57,207,600	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			UPT WS Walaenae Cenranae	1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	49,703,200	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			UPT WS Walaenae Cenranae	4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	59,760,000						100 %	31,500,000	
1	3	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	59,760,000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			UPT WS Walaenae Cenranae	12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan aset	%		%	100 %	27,391,600						100 %	21,000,000	
1	3	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	27,391,600	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	%		%	100 %	3,610,000						100 %	7,350,000	
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,080,000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,530,000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	%		%	100 %	2,632,423,632						100 %	2,586,220,938	
1	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16,961,400	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		UPT WS Walaenae Cenranae	12 Laporan	14,268,870	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,615,462,232	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		UPT WS Walaenae Cenranae	12 Laporan	2,571,952,068	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan layanan irigasi pada Di Kewenangan Provinsi	Ha		Ha	17894 Ha	1,371,037,000						17894 Ha	1,228,500,000	
1	3	2	01.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan disediakan	unit		unit	12 unit	1,371,037,000						12 unit	1,228,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perngkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Mawar Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
														11	12				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
															Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan layanan irigasi pada DI Kewenangan Provinsi	Ha		Ha	11210 Ha	1,132,983,800						11210 Ha	1,144,500,000	
1	3	2	01.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara	unit		unit	12 unit	1,132,983,800						12 unit	1,144,500,000	
						Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	meter		meter	67465 meter							67465 meter		
1	3	2	01.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				80 Km	999,999,800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan pada WS Pompegan Larona	80 Km	1,050,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	3	2	01.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				9 Bendung	90,000,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan pada WS Pompegan Larona	9 Bendung	94,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	3	2	01.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air				6 DI	42,984,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan pada WS Pompegan Larona	6 DI	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERSIKUTAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2,546,175,474							1,786,741,438	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,546,175,474						100 %	1,786,741,438	
1	3	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	%		%	100 %	840,234,000						100 %	15,750,000	
1	3	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 laporan	5,195,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pui	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Workshop dan Peralatan	1 laporan	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	835,039,200	Kota Makassar, Biringkanaya, Pui	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Workshop dan Peralatan	4 Laporan	10,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	5,307,000						100 %	5,250,000	
1	3	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	5,307,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pui	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Workshop dan Peralatan	12 Laporan	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan aset	%		%	100 %	8,571,800						100 %	21,000,000	
1	3	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8,571,800	Kota Makassar, Biringkanaya, Pui	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan daerah	Rupiah		Rupiah	200000000 Rupiah	4,600,000						200000000 Rupiah	5,250,000	

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerangik Daerah Penanggung Jawab
												Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	3	1	01.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			12 Laporan	4,600,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	%	%	100 %	10,871,000					100 %	7,350,000			
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	8,504,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	2,367,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	%	%	100 %	465,745,704					100 %	451,141,438			
1	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	74,665,200	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	71,051,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	391,080,504	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	380,090,038	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	%	%	100 %	1,210,845,770					100 %	1,281,000,000			
1	3	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinasnya			5 Unit	62,845,770	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Aparatur Dinas PUTR Provinsi	5 Unit	84,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	1,148,000,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Aparatur Dinas PUTR Provinsi	15 Unit	1,197,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1,875,776,236					1,222,504,609				
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	%	100 %	699,387,136					100 %	697,504,609			
1	3	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	%	%	100 %	26,584,000					100 %	15,750,000			
1	3	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	4,680,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		UPTD Laboratorium Pengujian dan Bahan Konstruksi	1 Dokumen	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	21,904,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		UPTD Laboratorium Pengujian dan Bahan Konstruksi	4 Laporan	10,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%	%	100 %	4,680,000					100 %	5,250,000			
1	3	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			12 Laporan	4,680,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	12 Laporan	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan aset	%	%	100 %	3,120,000					100 %	21,000,000			
1	3	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	3,120,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan daerah	Rupiah	Rupiah	1229236600 Rupiah	9,360,000					1229236600 Rupiah	31,500,000			
1	3	1	01.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			12 Laporan	9,360,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	37,551,500					100 %	7,350,000			
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	7,635,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	29,916,500	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	%	%	100 %	563,091,636					100 %	558,904,609			
1	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	142,290,468	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	149,404,609	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	420,801,168	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	409,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	%	%	100 %	55,000,000					100 %	57,750,000			
1	3	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Paket	55,000,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		Aparatur Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	57,750,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					324,464,000						0			
1	3	9	01.01		Penyelenggaraan Pemetaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					324,464,000						0			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	3	9	01.01	7	Monitoring Pemetaan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Pemetaan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				0 Dokumen	324,464,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
						Terkelaksananya Monitoring Pemetaan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan pada UPT Laboratorium dan Pengujian				1 Dokumen					2. Penguatan infrastruktur wilayah	1 Dokumen			
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%		%	75.09 %	551,925,100					75.09 %	525,000,000		
						Presentase panjang terasidur pada ruas jalan provinsi yang terakurir roda empat	%		%	80 %						80 %			
1	3	10	01.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah paket/ pekerjaan yang dilakukan pengujian	%		%	100 %	551,925,100					100 %	525,000,000		
1	3	10	01.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				0 Dokumen	551,925,100	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	0 Dokumen	525,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan pada UPT Laboratorium dan Pengujian				1 Dokumen						1 Dokumen			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						5,492,366,544						5,653,626,642		
1	3	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,342,182,544					100 %	1,138,626,642		
1	3	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penyusunan penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	%		%	100 %	8,866,800					100 %	52,500,000		
1	3	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Laporan	6,256,800	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I	1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2,610,000	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I	4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	3,900,000					100 %	31,500,000		
1	3	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3,900,000	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I	12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan pengelolaan aset	%		%	100 %	143,610,000					100 %	194,311,599		
1	3	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	143,610,000	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Laporan	194,311,599	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi umum	%		%	100 %	8,151,200					100 %	8,439,375		
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,033,200	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	6,339,375	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,118,000	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	%		%	100 %	1,177,654,544					100 %	851,875,668		
1	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	71,757,600	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	75,345,480	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,105,896,944	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	776,530,188	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%		%	75.09 %	4,150,184,000					75.09 %	4,315,000,000		
1	3	10	01.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang ruas jalan wilayah I yang ditangani	Km		Km	296.7 Km	4,150,184,000					296.7 Km			
1	3	10	01.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				0 Dokumen	42,984,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Wilayah I				1 Dokumen		Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen			
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	3	10	01.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				148 KM	3,703,600,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Sulawesi Selatan	148 KM	4,095,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	3	10	01.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				0 M	403,600,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	0 M	420,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin pada wilayah UPT 1					172 Meter		Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					172 Meter		
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						6,488,211,786							6,474,147,669	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	%	100 %		940,335,786						100 %	745,085,169	
1	3	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	%	%	100 %		124,294,900						100 %	52,500,000	
1	3	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Laporan	22,440,100	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II	1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	101,854,800	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II	4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%	%	100 %		44,900,000						100 %	31,500,000	
1	3	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	44,900,000	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II	12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan aset	%	%	100 %		202,800,000						100 %	125,105,400	
1	3	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	202,800,000	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Laporan	125,105,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	%	%	100 %		6,535,000						100 %	7,350,000	
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,537,000	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,998,000	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	%	%	100 %		561,808,886						100 %	528,629,769	
1	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	44,750,150	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	28,839,731	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	517,058,736	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	499,790,038	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	10			PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	%	75.09 %		5,947,873,000						75.09 %	5,729,062,500	
1	3	10	01.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang ruas jalan wilayah II yang ditangani	Km		Km	315.86 Km	5,947,873,000						315.86 Km	5,729,062,500	
1	3	10	01.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				0 Dokumen	42,984,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	3	10	01.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				190 KM	5,104,889,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan	190 KM	5,309,062,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
													Semua Kelurahan Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	3	10	01.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				0 M	400,000,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	0 M	420,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin pada wilayah UPT II				127 Meter		Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				127 Meter				
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						4,879,098,792							4,872,939,000		
1	3	1			PROGRAM PERUKJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%	100 %	874,096,792					100 %		696,339,000		
1	3	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	%		%	100 %	238,078,000					100 %		52,500,000		
1	3	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Laporan	6,220,000	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III	1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	231,858,000	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III	4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	43,690,000					100 %		31,600,000		
1	3	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	43,690,000	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III	12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan aset	%		%	100 %	147,200,000					100 %		203,036,400		
1	3	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	147,200,000	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Laporan	203,036,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	%		%	100 %	4,686,000					100 %		4,725,000		
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,346,000	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	2,625,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,340,000	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	%		%	100 %	440,442,792					100 %		404,577,600		
1	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	95,752,800	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	73,197,600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	344,689,992	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	331,380,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%		%	75.09 %	3,705,002,000					75.09 %		3,876,600,000		
1	3	10	01.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang ruas jalan wilayah 3 yang ditangani	Km		%	193.42 Km	3,705,002,000					193.42 Km		3,876,600,000		
1	3	10	01.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				0 Dokumen	42,984,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Wilayah III				1 Dokumen		Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen				
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
1	3	10	01.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				125 KM	3,332,018,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Sulawesi Selatan	125 KM	3,530,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17			
								Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
								Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
1	3	10	01.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0 M	330,000,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	0 M	346,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin pada wilayah UPT III	186 Meter		Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			186 Meter						
								Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
								Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERATAN RUANG													
1	3	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
1	3	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	%	100 %	5,174,721,566				5,028,350,672				
1	3	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penyusunan penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	%	%	100 %	31,406,000				52,500,000				
1	3	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	19,526,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV	1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
1	3	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	11,880,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV	4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
1	3	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%	%	100 %	17,450,000				31,600,000				
1	3	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	17,450,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV	12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
1	3	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan pengelolaan aset	%	%	100 %	30,880,000				289,450,800				
1	3	1	01.03	4	Pembiinan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembiinan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30,880,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Laporan	259,450,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi umum	%	%	100 %	7,832,000				26,250,000				
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,864,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
1	3	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,968,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
1	3	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	%	%	100 %	615,038,328				98,647,672				
1	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37,925,400	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	42,987,672	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
1	3	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	577,112,928	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	55,660,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
1	3	10			PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN													
1	3	10	01.01		Perencanaan jalan provinsi	Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	%	75.09 %	4,472,115,238				75.09 %	4,560,002,200			
					Perencanaan jalan provinsi	Perencanaan jalan provinsi wilayah IV yang ditargetkan	Km		Km	448.76 Km	4,472,115,238			448.76 Km	4,560,002,200			
1	3	10	01.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	0 Dokumen	42,984,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Wilayah IV	1 Dokumen		Kab. Maros, Semua Kecamatan				1 Dokumen					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														Nasional	Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					14					16					17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							1 Paket	2,205,000	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macananga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	2,318,243	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							1 Paket	2,000,000	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macananga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	%		%				100 %	538,915,500						100 %	532,831,988	
1	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12 Laporan	187,387,500	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macananga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	188,881,875	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12 Laporan	351,528,000	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macananga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	343,950,113	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%		%				78.5 %	6,042,983,900						78.5 %	6,300,000,000	
1	3	10	01.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang ruas jalan wilayah V yang ditangani	Km		Km				398.35 Km	6,042,983,900						398.35 Km	6,300,000,000	
1	3	10	01.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan							0 Dokumen	42,984,000	Kab. Bone, Sempu, Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah		Masyarakat Sulawesi Selatan	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Wilayah V							1 Dokumen		Kab. Soppeng, Sempu, Kecamatan, Sempu Kelurahan					1 Dokumen		
															Kab. Wajo, Sempu, Kecamatan, Sempu Kelurahan							
1	3	10	01.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin							216 KM	5,599,999,900	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macananga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan	216 KM	5,880,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
															Kab. Soppeng, Sempu, Kecamatan, Sempu Kelurahan							
															Kab. Wajo, Sempu, Kecamatan, Sempu Kelurahan							
1	3	10	01.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin							429 Meter	400,000,000	Kab. Bone, Sempu, Kecamatan, Sempu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Penguatan infrastruktur wilayah		Masyarakat Sulawesi Selatan	429 Meter	420,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
															Kab. Soppeng, Sempu, Kecamatan, Sempu Kelurahan							
															Kab. Wajo, Sempu, Kecamatan, Sempu Kelurahan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									4,234,820,922							4,861,063,555	
1	3	1			PROGRAM PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%				100 %	1,160,871,472						100 %	1,678,025,252	
1	3	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan penganggaran	%		%				100 %	70,929,100						100 %	82,500,000	
1	3	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							1 Laporan	20,283,800	Kab. Bulukumba, Ujung Bahu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI	1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							4 Laporan	50,645,300	Kab. Bulukumba, Ujung Bahu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI	4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%		%				100 %	65,708,800						100 %	31,500,000	
1	3	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							12 Laporan	65,708,800	Kab. Bulukumba, Ujung Bahu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI	12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan aset	%		%				100 %	63,747,600						100 %	86,139,900	
1	3	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							1 Laporan	63,747,600	Kab. Bulukumba, Ujung Bahu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Laporan	86,139,900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	%		%				100 %	6,987,500						100 %	7,343,700	
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							1 Paket	4,987,500	Kab. Bulukumba, Ujung Bahu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	5,243,700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							1 Paket	2,000,000	Kab. Bulukumba, Ujung Bahu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas PUTR Provinsi	1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
1										2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12	14	15	16	17
1	3	1	01.08							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	%		%	100 %		953,498,472								100 %	1,500,541,652
1	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	58,232,400	Kab. Bulukumba, Ujung Buhu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	731,971,539			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					
1	3	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	895,266,072	Kab. Bulukumba, Ujung Buhu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)			Dinas PUTR Provinsi	12 Laporan	768,570,113		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%		%	78.5 %	3,073,949,450							78.5 %	3,183,038,203							
1	3	10	01.01		Penyeleenggaraan Jalan Provinsi	Panjang ruas jalan wilayah VI yang ditangani	Km		Km	283.41 Km	3,073,949,450							283.41 Km	3,183,038,203							
1	3	10	01.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				0 Dokumen	42,984,000	Kab. Bontolene, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan			2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	0 Dokumen	0		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Wilayah VI				1 Dokumen		Kab. Bulukumba, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan					1 Dokumen									
												Kab. Jeneponto, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan														
												Kab. Kepulauan Selayar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan														
												Kab. Sinjai, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan														
1	3	10	01.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				106 Km	2,864,920,950	Kab. Bontolene, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Selatan	106 Km	3,008,691,578		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						
												Kab. Bulukumba, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan														
												Kab. Jeneponto, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan														
												Kab. Kepulauan Selayar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan														
												Kab. Sinjai, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan														
1	3	10	01.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				0 M	166,044,500	Kab. Bontolene, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Sulawesi Selatan	0 M	174,346,725		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin pada wilayah UPT VI				168 Meter		Kab. Bulukumba, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan					168 Meter									
												Kab. Jeneponto, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan														
												Kab. Kepulauan Selayar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan														
												Kab. Sinjai, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAPAN DAN KETERTERAPAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						48,079,541,072							53,258,709,169								
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						41,813,927,922							46,134,709,169								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	5	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										540,878,600			
1	5	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	279,713,300	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	400,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11,042,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	14,036,200	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	63,343,100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	13,204,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	5	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	55,073,900	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11,565,250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15,068,800	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	15,970,250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	15,751,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20,639,734,070					23,065,647,041		
1	5	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1944 Orang/ Bulan	20,527,520,520	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1944 Orang/ Bulan	22,960,522,041	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	57,873,800	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	67,052,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,679,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5,107,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				20 Dokumen	8,943,750	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Dokumen	6,516,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	24,717,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	26,450,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9,498,750					22,000,000		
1	5	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	5,442,750	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	4,056,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	12,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						138,799,250					375,800,000		
1	5	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket	99,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	305,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				150 Paket						150 Paket		
1	5	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				340 Dokumen	39,799,250	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		340 Dokumen	70,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2 kali	416,858,600					2 kali	697,551,000	
1	5	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	4,135,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Paket	7,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				250 Paket	3,307,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250 Paket	17,250,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				18000 Paket	15,325,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18000 Paket	52,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	15,728,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	24,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	10,875,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	17,250,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	305,343,200	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Laporan	450,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5000 Dokumen	12,145,400	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5000 Dokumen	28,551,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	5	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	50,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							622,919,900							1,650,000,000	
1	5	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	0	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	650,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	51,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	150,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	5	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					8 Unit	421,919,500	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Unit	700,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							19,048,443,852							19,107,832,528	
1	5	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	19,572,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	19,028,871,552	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	19,082,832,528	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							533,785,000							675,000,000	
1	5	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					25 Unit	331,980,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Unit	375,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya					9 Unit	169,305,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Unit	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	32,500,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					41 Unit							41 Unit		
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETERENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							4,913,681,350							5,154,000,000	
1	5	2	01.01		Penanganan Gangguan Keterenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							3,935,921,950							3,764,000,000	
1	5	2	01.01	1	Pencegahan Gangguan Keterenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Beres Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Keterenteraman dan Ketertiban Umum yang Beres Melalui Beres Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan					277 Kasus	809,474,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				277 Kasus	800,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	01.01	2	Penindakan atas Gangguan Keterenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Keterenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan					42 Kasus	2,201,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42 Kasus	2,300,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	01.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Keterenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Keterenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi					0 Dokumen	490,169,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Keterenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi					15 Dokumen							15 Dokumen		
1	5	2	01.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keterenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keterenteraman dan Ketertiban Umum					0 Dokumen	132,335,850	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keterenteraman dan Ketertiban Umum					50 Dokumen							50 Dokumen		
1	5	2	01.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuara Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					3840 Orang	287,125,350	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3840 Orang	10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	01.01	6	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan					5 Dokumen	5,731,500	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	01.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keterenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana keterenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia					150 Unit	10,085,000	Kota Makassar, Panakkukang, Pannakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Unit	4,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	01.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur							865,380,150							1,140,000,000	
1	5	2	01.02	1	Sosialisasi Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					3 Laporan	305,832,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	320,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	5	2	01.02	2	Pengawasan atas Keputusan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Keputusan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				65 Laporan	294,167,350	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65 Laporan	420,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	01.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				25 Laporan	265,380,150	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Laporan	400,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	01.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi						112,379,250							250,000,000	
1	5	2	01.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertertaman Masyarakat serta Penggajian Perda				25 Laporan	112,379,250	Kota Makassar, Panakkukang, Punaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Laporan	250,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						715,712,200							940,000,000	
1	5	3	01.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi						245,314,200							325,000,000	
1	5	3	01.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Terampil untuk Melakukan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota				80 Orang	245,314,200	Kota Makassar, Panakkukang, Punaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80 Orang	325,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	3	01.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						265,798,800							315,000,000	
1	5	3	01.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Menperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				100 Orang	265,798,800	Kota Makassar, Panakkukang, Punaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	315,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	3	01.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						204,599,200							300,000,000	
1	5	3	01.04	3	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				2 Dokumen	204,599,200	Kota Makassar, Panakkukang, Punaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	300,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						636,219,600							1,030,000,000	
1	5	4	01.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran						543,580,350							780,000,000	
1	5	4	01.01	3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota				0 Laporan	0	Kota Makassar, Panakkukang, Punaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	80,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota				2 Laporan							2 Laporan		
1	5	4	01.01	4	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				0 Dokumen	205,581,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				12 Dokumen							12 Dokumen		
1	5	4	01.01	9	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota				0 Orang	337,999,350	Kota Makassar, Panakkukang, Punaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang	500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota				100 Orang							100 Orang		
1	5	4	01.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						92,639,250							250,000,000	
1	5	4	01.02	1	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				2 Laporan	92,639,250	Kota Makassar, Panakkukang, Punaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	250,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERTAMAN DAN KETERTERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						16,871,229,710							67,196,324,599	
1	5	1			PROGRAM PERUKUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Minimal Baik	%	%	%	100 %	8,486,606,574						100 %	13,557,884,126	
						Presentase Penurunan Temuan Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	%	%	%	100 %							100 %		
						Presentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	%	%	100 %							100 %		
1	5	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	%	%	100 %	325,711,000						100 %	921,393,999	
1	5	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	129,125,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPKD Provinsi	1 Dokumen	160,650,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	69,382,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPKD Provinsi	1 Dokumen	388,252,448	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	69,397,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan	BPKD Provinsi	1 Dokumen	134,679,408	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	5	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	15,317,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	1 Dokumen	190,580,293	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	4,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	1 Dokumen	6,360,609	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	38,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	2 Laporn	40,871,241	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%		100 %	5,053,248,130				100 %	5,802,982,866			
1	5	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 Orang/ Bulan	4,980,068,130		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	45 Orang/ Bulan	5,723,864,676	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		15 Laporan	62,790,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	15 Laporan	67,781,594	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	10,390,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	0 Dokumen	11,336,596	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen						1 Dokumen				
1	5	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Penilaian Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	%		100 %	272,114,000				100 %	2,853,587,775			
1	5	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0 Paket	67,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	0 Paket	70,799,637	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		95 Paket						95 Paket				
1	5	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		6 Dokumen	34,734,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	6 Dokumen	40,694,918	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	0 Orang	74,639,801	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang						5 Orang				
1	5	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1500 Orang	169,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	1500 Orang	2,667,453,419	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%		100 %	732,098,500				100 %	1,000,104,071			
1	5	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10,420,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	1 Paket	22,986,895	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	45,327,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	5 Paket	255,050,475	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		35 Paket	97,576,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	35 Paket	106,575,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan	73,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	1 Laporn	77,885,010	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	505,335,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	1 Laporan	537,606,691	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100 %	1,899,234,944				100 %	2,439,271,810			
1	5	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporn	342,782,520		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	3 Laporn	391,335,396	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	1,256,452,424		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	13 Laporan	2,047,936,414	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	%		100 %	504,200,000				100 %	540,543,605			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
1	5	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			15 Unit	321,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	15 Unit	338,529,360	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 Unit	29,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	0 Unit	37,590,335	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			40 Unit								40 Unit		
1	5	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	154,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	2 Unit	164,423,910	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	%	%	100 %	8,384,623,136							100 %	53,638,440,473	
						Presentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sub/instansi yang terdistribusi	%	%	100 %								100 %		
						Presentase Tanggap Darurat Bencana yang terintegrasi	%	%	100 %								100 %		
1	5	3	01.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Presentase Ketersediaan Sistem Peringatan Dini Bencana	%	%	100 %	535,470,200							100 %	563,468,841	
1	5	3	01.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota			200 Orang	535,470,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Kabupaten/Kota, Aparat Kebencanaan dan Masyarakat	200 Orang	563,468,841	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
														1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik					
1	5	3	01.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kebencanaan	%	%	100 %	3,152,553,936							100 %	46,788,499,541	
1	5	3	01.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			200 Orang	336,295,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Kabupaten/Kota	200 Orang	557,829,749	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	01.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			10 Dokumen	1,708,286,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	45,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	01.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana			0 Orang	489,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Kabupaten/Kota	0 Orang	537,932,292	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
						Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana			200 Orang					1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		200 Orang			
1	5	3	01.02	9	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi			1 Dokumen	618,532,536		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	692,737,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	01.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik serta Aparat Tanggap Darurat Bencana	%	%	100 %	2,673,684,000							100 %	3,623,369,681	
1	5	3	01.03	2	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			12 Laporan	632,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparat Kebencanaan dan Masyarakat	12 Laporan	690,596,648	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	01.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			0 Orang	2,041,504,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparat Kebencanaan dan Masyarakat	0 Orang	2,932,773,033	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			38000 Orang								38000 Orang		
1	5	3	01.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Ketersediaan Data Bencana Kabupaten/Kota	%	%	100 %	2,022,915,000							100 %	2,663,102,410	
1	5	3	01.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah			1 Dokumen	546,254,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	1 Dokumen	575,433,926	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	01.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan			1 Dokumen	169,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	1 Dokumen	213,150,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	01.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi			1 Laporan	239,645,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	1 Laporan	266,437,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	01.04	7	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (ITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun			5 Dokumen	1,067,516,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	BPBD Provinsi	5 Dokumen	1,608,080,984	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					51,051,176,074							4,323,609,807		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	6	1			PROGRAM PERURANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
1	6	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										4,156,070,807				
															32,723,280				
1	6	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	401,506,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	11 Dokumen	0	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						10,478,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		11,001,900	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						10,485,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		11,009,250	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5,889,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		6,176,100	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						4,329,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		4,536,000	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	200,516,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	3 Laporan	0	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						33,322,276,487				210,000,000				
1	6	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				341 Orang/ Bulan	33,122,246,087	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	341 Orang/ Bulan	0	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD				7 Laporan	200,030,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	7 Laporan	210,000,000	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah						0				0				
1	6	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	0 Paket	0	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						816,295,800				243,841,100				
1	6	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						19,038,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		20,000,000	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlingkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	219,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	15 Paket	0	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						23,441,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		24,612,000	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						48,699,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		51,599,100	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu						92,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		147,630,000	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	412,987,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	24 Laporan	0	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,049,097,087				3,330,188,457				
1	6	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						725,023,607	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		761,275,761	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				107 Orang	2,324,073,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	107 Orang	2,568,912,696	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						323,151,000				339,318,000				
1	6	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						290,001,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		304,510,500	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						33,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		34,807,500	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	0 Unit	0	DINAS SOSIAL			
1	6	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	7 Unit	0	DINAS SOSIAL			
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						0				0				
1	6	2	01.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0				0				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran		Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																											
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif																																																																													
1						2						3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						14						15						16						17					
1	6	2	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitaan Inisiatif dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitaan Inisiatif dan Pengumpulan Uang atau Barang					0 Dokumen	0				4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		0 Dokumen	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	2	01.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitaan Inisiatif dan Pengumpulan Uang atau Barang					24 Dokumen							24 Dokumen																																																																													
1	6	2	01.02	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi					0 Keluarga	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		0 Keluarga	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	2	01.02	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelengkapan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi					0 Lembaga	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		0 Lembaga	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							187,578,000																																																																																			
1	6	3	01.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal							187,578,000																																																																																			
1	6	3	01.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					300 Orang	187,578,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		300 Orang	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							5,621,789,500							167,539,000																																																																												
1	6	4	01.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti							200,000,000							0																																																																												
1	6	4	01.01	4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi					20 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		20 Orang	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.01	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi					0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		0 Orang	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti							3,495,882,500							0																																																																												
1	6	4	01.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi					425 Anak	2,709,890,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		425 Anak	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.02	3	Penyediaan Sandang	Jumlah anak yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi					475 Anak	295,213,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		475 Anak	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.02	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi					425 Anak	101,198,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		425 Anak	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.02	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi					425 Anak	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		425 Anak	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.02	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi					425 Anak	88,165,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		425 Anak	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.02	10	Pemberian Pelayanan Pemenuhan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pemenuhan Keluarga Kewenangan Provinsi					425 Orang	101,416,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		425 Orang	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti							1,138,406,000							112,539,000																																																																												
1	6	4	01.03	1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi					75 Orang	841,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		75 Orang	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.03	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi					75 Orang	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		75 Orang	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.03	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi					75 Orang	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		75 Orang	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.03	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi					75 Orang	59,996,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		75 Orang	0	DINAS SOSIAL																																																																											
																4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi																																																																															
1	6	4	01.03	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi					75 Orang	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		75 Orang	0	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.03	10	Pemberian Pelayanan Pemenuhan Keluarga							47,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi			49,539,000	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.03	12	Pemulasaran							59,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi			63,000,000	DINAS SOSIAL																																																																											
1	6	4	01.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti							0							0																																																																												
1	6	4	01.04	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi					160 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		160 Orang	0	DINAS SOSIAL																																																																											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Penugsat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	6	4	01.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti										85,000,000				
1	6	4	01.05	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			100 Orang	567,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	100 Orang	0	DINAS SOSIAL		
1	6	4	01.05	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi			100 Orang	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	100 Orang	0	DINAS SOSIAL		
1	6	4	01.05	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi			100 Orang	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	100 Orang	0	DINAS SOSIAL		
1	6	4	01.05	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi		55,000,000	DINAS SOSIAL		
1	6	4	01.05	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi			100 Orang	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	100 Orang	0	DINAS SOSIAL		
1	6	4	01.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal			100 Orang	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	100 Orang	0	DINAS SOSIAL		
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					4,585,700,000						0			
1	6	5	01.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					0							0		
1	6	5	01.01	1	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi			0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	0 Orang	0	DINAS SOSIAL		
1	6	5	01.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					4,585,700,000							0		
1	6	5	01.02	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBH)	20 Kelompok	3,405,700,000				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	20 Kelompok	0	DINAS SOSIAL		
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Keluarga								0 Keluarga				
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	400 Keluarga								400 Keluarga				
1	6	5	01.02	2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	183 Keluarga	0				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	183 Keluarga	0	DINAS SOSIAL		
1	6	5	01.02	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	48 Lembaga	1,180,000,000				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	48 Lembaga	0	DINAS SOSIAL		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	0 Orang								0 Orang				
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	40 Keluarga								40 Keluarga				
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					2,512,085,000						0			
1	6	6	01.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					2,512,085,000							0		
1	6	6	01.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	25692 Orang	1,808,625,000				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	25692 Orang	0	DINAS SOSIAL		
1	6	6	01.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	3887 Orang	200,000,000				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	3887 Orang	0	DINAS SOSIAL		
1	6	6	01.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	1775 Orang	503,460,000				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	1775 Orang	0	DINAS SOSIAL		
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					0							0		
1	6	7	01.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					0								0	
1	6	7	01.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Makam	0				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	2 Makam	0	DINAS SOSIAL		
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					37,790,270,058						39,251,448,185			
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					30,379,801,820						35,019,745,285			
2	7	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					418,202,100						453,245,285			
2	7	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	283,205,400				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		5. Pembangunan manusia	7 Dokumen	262,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	7	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17,498,900				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALD)		5. Pembangunan manusia	1 Dokumen	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Mutu Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
2	7	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	14,997,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		1 Dokumen	17,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	17,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		1 Dokumen	20,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		1 Dokumen	17,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rbtinar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rbtinar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rbtinar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		17 Laporan	58,245,285	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		6 Laporan	52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								26,889,943,670					30,180,500,000		
2	7	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				199 Orang/ Bulan	26,723,661,170		Dana Transfer Umum-Dana Absest Umum		5. Pembangunan manusia		199 Orang/ Bulan	30,000,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	9,999,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		2 Laporan	10,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	156,283,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		18 Laporan	170,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								190,000,000					168,000,000		
2	7	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Tahun	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		1 Tahun	115,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia			52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								402,845,600					443,000,000		
2	7	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				2 Paket	58,365,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		2 Paket	65,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	244,480,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		12 Laporan	236,250,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia			36,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia			105,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								124,307,850					110,000,000		
2	7	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	124,307,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		1 Unit	110,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,119,918,000					1,365,000,000		
2	7	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	618,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		12 Laporan	682,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	501,078,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		12 Laporan	682,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,234,884,600					2,300,000,000		
2	7	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				17 Unit	293,484,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		17 Unit	350,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	895,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		1 unit	1,900,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Paket	45,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		8 Paket	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								86,442,700						105,000,000		
2	7	2	01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								86,442,700						105,000,000	
2	7	2	01.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	41,442,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		1 Dokumen	52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	2	01.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro				24 Orang	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		24 Orang	52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RPMD Tahun 2021		Prakiraan Capaian Target RPMD Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab			
														Target 2023		Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
1				2		3		4		5		6		7		8	9	10	11		12	14	15	16	17
2	7	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										4,832,824,200									1,099,000,000		
2	7	3	01.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi										4,752,824,200									1,015,000,000		
2	7	3	01.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Peserta Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n							240 Orang		4,644,992,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		240 Orang	1,000,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	3	01.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyelidikan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023							20 Lembaga		107,831,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		20 Lembaga	15,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	3	01.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi										80,000,000								84,000,000			
2	7	3	01.04	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah							10 Dokumen		80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		10 Dokumen	84,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										624,784,856								1,044,750,000			
2	7	4	01.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja										139,772,300								182,250,000			
2	7	4	01.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)							22730 Orang		39,772,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		22730 Orang	52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	4	01.03	3	Job Fair/Bursa Kerja										100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia			99,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	4	01.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi										439,999,056								735,000,000			
2	7	4	01.04	3	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA							100 Orang		439,999,056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		100 Orang	735,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	4	01.05	Pengesahan RPTKA Perjanjian yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										45,013,500								157,500,000			
2	7	4	01.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA							100 Orang		45,013,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		100 Orang	157,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										1,000,613,900								1,218,000,000			
2	7	5	01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota										67,853,400								105,000,000			
2	7	5	01.01	3	Penyenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek							1 Laporan		67,853,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		1 Laporan	105,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	5	01.02	Pencapaian dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi										437,362,500								561,750,000			
2	7	5	01.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan							110 Perkara		64,471,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		110 Perkara	105,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	5	01.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina							3 Lembaga		372,891,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		3 Lembaga	456,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	5	01.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)										495,398,000								551,250,000			
2	7	5	01.03	1	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP							1 Surat Keputusan		441,160,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		1 Surat Keputusan	472,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	5	01.03	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan							95000 Orang		54,237,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		95000 Orang	78,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	6		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN										895,802,582								764,952,900			
2	7	6	01.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										895,802,582								764,952,900			
2	7	6	01.01	1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)							900 Perusahaan		598,371,332	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		900 Perusahaan	476,202,900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	6	01.01	2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan							100 kasus		170,597,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		100 Kasus	131,250,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	6	01.01	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3							100 Perusahaan		126,833,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		100 Perusahaan	157,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										269,999,900								532,500,000			
3	32	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										40,000,000								105,000,000			
3	32	2	01.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi										40,000,000								105,000,000			
3	32	2	01.01	3	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi							1058 Hektar		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		1058 Hektar	52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
														Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			Target	Pagu Indikatif								
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		14		16		17	
3	32	2	01.01	4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi									0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5. Pembangunan manusia								52,500,000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI									139,999,900													230,000,000				
3	32	3	01.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Bersifat dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									139,999,900													230,000,000				
3	32	3	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			2 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		2 Laporn	52,500,000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
3	32	3	01.01	3	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)			40 Kepala Keluarga	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		40 Kepala Keluarga	52,500,000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
	32	3	01.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Bersifat dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia			52,500,000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
3	32	3	01.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan			40 Kepala Keluarga	69,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		40 Kepala Keluarga	72,500,000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
3	32	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					90,000,000								197,500,000													
3	32	4	01.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan					90,000,000								197,500,000													
3	32	4	01.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina			60 Kepala Keluarga	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia		60 Kepala Keluarga	92,500,000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
3	32	4	01.01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman					0				5. Pembangunan manusia			105,000,000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					15,237,910,907							14,915,491,527														
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	%	95 %	11,416,301,375							95 %	11,089,294,478													
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	%	100 %								100 %														
						Persentase Temuan Material BPK dan APIP	%	%	2 %								2 %														
2	8	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	%	%	100 %	574,746,200							100 %	550,580,568													
2	8	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	128,772,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan tatakoda Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakoda pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Daiduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah, Lingkup PPPA dan Daiduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	4 Dokumen	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA													
2	8	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	7,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakoda pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Daiduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah, Lingkup PPPA dan Daiduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	2 Dokumen	7,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA													
2	8	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	7,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakoda pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Daiduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah, Lingkup PPPA dan Daiduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	2 Dokumen	7,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA													
2	8	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	6,525,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakoda pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Daiduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah, Lingkup PPPA dan Daiduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	2 Dokumen	6,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA													
2	8	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2 Dokumen	6,525,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakoda pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Daiduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah, Lingkup PPPA dan Daiduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	2 Dokumen	6,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA													
2	8	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			23 Laporan	417,922,200	Kab. Barrateng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakoda pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Daiduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah, Lingkup PPPA dan Daiduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	23 Laporan	412,580,568	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Desral		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
2	8	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	41,733,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02)Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum, Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD, Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat Website Dinas	2 Paket	41,700,000	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	121,700,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02)Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum, Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD, Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat Website Dinas	1 Laporan	121,700,000	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	513,584,200	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02)Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum, Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD, Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat Website Dinas	2 Laporan	373,868,000	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
2	8	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	25,064,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(G2),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum, Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat Website Dinas	100 Dokumen	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	40,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(G2),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum, Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat Website Dinas	3 Dokumen	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan kantor	%		%	85 %	845,092,390						85 %	844,943,200		
2	8	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	35,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, Tenaga Non PNS dan OPD DP3A Didirik KB, Objek Layanan Komunikasi, Sumbere daya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas , Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Dinas	1 Laporan	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	87,099,190	Kota Makassar, Semua	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya	1. Perbaikan tatakelola	ASN, Tenaga Non PNS dan OPD DP3A Didirik KB, Objek	1 Laporan	87,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
												Kecamatan, Semua Kelurahan		Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pemerintahan dan pelayanan publik	Layanan Komunikasi, Sumberebaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas , Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Pemerintahan Lingkup Dinas				PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50,050,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, Tenaga Non PNS dan OPD DP3A Daiduk KB, Objek Layanan Komunikasi, Sumberebaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas , Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Pemerintahan Lingkup Dinas	1 Laporan	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	672,943,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, Tenaga Non PNS dan OPD DP3A Daiduk KB, Objek Layanan Komunikasi, Sumberebaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas , Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Pemerintahan Lingkup Dinas	1 Laporan	672,943,200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	%	%	%	100 %	427,655,000						100 %	323,549,000		
2	8	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	228,498,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1 Pengguna Kendaraan Roda 2 Dan 4 Dp3a Daiduk KB Prov. Sulsel 2 Kantor DP3A Daiduk KB dan UPT PPA Prov. Sulsel	12 Unit	210,350,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	199,157,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1 Pengguna Kendaraan Roda 2 Dan 4 Dp3a Daiduk KB Prov. Sulsel 2 Kantor DP3A Daiduk KB dan UPT PPA Prov. Sulsel	4 Unit	113,199,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	2			PROGRAM PENGARURUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN	Persentase kab/kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG	%	%	%	75 %	767,852,100						75 %	780,000,000		
						Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terakreditasi	%	%	%	35 %							35 %			
2	8	2	01.01		Pelembagaan Pengurusan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD Provinsi yang Memenuhi Prasyarat PUG	%	%	%	90 %	319,999,600						90 %	320,000,000		
2	8	2	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengurusan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. OPD Prov. Tim Pokja PUG, Pelaksanaan PUG di 24 Kab/Kota, 2. Focal Point PUG Perangkat Daerah/Provinsi dan OPD Tk Provinsi, 3. Perencana/auditor/calculas fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG	2 Dokumen	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	2	01.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengurusan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	51,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. OPD Prov. Tim Pokja PUG, Pelaksanaan PUG di 24 Kab/Kota, 2. Focal Point PUG Perangkat Daerah/Provinsi dan OPD Tk Provinsi, 3. Perencana/auditor/calculas fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG	1 Dokumen	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	2	01.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengurusan Gender (PUG) termasuk/Perencana Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi				50 Perangkat Daerah	267,999,800	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. OPD Prov. Tim Pokja PUG, Pelaksanaan PUG di 24 Kab/Kota, 2. Focal Point PUG Perangkat Daerah/Provinsi dan OPD Tk Provinsi, 3. Perencana/auditor/calculas fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG	50 Perangkat Daerah	130,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
														11	12				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan							
												Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	8	2	01.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial	%		%	35 %	447,852,800						35 %	365,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab
											Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana			Target		Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17					
2	8	2	01.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota				24 Organisasi	447,852,500	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi, Politik,hukum, Perempuan kelompok rentan, kader partai politik, DPJA Kab/kota , LHH	24 Organisasi	365,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
2	8	2	01.03		Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi yg terstandarisasi	Organisasi/Lembaga		Organisasi/Lembaga	15 Organisasi/Lembaga	0						15 Organisasi/Lembaga	95,000,000		
2	8	2	01.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				15 Lembaga	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Perempuan Penyintas Kekerasan dan TPPO, Perempuan Dalam Kondisi Khusus (Disabilitas, Lansia dan Narapidana), Perempuan Kepala Keluarga, Organisasi Pemberdayaan Perempuan , Forum PUSPA Kab/kota dan Provinsi	15 Lembaga	95,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	2	01.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				65 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Perempuan Penyintas Kekerasan dan TPPO, Perempuan Dalam Kondisi Khusus (Disabilitas, Lansia dan Narapidana), Perempuan Kepala Keluarga, Organisasi Pemberdayaan Perempuan , Forum PUSPA Kab/kota dan Provinsi	65 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Perentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi perempuan	%		%	50 %	1,375,921,308						50 %	1,179,385,500		
2	8	3	01.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perentase kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model sinergi layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%		%	17 %	230,233,500						17 %	227,631,400		
2	8	3	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	150,450,000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Pengelola Sinergi Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lokasi Percontohan 2. Gugus Tugas PTPTPO Provinsi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
2	8	3	01.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				24 Perangkat Daerah	79,783,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Pengelola Sinergi Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lokasi Percontohan 2. Gugus Tugas PTPTPO Provinsi Kabupaten/Kota	24 Perangkat Daerah	77,631,400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	3	01.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif	%		%	98 %	1,073,727,608						98 %	718,000,000		
2	8	3	01.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				24 Orang	622,377,608	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Perempuan dan Anak Korban KHP/KTA, Lembaga Masyarakat, Jejaring Layanan di Provinsi , Kab/Kota	24 Orang	478,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran		Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Desral					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Main Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Desral		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	8	3	01.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyelidikan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				24 Layanan	451,350,000	Kab. Bantareng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Perempuan dan Anak Korban ktp/ktA, Lembaga Masyarakat, Jejaring Layanan di Provinsi , Kab/Kota	24 Layanan	240,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Jenebera, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Lenei, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Lenei Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Siderereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Siropeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	8	3	01.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	%		%	50 %	71,960,200						50 %	233,754,100	
2	8	3	01.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				1 Laporan	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Lembaga pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota, Organisasi Masyarakat, Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (koordinasi dan Sinkronisasi) Pengutan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	1 Laporan	100,000,000	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	8	3	01.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				110 Orang	71,960,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Lembaga pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota, Organisasi Masyarakat, Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (koordinasi dan Sinkronisasi) Pengutan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	110 Orang	71,954,100	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	01.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				120 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	5. Pembangunan manusia	1. Lembaga pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Jejaring UPT PPA Provinsi dan	120 Orang	61,800,000	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN,

Kode				Ururan/ Bidang Ururan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
													11	12				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
											Semua Kelurahan	Anak-Khusus Non Fisik	Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kab/Kota, Organisasi Masyarakat, Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)			PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BEREKSTANA
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	%	50 %	824,889,024						50 %	875,258,000	
2	8	4	01.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan edukasi keluarga yang di dukasi oleh lembaga layanan pembelajaran keluarga tingkat provinsi	Layanan	Layanan	24 Layanan	773,868,324						24 Layanan	800,258,000	
2	8	4	01.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia			2 Dokumen	773,868,324	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Pengelola Puspaga dan Masyarakat Pengguna Layanan Puspaga Tk. Provinsi	2 Dokumen	800,258,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BEREKSTANA
2	8	4	01.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga terstandarisasi	%	%	42 %	51,020,700						42 %	75,000,000	
2	8	4	01.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			6 Lembaga	51,020,700	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Pengelola Puspaga Tk. Kab/Kota	6 Lembaga	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BEREKSTANA
											Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	8	4	01.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			80 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Pengelola Puspaga Tk. Kab/Kota	80 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BEREKSTANA
2	8	4	01.02	3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Pengelola Puspaga Tk. Kab/Kota	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BEREKSTANA
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase kab/kota yang menyediakan Data Gender dan Anak yang Terupdate	%	%	87 %	314,999,000						87 %	315,000,000	
2	8	5	01.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tingkat Provinsi	%	%	87 %	314,999,000						87 %	315,000,000	
2	8	5	01.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia			2 Dokumen	129,999,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Pengelola Data Gender dan Anak Pada OPD Provinsi dan Kab/Kota (Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi) 2. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Organisasi/ Lembaga Mitra DP/PA Dalam KB (Penyugan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi)	2 Dokumen	130,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BEREKSTANA
											Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran		Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Desral					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Palopo, Semua								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
															11	12				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
													Keramatani, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	8	5	01.01	2	Penyajian dan Pemandatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemandfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi					2 Dokumen	185,000,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Pengelola Data Gender dan Anak Pada OPD Provinsi dan Kab/ Kota (Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi) 2. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Organisasi/ Lembaga Mitra DP3A Dukduk KB (Penyajian dan Pemandfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi)	2 Dokumen	185,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
													Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase kab/kota Layak Anak	%		%	83 %	338,175,600						83 %	376,853,049	
2	8	6	01.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Presentase kab/kota yg difasilitasi dlm pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha	%		%	100 %	230,175,600						100 %	285,000,000	
2	8	6	01.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				10 Organisasi	230,175,600	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Gugus tugas Penyelenggara Layanan PHA tingkat Prov/Kab/Kota, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Sekolah Madra dan Forum Anak daerah Prov dan Kab/kota	10 Organisasi	285,000,000	DINAS PEMERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	8	6	01.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Gugus tugas Penyelenggara Layanan PHA lingkup Prov/Kab/Kota, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Sekolah Madira dan Forum Anak daerah Prov dan Kab/kota	1 Dokumen	0	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6	01.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak	%		%	50 %	108,000,000						50 %	91,553,549	
2	8	6	01.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				60 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Unsur Pembina dari Kabupaten/Kota dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan 2. Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	60 Orang	0	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6	01.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	108,000,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Unsur Pembina dari Kabupaten/Kota dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan 2. Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	91,553,549	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidetngeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	14	15	16	17
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
2	8	6	01.02	4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Unsur Pembina dari Kabupaten/Kota dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan 2. Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak (per 10000)	Rasio		Rasio	Rasio 2.5/0000 Rasio	199,772,500						Rasio 2.5/0000 Rasio	300,000,000		
2	8	7	01.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kab/kota yg diinisiasi dlm pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak	%		%	16.7 %	75,002,000						16.7 %	75,000,000		
2	8	7	01.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				24 Organisasi	75,002,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Unsur di Desa/Kel yang Terkait Pencegahan Kekerasan Seksual/Pornografi terhadap Anak 2. Unsur Pembina di Tingkat Kab/Kota	24 Organisasi	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
2	8	7	01.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif	%		%	95 %	75,000,000						95 %	75,000,000		
2	8	7	01.02	1	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan				72 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Unsur Pemerintah dan Non Pemerintah Terkait Proteksi dan Kab/Kota 2. Pengelola PATBM Desa/Kelurahan Lokasi Percontohan 3. Pembina PATBM Kab/Kota dari Unsur Pemerintah dan non Pemerintah 4. Pengelola Lembaga Layanan AMPK Anak Korban Kekerasan di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	72 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	7	01.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				40 Layanan	75,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Unsur Pemerintah dan Non Pemerintah Terkait Proteksi dan Kab/Kota 2. Pengelola PATBM Desa/Kelurahan Lokasi Percontohan 3. Pembina PATBM Kab/Kota dari Unsur Pemerintah dan non Pemerintah 4. Pengelola Lembaga Layanan AMPK Anak Korban Kekerasan di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	40 Layanan	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	7	01.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Unsur Pemerintah dan Non Pemerintah Terkait Proteksi dan Kab/Kota 2. Pengelola PATBM Desa/Kelurahan Lokasi Percontohan 3. Pembina PATBM Kab/Kota dari Unsur Pemerintah dan non Pemerintah 4. Pengelola Lembaga Layanan AMPK Anak Korban Kekerasan di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan,								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	14	2	01.01	3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK				1 Laporan	200,000,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota 2. Pembina / Pengelola Kampung KB Kab/ Kota dan Desa	1 Laporan	100,000,000	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	14	2	01.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian penduduk yg tersedia di tk provinsi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	65,000,000						2 Dokumen	65,000,000	
2	14	2	01.02	4	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. OPD Terkait Tingkat Kab/ Kota dan Pengelola Rumah Daku 2. OPD Terkait Tingkat Provinsi dan Kab/ Kota	1 Dokumen	0	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	01.02	6	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	65,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. OPD Terkait Tingkat Kab/ Kota dan Pengelola Rumah Daku 2. OPD Terkait Tingkat Provinsi dan Kab/ Kota	1 Dokumen	65,000,000	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS peserta KB Aktif	%		%	65,34 %	242,000,000						65,34 %	292,000,000	
2	14	3	01.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kab/kota yang mengembangkan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	%		%	25 %	242,000,000						25 %	211,400,000	
2	14	3	01.01	1	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Pembina dan Pengelola/ Kader Kespro dan PIK-R Lokasi Percontohan Kampung KB	1 Laporan	0	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	01.01	4	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja				1 Dokumen	145,400,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Pembina dan Pengelola/ Kader Kespro dan PIK-R Lokasi Percontohan Kampung KB	1 Dokumen	145,400,000	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penasngkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	14	3	01.01	8	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi				1 Laporan	96,600,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Pembina dan Pengelola/ Kader Kespri dan PK-R Lokasi Percontohan Kampung KB	1 Laporan	66,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAH PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	14	3	01.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB	Persentase kab/kota yang menjadi lokasi pengembangan kemitraan pengelolaan pelayanan dan kesetiaan ber-KB	%		%	25 %	0						25 %	80,600,000	
2	14	3	01.02	1	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB				1 Dokumen	0	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	0	1 Dokumen	80,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAH PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	%		%	25 %	800,000,000						25 %	850,000,000	
2	14	4	01.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan IPK daerah	%		%	25 %	800,000,000						25 %	800,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
2	14	4	01.01	3	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bantareng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Pembina/Pengelola/Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyajian Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota (Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyajian Pengasuhan 1000 HPK 2. Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Kabupaten/Kota (Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	1 Dokumen	50,000,000	
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	14	4	01.01	8	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB				6 Organisasi	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Pembina/Pengelola/Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyajian Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota (Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyajian Pengasuhan 1000 HPK 2. Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Kabupaten/Kota (Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	6 Organisasi	0	
2	14	4	01.01	14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyajian Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyajian Pengasuhan 1000 HPK				1 Dokumen	700,000,000	Kab. Bantareng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	1. Pembina/Pengelola/Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyajian Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota (Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyajian Pengasuhan 1000 HPK 2. Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Kabupaten/Kota (Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	1 Dokumen	450,000,000	
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	14	4	01.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kah/kota yang difasilitasi dalam pembentukan percontohan BKB, BKK, BKL, dan UPPKS	%		%	25 %	0						25 %	50,000,000	
2	14	4	01.02	2	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Pembina/Pengelola/Kader/Calon Fasilitas Kelompok BKB, BKK, BKL dan UPPKS Kab/Kota Percontohan	1 Laporan	50,000,000	
															</				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
2	14	4	01.02	4	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKBB), Bina Keluarga Remaja (BKBR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendidikan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKBB), Bina Keluarga Remaja (BKBR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendidikan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1 Dokumen	0	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	Pembina/Pengelola/Kader/Calon Fasilitator Kelompok BKBB, BKBR, BKL dan UPPKS Kab/Kota Percontohan	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						27,842,298,157							32,918,940,942	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18,632,165,733							22,303,081,442	
2	9	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						715,924,300							599,001,700	
2	9	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	473,868,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Dokumen	332,739,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	4,915,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	5,406,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	4,915,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	5,406,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	17,452,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	19,197,200	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	17,452,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	19,197,200	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	115,066,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Laporan	126,573,700	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	82,256,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	90,481,600	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14,234,532,791							15,577,985,131	
2	9	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				134 Orang/ Bulan	13,929,592,791		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				134 Orang/ Bulan	15,322,546,631	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	1,370,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	1,507,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	10,060,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	11,066,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	160,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	99,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	8,800,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				36 Dokumen	59,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36 Dokumen	65,824,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	59,910,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	62,905,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	5,760,000		PENDAPATAN ASLI				3 Dokumen	6,336,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab													
													Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif														
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17													
2				9	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											43,758,300									47,097,000			
2				9	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										2 Dokumen	2,980,000							2 Dokumen	3,278,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2				9	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										24 Laporan	20,000,000							24 Laporan	22,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2				9	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										4 Laporan	10,780,000							4 Laporan	11,319,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2				9	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										2 Laporan	9,998,300							2 Laporan	10,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2				9	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											125,560,000									712,373,750			
2				9	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										4 Unit	0							4 Unit	4,200,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2				9	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											134 Paket	27,060,000							134 Paket	29,768,750	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2				9	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											2 Dokumen	0							2 Dokumen	120,750,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2				9	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											24 Dokumen	0							24 Dokumen	105,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2				9	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											2 Dokumen	0							2 Dokumen	105,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2				9	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan											10 Orang	28,500,000							10 Orang	210,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2				9	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											20 Orang	0							20 Orang	61,740,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2				9	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											40 Orang	70,000,000							40 Orang	75,915,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2				9	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												493,306,400									668,667,950		
2				9	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											20 Paket	0							20 Paket	52,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2				9	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan											20 Paket	102,576,900								20 Paket	112,860,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2				9	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan											20 Paket	0								20 Paket	52,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2				9	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan											20 Paket	24,995,000								20 Paket	27,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2				9	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan											20 Dokumen	30,000,000								20 Dokumen	33,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2				9	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											150 Laporan	323,849,500								150 Laporan	356,234,450	DINAS KETAHANAN PANGAN
2				9	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											2 Dokumen	11,885,000								2 Dokumen	13,073,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2				9	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											16 Dokumen	0								16 Dokumen	21,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2				9	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												125,000,000									1,291,500,000		
2				9	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan											2 Unit	0								2 Unit	315,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2				9	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan											2 Unit	0								2 Unit	315,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2				9	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan											20 Paket	0								20 Paket	105,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2				9	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan											2 Unit	0								2 Unit	210,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
													DAERAH (PAD)						
2	9	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	52,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	294,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,290,823,192							2,533,765,511	
2	9	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				36 Laporan	20,996,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36 Laporan	23,095,600	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	378,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36 Laporan	433,620,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Laporan	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Laporan	13,200,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,879,827,192		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	2,063,849,911	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						603,260,750							872,690,400	
2	9	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				27 Unit	199,260,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27 Unit	219,190,400	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya				40 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Unit	63,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Unit	10,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	304,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	315,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	210,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEMANDIRIAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						250,000,000							684,500,000	
2	9	2	01.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi						250,000,000							684,500,000	
2	9	2	01.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				6 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	220,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2	01.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia				6 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	236,250,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2	01.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia				2 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	157,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2	01.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				8 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Laporan	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2	01.01	5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan				4 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	15,750,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						5,820,136,524							5,855,359,500	
2	9	3	01.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan						1,575,000,000							1,037,359,500	
2	9	3	01.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				4 Laporan	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	01.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				4 Laporan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	01.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				3 Laporan	190,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	01.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				12 Dokumen	290,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif																																																																		
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17				
2	9	3	01.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				3 Unit	725,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	440,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																	
2	9	3	01.01	6	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				5 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	377,359,500	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																	
2	9	3	01.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						810,000,000							187,000,000																																																																		
2	9	3	01.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi				6 Laporan	220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Laporan	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	3	01.02	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				3 Dokumen	220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Dokumen	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	3	01.02	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				3 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Laporan	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	3	01.02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara				180 Ton	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180 Ton	22,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	3	01.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat						30,000,000							33,000,000																																																																		
2	9	3	01.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				8 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Laporan	33,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	3	01.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi						3,705,136,524							4,598,000,000																																																																		
2	9	3	01.04	1	Promosi Pengatekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Pengatekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				12 Dokumen	2,805,136,524		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	4,400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	3	01.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BERSA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BERSA)				12 Laporan	870,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	165,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	3	01.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				4 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	33,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						2,125,003,800							3,680,000,000																																																																		
2	9	4	01.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi						50,000,000							55,000,000																																																																		
2	9	4	01.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				3 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Dokumen	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	4	01.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						2,075,003,800							3,625,000,000																																																																		
2	9	4	01.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi				3 Dokumen	2,075,003,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Dokumen	3,520,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	4	01.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				4 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	105,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						1,014,992,100							396,000,000																																																																		
2	9	5	01.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Didistribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1,014,992,100							396,000,000																																																																		
2	9	5	01.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina				36 Dokumen	589,999,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36 Dokumen	198,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	5	01.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				75 Sertifikat	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75 Sertifikat	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	5	01.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				55 Dokumen	119,999,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55 Dokumen	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	5	01.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				9 Dokumen	29,993,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9 Dokumen	33,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
2	9	5	01.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan				9 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9 Dokumen	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN																																																																		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PUBLIK																																																																															
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						413,988,379,921							420,026,628,427																																																																		
3	27	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						88,189,401,711							87,023,258,541																																																																		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100 %							100 %																																																																			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100 %							100 %																																																																			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100 %							100 %																																																																			
3	27	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6,515,993,160							7,875,000,000																																																																		
3	27	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1,400,795,660		PENDAPATAN ASLI		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan	0	3 Dokumen	1,470,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN																																																																	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												DAERAH (PAD)						HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	64,910,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 Dokumen	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	26,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Dokumen	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	48,417,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	2 Dokumen	367,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	27	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	31,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Dokumen	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7 Laporan	4,944,199,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	7 Laporan	5,250,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	700 Orang/Bulan	71,887,280,127						700 Orang/Bulan	71,615,602,988	
3	27	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			700 Orang/ Bulan	70,757,844,527					0	700 Orang/ Bulan	70,757,773,985	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	323,419,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Laporan	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			12 Laporan	240,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	12 Laporan	332,829,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen	235,066,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	0 Dokumen	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen							1 Dokumen		
3	27	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					838,000,000						630,000,000		
3	27	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	288,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Laporan	367,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8,878,288,424							8,882,655,556	
3	27	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1,731,375,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Laporan	2,100,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	6,846,882,824		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Laporan	3,752,655,556	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					999,900,000							1,050,000,000	
3	27	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			48 Unit	499,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	48 Unit	525,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilitasi			5 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	5 Unit	525,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengembangan Jeruk Keprok Selayar	Ha	Ha	121 Ha	211,419,409,350						121 Ha	210,288,750,000	
						Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	Unit		Unit	300 Unit							300 Unit	
						Peningkatan Ketersediaan Pupuk	Ton		Ton	323,02 Ton							323,02 Ton	
						Produksi Tolu Solusone	Ton		Ton	7000 Ton							7000 Ton	
						Produktivitas Jagung	Kw/Ha		Kw/Ha	55,73 Kw/Ha							55,73 Kw/Ha	
						Produktivitas Kakao	Kg/Ha		Kg/Ha	634,1 Kg/Ha							634,1 Kg/Ha	
						Produktivitas Kopi	Kg/Ha		Kg/Ha	588,1 Kg/Ha							588,1 Kg/Ha	
						Produktivitas Paai	Kw/Ha		Kw/Ha	50,43 Kw/Ha							50,43 Kw/Ha	
3	27	2	01.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					61,567,396,000							62,500,000,000	
3	27	2	01.01	1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestiisida, Akutintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestiisida, Akutintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			2 Laporan	61,567,396,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0	2 Laporan	52,500,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasang Daerah Pemanggang Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
														11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
3	27	2	01.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman							149,852,013,350				157,788,750,000			
3	27	2	01.02	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih			500 Sertifikat			94,041,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0	500 Sertifikat	288,750,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	2	01.02	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			4 Laporan			39,999,982,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0	4 Laporan	42,000,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	2	01.02	3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran			4 Dokumen			49,757,996,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0	4 Dokumen	52,500,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	2	01.02	4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			4 Laporan			59,999,992,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0	4 Laporan	63,000,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan	Rp		Rp	8000000000 Rp		101,283,785,360				8000000000 Rp	105,615,813,057		
3	27	3	01.01		Penataan Prasarana Pertanian	Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan	Rp		Rp	465893180426 Rp		101,283,785,360				465893180426 Rp	105,615,813,057		
3	27	3	01.01	1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			1 Dokumen			2,581,715,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	1,093,826,562	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	3	01.01	2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			3 Dokumen			500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		3 Dokumen	4,771,986,495	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	3	01.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani			1 Dokumen			50,008,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	52,500,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	3	01.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			1 Dokumen			39,994,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	42,000,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	3	01.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi			5 Unit			8,200,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		5 Unit	5,250,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat	%		%	81,15 %		9,200,000,000				81,15 %	8,610,000,000		
3	27	5	01.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Penanganan Serangan OPT	%		%	4,5 %						4,5 %			
3	27	5	01.01			Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ha		Ha	40 Ha		9,200,000,000				40 Ha	8,610,000,000		
3	27	5	01.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			40 Ha			6,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0	40 Ha	5,250,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	5	01.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			5 Ha			3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0	5 Ha	3,150,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	5	01.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			1 Ha			200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0	1 Ha	210,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rasio Keteredahan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/KEP	%		%	5 %		3,895,783,500				5 %	8,688,706,829		
3	27	7	01.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian							500,000,000					525,000,000		
3	27	7	01.01	1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan			100 Orang			250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0	100 Orang	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	7	01.01	2	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi			100 Orang			250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0	100 Orang	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	7	01.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian							1,420,783,500					6,090,000,000		
3	27	7	01.02	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			2 Dokumen			300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0	2 Dokumen	315,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	7	01.02	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan			10 Kelompok			1,120,783,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0	10 Kelompok	5,775,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	7	01.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan							1,975,000,000					2,073,706,829		
3	27	7	01.03	1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi			5 Unit			300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		5 Unit	315,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	7	01.03	2	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Korporasi Petani			1 Laporan			200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Laporan	210,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	7	01.03	4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			5 Unit			1,475,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		5 Unit	1,548,706,829	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							40,266,052,480					52,910,099,996		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11		12	14	15
1	4	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%		%	100 %	15,280,053,592						100 %	25,834,907,189		
						Penentase Penurusan Temuan berdasarkan LHP	%		%	100 %							100 %			
						Penentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%	100 %							100 %			
1	4	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	%		%	100 %	713,120,400						100 %	2,616,858,649		
1	4	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	428,073,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	2 Dokumen	1,993,268,063	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	64,289,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	163,251,913	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	35,638,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	100,912,875	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,146,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	19,260,150	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7,029,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	15,480,150	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	73,850,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Laporan	141,317,648	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	99,095,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Laporan	183,367,850	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	12,249,915,560						100 %	19,341,491,748		
1	4	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				119 Orang / Bulan	11,860,280,460	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	119 Orang / Bulan	19,015,660,410	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12,668,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	2,808,750	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	50,794,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	83,554,825	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	22,334,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	3,480,750	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	13,169,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Laporan	105,631,050	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	238,668,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	42,698,788	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD				3 Laporan	11,712,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	3 Laporan	5,068,350	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	40,286,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	82,588,825	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	108,400,800							4 Laporan	291,936,263	
1	4	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	35,045,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	191,671,738	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	11,495,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	15,502,200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Pemerangik Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	4	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	61,860,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	2 Laporan	84,762,325	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Laporan		Laporan	1 Laporan	368,870,000						1 Laporan	588,888,401	
1	4	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					119 Paket	81,910,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	119 Paket	208,015,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	142,495,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	1 Dokumen	172,497,713	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	4	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen	84,525,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	1 Dokumen	123,465,863	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					20 Orang	59,940,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	20 Orang	84,909,325	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah		Laporan		Laporan	1 Laporan	267,991,500						1 Laporan	945,435,488	
1	4	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	35,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	1 Paket	9,348,938	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	107,910,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	1 Paket	771,871,275	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	25,028,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	1 Paket	53,944,275	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					1 Laporan	100,052,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	1 Laporan	110,271,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Laporan		Laporan	1 Laporan	50,000,000						1 Laporan	82,762,500	
1	4	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	1 Paket	52,762,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Laporan		Laporan	1 Laporan	475,083,532						1 Laporan	433,439,826	
1	4	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	475,083,532	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	1 Laporan	433,439,826	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Laporan		Laporan	1 Laporan	1,046,671,800						1 Laporan	1,564,094,314	
1	4	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					10 Unit	624,048,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	10 Unit	156,796,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya					6 Unit	142,800,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	6 Unit	211,869,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	279,823,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel	1 Unit	1,195,428,814	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan Provinsi (SPM)		%		%	100 %	6,472,408,088						100 %	4,922,220,971	
						Presentase warga negan yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM)		%		%	100 %							100 %		
1	4	2	01.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi		Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	1,046,481,900						5 Dokumen	1,144,584,613	
1	4	2	01.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi					1 Dokumen	594,866,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mayarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	237,051,163	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	01.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertanganini					1 Dokumen	91,752,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mayarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	107,470,150	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	01.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah					1 Dokumen	116,375,000	Kota Makassar, Semua	PENDAPATAN ASLI			Mayarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	109,600,075	DINAS PERUMAHAN

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Produksi				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	4	2	01.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	126,287,400	Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	DAPERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	103,730,575	KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	2	01.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	117,201,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	586,732,650	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	2	01.02		Sosialisasi dan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah apensi yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	195 Orang	234,079,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				195 Orang	621,839,820	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	4	2	01.02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	71,827,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	50 Orang	271,916,400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	2	01.02	2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	50 Orang	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	50 Orang	271,916,400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	2	01.02	3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	50 Orang	23,666,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	50 Orang	61,916,400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	2	01.02	4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Facilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Facilitator yang Terlembat dan Terlatih	45 Orang	8,669,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	45 Orang	4,992,120	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	2	01.02	5	Rembag Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1 Dokumen	27,278,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	4,000,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	2	01.02	6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	52,639,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	7,098,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	2	01.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun	40 Unit	5,191,846,388	Kab. Luwu Uluara, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Unit	3,155,796,538	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	2	01.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terlembat	40 Unit Rumah	5,052,778,388	Kab. Luwu Uluara, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	40 Unit Rumah	2,974,722,988	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	2	01.03	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	139,068,000	Kab. Luwu Uluara, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	181,073,550	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penetapan Luas Kawasan Kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	%	%	36,37 %	5,136,586,600				36,37 %	11,301,690,363	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	3	01.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen penataan kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen	434,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	1,401,562,638	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	3	01.01	2	Penyadaran Publik Percehangan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Percehangan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	1 Laporan	240,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Laporan	842,722,650	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	3	01.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	1 Laporan	106,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Laporan	347,053,913	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	3	01.01	9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	88,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Laporan	211,786,075	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	3	01.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh tertangani	Ha	Ha	120 Ha	4,702,586,600				120 Ha	9,900,127,725	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN	
1	4	3	01.02	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	9 Dokumen	282,000,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	9 Dokumen	1,203,826,075	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten								
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten								
									Kab. Luwu Uluara, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penasngkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
													Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Sidetengriang Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	4	3	01.02	7	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Ditemajatkan/Dipagar					120 Ha	4,420,586,600	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	120 Ha	8,696,301,650	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
													Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	4	8			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	%		%		100 %	12,715,004,200						100 %	10,254,103,968	
						Persentase Rumah tangga bersantasi di kawasan permukiman	%		%		93 %							93 %		
						Persentase Rumah tangga yang berakses air bersih layak/tenang di kawasan perkotaan dan Kepulauan	%		%		100 %							100 %		
1	4	8	01.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pantai dan Kepulauan	Lokasi			Lokasi	21 Lokasi	12,715,004,200						21 Lokasi	10,254,103,968	
1	4	5	01.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman					1 Dokumen	1,116,000,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	870,073,613	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
													Kab. Luwu, Semua							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
														11	12				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	4	5	01.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				21 Lokasi	11,433,004,200	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	21 Lokasi	9,094,419,839	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Penanggot Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4	5	01.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		1 Laporan	92,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Laporan	143,465,725	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	5	01.01	5	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman		1 Dokumen	74,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Dokumen	146,144,788	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	6			PROGRAM Peningkatan Pelayanan SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	%	100 %	662,000,000				100 %	597,177,508	
1	4	6	01.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU	Pengembang	Pengembang	15 Pengembang	662,000,000				15 Pengembang	597,177,508	
1	4	6	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah		1 Laporan	662,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Laporan	597,177,508	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				622,000,000						1,623,675,513	
2	10	3			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	%	100 %	140,000,000				100 %	182,009,150	
2	10	3	01.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	140,000,000				1 Dokumen	182,009,150	
2	10	3	01.01	1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		1 Dokumen	140,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Dokumen	182,009,150	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	%	100 %	147,000,000				100 %	259,839,350	
2	10	4	01.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah	Kasus	Kasus	1 Kasus	147,000,000				1 Kasus	259,839,350	
2	10	4	01.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Perantahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		7 Dokumen	49,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	7 Dokumen	133,405,675	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	4	01.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		7 Berita Acara	98,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	7 Berita Acara	126,433,675	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	%	100 %	335,000,000				100 %	1,181,827,013	
2	10	10	01.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	335,000,000				1 Dokumen	1,181,827,013	
2	10	10	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi		1 Laporan	267,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Laporan	138,226,225	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	10	01.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	68,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Dokumen	1,043,600,788	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				23,908,712,410						24,846,730,611	
2	11	1			PROGRAM PERURANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14,660,424,272						16,246,530,611	
2	11	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				97,212,500						175,800,000	
2	11	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	7,800,000	Sempu Kab/Kota, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		7 Dokumen	7,800,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	3,500,000	Sempu Kab/Kota, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	4,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	3,500,000	Sempu Kab/Kota, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	4,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	3,500,000	Sempu Kab/Kota, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	4,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab
											Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan							
2	11	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	4,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	75,412,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	150,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12,948,661,019							13,028,660,895	
2	11	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				104 Orang/ Bulan	12,878,661,019	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				104 Orang/ Bulan	12,878,660,895	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Laporan	150,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							58,500,000	
2	11	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		13 Orang	58,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						387,493,600							1,017,798,700	
2	11	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Paket	6,760,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	67,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Paket	313,843,500	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	59,997,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Paket	248,920,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	249,996,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45 Laporan	448,275,200	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						983,787,153							983,483,016	
2	11	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	931,758,216	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	931,758,216	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	51,998,937	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	51,724,800	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						243,300,000							982,288,000	
2	11	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinasnya				11 Unit	235,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		11 Unit	932,288,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						600,000,000							800,000,000	
2	11	2	01.01		Rencana Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi						350,000,000							250,000,000	
2	11	2	01.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup		1 Dokumen	250,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	01.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi						250,000,000							250,000,000	
2	11	2	01.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPUPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPUPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup		1 Dokumen	250,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Praktiran Menu Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										Target 2023	Paga Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Paga Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														Nasional	Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PEMERANAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							1,730,198,485																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perngkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
2	11	9	01.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														
2	11	9	01.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dimulai Kinerjanya dalam rangka PPLH				138 Entitas	149,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup	138 Entitas	300,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
2	11	10	01.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi														
2	11	10	01.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani				20 Dokumen	84,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup	20 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	10	01.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				14 Dokumen	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup	14 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						668,093,099						100,000,000		
2	11	11	01.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						668,093,099						100,000,000		
2	11	11	01.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganam Sampah Regional	Jumlah Laporan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganam Sampah Regional yang Disusun				1 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup	1 Laporan	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	01.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganam Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganam Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				1 Dokumen	168,093,099	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL						11,340,024,246						19,176,196,325		
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik	%		%	100 %	10,090,024,246						100 %	13,821,196,325	
						Persentase Pemusnaan Temuan Berdasarkan LHP	%		%	100 %							100 %		
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%	100 %							100 %		
2	12	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	%		%	100 %	300,000,000						100 %	945,000,000	
2	12	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	3 Dokumen	525,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Dokumen	15,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Dokumen	15,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Dokumen	15,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Dokumen	15,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	4 Laporan	78,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Laporan	278,250,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhi Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu	%		%	100 %	8,274,219,702						100 %	9,273,760,220	
2	12	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang	8,174,219,702	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	65 Orang	8,854,810,220	DINAS KEPENDUDUKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Pemerangik Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
									Akuisasi, Semua Kelurahan	Akuisasi Umum	dan pelayanan publik				DINAS CATATAN SIPIL				
2	12	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	4 Dokumen	84,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	5 Dokumen	73,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1 Laporan	103,950,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	6 Dokumen	52,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	18 Laporan	57,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1 Dokumen	47,250,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhihan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	%		%	100 %	25,472,750			100 %	136,518,188	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1 Dokumen	32,491,664	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1 Laporan	31,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1 Laporan	41,026,524	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1 Dokumen	31,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhihan kebutuhan Pegawai	%		%	100 %	0			100 %	579,398,400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Unit	17,325,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya						Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Paket	57,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Dokumen	40,748,400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Dokumen	57,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Dokumen	75,075,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
2	12	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	4 Orang	57,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
2	12	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				72 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/kota	72 Orang	136,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				72 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukcapil Prov. Sulsel dan Dinas Dukcapil Kab/Kota	72 Orang	136,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	%		%	100 %	256,400,000						100 %	730,328,517	
2	12	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	11,550,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	11,550,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	17,325,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	69,878,193	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	28,875,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	115,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	378,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	39,900,324	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	57,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	unit		unit	10 unit	0						10 unit	362,250,000	
2	12	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1 Paket	63,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	10 Unit	262,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				3 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	3 Unit	36,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	535,804,544						100 %	410,550,000	
2	12	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1 Laporan	11,550,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	515,804,544	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	1 Laporan	399,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Pernakap Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
2	12	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	unit		unit	10 unit	698,127,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi	10 unit	1,083,390,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	112,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi	1 Unit	103,950,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinasnya				7 Unit	175,997,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi	7 Unit	271,425,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi	20 Unit	9,240,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi	2 Unit	5,775,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi	2 Unit	693,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	%		%	98 %	205,000,000						98 %	1,260,000,000	
						Perentase Penyerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%		%	40 %							40 %		
						Perentase penyerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%		%	98 %							98 %		
						Perentase Pendataan Kartu Tanda Penduduk	%		%	100 %							100 %		
2	12	2	01.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Perentase Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk	%		%	100 %	125,000,000						100 %	825,000,000	
2	12	2	01.01	2	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Dokumen	210,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	01.01	3	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				1 Dokumen	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Dokumen	157,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	01.01	5	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admnduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admnduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Dokumen	157,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	01.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Perentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%		%	100 %	5,000,000						100 %	367,500,000	
2	12	2	01.02	1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Laporan	210,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	01.02	2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Laporan	157,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	01.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Perentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%		%	100 %	75,000,000						100 %	367,500,000	
2	12	2	01.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Laporan	105,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	01.03	2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Laporan	262,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Perentase Akta Kematian yang Diterbitkan	%		%	100 %	345,000,000						100 %	1,460,000,000	
						Perentase Bayi ber-Akta Kelahiran	%		%	98 %							98 %		
						Perentase Kematian Akta Kelahiran	%		%	97 %							97 %		
						Perentase Pasangan ber-Akta Nikah	%		%	37 %							37 %		
						Perentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kependudukan Akta Kelahiran	%		%	90.10 %							90.10 %		
						Perentase Penyerbitan Akta Kelahiran	%		%	95 %							95 %		
2	12	3	01.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Perentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	270,000,000						100 %	782,500,000	
2	12	3	01.02	1	Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil				1 Laporan	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Laporan	210,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	3	01.02	2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI		1. Perbaikan tatakelola	Dinas Dukcapil Kab/Kota	1 Laporan	310,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)		pemerintahan dan pelayanan publik				DAN CATATAN SIPIL
2	12	3	01.02	5	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				1 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukacopil Kab/Kota	1 Laporan	262,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	3	01.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	75,000,000						100 %	677,500,000	
2	12	3	01.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukacopil Kab/Kota	1 Laporan	367,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	3	01.03	2	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukacopil Kab/Kota	1 Laporan	310,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%		%	100 %	600,000,000						100 %	2,305,000,000	
2	12	4	01.01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Data Kependudukan skala provinsi	%		%	100 %	300,000,000						100 %	310,000,000	
2	12	4	01.01	2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Penserangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Penserangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Dinas Dukacopil Kab/Kota	1 Dokumen	310,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4	01.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Kab/Kota/OPD/Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%		%	100 %	100,000,000						100 %	1,312,500,000	
2	12	4	01.02	2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Dinas Dukacopil Kab/Kota	1 Laporan	525,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4	01.02	3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Dinas Dukacopil Kab/Kota	1 Dokumen	262,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4	01.02	5	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Dinas Dukacopil Kab/Kota	1 Dokumen	525,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4	01.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%		%	100 %	200,000,000						100 %	682,500,000	
2	12	4	01.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukacopil Kab/Kota	1 Laporan	420,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4	01.03	2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				60 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Dukacopil Kab/Kota	60 Orang	262,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%		%	100 %	100,000,000						100 %	630,000,000	
2	12	5	01.01		Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi	%		%	100 %	100,000,000						100 %	630,000,000	
2	12	5	01.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi				3 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	OPD/Lembaga/ Dinas Dukacopil Kab/Kota	3 Dokumen	630,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						18,886,759,215							20,211,162,231	
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14,893,059,104							13,824,797,356	
2	13	1	01.01		Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						455,723,300							440,000,000	
2	13	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	103,255,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	40,881,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	35,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	31,633,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan		1 Dokumen	35,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Pernangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)		dan pelayanan publik				MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	34,094,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1 Dokumen	35,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	40,848,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1 Dokumen	35,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	107,012,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	3 Laporan	100,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	98,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	5 Laporan	100,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11,655,278,044						10,324,837,404		
2	13	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	11,368,592,044		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Orang/ Bulan	10,203,102,404	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				960 Dokumen	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	960 Dokumen	13,335,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				79 Dokumen	86,389,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	79 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				16 Dokumen	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	16 Dokumen	7,560,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	49,394,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	2 Laporan	50,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	86,580,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				19 Laporan	64,323,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	19 Laporan	20,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	2 Dokumen	840	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						67,332,000						89,000,000		
2	13	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0	Kota Makassar, Rappocini, Bantia- Bantamang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	2 Dokumen	17,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	67,332,000	Kota Makassar, Rappocini, Bantia- Bantamang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	12 Laporan	72,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1,241,344,160						358,791,780		
2	13	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1,120,352,160	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1 Unit	15,750,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				4 Paket	116,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	4 Paket	244,109,250	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	0	Semua Kab/ Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan	6 Dokumen	15,750,000	DINAS PEMERIDAYAAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Pemerikat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
								Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)		dan pelayanan publik				MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Dokumen	5,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Orang	10,300,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		85 Orang	67,882,500	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										427,966,826		
2	13	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Paket	5,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Paket	2,500,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Paket	20,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Paket	24,937,500	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Paket	2,500,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	50,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	318,609,026	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	2,500,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	1,920,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										999,320,100		
2	13	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	0	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	553,740,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Paket	60,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Unit	50,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Unit	25,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	160,580,100	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Unit	150,000,000	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17			
2	13	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					403,817,500					964,881,876			
2	13	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	16,802,500	Kota Makassar, Rappocini, Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	302,391,000	Kota Makassar, Rappocini, Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	302,391,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	84,624,000	Kota Makassar, Rappocini, Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	632,490,576	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					434,900,000						220,000,000		
2	13	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			5 Unit	325,560,000	Kota Makassar, Rappocini, Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			5 Unit	0	Kota Makassar, Rappocini, Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			0 Unit	9,340,000	Kota Makassar, Rappocini, Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Unit	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			15 Unit						15 Unit			
2	13	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			15 Unit						15 Unit			
2	13	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi			1 Unit	100,000,000	Kota Makassar, Rappocini, Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi			2 Unit	0	Kota Makassar, Rappocini, Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA					99,999,700						620,328,125		
2	13	2	01.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat					99,999,700						620,328,125		
2	13	2	01.01	1	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan			0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
						Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan			3 Dokumen						3 Dokumen			
2	13	2	01.01	2	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat			2 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	144,703,125	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	2	01.01	3	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa			1 Dokumen	99,999,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	2	01.01	4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa			12 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Unit	275,625,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					499,975,700						300,000,000		
2	13	3	01.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					499,975,700						300,000,000		
2	13	3	01.01	1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota			5 Dokumen	99,996,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		5 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	3	01.01	2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan			5 Dokumen	99,999,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		5 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
2	13	3	01.01	3	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	299,979,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						1,177,831,111							3,756,544,360	
2	13	4	01.01		Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						1,177,831,111							3,756,544,360	
2	13	4	01.01	1	Facilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	86,821,875	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	2	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				2 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	115,762,500	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	3	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan				2 Dokumen	19,998,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	86,821,875	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	4	Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Penguasaan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Penguasaan Pembangunan Desa				5 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Dokumen	68,000,000	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	5	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				2 Dokumen	67,998,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	68,000,000	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	6	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Aset Desa				2 Dokumen	67,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	68,000,000	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	7	Facilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				50 Orang	19,999,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		50 Orang	86,821,875	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	8	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	558,765,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	1,451,166,235	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	9	Facilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	99,996,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dina				60 Orang	99,977,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		60 Orang	100,000,000	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				50 Orang	67,998,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		50 Orang	68,000,000	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				6 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		6 Dokumen	347,287,500	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	13	Pelaksanaan Pengawasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa				2 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	57,881,250	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	14	Pembinaan dan Penguasaan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembinaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Penguasaan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembinaan Desa				5 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Dokumen	57,881,250	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	15	Pembinaan dan Penguasaan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Penguasaan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				12 Dokumen	67,999,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		12 Dokumen	68,000,000	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	01.01	16	Facilitasi Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Pengawasan Batas Desa				10 Dokumen	19,997,600	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan		10 Dokumen	57,881,250	DINAS PEMERDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Pernakot Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17			
								Semua Kabupaten, Semua Kelurahan	UNDUK (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			MASYARAKAT DAN DESA				
2	13	4	01.01	17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	2 Dokumen	0	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	115,762,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	4	01.01	18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	7 Dokumen	0	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7 Dokumen	115,762,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	4	01.01	19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2 Dokumen	0	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	86,821,875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	4	01.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	6 Desa	0	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Desa	231,525,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	4	01.01	21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	0	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	231,525,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	4	01.01	22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	5 Dokumen	86,800,411	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Dokumen	86,821,875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									1,709,492,390				
2	13	5	01.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota									1,709,492,390				
2	13	5	01.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	99,999,700	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	4 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	5	01.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	0	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia	5 Dokumen	115,762,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	5	01.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	15 Lembaga	99,997,800	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia	15 Lembaga	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	5	01.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	0	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	5 Unit	202,957,140	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	5	01.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	549,995,400	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	5	01.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	664,073,800	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	2 Laporan	800,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	5	01.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	2,160,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia	2 Laporan	149,916,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	5	01.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan dan Perlingungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan dan Perlingungan Masyarakat Desa	2 Dokumen	199,967,800	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	2 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	5	01.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Laporan	599,999,100	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	6 Laporan	120,856,250	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasagat Daerah Penasagngg Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		Penasihat	
														Nasional						Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan pelayanan publik					
2	15	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0						1,000,000,000			
2	15	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5,184,969,164						5,148,806,823			
2	15	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	381,642,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	345,479,250	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	4,803,326,264		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	4,803,327,273	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7,804,454,928						10,304,520,750			
2	15	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				53 Unit	804,455,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	53 Unit	804,520,750	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	01.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6,999,999,928		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1 Unit	9,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						3,750,673,645						13,594,209,597			
2	15	2	01.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi						0						600,000,000			
2	15	2	01.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	1 Dokumen	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	01.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	01.01	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	1 Laporan	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	01.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi						1,296,185,425						3,946,186,597			
2	15	2	01.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	01.02	2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				0 Unit	1,296,185,425		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	0 Unit	1,296,186,597	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	01.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	01.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	01.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B						931,564,640						4,975,000,000			
2	15	2	01.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				2 Dokumen	349,730,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	2 Dokumen	350,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	01.03	2	Pembangunan Gedung Terminal						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	01.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan				3 Unit	581,834,640		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	3 Unit	575,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peraangat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
2	15	2	01.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah				3,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	01.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah				50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	01.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						1,201,952,780							2,323,023,000	
2	15	2	01.05	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	49,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah	1 Laporan		50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	01.05	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah				1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	01.05	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						0			2. Penguatan infrastruktur wilayah				100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	01.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				12 Laporan	28,929,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah	12 Laporan		50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	01.05	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	1,123,023,780		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah	1 Laporan		1,123,023,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	01.06		Penetapan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi						21,070,800							400,000,000	
2	15	2	01.06	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah				100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	01.06	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah				100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	01.06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah				100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	01.06	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terwasi				1 Laporan	21,070,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah	1 Laporan		100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	01.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0							200,000,000	
2	15	2	01.08	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah				100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	01.08	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah				100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	01.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						240,000,000							240,000,000	
2	15	2	01.09	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	140,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah	1 Dokumen		140,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	01.09	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah	1 Dokumen		100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	01.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0							200,000,000	
2	15	2	01.10	1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah				100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	01.10	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah				100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	01.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0							100,000,000	
2	15	2	01.11	1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewangan Provnsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah				50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	01.11	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah				50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	01.12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0							200,000,000	
2	15	2	01.12	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI	2. Penguatan infrastruktur wilayah				100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17					
2	15	3	01.10	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		100,000,000		DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	3	01.10	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		500,000,000		DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	3	01.10	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		100,000,000		DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	5			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						174,999,800							575,000,000		
2	15	5	01.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian						74,999,800							275,000,000		
2	15	5	01.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	74,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		1 Dokumen	75,000,000		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5	01.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		100,000,000		DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	5	01.01	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		100,000,000		DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	5	01.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah						0						100,000,000			
2	15	5	01.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		50,000,000		DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	5	01.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		50,000,000		DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	5	01.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melintasi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						100,000,000						200,000,000			
2	15	5	01.03	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		1 Dokumen	100,000,000		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5	01.03	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		100,000,000		DINAS PERHUBUNGAN	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						58,453,081,823						66,215,889,967			
2	16	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	%		%	100 %	15,491,480,289						100 %	18,764,999,999		
2	16	1			Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	%		%	100 %								100 %			
2	16	1			Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%	100 %								100 %			
2	16	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tiga Tahun	%		%	100 %	349,296,100						100 %	610,000,000		
2	16	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	319,999,700	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen Perencanaan Diskominfo-SP Prov. Sulsel	6 Dokumen	550,000,000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	29,296,400	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen Perencanaan Diskominfo-SP Prov. Sulsel	12 Laporan	60,000,000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan		Laporan	2 Laporan	11,613,193,165						2 Laporan	12,849,999,999		
2	16	1	01.02	1	Penyetiaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	11,363,193,165	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Diskominfo-SP Prov. Sulsel	90 Orang/ Bulan	12,499,999,999		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Diskominfo-SP Prov. Sulsel	0 Dokumen	350,000,000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	92,000,000						2 Laporan	155,000,000		
2	16	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Diskominfo Sulsel		80,000,000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	92,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Diskominfo Sulsel	2 Orang	75,000,000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	2,129,952,874						2 Laporan	2,400,000,000		
2	16	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dielakkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dielakkan				3 Paket	116,607,250		PENDAPATAN ASLI			ASN Diskominfo-SP Prov. Sulsel	3 Paket	300,000,000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Pemerang Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
													DAERAH (PAD)						STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	01.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporn	2,013,345,624		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Diskominfo-SP Prov Sulsel	4 Laporan	2,100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0							1,200,000,000	
2	16	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	1,200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	1,307,038,150						3 Laporan	1,550,000,000	
	16	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				22 Unit	1,136,998,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Diskominfo-SP Prov Sulsel	22 Unit	1,100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40,097,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Diskominfo-SP Prov Sulsel	1 Unit	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				59 Unit	129,942,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Diskominfo-SP Prov Sulsel	59 Unit	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat secara elektronik	%		%	90 %	34,923,430,160						90 %	36,900,889,968	
						Persentase Tindak Lanjut Pengaduan pada Baruga Layanan masyarakat secara elektronik	%		%	100 %							100 %		
2	16	2	01.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	34,923,430,160						2 Dokumen	36,900,889,968	
2	16	2	01.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				4 Dokumen	337,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Media dan Publik	4 Dokumen	500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	01.01	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				4 Dokumen	522,016,880		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Media dan Publik	4 Dokumen	350,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	01.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	597,016,780		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Media dan Publik	4 Dokumen	750,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	01.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	12,933,776,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Media dan Publik	4 Dokumen	17,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	01.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				0 Dokumen	7,711,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Media dan Publik	0 Dokumen	2,917,155,560	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				4 Dokumen							4 Dokumen		
2	16	2	01.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				4 Layanan	11,346,922,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Media dan Publik	4 Layanan	12,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	01.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				4 Dokumen	1,474,697,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Media dan Publik	4 Dokumen	2,883,734,408	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Nilai		Nilai	3,1 Nilai	8,038,171,374						3,1 Nilai	10,550,000,000	
2	16	3	01.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Domain dan Sub Domain Pada Pemprov. Sulsel	Laporan		Laporan	1 Laporn	6,012,010,232						1 Laporan	7,500,000,000	
2	16	3	01.01	3	Penyenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				53 Unit	6,012,010,232	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Prov. Sulsel	53 Unit	7,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	3	01.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	%		%	100 %	2,026,161,142						100 %	3,050,000,000	
2	16	3	01.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				76 Unit	293,674,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Prov. Sulsel	76 Unit	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	3	01.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				4 Dokumen	1,131,075,492	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Prov. Sulsel	4 Dokumen	2,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	3	01.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyenggaraan SPBE				2 Dokumen	601,411,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Lingkup Prov. Sulsel	2 Dokumen	750,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						749,998,612	Minasa Kelurahan						1,110,000,000			
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%		%	80 %	749,998,612							80 %	1,110,000,000		
2	20	2	01.01		Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Laporan		Laporan	4 Laporan	749,998,612							4 Laporan	1,110,000,000		
2	20	2	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				4 Dokumen	199,999,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Bidang Persandian Prov Sulsel dan Kab/Kota	4 Dokumen	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	20	2	01.01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				15 Orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Bidang Persandian Prov Sulsel dan Kab/Kota	15 Orang	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	20	2	01.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				4 Dokumen	124,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Bidang Persandian Prov Sulsel dan Kab/Kota	4 Dokumen	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	20	2	01.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				53 Orang	149,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Bidang Persandian Prov Sulsel dan Kab/Kota	53 Orang	220,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	20	2	01.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	99,999,812	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Bidang Persandian Prov Sulsel dan Kab/Kota	1 Unit	175,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	20	2	01.01	6	Penyelenggaraan Otisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun				4 Dokumen	74,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Bidang Persandian Prov Sulsel dan Kab/Kota	4 Dokumen	15,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						799,993,982							1,100,000,000			
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Keamanan KAMI	%		%	50 %	799,993,982							50 %	1,100,000,000		
2	21	2	01.01		Penyenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Area Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Area		Area	6 Area	642,086,752							6 Area	880,000,000		
2	21	2	01.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				4 Laporan	95,799,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Bidang Persandian	4 Laporan	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	21	2	01.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				4 Laporan	278,169,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Bidang Persandian	4 Laporan	350,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	21	2	01.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				53 Perangkat Daerah	268,117,152	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Bidang Persandian	53 Perangkat Daerah	350,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	21	2	01.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	187,907,200							3 Jenis	280,000,000		
2	21	2	01.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				53 Perangkat Daerah	157,907,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Bidang Persandian Prov Sulsel dan Kab/Kota	53 Perangkat Daerah	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						32,781,954,573							47,749,500,003			
2	17	1			PROGRAM PERURUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14,982,310,573							30,999,500,000			
2	17	1	01.01		Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						344,697,000							205,000,000			
2	17	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						232,352,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				75,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	17	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						28,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				15,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	17	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						36,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				15,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	17	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						48,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	17	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10,263,620,973							14,065,000,000			
2	17	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	10,187,685,973	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				0 Orang/ Bulan	14,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															pemerintahan dan pelayanan publik					
2	17	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						75,935,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		65,000,000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	1	01.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0							10,000,000		
2	17	1	01.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10,000,000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						407,610,400							838,000,000		
2	17	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				300 Paket	295,675,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		300 Paket		375,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						6,635,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				6,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						5,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				6,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Orang		150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,286,146,000							4,101,800,000		
2	17	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	199,346,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Paket		1,500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Paket		1,400,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				30,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				250 Laporan	51,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		250 Laporan		1,100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				6,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396,250,000							900,000,000		
2	17	1	01.07	5	Pengadaan Mebel						336,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				800,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud						60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,089,996,200							6,350,000,000		
2	17	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1,396,953,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				1,850,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				80 Laporan	693,043,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		80 Laporan		3,500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						164,090,000							6,830,000,000		
2	17	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		25 Unit		230,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	01.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						144,090,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan				550,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Prioritas Daerah	Target		Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
2	17	1	01.09	10	Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pansarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Pansarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Unit	5,050,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						123,730,000							1,050,000,000	
2	17	2	01.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						120,530,000							550,000,000	
2	17	2	01.01	1	Facilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				0 Unit Usaha	120,530,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		0 Unit Usaha	550,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	17	2	01.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						3,200,000							500,000,000	
2	17	2	01.02	1	Facilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				100 Unit Usaha	3,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		100 Unit Usaha	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						166,575,000							1,050,000,000	
2	17	3	01.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						166,575,000							1,050,000,000	
2	17	3	01.01	1	Memastikan Akuntabilitas, Keperayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Keperayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUM dan Masyarakat				200 Dokumen	166,575,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		200 Dokumen	550,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	17	3	01.01	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel				150 Unit Usaha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		150 Unit Usaha	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						59,260,000							750,000,000	
2	17	4	01.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						59,260,000							750,000,000	
2	17	4	01.01	1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jati diri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jati diri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi				100 Unit Usaha	59,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		100 Unit Usaha	300,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	17	4	01.01	2	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan				150 Unit Usaha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		150 Unit Usaha	450,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						962,262,000							1,000,000,003	
2	17	5	01.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						962,262,000							1,000,000,003	
2	17	5	01.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				750 Orang	962,262,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		750 Orang	1,000,000,003	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasngkat Daerah Penasnggug Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						0							1,200,000,000	
2	17	6	01.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Listas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0							1,200,000,000	
2	17	6	01.01	1	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha				200 Unit Usaha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		200 Unit Usaha	550,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	17	6	01.01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				300 Unit Usaha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		300 Unit Usaha	650,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	17	7			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						7,715,562,000							7,000,000,000	
2	17	7	01.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						7,715,562,000							7,000,000,000	
2	17	7	01.01	1	Memumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Persepsi Lapangan Kerja, Penataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguatan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Persepsi Lapangan Kerja, Penguatan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguatan Kemiskinan				0 Unit Usaha	7,715,562,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		0 Unit Usaha	7,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						8,802,255,000							4,700,000,000	
2	17	8	01.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						8,802,255,000							4,700,000,000	
2	17	8	01.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				0 Unit Usaha	8,802,255,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		0 Unit Usaha	4,700,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						23,025,368,733							25,629,086,697	
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18,706,869,821							21,076,161,697	
2	18	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						493,999,700							534,700,000	
2	18	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	220,000,000		Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		3 Dokumen	231,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	41,999,800		Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	44,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	32,000,000		Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	44,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	42,000,000		Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	44,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	32,000,000		Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	44,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	26,000,000		Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		2 Laporan	27,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Pemerikat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
2	18	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	99,999,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		6 Laporan	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12,579,999,755							13,188,000,000	
2	18	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/ Bulan	12,410,000,055	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		86 Orang/ Bulan	13,030,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	169,999,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	157,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						12,000,000							12,600,000	
2	18	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	6,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Laporan	6,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						367,775,000							386,400,000	
2	18	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				86 Paket	249,775,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		86 Paket	262,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	68,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	71,400,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	52,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2,478,281,750							2,497,211,697	
2	18	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		10 Paket	52,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1,199,996,950	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		12 Paket	1,155,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	72,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		6 Paket	75,600,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				7 Laporan	49,988,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		7 Laporan	52,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	1,106,296,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		3 Laporan	1,161,611,697	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,894,854,416							1,701,000,000	
2	18	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	684,987,024	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		12 Laporan	651,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,209,567,392	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		12 Laporan	1,050,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						880,259,200							2,756,250,000	
2	18	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	149,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		15 Unit	157,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		0 Unit	78,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
						Jumlah Perlakuan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki				5 Unit							5 Unit		
2	18	1	01.09	9	Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Unit	1,260,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	01.09	10	Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi				22 Unit	531,259,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		22 Unit	1,260,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						738,499,900							775,425,000	
2	18	2	01.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						223,999,900							235,200,000	
2	18	2	01.01	1	Peraturan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	178,999,900	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	187,950,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	2	01.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah				1 Kegiatan usaha	45,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Kegiatan usaha	47,250,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	2	01.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi						514,500,000							540,225,000	
2	18	2	01.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	55,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	57,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	2	01.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi investasi dan Peluang Usaha Provinsi				10 Dokumen	459,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		10 Dokumen	482,475,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						1,269,999,800							1,222,500,000	
2	18	3	01.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						1,269,999,800							1,222,500,000	
2	18	3	01.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	470,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Dokumen	472,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	3	01.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				4 Dokumen	799,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		4 Dokumen	750,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						1,354,999,800							1,743,000,000	
2	18	4	01.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						1,354,999,800							1,743,000,000	
2	18	4	01.02	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi				27000 Pelaku Usaha	899,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		27000 Pelaku Usaha	1,365,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	4	01.02	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi				27000 Kegiatan Usaha	225,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		27000 Kegiatan Usaha	189,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	4	01.02	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengolahan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengolahan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi				110 Orang	230,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		110 Orang	189,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						804,999,412							644,000,000	
2	18	5	01.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						804,999,412							644,000,000	
2	18	5	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				70 Kegiatan usaha	239,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		70 Kegiatan usaha	189,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	5	01.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				70 Pelaku Usaha	329,999,612	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		70 Pelaku Usaha	225,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	5	01.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				70 Kegiatan usaha	235,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		70 Kegiatan usaha	230,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktikan Matrik Rencana Tahun 2024		Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							150,000,000				168,000,000			
2	18	6	01.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi							150,000,000				168,000,000			
2	18	6	01.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	150,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	1 Dokumen	168,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							96,266,929,874					625,500,000		
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik	%		%	100 %	17,935,044,844					100 %	476,000,000		
						Penentase penyusunan rencana berdasarkan LHP	%		%	100 %						100 %			
						Penentase realisasi kegiatan Perangkat Daerah	%		%	100 %						100 %			
2	19	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tepat waktu	%		%	100 %	640,000,000					100 %	470,000,000		
2	19	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	380,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta data terpelah	6 Dokumen	315,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah peserta Forum Perangkat Daerah				100 orang						100 orang			
2	19	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	85,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta data terpelah	1 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	85,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta data terpelah	1 Dokumen	85,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	19	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta data terpelah	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta data terpelah	1 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	30,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta data terpelah	12 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	30,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta data terpelah	7 Laporan	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	13,360,725,468						100 %	6,000,000	
2	19	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ Bulan	13,195,725,468	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan	115 Orang/ Bulan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan	0 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	50,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan	12 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	30,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan	12 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan	1 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan	1 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	40,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan	12 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
2	19	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	5,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan	0 Dokumen	6,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	19	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen aset milik daerah	%		%	100 %	17,000,000						100 %	0	
2	19	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	12,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pendapatan daerah	%		%	100 %	105,000,000						100 %	0	
2	19	1	01.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				0 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	19	1	01.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	105,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	%		%	100 %	335,720,000						100 %	0	
2	19	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket	93,720,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Paket	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				115 Paket							115 Paket		
2	19	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	5,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerangik Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
2	19	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	25,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	200,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				126 Orang							126 Orang		
						Presentasi pemenuhan administrasi umum kantor	%		%	100 %	1,000,226,000						100 %		0
2	19	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Paket	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	150,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Paket	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	2,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Paket	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	78,596,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Paket	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	2,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Paket	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	250,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	505,630,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 bulan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	10,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah menunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	1,000,000						100 %		0
2	19	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Paket	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	1,956,030,876						100 %		0
2	19	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	519,998,628	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peraungkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
2	19	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				44 Laporan	1,436,032,248	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	44 Laporan	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	519,342,500						100 %	0	
2	19	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	240,510,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	203,832,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	25,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit							5 Unit		
2	19	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit							2 Unit		
2	19	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%		%	0.25 %	4,112,712,930						0.25 %	149,500,000	
						Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%		%	2.03 %							2.03 %		
2	19	2	01.01		Pengadaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase pemuda kader yang diberdayakan	%		%	0.46 %	2,822,712,930						0.46 %	149,500,000	
2	19	2	01.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				210 Orang	77,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		Pemuda pelopor, wirasusaha muda, dan pemuda kader (putra/putri)	210 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	01.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirasaha Muda Provinsi	Jumlah Wirasaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				500 Orang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		Pemuda pelopor, wirasusaha muda, dan pemuda kader (putra/putri)	500 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	01.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				650 Orang	569,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		Pemuda pelopor, wirasusaha muda, dan pemuda kader (putra/putri)	650 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	01.01	4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				75 Orang	1,176,262,930	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		Pemuda pelopor, wirasusaha muda, dan pemuda kader (putra/putri)	75 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	01.01	5	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		Pemuda pelopor, wirasusaha muda, dan pemuda kader (putra/putri)	0 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	01.01	6	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan				4 Dokumen	149,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		Pemuda pelopor, wirasusaha muda, dan pemuda kader (putra/putri)	4 Dokumen	149,500,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	01.01	7	Pemenuhan Hak Setup Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				0 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemuda pelopor, wirasusaha muda, dan pemuda kader (putra/putri)	0 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	01.01	8	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi				1 Dokumen	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		Pemuda pelopor, wirasusaha muda, dan pemuda kader (putra/putri)	1 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	01.01	9	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota				500 Orang	300,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pembangunan manusia		Pemuda pelopor, wirasusaha muda, dan pemuda kader (putra/putri)	500 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	01.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan	%		%	2.61 %	1,290,000,000						2.61 %	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
2	19	2	01.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				200 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda	200 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	01.02	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi				5 Dokumen	1,140,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pembangunan manusia	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda	5 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%		%	200 %	73,469,172,100						200 %	0	
						Persentase peningkatan prestasi olahraga	%		%	200 %							200 %		
2	19	3	01.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pembinaan atlet pelajar	%		%	9.47 %	64,100,000,000						9.47 %	0	
2	19	3	01.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Dielenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Dielenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan dan Dunia Usaha				3 Unit	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet PPLP, Atlet SMANKO (putra/putri) dan Sarana Prasarana Olahraga	3 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	01.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perikumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perikumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				0 Dokumen	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet PPLP, Atlet SMANKO (putra/putri) dan Sarana Prasarana Olahraga	0 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perikumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				5 Dokumen							5 Dokumen		
2	19	3	01.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan				15 Unit	63,250,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet PPLP, Atlet SMANKO (putra/putri) dan Sarana Prasarana Olahraga	15 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	01.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi	Atlet		Atlet	300 Atlet	4,172,672,100						300 Atlet	0	
2	19	3	01.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi				0 Dokumen	4,095,172,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kejuaraan olahraga single event dan multi event	0 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi				15 Dokumen							15 Dokumen		
2	19	3	01.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi				1 Dokumen	500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kejuaraan olahraga single event dan multi event	1 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	01.02	3	Partisipasi dan Keterlibatan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event				100 Orang	77,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kejuaraan olahraga single event dan multi event	100 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	01.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase atlet PPOD potensial	%		%	100 %	196,500,000						100 %	0	
2	19	3	01.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diateksi				100 Orang	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet dan pelatih PPOD Sulawesi Selatan	100 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	01.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				3 Pelatid	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet dan pelatih PPOD Sulawesi Selatan	3 Pelatid	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	01.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				100 Orang	46,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet dan pelatih PPOD Sulawesi Selatan	100 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	01.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan				5 Orang	500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet dan pelatih PPOD Sulawesi Selatan	5 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	01.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				0 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlet dan pelatih PPOD Sulawesi Selatan	0 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	01.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pembinaan dan pengembangan cabang olahraga	%		%	100 %	5,000,000,000						100 %	0	
2	19	3	01.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Dokumen	5,000,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	01.04	3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				0 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Keolahragaan	0 Dokumen	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	01.04	4	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				0 Organisasi	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Keolahragaan	0 Organisasi	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	2	3	4																5	6	7	8
2	19	4								PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka aktif	%	%	100 %		750,000,000						
2	19	4	01.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pembinaan organisasi kepramukaan	%	%	100 %	750,000,000						100 %	0					
2	19	4	01.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya			25 Organisasi	500,000,000	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25 Organisasi	0	DINAS KEPEREMUDAAN DAN OLARAHAGA				
2	19	4	01.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas			2 Unit	50,000,000	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Unit	0	DINAS KEPEREMUDAAN DAN OLARAHAGA				
2	19	4	01.01	4	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya			0 Orang	0	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Orang	0	DINAS KEPEREMUDAAN DAN OLARAHAGA				
2	19	4	01.01	5	Penyenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi			2 Laporan	200,000,000	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	0	DINAS KEPEREMUDAAN DAN OLARAHAGA				
2	19	4	01.01	8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan			0 Organisasi	0	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Organisasi	0	DINAS KEPEREMUDAAN DAN OLARAHAGA				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					25,784,289,252							41,070,478,257					
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					18,020,515,362							29,548,608,445					
2	22	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					172,278,300							450,781,316					
2	22	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	118,214,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	385,558,635	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN				
2	22	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					8,228,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			8,698,536	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN				
2	22	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					7,208,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			7,609,895	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN				
2	22	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	3,370,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Laporan	12,705,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN				
2	22	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35,257,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			36,209,250	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN				
2	22	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13,018,267,786							13,287,465,765					
2	22	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			135 Orang/ Bulan	12,930,531,486		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		135 Orang/ Bulan	13,224,560,969	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN				
2	22	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	18,618,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Dokumen	19,530,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN				
2	22	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	4,998,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Laporan	5,250,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN				
2	22	1	01.02	6	Pengadaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 Dokumen	35,310,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	7,875,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN				
2	22	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			18 Laporan	22,308,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		18 Laporan	23,424,786	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN				
2	22	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	6,499,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	6,825,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN				
2	22	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0							42,966,000					
2	22	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	10,799,250	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian ASU RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	22	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Laporan	23,677,500	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN	
2	22	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Laporan	8,489,250	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN	
2	22	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					113,100,000						407,893,500		
2	22	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			5 Unit	0			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Unit	31,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN	
2	22	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			135 Paket	113,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		135 Paket	157,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			8,893,500	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Orang	210,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					575,053,700						1,164,396,660		
2	22	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			14 Paket	20,293,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		14 Paket	10,751,265	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	13,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Paket	125,787,795	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	65,803,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Paket	197,263,185	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	18,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Paket	36,456,840	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	14,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	7,875,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	136,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	34,715,625	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			55 Laporan	305,437,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		55 Laporan	541,546,950	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	210,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0						8,283,330,731		
2	22	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Unit	990,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	0				1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Unit	5,701,911,356	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Unit	1,591,419,375	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3,383,126,184						4,459,826,413		
2	22	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	981,619,560		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	1,225,641,065	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	2,401,506,624		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	3,233,885,348	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
2	22	1	01.09		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
2	22	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						758,689,392							1,452,248,070	
2	22	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pujaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pujaknya				1 Unit	125,830,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	115,607,415	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinasnya				23 Unit	363,087,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		23 Unit	499,550,205	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	105,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	72,271,892		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	574,590,450	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				45 Unit	147,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		45 Unit	157,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						707,535,200							1,537,182,231	
2	22	2	01.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						115,732,000							260,694,500	
2	22	2	01.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				10 Objek	115,732,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		10 Objek	260,694,500	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	2	01.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						591,803,200							1,276,487,731	
2	22	2	01.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	70,304,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		2 Objek	421,322,999	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	2	01.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				4 Laporan	521,498,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		4 Laporan	855,164,732	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						2,298,499,700							387,800,000	
2	22	3	01.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2,298,499,700							387,800,000	
2	22	3	01.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				937 Orang	2,298,499,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		937 Orang	357,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						84,292,400							266,200,000	
2	22	4	01.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi						84,292,400							266,200,000	
2	22	4	01.01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				60 Orang	84,292,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		60 Orang	266,200,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						756,582,200							2,379,096,731	
2	22	5	01.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						140,520,000							962,846,731	
2	22	5	01.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapan				5 Objek	140,520,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		5 Objek	962,846,731	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	5	01.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						616,032,200							1,416,250,000	
2	22	5	01.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				0 Objek	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		0 Objek	371,250,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	5	01.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	393,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		2 Objek	660,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	5	01.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				1 Objek	223,032,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		1 Objek	385,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						3,916,894,390							6,981,890,850	
2	22	6	01.01		Pengelolaan Museum Provinsi						3,916,894,390							6,981,890,850	
2	22	6	01.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				350 Unit	1,189,889,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		350 Unit	1,309,894,333	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	6	01.01	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		0 Orang	60,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	6	01.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				7 Unit	2,063,005,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		7 Unit	3,162,491,937	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	6	01.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				6 Unit	663,999,640		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan		6 Unit	1,734,004,580	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN
2	22	6	01.01	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI		3. Pengembangan		0 Unit	715,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARAWISATAAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
													Nasional	Daerah	12			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							DAERAH (PAD)			kawasan pusat pertumbuhan			
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				8,743,389,200							99,811,376,108		
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				2,540,781,800							12,727,407,489		
3	26	2	01.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				2,180,249,600							1,312,800,000		
3	26	2	01.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		7 Lokasi	2,180,249,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	7 Lokasi		1,312,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	2	01.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				0							315,000,000		
3	26	2	01.02	2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0 Dokumen		315,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	2	01.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				229,746,400							10,078,107,459		
3	26	2	01.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		0 Lokasi	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0 Lokasi		9,617,287,050	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	2	01.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		1 Dokumen	98,746,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	1 Dokumen		210,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	2	01.03	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		2 Lokasi	131,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	2 Lokasi		247,820,409	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	2	01.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				130,785,800							1,024,800,000		
3	26	2	01.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		3 Laporan	67,859,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	Penguatan infrastruktur wilayah	3 Laporan		262,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	2	01.04	5	Facilitasi Standartisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standartisasi dan Sertifikasi		3 Unit Usaha	62,926,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	Penguatan infrastruktur wilayah	3 Unit Usaha		762,300,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				4,131,748,200							25,762,085,108		
3	26	3	01.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				4,131,748,200							25,762,085,108		
3	26	3	01.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		4 Dokumen	2,803,608,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	4 Dokumen		1,597,200,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	3	01.01	2	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		5 Laporan	937,855,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	5 Laporan		23,161,141,158	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	3	01.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Dokumen	199,627,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	1 Dokumen		550,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	3	01.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		1 Dokumen	190,657,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	1 Dokumen		453,743,950	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				0							440,000,000		
3	26	4	01.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				0							440,000,000		
3	26	4	01.01	2	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik		0 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0 Laporan		440,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				2,070,829,200							60,581,883,538		
3	26	5	01.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				707,331,200							60,416,883,538		
3	26	5	01.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya		217 Orang	191,519,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	217 Orang		24,242,409,411	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	5	01.01	2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		450 Orang	444,811,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	450 Orang		35,679,474,127	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	5	01.01	4	Facilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	0 Orang		275,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	5	01.01	9	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		90 Orang	71,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	90 Orang		220,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
3	26	5	01.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				1,363,498,000							165,000,000		
3	26	5	01.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		400 Orang	1,363,498,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	400 Orang		165,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penasang Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	23	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
2	23	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						36,840,317,769							47,320,000,000	
2	23	1		PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	28,186,196,769						6 Dokumen	38,470,000,000	
2	23	1	01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	440,681,700						6 Dokumen	1,040,000,000	
2	23	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	196,447,500		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia	OPD		6 Dokumen	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	18,453,500		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia	OPD		1 Dokumen	70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	17,201,000		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia	OPD		1 Dokumen	110,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	10,905,100		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia	OPD		1 Dokumen	65,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	15,000,000		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia	OPD		1 Dokumen	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Laporan	25,358,500		Pajak Daerah			OPD	6 Laporan	85,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Laporan	157,316,100		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia	OPD		6 Laporan	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25,143,527,873							30,950,000,000	
2	23	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			180 Orang/ Bulan	24,927,163,873		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	SKPD	180 Orang/ Bulan	30,000,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	5,000,000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	SKPD	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	37,903,000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	SKPD	12 Dokumen	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	76,325,000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	SKPD	12 Dokumen	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	51,997,500		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	SKPD	1 Laporan	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			20 Laporan	10,000,000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	SKPD	20 Laporan	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	35,138,500		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	SKPD	1 Dokumen	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,000,000							200,000,000	
2	23	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	2,000,000		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia			1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1,000,000		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia			1 Laporan	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0 Laporan	0		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia			0 Laporan	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen	0		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia			0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0							150,000,000	
2	23	1	01.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			0 Dokumen	0		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia			0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah			0 Dokumen	0		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia			0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah			0 Laporan	0			5. Pembangunan manusia			0 Laporan	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						24,650,000							900,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
2	23	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5 Unit	5,000,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	ASN OPD		5 Unit	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2,000,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	ASN OPD		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	5,000,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	ASN OPD		12 Dokumen	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5,000,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	ASN OPD		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	2,650,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	ASN OPD		10 Orang	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	ASN OPD		0 Orang	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	5,000,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	ASN OPD		50 Orang	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dos Arsip	Dos		Dos	5 Dos	611,429,800							5 Dos	1,730,000,000	
2	23	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	93,950,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	SKPD		7 Paket	160,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	239,490,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	SKPD		20 Paket	750,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	20,000,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	SKPD		10 Paket	70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	14,400,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	SKPD		12 Laporan	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	243,589,800		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	SKPD		12 Laporan	600,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0								1,100,000,000	
2	23	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia			0 Unit	700,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia			0 Unit	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia			0 Paket	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Laporan		Laporan	1 Laporan	853,517,396							1 Laporan	1,100,000,000	
2	23	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	853,517,396		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	SKPD		12 Laporan	1,100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,079,390,000								1,300,000,000	
2	23	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	400,390,000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	SKPD		14 Unit	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				6 Unit	179,000,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	SKPD		6 Unit	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	SKPD		0 Unit	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	500,000,000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	SKPD		5 Unit	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan Daerah	tahun		tahun	1 tahun	7,850,911,000							1 tahun	5,850,000,000	
						Jumlah Pengunjung Perpustakaan Konvensional dan Elektronik akan Konvensional	Orang		Orang	150000 Orang								150000 Orang		
2	23	2	01.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						7,770,811,000								4,950,000,000	
2	23	2	01.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM - Information Technology Service)				4 Perpustakaan	62,967,400		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia	Pengguna Layanan Perpustakaan	4 Perpustakaan	600,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	23	2	01.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				20 Perpustakaan	5,500,000,000		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia	Pengguna Layanan Perpustakaan	20 Perpustakaan	1,500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	23	2	01.01	3	Pengembangan Kichsan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang dikembangkan				100 Eksemplar	5,000,000		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia	Pengguna Layanan Perpustakaan	100 Eksemplar	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	23	2	01.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				100 Perpustakaan	75,000,000		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia	Pengguna Layanan Perpustakaan	100 Perpustakaan	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17					
2	23	2	01.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				10 Perpustakaan	15,000,000		Pajak Daerah			Pengguna Layanan Perpustakaan	10 Perpustakaan	300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	01.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				0 Orang	0			5. Pembangunan manusia		Pengguna Layanan Perpustakaan	0 Orang	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	01.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peminatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peminatan Koleksi				4 Perpustakaan	1,200,000,000		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia		Pengguna Layanan Perpustakaan	4 Perpustakaan	1,500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	01.01	8	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				5 Perpustakaan	30,000,000		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia		Pengguna Layanan Perpustakaan	5 Perpustakaan	300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	01.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				100 Eksemplar	775,000,000		Pajak Daerah			Pengguna Layanan Perpustakaan	100 Eksemplar	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	01.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				10 Dokumen	107,543,600		Pajak Daerah			Pengguna Layanan Perpustakaan	10 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	01.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembudayaan gemar membaca	Orang		Orang	100 Orang	80,400,000						100 Orang	900,000,000		
2	23	2	01.02	1	Sosialisai Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				20 Lokus	75,000,000		Pajak Daerah			Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat umum	20 Lokus	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	01.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				60 Orang	5,400,000		Pajak Daerah			Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat umum	60 Orang	300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	01.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				0 Orang	0		Pajak Daerah			Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat umum	0 Orang	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	%		%	100 %	833,210,000						100 %	3,000,000,000		
2	23	3	01.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi	Macam		Macam	3 Macam	0						3 Macam	1,200,000,000		
2	23	3	01.01	1	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Keputahan Serah Simpan KCKR				0 Eksemplar	0		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia		Penerbit Lokal	0 Eksemplar	700,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3	01.01	2	Pemberitan Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Pemberita Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				5 Penerbit	0		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia		Penerbit Lokal	5 Penerbit	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3	01.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang Diterbitkan			Buku	100 Buku	815,000,000						100 Buku	400,000,000		
2	23	3	01.02	1	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang Diterbitkan				200 Entry	15,000,000		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia		mayarakat umum	200 Entry	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3	01.02	2	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				2 Naskah	800,000,000		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia		mayarakat umum	2 Naskah	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3	01.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	umlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang		Orang	2 Orang	0						2 Orang	600,000,000		
2	23	3	01.03	1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno				0 Orang	0		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia			0 Orang	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3	01.03	2	Pengembangan, Pengolahan dan Penghimpunan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Dilayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Dilayagunakan				0 Eksemplar	0		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia			0	350,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3	01.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi, Di Lakukan pengadaaan dan pengolah serta penyangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Exp		Exp	100 Exp	18,210,000						100 Exp	800,000,000		
2	23	3	01.04	1	Seleksi dan Pengadaaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				100 Eksemplar	18,210,000		Pajak Daerah			Masyarakat Umum	100 Eksemplar	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3	01.04	2	Pengadaan dan Penyangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				0 Eksemplar	0		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia		Masyarakat Umum	0 Eksemplar	300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						3,012,714,836							8,110,000,000		
2	24	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Dokumen Administrasi Umum Perangkat daerah	tahun		tahun	1 tahun	2,050,668,336						1 tahun	4,100,000,000		
2	24	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dos Arsip	Dos		Dos	5 Dos	11,415,000						5 Dos	100,000,000		
2	24	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	11,415,000		Pajak Daerah	5. Pembangunan manusia		SKPD	5 Dokumen	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Laporan		Laporan	1 Laporan	2,039,253,336						1 Laporan	4,000,000,000		
2	24	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,039,253,336		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	SKPD	12 Laporan	4,000,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baik	OPD		OPD	10 OPD	962,046,500						10 OPD	3,460,000,000		
2	24	2	01.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah OPD yang Di awasi	OPD		OPD	10 OPD	156,068,500						10 OPD	1,110,000,000		
2	24	2	01.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan				50 Berkas	0		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia		50 Berkas	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	2	01.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				200 Berkas	12,120,000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia		200 Berkas	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	2	01.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				24 Laporan	143,948,500		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	5. Pembangunan manusia		24 Laporan	1,000,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
																			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
2	24	2	01.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Naskah		Naskah	1 Naskah	417,662,000					1 Naskah	850,000,000			
2	24	2	01.02	1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI			1 Arsip	117,662,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	Perangkat Daerah, BUMN, Masyarakat Umum	1 Arsip	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	2	01.02	2	Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses			2 Arsip	300,000,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	Perangkat Daerah, BUMN, Masyarakat Umum	2 Arsip	800,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	2	01.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah LKD		LKD	10 LKD	388,316,000						10 LKD	1,500,000,000		
					Jumlah Pengunjung layanan kearsipan			orang	100 orang							100 orang			
2	24	2	01.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			300 Pengguna	200,000,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	Lembaga Kearsipan Daerah	300 Pengguna	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	2	01.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			10 Laporan	188,316,000		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	Lembaga Kearsipan Daerah	10 Laporan	1,000,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemilisan, Penertapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Rempuh) Tahun	ML		ML	1 ML	0					1 ML	450,000,000		
					Perantara Dokumen Arsip Daerah yang diamankan dan dilestarikan		%		%	100 %						100 %			
2	24	3	01.01		Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Volume Arsip	ML		ML	1 ML	0					1 ML	200,000,000		
2	24	3	01.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan			0 Berkas	0		Pajak Daerah		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lembaga/ Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	0 Berkas	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	3	01.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berakala Provinsi	Jumlah Volume Arsip yang diselamatkan	ML		ML	4 ML	0					4 ML	250,000,000		
2	24	3	01.02	1	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			0 Arsip	0		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	Perangkat Daerah, BUMN, dan Masyarakat	0 Arsip	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	3	01.02	2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			0 Arsip	0		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	Perangkat Daerah, BUMN, dan Masyarakat	0 Arsip	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	4			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penyusunan dan Penerapan SOP Pengguna Arsip yang Bersifat Tertutup	SOP		SOP	1 SOP	0					1 SOP	100,000,000		
2	24	4	01.01		Pelayanan Jasa Pengguna Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Jumlah SOP Pengguna Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	SOP		SOP	1 SOP	0					1 SOP	100,000,000		
2	24	4	01.01	1	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disusun dan ditetapkan			0 SOP	0		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	Pengguna Layanan Kearsipan	0 SOP	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	4	01.01	2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Jasa Pengguna Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Jasa Pengguna Arsip yang Bersifat Tertutup			0 Arsip	0		Pajak Daerah		5. Pembangunan manusia	Pengguna Layanan Kearsipan	0 Arsip	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3	25				PROGRAM PENGUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	%		%	100 %	34,532,097,474					100 %	92,088,450,466		
					Persentase pemurnian temuan berdasarkan LHP		%		%	60 %						60 %	36,682,538,652		
					Kecepatan realisasi kegiatan perangkat daerah		%		%	100 %						100 %			
3	25	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	859,773,400					7 Dokumen	465,980,070		
3	25	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15 Dokumen	267,150,300		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	15 Dokumen	117,600,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							
3	25	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			31 Dokumen	50,919,500		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	31 Dokumen	42,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			30 Dokumen	16,214,300		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	30 Dokumen	19,577,093	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			30 Dokumen	18,940,600		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	30 Dokumen	33,551,280	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			30 Dokumen	25,838,200		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	30 Dokumen	27,501,697	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10 Laporan	465,717,700		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	10 Laporan	210,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
3	25	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	14,992,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Laporan	15,750,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Tepat Waktu	Laporan		Laporan	61 Laporan	24,745,901,430						61 Laporan	26,006,938,399	
3	25	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				199 Orang/ Bulan	24,597,226,230	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	199 Orang/ Bulan	25,811,875,169	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	11,550,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	14,908,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Dokumen	15,750,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	4,806,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Dokumen	55,813,181	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,066,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Laporan	3,510,911	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	45,048,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	46,850,958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	76,845,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	18 Laporan	55,813,180	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	7 Laporan	14,175,000						7 Laporan	40,425,000	
3	25	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,325,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	0 Laporan	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	0 Laporan	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	0 Laporan	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	0 Dokumen	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	25	1	01.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah perangkat daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	11,430,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Laporan	22,050,000	
3	25	1	01.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	11,430,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	420,138,300						100 Persen	569,739,762	
3	25	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	50,260,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. ASN Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Unit	52,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				333 Paket	267,940,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. ASN Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	333 Paket	210,775,950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	19,560,100	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. ASN Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Dokumen	21,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	29,323,200	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. ASN Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Dokumen	32,571,312	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Ewahasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	43,335,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. ASN Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Dokumen	52,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. ASN Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	0 Orang	181,912,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	9,720,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. ASN Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	100 Orang	9,240,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. ASN Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	0 Orang	9,240,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	1,836,995,703						100 Persen	1,980,916,638	
3	25	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	52,847,600	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	10 Paket	57,881,250	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	927,173,103	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	30 Paket	951,562,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	90,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	10 Paket	94,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	0 Paket	22,050,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	85,300,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	30 Paket	103,144,388	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	110,241,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Laporan	115,762,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Pemerangik Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	25	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	569,314,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Laporan	597,429,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	33,075,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Unit		Unit	12 Unit	400,000,000						12 Unit	945,000,000	
3	25	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi dinas Kelautan dan Perikanan	0 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi dinas Kelautan dan Perikanan	5 Paket	105,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi dinas Kelautan dan Perikanan	1 Unit	210,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi dinas Kelautan dan Perikanan	0 Unit	420,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi dinas Kelautan dan Perikanan	0 Unit	210,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	4,717,482,391						4 Jenis	4,614,585,384	
3	25	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Orgaisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	0 Laporan	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,097,158,327	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Orgaisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Laporan	963,098,820	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Orgaisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	0 Laporan	16,537,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3,620,324,064	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Orgaisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Laporan	3,623,924,064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Unit		Unit	81 Unit	1,826,201,280						81 Unit	2,036,903,400	
3	25	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	552,198,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	17 Unit	655,578,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya				19 Unit	324,003,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	19 Unit	378,575,400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Unit	52,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	3 Unit	630,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	25	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0	Semua Kab./kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	0 Unit	210,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0	Semua Kab./kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	0 Unit	110,250,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	%		%	100 %	11,969,196,200						100 %	13,321,140,000	
						Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha		Ha	1038850.36 Ha							1038850.36 Ha		
						Jumlah produksi garam rakyat	Ton		Ton	48450 Ton							48450 Ton		
						Nilai Hilirisasi produksi garam	Rp. Milyar		Rp. Milyar	85.94 Rp. Milyar							85.94 Rp. Milyar		
3	25	2	01.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi	Ha		Ha	56.45 Ha	11,585,223,200						56.45 Ha	11,655,000,000	
						Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	Unit		Unit	21 Unit							21 Unit		
3	25	2	01.01	2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Peraturan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				1038850.36 Ha	175,323,200	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pesisir dan PPK	1038850.36 Ha	1,890,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Desral		Target	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
													Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	25	2	01.01	3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi					56.45 Ha	11,409,900,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan,, 2. Masyarakat Pesisir dan PPK	56.45 Ha	9,765,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
													Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Sijai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	25	2	01.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah dokumen teknis pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi	Rekomendasi		Rekomendasi	12 Rekomendasi	1,830,000						12 Rekomendasi	56,227,500	
3	25	2	01.02	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi				0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha KP. 3. Masyarakat Pesisir dan PPK	0 Rekomendasi	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	01.02	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				4 Rekomendasi	1,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha KP. 3. Masyarakat Pesisir dan PPK	4 Rekomendasi	13,230,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	01.02	3	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha KP. 3. Masyarakat Pesisir dan PPK	0 Rekomendasi	13,230,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	01.02	4	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha KP. 3. Masyarakat Pesisir dan PPK	0 Rekomendasi	13,230,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	01.02	5	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha KP. 3. Masyarakat Pesisir dan PPK	0 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	01.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	Unit		Unit	24 Unit	382,143,000						24 Unit	1,609,912,500	
3	25	2	01.03	1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	200,000,000	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Masyarakat Pesisir dan PPK	100 Orang	173,643,750	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	25	2	01.03	2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				10 Kelompok	154,500,000	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Masyarakat Pesisir dan PPK	10 Kelompok	1,262,625,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
															11	12				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
													Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	dan Berkeadilan					
													Kab. Pangajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	25	2	01.03	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					20 Kelompok	27,643,000	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Masyarakat Pesisir dan PPK	20 Kelompok	173,643,750	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan bina kelompok nelayan	%			%	30.25 %	24,121,160,300						30.25 %	29,075,186,280	
						Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton			Ton	413030.8 Ton							413030.8 Ton		
						Nilai Hilirisasi Produk Perikanan Tangkap	Rp. Miliar			Rp. Miliar	9210.12 Rp. Miliar							9210.12 Rp. Miliar		
						Persentase Peltabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	%			%	78.95 %							78.95 %		
						Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%			%	27.17 %							27.17 %		
3	25	3	01.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit			Unit	287 Unit	15,523,425,800						287 Unit	22,089,900,000	
3	25	3	01.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					0 Dokumen	0	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Dokumen	110,250,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	01.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					25 Unit	7,340,847,800	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	25 Unit	8,820,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
													Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Maros, Semua Kecamatan,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Matrik Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Desaiah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sijau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	25	3	01.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				270 Unit	8,182,578,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADL)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	270 Unit	13,159,650,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Singar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	25	3	01.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dihubungkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan	Unit		Unit	17 Unit	63.214,500						17 Unit	568.132,500	
3	25	3	01.02	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Pesisiran Darat				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Dokumen	55,125,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	01.02	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Pesisiran Darat				2 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	2 Unit	210,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	01.02	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Pesisiran Darat				15 Unit	63.214,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	15 Unit	303,007,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	25	3	01.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi		Rekomendasi	100 Rekomendasi	1,440,000						100 Rekomendasi	85,125,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penanggung Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
3	25	3	01.03	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Dokumen	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	3	01.03	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				100 Rekomendasi	1,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	100 Rekomendasi	33,075,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	3	01.03	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Dokumen	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	3	01.04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	rekomendasi		rekomendasi	150 rekomendasi	0					150 rekomendasi	60,637,500			
3	25	3	01.04	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Dokumen	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	3	01.04	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Rekomendasi	49,612,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	3	01.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat Dinabuhkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal yang telah diterbitkan	Laporan		Laporan	125 Laporan	0					125 Laporan	46,856,250			
3	25	3	01.05	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	3	01.05	2	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Dokumen	41,343,750	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	3	01.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	Unit		Unit	5 Unit	8,533,080,000					5 Unit	6,195,000,000			
3	25	3	01.06	1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				5 Pelabuhan Perikanan	51,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	5 Pelabuhan Perikanan	52,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	3	01.06	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				4 Unit	8,382,080,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	4 Unit	5,985,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Pemerang Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
											Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	25	3	01.06	3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana			2 Layanan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	2 Layanan	157,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	01.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	rekomendasi	rekomendasi	20 rekomendasi	0					20 rekomendasi		27,562,500	
3	25	3	01.07	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi			0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	01.07	2	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan			0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Rekomendasi	22,050,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	01.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan & Kapal Pengangkut Ikan dgn Ukuran Sampai dgn 10 GT di Laut,Sungai,Danau,Waduk,Rawe, dan Genangan air lainnya yang dapat di usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	Rekomendasi	2 Rekomendasi	0					2 Rekomendasi		7,717,900	
3	25	3	01.08	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi			0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	01.08	2	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi			0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Rekomendasi	2,205,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	01.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	Laporan	Laporan	10 Laporan	0					10 Laporan		16,537,500	
3	25	3	01.09	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi			0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	01.09	2	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan			0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Rekomendasi	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	01.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut,Sungai,danau,waduk,Rawe, dan Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	Laporan	2 Laporan	0					2 Laporan		7,717,900	
3	25	3	01.10	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi			0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	0 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	01.10	2	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan			2 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Abokasi Umum		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Nelayan	2 Rekomendasi	2,205,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Ton	4298391.1 Ton	7,195,875,800					4298391.1 Ton		7,015,948,125	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
				2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
						Nilai Hilirisasi produk perikanan budidaya	Rp. Milyar		Rp. Milyar	15958,39 Rp. Milyar						15958,39 Rp. Milyar			
						Persepsi Ketahanan dan berkeadilan	Person		Person	100 Person						100 Person			
3	25	4	01.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dal (satu) daerah Provinsi	rekomendasi		rekomendasi	5 rekomendasi	0					5 rekomendasi	66,150,000		
3	25	4	01.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Pembudidaya	0 Rekomendasi	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	01.01	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Pembudidaya	0 Rekomendasi	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	01.01	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abokasi Umum	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Pembudidaya	1 Dokumen	55,125,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	01.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sempai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sempai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	rekomendasi		rekomendasi	100 rekomendasi	0					100 rekomendasi	16,537,500		
3	25	4	01.02	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkesinastan dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pebudidaya	0 Rekomendasi	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	01.02	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkesinastan dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pebudidaya	0 Rekomendasi	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	01.03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan	rekomendasi		rekomendasi	2 rekomendasi	0					2 rekomendasi	7,717,500		
3	25	4	01.03	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkesinastan dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya	0 Rekomendasi	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	01.03	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkesinastan dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya	0 Rekomendasi	2,205,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	01.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi	Laporan		Laporan	100 Laporan	0					100 Laporan	16,537,500		
3	25	4	01.04	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya	0 Rekomendasi	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	01.04	2	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya	0 Rekomendasi	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	01.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah semua dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit		Unit	133 Unit	5,051,075,800					133 Unit	3,864,905,625		
3	25	4	01.05	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkesinastan dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya	0 Dokumen	55,125,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	25	4	01.05	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				130 Unit	4,800,000,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya	130 Unit	3,305,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	25	4	01.05	4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	69,096,800	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya	1 Unit	237,313,125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	01.05	6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				13 Dokumen	81,640,000	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya	13 Dokumen	162,067,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	01.05	7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya				30 Orang	100,339,000	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya	30 Orang	105,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	01.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar	Unit		Unit	150 Unit	2,144,800,000						150 Unit	3,044,800,000	
3	25	4	01.06	1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				18 Unit	904,800,000	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya	18 Unit	1,417,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	25	4	01.06	2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150 Unit	1,240,000,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Masyarakat Pembudidaya	150 Unit	1,627,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sijene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	89.85 %	3,565,142,900						89.85 %	3,865,103,689	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Main Rencana Tahun 2024		Penasugkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	25	5	01.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Unit usaha		Unit usaha	9 Unit usaha	3,531,297,900						9 Unit usaha	3,632,948,689	
3	25	5	01.01	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	108,982,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Kelompok Masyarakat Pengawas	1 Dokumen	114,818,689	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	01.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				7 Dokumen	3,363,856,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Kelompok Masyarakat Pengawas	7 Dokumen	3,391,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	25	5	01.01	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	19,265,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Kelompok Masyarakat Pengawas	1 Dokumen	52,762,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	01.01	4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (PORMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (PORMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				30 Kelompok	39,193,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Kelompok Masyarakat Pengawas	30 Kelompok	73,867,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	01.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Gemangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawe, dan Gemangan Air Lainnya	Unit		Unit	2 Unit	33,845,000						2 Unit	232,155,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penaspat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17			
3	25	5	01.02	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disusahkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disusahkan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya			1 Dokumen	10,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha kelautan dan Perikanan, 3. Kelompok Masyarakat Pengawas	1 Dokumen	116,077,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	01.02	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disusahkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disusahkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya			1 Dokumen	8,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha kelautan dan Perikanan, 3. Kelompok Masyarakat Pengawas	1 Dokumen	52,762,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	01.02	3	Pengawasan Usaha Pemastaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemastaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1 Dokumen	15,505,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha kelautan dan Perikanan, 3. Kelompok Masyarakat Pengawas	1 Dokumen	63,315,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASTARAN HASIL PERIKANAN	Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan	Rp. Milyar		Rp. Milyar	317,28 Rp. Milyar	912,107,400					317,28 Rp. Milyar	2,128,533,750	
						Persentase pemajuan mutu produk perikanan	%		%	20 %						20 %		
						Produksi cangkang ikan konsumsi dan non konsumsi	Ton		Ton	5544.1 Ton						5544.1 Ton		
3	25	6	01.01		Penerbitan Izin Usaha Pemastaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemastaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	rekomendasi		rekomendasi	85 rekomendasi	0					85 rekomendasi	70,008,750	
3	25	6	01.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemastaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Petrisan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemastaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi			0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	0 Rekomendasi	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	01.01	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemastaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Petrisan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemastaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			0 Rekomendasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	0 Rekomendasi	9,371,250	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	01.01	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemastaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemastaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	55,125,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	01.02		Pembiinan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemastaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemastaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Unit usaha		Unit usaha	100 Unit usaha	875,856,000					100 Unit usaha	1,995,000,000	
3	25	6	01.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemastaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemastaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Petrisan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemastaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko			130 Unit Usaha	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	130 Unit Usaha	315,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	01.02	2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing			100 Unit Usaha	675,856,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	100 Unit Usaha	1,680,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	01.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan	Laporan		Laporan	2 Laporan	36,251,400					2 Laporan	63,525,000	
3	25	6	01.03	1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1 Dokumen	30,851,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	52,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	01.03	3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir			1 Dokumen	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, 2. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						40,176,174,266						89,333,199,761	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18,583,887,878						22,454,753,543	
3	27	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278,100,000						921,782,069	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
3	27	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH				4 Dokumen	25,215,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Dokumen	253,600,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD				1 Dokumen	8,514,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	21,274,640	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD				1 Dokumen	11,883,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	22,940,365	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD				1 Dokumen	14,803,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	21,442,219	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD				1 Dokumen	17,045,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	24,115,642	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD				6 Laporan	108,305,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		6 Laporan	367,895,474	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				5 Laporan	92,332,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Laporan	210,513,729	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14,185,523,602							18,270,798,064	
3	27	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JUMLAH ASN YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN				128 Orang/ Bulan	14,000,178,902		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		128 Orang/ Bulan	17,831,305,850	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGULIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD				1000 Dokumen	58,839,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1000 Dokumen	106,800,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD				2 Dokumen	18,277,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	194,009,214	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD				2 Laporan	12,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Laporan	2,780,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	JUMLAH DOKUMEN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN				2 Dokumen	87,704,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	67,900,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD DAN LAPORAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD				36 Laporan	8,143,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		36 Laporan	15,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							393,750,000	
3	27	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Paket	157,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				4 Paket							4 Paket		
3	27	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	78,750,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Orang	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Orang	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Orang	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						218,611,800							979,544,967	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Pemerangik Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	27	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN				3 Paket	14,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Paket	45,629,073	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN				11 Paket	30,447,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		11 Paket	318,379,030	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				250 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		250 Paket	63,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		15 Paket	31,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	JUMLAH LAPORAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU				12 Laporan	64,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	34,073,865	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD				12 Laporan	108,769,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	378,812,999	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	3,150,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	105,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0					187,800,000			
3	27	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	10,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Unit	73,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Unit	73,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,521,981,976					655,194,960			
3	27	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	3,150,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN				12 Laporan	771,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Laporan	552,044,960	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN				107 Orang/Bulan	2,750,981,976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		107 Orang/Bulan	100,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						349,670,500					1,076,186,483			
3	27	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA				83 Unit	159,502,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		83 Unit	540,375,339	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERZINANNYA				83 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		83 Unit	105,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	5,250,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI				6 Unit	85,168,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		6 Unit	399,311,144	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		10 Unit	26,250,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						20,117,295,548					25,827,807,368			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	27	2	01.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					18,987,230,648							21,850,674,711	
3	27	2	01.04	1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	JUMLAH BIMBINGAN PENINGKATAN PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI			3 DOKUMEN	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas			3 DOKUMEN	105,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	01.04	2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	JUMLAH PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI			5 LAPORAN	18,957,230,648		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas			5 LAPORAN	21,693,174,711	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	01.04	3	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	JUMLAH PENGAWAS MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KAPASITAS			10 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas			10 Orang	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	01.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi					1,059,997,200							3,612,672,082	
3	27	2	01.05	1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	JUMLAH KETERSEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HILAUAN PAKAN TERNAK YANG TERSEDIA DAN YANG DIPRODUKSI			15 LAPORAN	1,000,000,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas			15 LAPORAN	3,431,254,940	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	01.05	2	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	JUMLAH BENIH/BIBIT TERNAK DAN HPT, BAHAN PAKAN, PAKAN YANG BEREDAR			1 TON	59,997,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas			1 TON	181,417,142	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	01.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor					100,067,700							206,960,575	
3	27	2	01.06	1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	JUMLAH PEMERIKSAAN MUTU, KHASIAT DAN KEAMANAN OBAT HEWAN YANG BEREDAR			3 LAPORAN	100,067,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas			3 LAPORAN	206,960,575	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	01.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain					0							157,500,000	
3	27	2	01.07	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	JUMLAH BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH PROVINSI LAIN			7 Ekor	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas			7 Ekor	157,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					654,999,100							36,425,975,836	
3	27	3	01.01		Penataan Prasarana Pertanian					654,999,100							36,284,225,836	
3	27	3	01.01	1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	JUMLAH RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN			4 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas			4 Dokumen	157,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	01.01	2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	JUMLAH PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN			6 DOKUMEN	579,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas			6 DOKUMEN	17,094,630,866	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	01.01	6	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	JUMLAH POS PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG DIBANGUN DAN DIPELIHARA			24 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas			24 Unit	94,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	01.01	8	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	JUMLAH RUMAH POTONG HEWAN YANG DIBANGUN DAN DIPELIHARA			8 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas			8 Unit	18,570,094,970	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	01.01	9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	JUMLAH KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENATAAN PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA			5 LAPORAN	59,999,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas			5 LAPORAN	262,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	01.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	JUMLAH GEDUNG UPTD PERTANIAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA YANG DIBANGUN, DIPELIHARA DAN DIREHABILITASI			4 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana	6. Pemberdayaan ekonomi			4 Unit	105,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasang Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Akasi Umum		Keragaman melalui hilirisasi komoditas				KESIHATAN HEWAN
3	27	3	01.02		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					0							141,750,000	
3	27	3	01.02	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	JUMLAH WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK YANG DILESTARIKAN DAN DIMANFAATKAN			3 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		3 Laporan	89,250,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	01.02	2	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	JUMLAH PENGAWASAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK			1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		1 Laporan	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					749,992,140							3,264,000,000	
3	27	4	01.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					149,992,700							1,294,500,000	
3	27	4	01.01	1	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	JUMLAH WILAYAH PENGENDALIAN RISIKO DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS			4 LAPORAN	149,992,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		4 LAPORAN	1,294,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	01.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					99,999,800							156,600,000	
3	27	4	01.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	JUMLAH PENGAWASAN PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN			1 LAPORAN	99,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		1 LAPORAN	156,600,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	01.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					499,999,640							1,163,500,000	
3	27	4	01.03	2	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	JUMLAH UNIT USAHA PRODUK HEWAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER			2 LAPORAN	99,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		2 LAPORAN	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	01.03	3	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	JUMLAH UNIT USAHA PRODUK HEWAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER			7 DOKUMEN	399,999,740		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		7 DOKUMEN	1,111,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	01.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					0							649,400,000	
3	27	4	01.04	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan			3 Sertifikat	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		3 Sertifikat	108,200,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	01.04	2	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			12 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		12 Orang	541,200,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					0							53,832,665	
3	27	6	01.03		Penerbitan Ijin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan					0							53,832,665	
3	27	6	01.03	2	Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Ijin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi			40 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		40 Laporan	53,832,665	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					99,999,600							1,306,830,349	
3	27	7	01.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					0							52,500,000	
3	27	7	01.01	2	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta					0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas			52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	7	01.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					99,999,600							1,196,880,349	
3	27	7	01.02	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	JUMLAH DISEMINASI INFORMASI TEKNIS, SOSIAL, EKONOMI DAN INOVASI PERTANIAN			6 DOKUMEN	50,000,400		Dana Transfer		6. Pemberdayaan		6 DOKUMEN	1,107,330,349	DINAS PETERNAKAN DAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Umum-Dana Alokasi Umum		ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas				KESERHATAN HEWAN
3	27	7	01.02	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	JUMLAH KELOMPOK PETANI YANG MENDAPAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN			50 KELOMPOK	49,999,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		50 KELOMPOK	89,250,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESERHATAN HEWAN
3	27	7	01.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					0							87,750,000	
3	27	7	01.03	1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooperasi Petani	Jumlah Kooperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi			1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		1 Unit	57,750,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESERHATAN HEWAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					139,172,247,582							174,199,004,044	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah: %ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik, %Penyusunan Tercana Berdasarkan LJP	%	%	100 %	114,638,025,362						100 %	143,989,800,972	
3	28	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	%	100 %	1,417,624,500						100 %	1,580,000,000	
3	28	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	779,898,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	2 Dokumen	850,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	92,796,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	2 Dokumen	90,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	85,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	2 Dokumen	90,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	94,093,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	2 Dokumen	90,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2 Dokumen	84,999,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	2 Dokumen	90,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 Laporan	90,974,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	3 Laporan	90,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	189,861,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	4 Laporan	250,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	%	%	100 %	93,701,917,694						100 %	110,371,129,157	
3	28	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			821 Orang/ Bulan	93,302,054,394	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	821 Orang/ Bulan	109,946,129,157	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			9 Dokumen	9,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	9 Dokumen	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5000 Dokumen	9,999,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	5000 Dokumen	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	74,937,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	94,977,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1 Laporan	95,000,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Pemerang Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
3	28	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	129,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	3 Dokumen	130,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	74,949,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	14 Laporan	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	118,582,400						2 Dokumen	170,000,000	
3	28	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	4 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20 Dokumen	50,124,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	20 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	59,084,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1 Laporan	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				24 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	24 Laporan	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	4,637,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	2 Laporan	5,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				16 Laporan	4,737,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	16 Laporan	5,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan daerah	Rp		Rp	1712430000 Rp	68,303,400						1712430000 Rp	105,000,000	
3	28	1	01.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah, Swasta	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				16 Dokumen	68,303,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah, Swasta	16 Dokumen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah, Swasta	1 Laporan	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah, Swasta	1 Laporan	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	%		%	90 %	874,771,800						90 %	1,200,000,000	
3	28	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	5 Unit	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1150 Paket	441,850,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1150 Paket	575,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				24 Dokumen	72,310,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	24 Dokumen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Pemerang Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	28	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				24 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	24 Dokumen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	60.611,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				125 Orang	200,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	125 Orang	200,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	120 Orang	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	120 Orang	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan administrasi umum kantor	%		%	100 %	2,397,920,400						100 %	1,690,000,000	
3	28	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				26 Paket	62,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	26 Paket	70,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Paket	70,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	26 Paket	70,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				26 Paket	60,001,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	26 Paket	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	351,652,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	26 Paket	350,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				26 Paket	168,720,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	26 Paket	250,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	4 Dokumen	20,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	9,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1 Paket	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	46,280,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	12 Laporan	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	1,511,613,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	150 Laporan	700,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				14 Dokumen	47,653,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	14 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	6 Dokumen	70,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	4,945,963,000						100 %	17,566,318,352	
3	28	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				24 Unit	500,000,000	Kota Makassar, Semua	PENDAPATAN ASLI	Meningkatkan Sumber Daya	1. Perbaikan tatakelola	Instansi Pemerintah	24 Unit	5,000,000,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPJPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pemerintahan dan pelayanan publik				
3	28	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				96 Unit	984,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	96 Unit	1,000,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				12 Unit	49,497,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	12 Unit	60,000,000	DINAS KEHUTANAN
	28	1	01.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				12 Unit	14,400,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	12 Unit	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Paket	478,896,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	100 Paket	500,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	445,520,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	100 Unit	500,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				39 Unit	54,150,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	39 Unit	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
	28	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1 Unit	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2,000,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1 Unit	9,556,318,352	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	99,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	8 Unit	200,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	300,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	6 Unit	500,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	8,863,012,168						100 %	9,042,353,463	
3	28	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1 Laporan	25,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	601,709,880	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1 Laporan	650,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1 Laporan	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8,255,802,288	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1 Laporan	8,267,353,463	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	2,249,930,000						100 %	2,295,000,000	
3	28	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	151,200,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	13 Unit	107,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				421 Unit	598,480,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	421 Unit	628,000,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	28	1	01.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	19,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	50 Unit	80,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	91,250,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	100 Unit	150,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	31,200,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	2 Unit	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1 Unit	30,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	1,008,800,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	24 Unit	500,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	130,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	10 Unit	300,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	200,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	18 Unit	350,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	01.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1693 Ha	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Instansi Pemerintah	1693 Ha	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Kerusakan Hutan	%		%	14.82 %	13,935,828,020						14.82 %	15,989,203,072	
3	28	3	01.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang diperbarikan fungsi dan kepastian hukumnya	Ha		Ha	1780029 Ha	788,716,120						1780029 Ha	1,180,000,000	
3	28	3	01.01	1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	190,000,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	200,000,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	3	01.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				16 Unit	423,164,220	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah	16 Unit	800,000,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Barru, Semua							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Target Akhir Periode RPJMD					Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021					Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran					Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																														Prioritas										Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																														Nasional		Daerah								Target	Pagu Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					14					15					16					17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	3	01.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				1 Dokumen	75,551,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	80,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	01.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan KPH	Dokumen		Dokumen	24 Dokumen	190,000,000						24 Dokumen	240,000,000	
3	28	3	01.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terusun				24 Dokumen	190,000,000	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah	24 Dokumen	240,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	01.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Rp		Rp	25000000 Rp	587,671,000						25000000 Rp	590,000,000	
3	28	3	01.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				4 Dokumen	78,146,600	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	4 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	3	01.03	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	49,890,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	10 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Desar				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
												Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Siderang, Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	28	3	01.03	3	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemukiman Kewali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				10 Dokumen	49,620,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	10 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN	
3	28	3	01.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian lain Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				10 Dokumen	60,420,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	10 Dokumen	70,000,000	DINAS KEHUTANAN	
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	28	3	01.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian lain Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				10 Dokumen	0	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	10 Dokumen	70,000,000	DINAS KEHUTANAN	
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraa Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraa Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Derah		Target	Pagu Indikatif		
															1	2		3	4		5
													Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	28	3	01.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan					4 Dokumen	49,594,400	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	4 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN	
													Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Pangkep, Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Pinrang, Semua Kecamatan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraa Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraa Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Desah					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
												Semua Kelurahan								
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Singaj. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwa Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Tana Uluu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	28	3	01.03	7	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				10 Dokumen	0	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	10 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN	
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Masi Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan		Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim					
3	28	3	01.04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				450 Ha	3,267,363,800	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	450 Ha	4,645,727,500	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Pengusahan-Kehutanan						
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	3	01.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				60 Ha	676,800,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	60 Ha	1,224,000,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)						
												Kab. Bone, Semua Kecamatan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Dserah					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
												Semua Kelurahan								
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Tana Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	28	3	01.04	5	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				150 Unit	4,328,711,600	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	150 Unit	4,331,734,572	DINAS KEHUTANAN	
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan-Penggunaan-Kehutanan							
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								

Kode					Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target				Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah	14		15	16	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
												Semua Kelurahan								
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	28	3	01.04	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit yang dihasilkan untuk Rehabilitasi Lahan				25000 Bibit	684,564,500	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	25000 Bibit	170,000,000	DINAS KEHUTANAN	
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prokiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
													Semua Kelurahan							
													Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	3	01.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	68,303,400		Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	1 Laporan	80,000,000	DINAS KEHUTANAN
													Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	28	3	01.04	9	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				20 Ha	451.793,600	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Berasna Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	20 Ha	454.949,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penguasaan- Kehutanan						
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidrap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	3	01.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase jumlah kasus kerusakan kawasan hutan yang tertangani	%		%	100 %	1,899,632,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	100 %	1,882,792,000	
3	28	3	01.05	1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				1780029 Ha	1,377,612,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	1780029 Ha	1,377,792,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memantau dan Perubahan Iklim				
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	3	01.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				1780029 Ha	217,850,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membanun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	1780029 Ha	200,000,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	3	01.05	3	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan				2 Operasi	109,920,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	2 Operasi	110,000,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penasngkat Daerah Penanggung Jawab	
												Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif					
1					2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	14	15	16	17	
													Keremajaan, Semua Kelurahan									
													Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
													Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
													Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
													Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
													Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3		28	3	01.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan				8 Dokumen	119,470,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	8 Dokumen	120,000,000		DINAS KEHUTANAN	
3		28	3	01.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				6 Laporan	74,680,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	6 Laporan	75,000,000		DINAS KEHUTANAN	
3	28	3	01.06			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				Jumlah HHBK yang diolah oleh pemegang izin	Jenis		Jenis	3 Jenis	67,009,200					3 Jenis	250,000,000	
3		28	3	01.06	1	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati					15 Unit	0		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	15 Unit	50,000,000		DINAS KEHUTANAN
3		28	3	01.06	2	fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					5 Unit Manajemen	0		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	5 Unit Manajemen	50,000,000		DINAS KEHUTANAN
3		28	3	01.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					15 Unit Manajemen	0		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	15 Unit Manajemen	75,000,000		DINAS KEHUTANAN
3		28	3	01.06	4	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu					3 Unit Manajemen	67,009,200		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	3 Unit Manajemen	75,000,000		DINAS KEHUTANAN
3	28	3	01.07			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu	M3		M3	28155171.7 M3	127,080,000				28155171.7 M3	190,000,000		
3		28	3	01.07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					30 Unit Manajemen	66,890,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	30 Unit Manajemen	75,000,000		DINAS KEHUTANAN
3		28	3	01.07	2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					30 Dokumen	60,190,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	30 Dokumen	75,000,000		DINAS KEHUTANAN
3		28	3	01.07	3	fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					12 Unit Manajemen	0		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	12 Unit Manajemen	40,000,000		DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	28	3	01.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan	Pemohon		Pemohon	95 Pemohon	675,596,400			Pemohon Hutan			95 Pemohon	700,000,000	
3	28	3	01.09	1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perizinan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi				14 Unit Usaha	99,980,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADJ)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	14 Unit Usaha	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	3	01.09	2	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan				7 Sertifikat	49,930,000	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADJ)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	7 Sertifikat	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Mutu Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Desral		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	3	01.09	3	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan				3 Sertifikat	49,930,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lihgungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	3 Sertifikat	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	3	01.09	4	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan				7 Sertifikat	49,930,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	7 Sertifikat	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penasngkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	3	01.09	5	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				14 Laporan	99,980,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Berencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	14 Laporan	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	3	01.09	6	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun				5 Ha	325,846,400	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Berencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Swasta, Kelompok Masyarakat	5 Ha	350,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DATA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	Jenis		Jenis	2 Jenis	83,011,800						2 Jenis	100,000,000	
3	28	4	01.02		Pertliadangan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin penangkark tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Penangkark		Penangkark	100 Penangkark	83,011,800						100 Penangkark	100,000,000	
3	28	4	01.02	1	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak				1 Laporan	83,011,800	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI	Membangun Lingkungan Hidup,	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Swasta	1 Laporan	100,000,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
						Ditirungi dan/atau tidak Masuk dalam Lampiran CITES						Semua Kelurahan	DAERAH (PAL)	Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim					
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemangag lin Perhutanan Sosial yang menjalankan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sesuai Aturan	%		%	16,76 %	10,184,262,300						16,76 %	13,650,000,000	
3	28	5	01.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	Orang		Orang	60 Orang	10,184,262,300						60 Orang	13,650,000,000	
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		Orang	60 Orang							60 Orang		
3	28	5	01.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				200 Orang	192,063,300	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Swasta, Penyuluh Kehutanan	200 Orang	200,000,000	DINAS KEHUTANAN
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasngkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
													Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	5	01.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan					169 Kelompok	196,263,600	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Perubahan Rum	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Swasta, Penyuluh Kehutanan	169 Kelompok	200,000,000	DINAS KEHUTANAN
													Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Maros, Semua Kecamatan,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Desral		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
												Semua Kelurahan								
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	28	5	01.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2000 Ha	9,795,935,400	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Berencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Swasta, Penyuluh Kehutanan	2000 Ha	13,250,000,000	DINAS KEHUTANAN	
												Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Bulukamba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Pinrang, Semua								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang direhabilitasi	DAS		DAS	2 DAS	331,423,100						2 DAS	470,000,000	
3	28	6	01.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang direhabilitasi	DAS		DAS	2 DAS	331,423,100						2 DAS	470,000,000	
3	28	6	01.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Diterapkan				1 Dokumen	75,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Berencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Swasta	1 Dokumen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	6	01.01	2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS				1 Dokumen	82,198,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Berencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Swasta	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	6	01.01	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				450 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Berencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Swasta	450 Orang	120,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	6	01.01	5	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				1 Lembaga	92,802,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Berencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Swasta	1 Lembaga	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	6	01.01	6	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS yang dihasilkan				1 Laporan	81,422,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	7. Pelestarian lingkungan hidup	Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Swasta	1 Laporan	75,000,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Paga Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Paga Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						Heritana Lmbk Perubahan Iklim								
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					27,214,691,973						16,829,945,161			
3	29	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Berdasarkan LUP	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Ketagot Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LUP	%		%	100 %	19,414,046,873					100 %	6,349,518,348		
3	29	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja	%		%	100 %	509,848,300					100 %	375,850,190		
3	29	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	192,199,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, APiP, TAPD, DPRD	2 Dokumen	193,199,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	129,534,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, APiP, TAPD, DPRD	1 Dokumen	130,534,600	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15,799,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, APiP, TAPD, DPRD	1 Dokumen	16,799,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	86,560,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, APiP, TAPD, DPRD	1 Dokumen	22,560,600	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	85,754,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PPPK, APiP, TAPD, DPRD	2 Laporan	12,455,990	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan	%		%	100 %	15,175,615,283					100 %	1,847,864,911		
3	29	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/ Bulan	14,925,244,483	Kota Makassar, Rappocini, Bantara-Bantatang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, PPPK Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	130 Orang/ Bulan	1,592,244,411	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				534 Dokumen	80,347,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PPPK Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	534 Dokumen	81,348,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	136,909,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PPPK Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	137,909,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,620,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PPPK Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	8,870,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	8,870,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PPPK Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	9,870,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	16,622,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PPPK Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	17,623,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	28,742,000					100 %	457,499,831		
3	29	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket	0	Kota Makassar, Rappocini, Bantara-Bantatang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, PPPK Pemprov Sulawesi Selatan	0 Paket	111,249,678	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				130 Paket							130 Paket		
3	29	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	28,742,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK Pemprov Sulawesi Selatan	12 Orang	29,500,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0	Kota Makassar, Rappocini, Bantara-Bantatang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK Pemprov Sulawesi Selatan	50 Orang	316,750,153	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	%		%	100 %	732,119,190					100 %	694,237,880		
3	29	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	10,022,250	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	3 Paket	11,022,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kota Makassar, Semua	PENDAPATAN ASLI		1. Perbaikan tatakelola				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								Kecamatan, Sempu Kelurahan	DAPRAH (PAD)		pemerintahan dan pelayanan publik								
3	29	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	1 Paket	11,022,250	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20,543,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	3 Paket	16,001,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10681 Paket	84,361,900	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	10681 Paket	36,997,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	149,942,640	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	12 Laporan	150,945,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	467,249,400	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	200 Laporan	468,249,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,001,120,000					659,382,000				
3	29	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	0	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		13 Unit	229,691,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1,001,120,000	Sempu Kab./Kota, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Unit	429,691,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100 %	1,320,304,860			100 %	1,408,081,440				
3	29	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	416,657,820	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PPPK, Bangunan Gedung Kantor	4 Laporan	503,404,400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	903,647,040	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PPPK, Bangunan Gedung Kantor	4 Laporan	904,647,040	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100 %	646,297,240			100 %	906,932,426				
3	29	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	324,520,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Pemerintah	1 Unit	328,210,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	15 Unit	40,630,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Pemerintah	15 Unit	41,630,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200,000,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Pemerintah	3 Unit	401,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Pemerintah	3 Unit	53,792,426	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125 Unit	81,147,240	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Pemerintah	125 Unit	82,300,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	2			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK EKOLOGIS	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah	%			90 %	361,189,500			90 %	861,146,300				
3	29	2	01.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tingkat Pengendalian kerusakan Air Tanah dan Lingkungan Air Tanah pada Wilayah CAT	%			35 %	199,999,800			35 %	211,000,000				
3	29	2	01.01	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	124,999,800	Sempu Kab./Kota, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan infrastruktur wilayah	Masyarakat Pengguna Air Tanah	1 Dokumen	126,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	2	01.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup	Masyarakat Pengguna Air Tanah	1 Laporan	85,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	2	01.02		Penastusahan Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tingkat ketaatan pengusahaan Air Tanah pada Aspek Administrasi, Teknik dan Lingkungan	%			30 %	0			30 %	477,955,500				
3	29	2	01.02	1	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Penggalian, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Sampel Uji Air Tanah	125 Sampel	0	Sempu Kab./Kota, Sempu Kecamatan,			Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan	Pengusahaan Air Tanah	125 Sampel	300,955,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan		Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim					
3	29	2	01.02	2	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeloran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi Teknis pemanfaatan Air Tanah yang diterbitkan				30 Rekomtek	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pengusahaan Air Tanah	30 Rekomtek	76.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2	01.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeloran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah					0	0	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pengusahaan Air Tanah	0	101.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						Jumlah Perizinan Air Tanah yang diawasi				55 Pengguna Air Tanah		Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					55 Pengguna Air Tanah		
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	2	01.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pengguna Air Tanah	%		%	28 %	161.189.700						28 %	172.190.800	
3	29	2	01.03	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				1 Dokumen	99.999.900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Pelestarian lingkungan hidup		Masyarakat Pengguna Air Tanah	1 Dokumen	110.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2	01.03	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				25 Laporan	61.189.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	Masyarakat Pengguna Air Tanah	25 Laporan	62.190.800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Luas Wilayah Izn Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis tertentu	Ha		Ha	150.000 Ha	933.148.000						150.000 Ha	2.006.093.702	
						Penentuan dan Penetapan Blok WUP Mineral (komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha		Ha	150.000 Ha							150.000 Ha		
3	29	3	01.01		Penetapan Wilayah Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Lokasi Peta WUP yang bersesuaian tata ruang	Kab/Kota		Kab/Kota	24 Kab/Kota	253.464.700						24 Kab/Kota	1.303.875.000	
3	29	3	01.01	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		Pelaku Usaha Pertambangan	1 Dokumen	547.535.200	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	01.01	2	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan				1 Dokumen	253.464.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		Pelaku Usaha Pertambangan	1 Dokumen	254.464.800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	3	01.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				90 Laporan	0	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		Pelaku Usaha Pertambangan	90 Laporan	501.875.000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Bulukumba,							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17			
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
								Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
								Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
								Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
3	29	3	01.03		Penatausahaan Iain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Iain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Lokasi Iain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kab/Kota	Kab/Kota	24 Kab/Kota	253,478,900			24 Kab/Kota	256,479,000				
3	29	3	01.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat			6 Laporan	163,473,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Pelaku Usaha Pertambangan	6 Laporan	164,473,400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	3	01.03	4	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Iain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Iain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			50 Laporan	47,200,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Pelaku Usaha Pertambangan	50 Laporan	48,200,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	3	01.03	5	Pengawasan Teknis Kadah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Iain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kadah Teknis Pertambangan yang baik dan Kadah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Iain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			50 Laporan	42,804,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Pelaku Usaha Pertambangan	50 Laporan	43,804,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	3	01.04		Penatausahaan Iain Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat yang diawasi	Lokasi	Lokasi	25 Lokasi	175,128,900			25 Lokasi	192,664,102				
3	29	3	01.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat			6 Laporan	175,128,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Non Logam dan Batuan	6 Laporan	176,129,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	3	01.04	4	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			25 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Non Logam dan Batuan	25 Laporan	16,535,102	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	3	01.06		Penatausahaan Iain Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diawasi	Iain	Iain	15 Iain	43,142,700			15 Iain	44,142,800				
3	29	3	01.06	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			15 Laporan	43,142,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Usaha Jasa Pertambangan	15 Laporan	44,142,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	3	01.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					207,932,800				208,932,800				
3	29	3	01.07	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Logam yang Terkumpul dan Terolah			1 Dokumen	207,932,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		1 Dokumen	208,932,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	5			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBUKAN	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga (Prioritas)	%	%	99 %	0				99 %	1,199,193,628			
3	29	5	01.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Gedung/Ruang Publik yang melakukan Konservasi Energi	Gedung/Ruang Publik	Gedung/Ruang Publik	4 Gedung/Ruang Publik	0				4 Gedung/Ruang Publik	1,199,193,628			
3	29	5	01.04	1	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi				0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah	Ruang Publik, Gedung Pemerintah, Masyarakat	0	208,875,077	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasngkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
						Jumlah Kebijakan Strategis dan Program Konservasi Energi yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
3	29	5	01.04	3	Sosialisasi secara Menyeduruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Tersedianya data & Informasi Penerima Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				15 Dokumen	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Ruang Publik, Gedung Pemerintah, Masyarakat	15 Dokumen	151.266.500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	5	01.04	4	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					0	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Ruang Publik, Gedung Pemerintah, Masyarakat	0	579.795.500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						Jumlah Pembangunan untuk program konservasi energi				50 Unit							50 Unit		
	29	5	01.04	6	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi					0	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ruang Publik, Gedung Pemerintah, Masyarakat	0	103.006.500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						Jumlah peserta bimbingan yang bersertifikat				25 Orang							25 Orang		
3	29	5	01.04	7	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan konservasi energi yang diawasi				4 Kegiatan	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ruang Publik, Gedung Pemerintah, Masyarakat	4 Kegiatan	156.250.051	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kerdusung)	%		%	99,50 %	6,506,307,600						99,50 %	6,413,993,183	
						Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (Prioritas)	%		%	99 %							99 %		
3	29	6	01.02		Penatuausahaan Iain Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Legaltas Iain Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang diawasi	Iain	Iain	Iain	25 Iain	69,683,700						25 Iain	187,477,900	
3	29	6	01.02	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Iain Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					0	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Pemegang Iain Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	0	116.794.100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						Tersusunnya Rekomendasi dan Informasi Perizinan				12 Dokumen							12 Dokumen		
3	29	6	01.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				25 Laporan	69,683,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Pemegang Iain Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	25 Laporan	70.683.800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	01.05		Penatuausahaan Iain Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Iain Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanaman Modal dalam Negeri	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha	10 Badan Usaha	204,056,300						10 Badan Usaha	152,950,700	
3	29	6	01.05	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Iain Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Iain Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri				12 Dokumen	168.286.500	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Perusahaan Jasa Penunjang Tenaga Listrik	12 Dokumen	116.180.900	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	01.05	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri				10 Laporan	35.769.800	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Perusahaan Jasa Penunjang Tenaga Listrik	10 Laporan	36.769.800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	01.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah KK yang telah menikmati listrik	KK	KK	KK	1187 KK	6,232,567,600						1187 KK	6,073,564,583	
3	29	6	01.06	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				6 Dokumen	221.823.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat yang belum menikmati Listrik	6 Dokumen	222.823.000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	01.06	2	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				175 Keluarga	1,153.528.200	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat yang belum menikmati Listrik	175 Keluarga	583.438.800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	01.06	4	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				3 Dokumen	0	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat yang belum menikmati Listrik	3 Dokumen	151.509.400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perngkat Daerah Penanggung Jawab
											Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan								
												Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	29	6	01.06	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				15 Laporan	669,707,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Masyarakat yang belum menikmati Listrik	15 Laporan	705,272,600	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	01.06	6	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				270 Set	4,187,508,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		Masyarakat yang belum menikmati Listrik	270 Set	4,140,996,900	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	01.06	7	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				14 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		Masyarakat yang belum menikmati Listrik	14 Laporan	269,523,883	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						299,999,900								728,967,949	
3	29	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%		%	100 %	78,814,900							100 %	82,782,900	
						Presentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	%		%	0.1 %										
						Presentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	%		%	0.1 %										
						Presentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%	100 %								100 %		
3	29	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum	%		%	100 %	64,610,800							100 %	66,782,900	
3	29	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	49,590,000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	3 Paket	52,050,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	9,764,800	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	5 Paket	8,476,900	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	01.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	5,256,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	1 Laporan	6,256,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	14,204,100							100 %	16,000,000	
3	29	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	14,204,100	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, Bangunan Gedung Kantor	3 Laporan	16,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	2			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGIS						48,550,000								49,550,049	
3	29	2	01.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						48,550,000								49	
3	29	2	01.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				12 Laporan	48,550,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup		12 Laporan	49	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	29	2	01.02		Penatausahaan Izin Pengolahan, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tingkat Ketepatan Pengusahaan Air Tanah pada Aspek Administrasi, Teknis dan Lingkungan	%		%	100 %	0							100 %	49,550,000	
3	29	2	01.02	2	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengolahan, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan				12 Dokumen	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Penguatan infrastruktur wilayah		Pengusahaan Air Tanah	12 Dokumen	49,550,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2. Penguatan infrastruktur wilayah					
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	29	3			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Luas Wilayah Iain Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha		Ha	150.000 Ha	77,155,000	Keramatan, Semua Kelurahan					150.000 Ha	78,155,000	
						Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha		Ha	150.000 Ha							150.000 Ha		
3	29	3	01.03		Penatausahaan Iain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Iain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Lokasi Iain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kab		Kab	3 Kab	77,155,000						3 Kab	78,155,000	
3	29	3	01.03	3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Iain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Iain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Iain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Iain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				15 Dokumen	77,155,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Pelaku Usaha Pertambangan	15 Dokumen	78,155,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	5			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN						0							421,000,000	
3	29	5	01.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						0							421,000,000	
3	29	5	01.04	4	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					20	0	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		20	421,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Desa Berlistrik	%		%	99,5 %	95,480,000						99,5 %	97,480,000	
						Persentase Desa Berlistrik	%		%	99,5 %							99,5 %		
						Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%		%	99 %							99 %		
3	29	6	01.02		Penatausahaan Iain Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Legalitas Iain Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Izin		Izin	12 Izin	35,390,000						12 Izin	36,390,000	
3	29	6	01.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				9 Laporan	35,390,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Pemegang Iain Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	9 Laporan	36,390,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	6	01.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah KK yang telah menikmati listrik	KK		KK	100 KK	60,090,000						100 KK	61,090,000	
3	29	6	01.06	4	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				10 Dokumen	60,090,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Masyarakat Belum Berlistrik	10 Dokumen	61,090,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						274,979,000							762,196,000	
3	29	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%		%	100 %	71,149,000						100 %	86,464,000	
						Persentase Pemahaman Tenaga Berlatarbelakang LHP	%		%	0,1 %							0,1 %		
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%	100 %							100 %		
3	29	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	%		%	100 %	87,180,000						100 %	71,464,000	
3	29	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	39,906,500	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	4 Paket	46,300,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Penasngkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	29	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,998,000	Kab. Gowa, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	1 Paket	4,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	9,781,500	Kab. Gowa, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	5 Paket	6,700,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4,464,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	1 Laporan	14,464,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	13,999,000						100 %	15,000,000	
3	29	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	13,999,000	Kab. Gowa, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	3 Laporan	15,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						41,800,000							89,160,000	
3	29	2	01.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						41,800,000							0	
3	29	2	01.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				12 Laporan	41,800,000	Kab. Gowa, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup		12 Laporan	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Jeneponto, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan							
												Kab. Takalar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan							
3	29	2	01.02		Penatausahaan Ijin Pengeboran, Ijin Penggalian, Ijin Pemaknaan, dan Ijin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					0								89,160,000	
3	29	2	01.02	2	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Ijin Pengeboran, Ijin Penggalian, Ijin Pemaknaan, dan Ijin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan				12 Dokumen	0	Kab. Gowa, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Dokumen	44,580,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Jeneponto, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan							
												Kab. Takalar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan							
3	29	2	01.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemaknaan, dan Pengusahaan Air Tanah					12 Dokumen	0	Kab. Gowa, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup		12 Dokumen	44,580,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Jeneponto, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan							
												Kab. Takalar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan							
3	29	3			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						61,180,000							62,600,000	
3	29	3	01.03		Penatausahaan Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						61,180,000						62,600,000		
3	29	3	01.03	3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				15 Dokumen	61,180,000	Kab. Gowa, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		15 Dokumen	62,600,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
												Kab. Jeneponto, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan							
												Kab. Takalar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	29	5			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBAKUR						0	Semua Kelurahan							421,000,000	
3	29	5	01.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						0								421,000,000	
3	29	5	01.04	4	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					20	0	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		20	421,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	29	6			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						100,880,000								102,972,000	
3	29	6	01.02		Penataanahan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						46,370,000								47,490,000	
3	29	6	01.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				10 Laporan	46,370,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		10 Laporan	47,490,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	29	6	01.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						54,480,000								55,482,000	
3	29	6	01.06	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Perizinan Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	54,480,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		1 Dokumen	55,482,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
												Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
												Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						300,000,000								776,231,900	
3	29	1			PROGRAM PERUKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						88,313,800								32,571,900	
3	29	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						71,648,500								15,571,900	
3	29	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	42,114,000	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Paket	12,450,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	3,488,000	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Paket	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	11,057,500	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Paket	3,121,900	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	14,989,000	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		8 Laporan	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16,665,300								17,000,000	
3	29	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	16,665,300	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Laporan	17,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	2			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGIAN						46,268,000								94,528,000	
3	29	2	01.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						46,268,000								0	
3	29	2	01.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				12 Laporan	46,268,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup		12 Laporan	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan,								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasngkat Daerah Penangnggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	2	01.02		Penatausahaan Ijin Pengeboran, Ijin Penggalian, Ijin Pemaknaan, dan Ijin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						0							94,528,000	
3	29	2	01.02	2	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Ijin Pengeboran, Ijin Penggalian, Ijin Pemaknaan, dan Ijin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan				12 Dokumen	0	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Dokumen	47,264,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	2	01.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemaknaan, dan Pengusahaan Air Tanah					12 Laporan	0	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup		12 Laporan	47,264,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	3			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						75,716,000							76,480,000	
3	29	3	01.03		Penatausahaan Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						75,716,000							76,480,000	
3	29	3	01.03	3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Ijin Usaha Pertambangan Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				15 Dokumen	75,716,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatn melalui hilirisasi komoditas		15 Dokumen	76,480,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
					PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN							Keramatitan, Semua Kelurahan							
3	29	5									0							421,000,000	
3	29	5	01.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						0							421,000,000	
3	29	5	01.04	4	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					20	0	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20	421,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	6			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						89,702,200							151,652,000	
3	29	6	01.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						30,863,700							31,766,000	
3	29	6	01.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Peritman Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Peritman Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				9 Laporan	30,863,700	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		9 Laporan	31,766,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	6	01.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						58,838,500							119,886,000	
3	29	6	01.06	4	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				10 Dokumen	58,838,500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		10 Dokumen	119,886,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						299,999,900							729,000,000	
3	29	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						111,567,900							116,568,000	
3	29	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						102,261,900							105,441,600	
3	29	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	39,983,000	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Paket	48,743,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	22,737,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		17 Paket	23,883,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peraung Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan							
												Kab. Sngai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	20,075,100	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Paket	12,314,100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	19,466,800	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		8 Laporan	20,501,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sngai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9,306,000							11,126,400	
3	29	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	9,306,000	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Laporan	11,126,400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEBUDUDAYAAN						37,200,000							38,200,000	
3	29	2	01.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						37,200,000							0	
3	29	2	01.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				12 Laporan	37,200,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup		12 Laporan	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sngai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	2	01.02		Penataan lahan Irigasi Penggalian, Irigasi Pemukiman, dan Irigasi Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						0							38,200,000	
3	29	2	01.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Penggalian, Penggalian, Pemukiman, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan				12 Dokumen	0	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pelestarian lingkungan hidup		12 Dokumen	38,200,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sngai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	3			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						63,064,000							64,064,000	
3	29	3	01.03		Penataan lahan Irigasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Irigasi Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						63,064,000							64,064,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
3	29	3	01.03	3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi lain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah lain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi lain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah lain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				12 Dokumen	63,064,000	Kab. Bantareng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		12 Dokumen	64,064,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	5			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN						0						421,000,000		
3	29	5	01.04		Penaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						0						421,000,000		
3	29	5	01.04	4	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					20	0	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		20	421,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	6			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						88,168,000						89,168,000		
3	29	6	01.02		Penatausahaan Iain Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						88,168,000						89,168,000		
3	29	6	01.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				12 Laporan	88,168,000	Kab. Bantareng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Penguatan infrastruktur wilayah		12 Laporan	89,168,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	6	01.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						0						0		
3	29	6	01.06	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	0	Kab. Bantareng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
												Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						276,846,200						816,332,000		
3	29	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						71,753,200						60,090,000		
3	29	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						56,811,000						46,090,000		
3	29	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	39,840,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		6 Paket	29,300,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	2,998,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Paket	4,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah			14	15
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket		Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Paket		
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	15,973,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Paket	12,790,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12,942,200							14,000,000	
3	29	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	12,942,200	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		3 Laporan	14,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGIS						59,783,000							128,582,000	
3	29	2	01.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						59,783,000							0	
3	29	2	01.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				12 Laporan	59,783,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pedestarian lingkungan hidup		12 Laporan	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	2	01.02		Penatausahaan Iain Pengeboran, Iain Penggalian, Iain Pemakian, dan Iain Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						0							128,582,000	
3	29	2	01.02	2	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Iain Pengeboran, Iain Penggalian, Iain Pemakian, dan Iain Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan				12 Dokumen	0	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Dokumen	64,291,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	2	01.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakian, dan Pengusahaan Air Tanah					12 Dokumen	0	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pedestarian lingkungan hidup		12 Dokumen	64,291,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	3			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						60,690,000							66,202,000	
3	29	3	01.03		Penatausahaan Iain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Iain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						60,690,000						66,202,000		
3	29	3	01.03	3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Iain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Iain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Iain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Iain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				15 Dokumen	60,690,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		15 Dokumen	66,202,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	5			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN						0							421,000,000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	29	5	01.04		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	29	5	01.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						0							421,000,000	
3	29	5	01.04	4	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					20	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20	421,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6			PROGRAM PENGELOLAAN KETEMAGALISTRIKAN						84,620,000							140,458,000	
3	29	6	01.02		Pemertumbuhan Ikte Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						39,120,000							42,806,000	
3	29	6	01.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				10 Laporan	39,120,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		10 Laporan	42,806,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	6	01.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						45,500,000							97,652,000	
3	29	6	01.06	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Perizinan Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	45,500,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		1 Dokumen	48,826,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	6	01.06	4	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sensus Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sensus Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Dokumen	0	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	48,826,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						300,000,000							728,873,600	
3	29	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	%	100 %	100 %	111,568,000						100 %	116,441,600	
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	%	%	100 %	100 %							100 %		
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %							100 %		
3	29	1	01.00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	%	%	100 %	100 %	101,031,400						100 %	105,441,600	
3	29	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	48,873,000	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	10 Paket	48,743,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	22,139,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	11 Paket	23,883,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	10,562,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	3 Paket	12,314,100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	19,456,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	8 Laporan	20,501,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	100 %	10,536,600						100 %	11,000,000	
3	29	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,536,600	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, Bangunan Gedung Kantor	12 Laporan	11,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGISIAN						37,200,000							38,200,000	
3	29	2	01.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						37,200,000							0	
3	29	2	01.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				12 Laporan	37,200,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI		7. Pelestarian lingkungan hidup		12 Laporan	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perngkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN APBD						
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	2	01.02		Penatausahaan Izin Penggeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tingkat Ketatan Pengusahaan Air Tanah pada Aspek Administrasi, Teknis dan Lingkungan	%		%	100 %	0						100 %	38,200,000	
3	29	2	01.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Penggeboran, Penggalian, Pemakian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pengawasan izin Air Tanah				12 Laporan	0	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Pengusahaan Air Tanah	12 Laporan	38,200,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	3			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha		Ha	150.000 Ha	63,064,000						150.000 Ha	64,064,000	
						Penentuan dan Penetapan Blok WUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha		Ha	150.000 Ha							150.000 Ha		
3	29	3	01.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Lokasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kab/Kota		Kab/Kota	5 Kab/Kota	63,064,000						5 Kab/Kota	64,064,000	
3	29	3	01.03	3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				12 Dokumen	63,064,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatn melalui hilirisasi komoditas	Pelaku Usaha Pertambangan	12 Dokumen	64,064,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	5			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN						0							421,000,000	
3	29	5	01.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						0							421,000,000	
3	29	5	01.04	4	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi					20	0	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		20	421,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
3	29	6			PROGRAM PENGELOLAAN KETERAGALIHAN	Persentase Desa Berlistrik	%		%	99.5 %	88,168,000	Semua Kelurahan				99.5 %	89,168,000		
3	29	6	01.02		Penatausahaan Ijin Operasi yang Fasilitas Instalasi-nya dalam Daerah Provinsi	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%		%	99 %						99 %			
3	29	6	01.02		Penatausahaan Ijin Operasi yang Fasilitas Instalasi-nya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Legalitas Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Kab/Kota		Kab/Kota	5 Kab/Kota	88,168,000					5 Kab/Kota	89,168,000		
3	29	6	01.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasi-nya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasi-nya dalam Daerah Provinsi				12 Laporan	88,168,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah	Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	12 Laporan	89,168,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2. Penguatan infrastruktur wilayah				
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
												Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						299,999,800						319,482,600		
3	29	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						299,999,800						319,482,600		
3	29	1	01.04		Administrasi Pendataan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						83,476,200						100,000,000		
3	29	1	01.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Laporan	83,476,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Laporan	100,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						216,523,600						219,482,600		
3	29	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	87,649,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		14 Paket	85,660,100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	35,089,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		5 Paket	35,692,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	93,784,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Laporan	98,130,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						21,771,000,715						29,973,500,000		
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14,112,023,405						19,164,500,000		
3	30	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						317,849,600						456,000,000		
3	30	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	88,510,000	Kota Makassar, Tamalate, Maricini Sombala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	89,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	34,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	17,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	34,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	29,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				12 Laporan	94,350,000		PENDAPATAN ASLI		1. Perbaikan tatakelola		12 Laporan	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasagkat Daerah Penasagngg Jawab		
																Target	Pagu Indikatif			
													Nasional	Daerah						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	30	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD							DAERAH (PAD)		pemerintahan dan pelayanan publik				12,200,000,000	
3	30	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 Orang/ Bulan	8,923,724,903			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Orang/ Bulan	12,000,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0 Laporan	80,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			0 Laporan	45,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen	44,999,800			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					289,240,000							300,000,000			
3	30	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0 Paket	179,240,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Paket	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang	40,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Orang	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			25 Orang	40,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	25 Orang	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,064,472,560							1,585,500,000			
3	30	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket	11,998,860			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Paket	15,500,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket	207,476,500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Paket	350,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0 Paket	99,999,600			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Paket	310,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			0 Laporan	44,999,600			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	110,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	699,998,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	800,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					429,612,200							1,030,000,000			
3	30	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		420,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			0 Unit	300,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Unit	400,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	59,904,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Unit	110,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	69,708,200			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Unit	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,152,128,092							2,661,000,000			
3	30	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0 Laporan	697,125,860			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	750,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		11,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0 Laporan	1,455,002,232			PENDAPATAN ASLI		1. Perbaikan tatakelola	0 Laporan	1,900,000,000	DINAS PERDAGANGAN		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
														11			12		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19			
									DAERAH (PAD)		pemerintahan dan pelayanan publik									
3	30	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					794,996,250						932,000,000				
3	30	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0 Unit	219,996,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Unit	300,000,000	DINAS PERDAGANGAN			
3	30	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	490,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Unit	500,000,000	DINAS PERDAGANGAN			
3	30	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Unit	120,000,000	DINAS PERDAGANGAN			
3	30	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12,000,000	DINAS PERDAGANGAN			
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					799,995,500						1,400,000,000				
3	30	2	01.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor					149,998,500						200,000,000				
3	30	2	01.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			0 Dokumen	149,998,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Dokumen	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN			
3	30	2	01.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar					150,000,000						200,000,000				
3	30	2	01.03	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya			0 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN			
3	30	2	01.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					499,997,000						1,000,000,000				
3	30	2	01.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal			0 Dokumen	499,997,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PERDAGANGAN			
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					499,936,350						850,000,000				
3	30	3	01.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas					499,936,350						850,000,000				
3	30	3	01.01	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			0 Unit	249,999,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Unit	350,000,000	DINAS PERDAGANGAN			
3	30	3	01.01	2	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			0 Laporan	249,936,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	500,000,000	DINAS PERDAGANGAN			
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK dan BARANG PENTING					1,166,998,300						1,297,000,000				
3	30	4	01.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi					50,000,000						55,000,000				
3	30	4	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor			0 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	55,000,000	DINAS PERDAGANGAN			
3	30	4	01.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					1,075,998,300						1,192,000,000				
3	30	4	01.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			0 Laporan	75,999,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	92,000,000	DINAS PERDAGANGAN			
3	30	4	01.02	2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			0 Laporan	999,999,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	1,100,000,000	DINAS PERDAGANGAN			
3	30	4	01.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					41,000,000						50,000,000				
3	30	4	01.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida			0 Laporan	41,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN			
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					1,694,000,000						2,774,000,000				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	30	5	01.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						1,694,000,000						2,774,000,000	
3	30	5	01.01	1	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			0 Pelaku Usaha	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Pelaku Usaha	1,000,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5	01.01	2	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal			0 Pelaku Usaha	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Pelaku Usaha	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5	01.01	3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			0 Pelaku Usaha	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Pelaku Usaha	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5	01.01	4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi			0 Produk	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Produk	700,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5	01.01	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina			0 Pelaku Usaha	574,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Pelaku Usaha	674,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					2,873,908,160							3,514,000,000	
3	30	6	01.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					323,993,900							434,000,000	
3	30	6	01.01	1	Pemberdayaan Konsumen dan Ketebagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelidikan Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif			0 BPSK	323,993,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 BPSK	434,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	01.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					1,949,914,260							2,280,000,000	
3	30	6	01.02	2	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Harang			0 Dokumen	399,993,260		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	500,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	01.02	3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan			0 Sertifikat	1,349,996,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Sertifikat	1,500,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	01.02	4	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan			0 Sertifikat	199,925,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Sertifikat	280,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	01.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					600,000,000							800,000,000	
3	30	6	01.03	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi Konsumen			0 Laporan	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Laporan	800,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					624,139,000							974,000,000	
3	30	7	01.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri					574,139,000							874,000,000	
3	30	7	01.02	1	Facilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dibagikan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			0 UMKM	574,139,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 UMKM	874,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	7	01.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					50,000,000							100,000,000	
3	30	7	01.03	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			0 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						42,780,123,253						42,905,562,638	
3	31	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						16,853,753,207						26,298,876,217	
3	31	1	01.01		PROGRAM PENURJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						762,665,500						554,714,500	
3	31	1	01.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
3	31	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	557,679,100		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	468,562,500	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0 Dokumen	10,500,000		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	9,975,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	12,600,000		Pajak Daerah				1 Dokumen	13,230,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	10,440,000		Pajak Daerah				1 Dokumen	11,025,000	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan					Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Paga Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran		Target	Paga Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	31	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	12,600,000		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	13,230,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	12,600,000		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		24 Laporan	11,130,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	146,246,400		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Laporan	27,562,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10,107,477,619							15,040,180,000	
3	31	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/ Bulan	9,481,148,419		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		72 Orang/ Bulan	14,332,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	548,806,100		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Dokumen	330,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	34,394,500		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	385,875,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	43,128,500		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Dokumen	11,025,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0							220,500,000	
3	31	1	01.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	110,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	110,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							110,250,000	
3	31	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Orang	110,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						974,480,600							910,874,217	
3	31	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	24,555,000		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Paket	28,874,217	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	949,925,600		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		24 Laporan	882,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,482,903,200							4,777,500,000	
3	31	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Unit	1,155,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Unit	315,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	728,000,000		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Unit	1,102,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	754,903,200		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Unit	2,205,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,298,026,388							3,560,050,000	
3	31	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	180,001,000		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Laporan	132,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	488,113,500		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Laporan	661,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1,629,911,888		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan		0 Laporan	2,756,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	31	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,228,200,000				dan pelayanan publik			1,114,837,500	
3	31	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0 Unit	598,200,000		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Unit	551,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya			0 Unit	35,000,000		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Unit	38,587,500	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	595,000,000		Pajak Daerah		1. Perbaikan tatakola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Unit	525,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					23,304,427,524							14,889,000,000	
3	31	2	01.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					23,304,427,524							14,889,000,000	
3	31	2	01.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi			0 Dokumen	0		Pajak Daerah		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	0 Dokumen	220,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	2	01.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilyahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilyahan Industri			0 Dokumen	0		Pajak Daerah		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	0 Dokumen	367,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	2	01.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			0 Dokumen	6,049,688,700		Pajak Daerah		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	0 Dokumen	5,040,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	2	01.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			0 Dokumen	10,069,678,700		Pajak Daerah		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	0 Dokumen	4,830,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	2	01.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			0 Dokumen	7,185,060,124		Pajak Daerah		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	0 Dokumen	4,305,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	2	01.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			0 Dokumen	0		Pajak Daerah		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	0 Dokumen	126,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					1,799,767,822							1,111,311,421	
3	31	3	01.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					1,799,767,822							1,111,311,421	
3	31	3	01.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					1,699,776,422		Pajak Daerah		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		900,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	3	01.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi			0 Dokumen	99,991,400		Pajak Daerah		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	0 Dokumen	211,311,421	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					822,174,700							606,375,000	
3	31	4	01.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					822,174,700							606,375,000	
3	31	4	01.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			0 Dokumen	672,181,400		Pajak Daerah		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	0 Dokumen	275,625,000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	4	01.01	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas			0 Dokumen	50,001,100		Pajak Daerah		6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui	0 Dokumen	165,375,000	DINAS PERINDUSTRIAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	31	4	01.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SINas				0 Dokumen	99,992,200		Pajak Daerah		6. Pembudayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas		0 Dokumen	165,375,000	DINAS PERINDUSTRIAN
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						4,677,581,992							7,020,000,000	
4	1	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2,593,872,092							4,470,000,000	
4	1	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350,658,800							550,000,000	
4	1	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	249,274,300	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Dokumen	350,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen	101,384,500	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	200,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	01.05		Administrasi Kepegawisan Perangkat Daerah						0							1,240,000,000	
4	1	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi				300 Orang	0	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300 Orang	620,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	0	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300 Orang	620,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,198,121,100							1,430,000,000	
4	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Paket	348,213,500	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	400,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20,000,000	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	30,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	01.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	829,907,600	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Laporan	1,000,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						477,582,192							550,000,000	
4	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	477,582,192	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	550,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						567,810,000							700,000,000	
4	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	95,710,000	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	100,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya				8 Unit	350,400,000	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Unit	400,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	121,400,000	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Unit	200,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						2,083,709,900							2,550,000,000	
4	1	3	01.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						762,723,400							1,050,000,000	
4	1	3	01.01	1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				3 Dokumen	241,431,400	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	300,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	01.01	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	200,000,000	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	300,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	01.01	3	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				8 Dokumen	321,292,000	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Dokumen	450,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	01.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah						1,020,986,900							950,000,000	
4	1	3	01.02	1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				13 Dokumen	379,999,900	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Dokumen	450,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	01.02	2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				24 Dokumen	99,999,700	Kota Makassar, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI				24 Dokumen	200,000,000	BIRO PEMERINTAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
								Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)						DAN OTONOMI DAERAH				
4	1	3	01.02	3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	24 Laporan	540,987,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Laporan	300,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
4	1	3	01.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			299,999,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				880,000,000					
4	1	3	01.03	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	75 Dokumen	149,999,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75 Dokumen	250,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
4	1	3	01.03	2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	75 Dokumen	49,999,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75 Dokumen	100,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
4	1	3	01.03	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	75 Laporan	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75 Laporan	200,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
4	1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			75,227,029,654						77,353,523,243					
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik	%	%	100 %	1,298,789,498			100 %	2,211,492,056					
						% Pemenuhan Temuan Berdasarkan LHP	%	%	100 %				100 %						
						% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	%	100 %				100 %						
4	1	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	%	100 %	85,240,600			100 %	117,500,000					
4	1	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	35,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	1	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,327,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	10,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	1	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	29,913,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	52,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	1	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	10,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	1	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	10,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	Persen	100 Persen	20,218,100			100 Persen	46,228,000					
4	1	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7,111,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Dokumen	10,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	1	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Dokumen	7,875,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	1	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	7,875,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	1	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	3,150,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	1	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10,136,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	18 Laporan	14,175,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	1	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	0 Dokumen	3,150,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen							1 Dokumen		
4	1	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	%		%	100 %	3,000,000						100 %	15,225,000	
4	1	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	2 Dokumen	4,725,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	5,250,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	1	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	5,250,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Persen		Persen	100 Persen	31,451,000						100 Persen	46,300,000	
4	1	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				45 Dokumen	6,651,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	45 Dokumen	10,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	24,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	0 Orang	30,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang							5 Orang		
4	1	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	30 Orang	3,150,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	30 Orang	3,150,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	278,321,535						100 Persen	518,875,000	
4	1	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	9,891,535	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	3 Paket	15,750,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	24 Paket	126,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	5 Paket	52,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	20,442,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	15 Paket	27,875,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14,925,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	2 Paket	20,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	24,995,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	31,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	201,233,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	30 Laporan	230,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	6,835,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Dokumen	15,250,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	54,525,000						100 Persen	373,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Korangko Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17					
4	1	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Paket	21,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	1	1	01.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					3 Unit	54,525,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panakajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	3 Unit	300,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	1	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan					1 Unit	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Unit	52,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen		100 Persen	526,753,263					100 Persen	674,367,056		
4	1	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	151,867,056	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	151,867,056	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	30,666,591	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	50,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	344,219,616	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	472,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen		Persen		100 Persen	299,280,000					100 Persen	419,500,000		
4	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dikayarkan Pajaknya					9 Unit	139,250,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panakajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	9 Unit	236,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					1 Unit	10,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Unit	10,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara					1 Unit	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Unit	52,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	150,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panakajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat	2 Unit	120,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan bahan pendukung kebijakan Bidang Keras yang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan	persen		persen		100 persen	73,928,270,156					100 persen	75,042,031,187		
4	1	4	01.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase kebijakan pembinaan spritual yang dimanfaatkan	persen		persen		100 persen	49,815,151,056					100 persen	74,146,281,187		
4	1	4	01.01	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola					4 Unit	1,147,826,756	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	OPD Terkait dan Lembaga Masyarakat	4 Unit	2,007,350,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	01.01	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi					400 Lembaga	48,667,324,300	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	OPD Terkait dan Lembaga Masyarakat	400 Lembaga	72,138,931,187	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	01.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	persentase kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	persen		persen		100 persen	21,951,647,900					100 persen	423,250,000		
4	1	4	01.02	1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan					1 Dokumen	21,820,696,700	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	OPT Teknis Terkait dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	01.02	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan					1 Dokumen	65,200,200	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	OPT Teknis Terkait dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	157,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	01.02	3	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial					1 Dokumen	65,751,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	OPT Teknis Terkait dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	115,750,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	01.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	persen		persen		100 persen	2,161,471,200					100 persen	472,500,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Daerah			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
4	1	4	01.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	66,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	OPD Teknis terkait dan Lembaga masyarakat	1 Dokumen	157,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	01.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	47,287,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	OPD Teknis terkait dan Lembaga masyarakat	1 Dokumen	157,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	01.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				1 Dokumen	2,047,294,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan manusia	OPD Teknis terkait dan Lembaga masyarakat	1 Dokumen	157,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						6,872,382,100							0	
4	1	1			PROGRAM PERUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,684,653,080							0	
4	1	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30,217,600							0	
4	1	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8,121,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	11,505,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10,591,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10,206,300							0	
4	1	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	10,206,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						277,735,000							0	
4	1	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	188,538,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Orang	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				160 Orang	89,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				160 Orang	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				480 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				480 Orang	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						429,143,000							0	
4	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Paket	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis	35,880,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Jenis	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	17,640,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	370,946,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Laporan	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4,676,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	0	BIRO HUKUM
4	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penuji Urusan Pemerintah Daerah						319,221,800							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
4	1	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				55 Unit	319,221,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55 Unit	0	BIRO HUKUM	
4	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						234,391,680							0		
4	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	234,391,680	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	BIRO HUKUM	
4	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						383,735,000							0		
4	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	234,025,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	0	BIRO HUKUM	
4	1	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	125,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	0	BIRO HUKUM	
4	1	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	24,710,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Unit	0	BIRO HUKUM	
4	1	5			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						5,187,729,020							0		
4	1	5	01.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan						1,539,369,012							0		
4	1	5	01.01	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				40 Dokumen	627,457,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Dokumen	0	BIRO HUKUM	
4	1	5	01.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				600 Dokumen	231,271,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				600 Dokumen	0	BIRO HUKUM	
4	1	5	01.01	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya				20 Dokumen	74,999,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Dokumen	0	BIRO HUKUM	
4	1	5	01.01	4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				300 Dokumen	605,640,512	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300 Dokumen	0	BIRO HUKUM	
4	1	5	01.02		Fasilitasi Bantuan Hukum						3,648,360,008							0		
4	1	5	01.02	1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				1 Kasus	2,412,805,608		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kasus	0	BIRO HUKUM	
4	1	5	01.02	2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				1 Kasus	1,235,554,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kasus	0	BIRO HUKUM	
4	1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						6,281,734,719							45,000,000		
4	1	1			PROGRAM PERUKUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,946,734,719							45,000,000		
4	1	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						319,457,200							0		
4	1	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	224,457,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntansi yang tersusun	Laporan		Laporan	12 Laporan	30,000,000							12 Laporan	0	
4	1	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	30,000,000	Kota Makassar, Semua	PENDAPATAN ASLI				1 Dokumen	0	BIRO ORGANISASI	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
												Kota Makassar, Semua Kecamatan	DAERAH (PAD)							
4	1	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	18 Laporan	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	ORGANISASI	
4	1	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	10,000,000						2 Dokumen	0		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen			
4	1	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	10,000,000					0	0 Dokumen	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0					0		0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0					0		0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah data pegawai ASN yang tersedia	ASN		ASN	38 ASN	20,200,000						38 ASN	0		
4	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				38 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	38 Paket	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	20,200,000					0	1 Dokumen	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%		%	100 %	813,853,600						100 %	0		
4	1	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 Paket	10,000,000		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	BIRO ORGANISASI
4	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	34,800,000		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Paket	0	BIRO ORGANISASI
4	1	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	13,250,000		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Paket	0	BIRO ORGANISASI
4	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,750,000		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	BIRO ORGANISASI
4	1	1	01.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	100,051,800		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	BIRO ORGANISASI
4	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 Laporan	344,701,800		Semua Kota/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	BIRO ORGANISASI
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan			
4	1	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penujiang Urusan Pemerintah Daerah						174,200,000							0		
4	1	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan				3 unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 unit	0	BIRO ORGANISASI	
4	1	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				1 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	BIRO ORGANISASI	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
4	1	1	01.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan				5 Unit	174,200,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	0	BIRO ORGANISASI
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit							0 Unit		
4	1	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan				1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	BIRO ORGANISASI
4	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						535,733,919							0	
4	1	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	BIRO ORGANISASI
4	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	535,733,919	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	BIRO ORGANISASI
4	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						343,590,000							45,000,000	
4	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				6 Unit	253,590,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	0	BIRO ORGANISASI
4	1	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara				1 Unit	90,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	45,000,000	BIRO ORGANISASI
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit							0 Unit		
4	1	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	BIRO ORGANISASI
4	1	2			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%		%	100 %	4,335,000,000						100 %	0	
4	1	2	01.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/kota yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan	%		%	100 %	1,800,000,000						100 %	0	
						Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/kota yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan	%		%	100 %							100 %		
4	1	2	01.01	1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	0 Dokumen	0	BIRO ORGANISASI
						Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan Provinsi				1 dokumen							1 dokumen		
4	1	2	01.01	2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan Kab/Kota				1 dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 dokumen	0	BIRO ORGANISASI
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				0 Dokumen							0 Dokumen		
4	1	2	01.01	3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan				1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Dokumen	0	BIRO ORGANISASI
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				0 Dokumen							0 Dokumen		
4	1	2	01.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi reformasi birokrasi akuntabilitas kinerja, budaya kerja, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik	%		%	100 %	2,835,000,000						100 %	0	
4	1	2	01.02	1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1,300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Dokumen	0	BIRO ORGANISASI
4	1	2	01.02	2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	505,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Dokumen	0	BIRO ORGANISASI
4	1	2	01.02	3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Emhuasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 Laporan	0	BIRO ORGANISASI
4	1	2	01.02	4	Pengelolaan Tatakelasa Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tatakelasa pemerintahan				1 dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 dokumen	0	BIRO ORGANISASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
4	1	2	01.02	5	Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik			1 dokumen	480,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perubahan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0	1 dokumen	0	BIRO ORGANISASI	
4	1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH					141,671,059,111						170,594,612,388			
4	1	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					141,671,059,111						170,594,612,388			
4	1	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					182,558,900						192,222,450			
4	1	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			32 Dokumen	76,715,000		Pajak Daerah				32 Dokumen	80,594,325	BIRO UMUM	
4	1	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			150 Laporan	105,843,900		Pajak Daerah			150 Laporan	111,628,125	BIRO UMUM		
4	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					66,542,716,507						70,548,430,372			
4	1	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			832 Orang/ Bulan	65,518,521,707		Pajak Daerah				832 Orang/ Bulan	69,838,412,497	BIRO UMUM	
4	1	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			151 Dokumen	126,217,500		Pajak Daerah				151 Dokumen	132,528,375	BIRO UMUM	
4	1	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2388 Dokumen	546,552,100		Pajak Daerah				2388 Dokumen	208,481,700	BIRO UMUM	
4	1	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			32 Dokumen	135,764,200		Pajak Daerah				32 Dokumen	142,553,775	BIRO UMUM	
4	1	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			9 Laporan	69,966,800		Pajak Daerah			9 Laporan	73,469,025	BIRO UMUM		
4	1	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			8 Dokumen	77,043,800		Pajak Daerah			8 Dokumen	80,896,725	BIRO UMUM		
4	1	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			13 Dokumen	68,650,400		Pajak Daerah			13 Dokumen	72,088,275	BIRO UMUM		
4	1	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					978,640,800						223,284,075			
4	1	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1778 Dokumen	505,362,400		Pajak Daerah			1778 Dokumen	44,480,625	BIRO UMUM		
4	1	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			16 Laporan	42,210,900		Pajak Daerah			16 Laporan	44,323,125	BIRO UMUM		
4	1	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			16 Laporan	42,684,900		Pajak Daerah			16 Laporan	44,820,825	BIRO UMUM		
4	1	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	345,483,900		Pajak Daerah			12 Laporan	44,612,925	BIRO UMUM		
4	1	1	01.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			12 Dokumen	42,898,400		Pajak Daerah			12 Dokumen	45,046,575	BIRO UMUM		
4	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					11,433,898,244						13,028,218,942			
4	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakuan Dinas Berserta Atribut Kepegawaian	Jumlah Paket Pakuan Dinas Berserta Atribut Kepegawaian			842 Paket	503,580,000		Pajak Daerah			842 Paket	529,200,000	BIRO UMUM		
4	1	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			482 Dokumen	10,453,672,844		Pajak Daerah			482 Dokumen	11,964,943,267	BIRO UMUM		
4	1	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			13 Orang	175,145,400		Pajak Daerah			13 Orang	132,975,675	BIRO UMUM		
4	1	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			20 Orang	301,500,000		Pajak Daerah			20 Orang	401,100,000	BIRO UMUM		
4	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					22,170,735,138						29,398,130,937			
4	1	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididialkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididialkan			4047 Paket	917,283,500		Pajak Daerah			4047 Paket	1,758,097,950	BIRO UMUM		
4	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididialkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididialkan			48 Paket	0		Pajak Daerah			48 Paket	779,464,350	BIRO UMUM		
4	1	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Dididialkan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dididialkan			36 Paket	1,548,301,335		Pajak Daerah			36 Paket	640,173,975	BIRO UMUM		
4	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dididialkan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dididialkan			12 Paket	368,041,100		Pajak Daerah			12 Paket	388,164,525	BIRO UMUM		
4	1	1	01.06	8	Penyediaan Fasilitas Komunikasi dan Penggandaan yang Dididialkan	Jumlah Laporan Fasilitas Komunikasi dan Penggandaan yang Dididialkan			48 Laporan	14,711,259,300		Pajak Daerah			48 Laporan	18,688,557,657	BIRO UMUM		
4	1	1	01.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			782 Laporan	4,529,727,900		Pajak Daerah			782 Laporan	7,039,918,305	BIRO UMUM		
4	1	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			19179 Dokumen	96,122,000		Pajak Daerah			19179 Dokumen	103,754,175	BIRO UMUM		
4	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,480,000,000						17,505,706,456			
4	1	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dididialkan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dididialkan			0 Unit	0		Pajak Daerah			0 Unit	0	BIRO UMUM		
4	1	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dididialkan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dididialkan			8 Unit	0		Pajak Daerah			8 Unit	1,049,381,025	BIRO UMUM		
4	1	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dididialkan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dididialkan			4 Unit	0		Pajak Daerah			4 Unit	2,730,000,000	BIRO UMUM		
4	1	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dididialkan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dididialkan			2 Unit	1,480,000,000		Pajak Daerah			2 Unit	13,201,325,431	BIRO UMUM		
4	1	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dididialkan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dididialkan			4 Unit	0		Pajak Daerah			4 Unit	525,000,000	BIRO UMUM		
4	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6,998,972,647						8,246,308,665			
4	1	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	109,230,200		Pajak Daerah			12 Laporan	114,697,275	BIRO UMUM		
4	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dididialkan			36 Laporan	6,723,070,947		Pajak Daerah			36 Laporan	7,738,690,365	BIRO UMUM		
4	1	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididialkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididialkan			20 Laporan	166,671,500		Pajak Daerah			20 Laporan	392,921,025	BIRO UMUM		
4	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9,064,641,000						9,072,391,883			
4	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dididialkan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dididialkan dan Dibayarkan Pajaknya			20 Unit	2,128,065,000		Pajak Daerah			20 Unit	2,219,895,825	BIRO UMUM		
4	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dididialkan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dididialkan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan			40 Unit	5,333,860,000		Pajak Daerah			40 Unit	4,953,958,800	BIRO UMUM		
4	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dididialkan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dididialkan			4 Unit	311,916,000		Pajak Daerah			4 Unit	751,916,025	BIRO UMUM		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana				Nasional	Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
4	1	1	01.09	9	Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			17 Unit	1,290,800,000		Pajak Daerah				17 Unit	919,180,733	BIRO UMUM
4	1	1	01.09	10	Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			7 Unit	0		Pajak Daerah				7 Unit	227,440,500	BIRO UMUM
4	1	1	01.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					9,820,803,087							9,642,584,603	
4	1	1	01.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	137,291,809		Pajak Daerah				2 Orang/Bulan	308,281,902	BIRO UMUM
4	1	1	01.11	2	Penyediaan Paksi Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Paksi Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			26 Paket	253,050,000		Pajak Daerah				26 Paket	391,293,525	BIRO UMUM
4	1	1	01.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1 Orang	1,250,000,000		Pajak Daerah				1 Orang	840,000,000	BIRO UMUM
4	1	1	01.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/ Bulan	7,880,461,278		Pajak Daerah				2 Orang/ Bulan	8,103,009,176	BIRO UMUM
4	1	1	01.12		Facilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					13,298,093,091							13,787,334,005	
4	1	1	01.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			360 Paket	6,986,377,800		Pajak Daerah				360 Paket	5,997,966,660	BIRO UMUM
4	1	1	01.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			360 Paket	814,716,000		Pajak Daerah				360 Paket	2,315,957,070	BIRO UMUM
4	1	1	01.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			360 Paket	5,496,999,291		Pajak Daerah				360 Paket	4,423,410,275	BIRO UMUM
4	1	1			UNSUB PENDUKUNG URISAN PEMERINTAHAN													
4	1	1			SEKRETARIAT DAERAH					9,361,124,785							10,251,817,740	
4	1	1			PROGRAM PERUKJANG URISAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9,361,124,785							10,251,817,740	
4	1	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					233,401,200							233,401,200	
4	1	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	206,101,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			5 Dokumen	193,801,500	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Laporan	12,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			5 Laporan	14,350,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	14,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			5 Laporan	25,250,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					447,216,000							458,795,000	
4	1	1	01.05	2	Pengadaan Paksi Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paksi Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			1 Paket	59,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			1 Paket	58,795,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	01.05	3	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			600 Dokumen	387,296,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				600 Dokumen	400,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,306,836,200							1,180,000,000	
4	1	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			20 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Paket	10,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	100,305,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	01.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	74,978,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	75,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	01.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	1,121,552,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			12 Laporan	1,095,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					850,131,200							1,036,802,000	
4	1	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			75 Unit	850,131,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			75 Unit	1,036,802,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,810,376,420							1,817,010,240	
4	1	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	199,251,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			12 Laporan	200,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1,611,124,920		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1,617,010,240	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	01.09		Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					734,600,000							1,748,000,000	
4	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				78,750,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			16 Unit	666,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan			16 Unit	500,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			70 Unit	68,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	70 Unit	89,250,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
4	1	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	4 Unit	1,080,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
4	1	1	01.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					1,391,872,700			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1,191,882,300			
4	1	1	01.13	1	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan			120 Dokumen	218,154,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	120 Dokumen	218,128,500	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
4	1	1	01.13	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12 Laporan	337,920,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	12 Laporan	325,884,200	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
4	1	1	01.13	3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			12 Laporan	835,797,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	12 Laporan	647,869,600	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
4	1	1	01.14		Fasilitasi Keprotokolan					2,586,691,065			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2,585,926,700			
4	1	1	01.14	1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			3200 Laporan	1,690,915,465		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	3200 Laporan	1,793,615,500	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
4	1	1	01.14	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			500 Laporan	630,070,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	500 Laporan	526,605,600	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
4	1	1	01.14	3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			3200 Laporan	265,705,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	3200 Laporan	265,705,600	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
4	1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH					6,641,209,920					8,429,992,888			
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					3,127,246,920					3,197,315,946			
4	1	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					326,300,000					304,400,000			
4	1	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	29,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	29,400,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	1	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Laporan	297,300,000		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Laporan	275,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi (Laporan)			4 Laporan					4 Laporan				
4	1	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 Dokumen	50,000,000		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Dokumen	50,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	1	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2 dokumen					2 dokumen				
4	1	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2 dokumen	0			Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	2 dokumen	105,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	0			Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1 Dokumen	55,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0					96,589,500			
4	1	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		96,589,500	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					45,000,000					114,600,000			
4	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0 Paket	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	0 Paket	64,500,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			42 Paket						42 Paket			
4	1	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diikuti / jumlah orang yang mengikuti pendidikan/pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya ()			5 Orang	0		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	5 Orang	50,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,796,973,000					785,692,322			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Pernangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
4	1	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket	2,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Paket	5,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket		
4	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			50 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Paket	200,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)			19 Jenis	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		19 Jenis	63,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	01.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			0 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Paket	8,500,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
					Tersedianya Bahan/Material				1 Paket							1 Paket		
4	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	1,794,473,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Laporan	205,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
					Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan							1 Laporan		
4	1	1	01.06	10	Penatausahaan Aritp Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Aritp Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Dokumen	55,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Dokumen	249,192,322	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
					Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola SKPD (Jenis)				4 Web							4 Web		
4	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0							333,600,012	
4	1	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			21 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		21 Paket	223,600,012	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	01.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	110,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					363,651,408							434,534,112	
4	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Orang	363,651,408		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		12 Orang	434,534,112	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makan Minum Tamu			4 Paket							4 Paket		
										545,322,512							918,000,000	
4	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0 Unit	295,322,512	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Unit	268,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10 Unit							10 Unit		
4	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 Unit	250,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		0 Unit	200,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit							3 Unit		
4	1	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			4 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		4 Unit	250,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		1 Unit	200,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	6			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					3,114,200,700							4,832,676,942	
4	1	6	01.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					1,689,627,100							2,700,000,000	
4	1	6	01.01	1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			2 Dokumen	785,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		2 Dokumen	1,600,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	6	01.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			2 Dokumen	904,627,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan		2 Dokumen	1,100,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
															Nasional	Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerikat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
4	1	1	01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	0						165,000,000	
4	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			0 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				0 Paket	165,000,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket							2 Paket		
4	1	1	01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,875,718,900							939,150,300	
4	1	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	5,697,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				2 Paket	6,121,500	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			25 Paket	1,180,071,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				25 Paket	31,075,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 Laporan	389,950,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				4 Laporan	901,953,800	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						232,000,000							0	
4	1	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)					0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)					0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			30 Paket	232,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				30 Paket	0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)					0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)					0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)					0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						503,166,542							349,089,857	
4	1	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 Laporan	18,384,330		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				4 Laporan	96,152,478	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	484,782,192		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				4 Laporan	252,937,379	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						578,541,310							373,918,600	
4	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			15 Unit	339,182,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				15 Unit	359,420,600	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30 Unit	39,359,310		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				30 Unit	14,498,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				2 Unit	0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				2 Unit	0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)					0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7		PROGRAM KEBLIKJAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						2,760,960,200							7,477,468,178	
4	1	7	01.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						1,284,604,700							3,019,346,182	
4	1	7	01.01	1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			4 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				4 Laporan	554,219,807	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	01.01	2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			4 Laporan	1,184,604,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				4 Laporan	1,633,680,058	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	01.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			12 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				12 Laporan	831,446,317	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	01.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						885,942,200							2,088,680,166	
4	1	7	01.02	1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			4 Laporan	443,483,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)				4 Laporan	769,229,877	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	01.02	2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			2 Laporan	385,156,400		PENDAPATAN ASLI				2 Laporan	760,722,683	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
													DAERAH (PAD)						
4	1	7	01.02	3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	57,302,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	558,727,606	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	01.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						590,413,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,369,441,830	
4	1	7	01.03	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O-A2022-12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				40 Orang	306,455,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Orang	972,839,850	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	01.03	2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	154,819,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan infrastruktur wilayah		4 Dokumen	732,406,813	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	01.03	3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	129,138,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	664,195,167	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	2				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						305,838,821,923								0
4	2	1			PROGRAM PERUKJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, % ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik, % Penyesuaian Tempaan Berdasarkan LHP	%		%	100 %	120,880,303,227						100 %		0
4	2	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu	%		%	100 %	929,765,200						100 %		0
4	2	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	94,566,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersediarnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Meningkatkan Kinerja ASN Sekretariat DPRD	3 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	244,377,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersediarnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Meningkatkan Kinerja ASN Sekretariat DPRD	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	224,658,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersediarnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Meningkatkan Kinerja ASN Sekretariat DPRD	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	89,755,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersediarnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Meningkatkan Kinerja ASN Sekretariat DPRD	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	101,293,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersediarnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Meningkatkan Kinerja ASN Sekretariat DPRD	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	67,001,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersediarnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Meningkatkan Kinerja ASN Sekretariat DPRD	2 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	108,111,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersediarnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Meningkatkan Kinerja ASN Sekretariat DPRD	6 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Keuangan serta Bahan Tanggapan Pemerintahan	%		%	100 %	13,600,796,679						100 %		0
4	2	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/ Bulan	11,939,705,479	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, Tersediarnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Tersediarnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Akhir Tahun OPD serta Tersediarnya Bahan Tanggapan Pemerintahan	120 Orang/ Bulan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	33,711,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, Tersediarnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Tersediarnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Akhir Tahun OPD serta Tersediarnya Bahan Tanggapan Pemerintahan	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	357,833,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, Tersediarnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Tersediarnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Akhir Tahun OPD serta Tersediarnya Bahan Tanggapan Pemerintahan	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021		Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022		Target 2023		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
																Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif												
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
4	2	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								4 Dokumen	208,334,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Akhir Tahun OPD serta Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD												
4	2	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								4 Laporan	170,411,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Akhir Tahun OPD serta Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD												
	2	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan								5 Dokumen	533,668,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Akhir Tahun OPD serta Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD												
4	2	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD								18 Laporan	205,945,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Akhir Tahun OPD serta Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	18 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD												
4	2	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								0 Dokumen	51,187,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Akhir Tahun OPD serta Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD												
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								5 Dokumen								5 Dokumen													
4	2	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penatausahaannya	%				%			100 %	74,561,800							100 %	0												
4	2	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah beserta Penatausahaannya	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD												
4	2	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah beserta Penatausahaannya	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD												
4	2	1	01.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								3 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah beserta Penatausahaannya	3 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD												
4	2	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								4 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah beserta Penatausahaannya	4 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD												
4	2	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								14 Laporan	74,561,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah beserta Penatausahaannya	14 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD												
4	2	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%				%			100 %	1,101,264,000							100 %	0												
4	2	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								6 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Disiplin Pegawai, Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Meningkatkan Kompetensi ASN	6 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD												
4	2	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								0 Paket	93,775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Disiplin Pegawai, Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Meningkatkan Kompetensi ASN	0 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD												
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								6 Paket								6 Paket													
4	2	1	01.05	3	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								6 Dokumen	104,845,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Disiplin Pegawai, Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Meningkatkan Kompetensi ASN	6 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD												
4	2	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								6 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Disiplin Pegawai, Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Meningkatkan Kompetensi ASN	6 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
4	2	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Ewahuasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Disiplin Pegawai, Tersedianya Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Meningkatkan Kompetensi ASN	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				120 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Disiplin Pegawai, Tersedianya Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Meningkatkan Kompetensi ASN	120 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.05	10	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				285 Orang	902.644.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Disiplin Pegawai, Tersedianya Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Meningkatkan Kompetensi ASN	285 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Disiplin Pegawai, Tersedianya Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Meningkatkan Kompetensi ASN	120 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	3,366,882,820						100 %	0	
4	2	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	148.634.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan, Bahan Material dan Terasilitasinya Kunjungan Tamu	2 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	380.112.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan, Bahan Material dan Terasilitasinya Kunjungan Tamu	25 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	242.070.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan, Bahan Material dan Terasilitasinya Kunjungan Tamu	10 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	480.960.020	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan, Bahan Material dan Terasilitasinya Kunjungan Tamu	3 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	720.610.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan, Bahan Material dan Terasilitasinya Kunjungan Tamu	3 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan, Bahan Material dan Terasilitasinya Kunjungan Tamu	3 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan, Bahan Material dan Terasilitasinya Kunjungan Tamu	2 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024				Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
															Target 2023		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana				Prioritas		Kelompok Sasaran		Target		Pagu Indikatif			
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		14		15		16		17	
4	2	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	908,248,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Penataan Rumah Tangga, Bahan Logistik, Barang Cetak dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Baku, Bahan Material dan Terselenggaranya Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD														
4	2	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6 Laporan	485,918,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Penataan Rumah Tangga, Bahan Logistik, Barang Cetak dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Baku, Bahan Material dan Terselenggaranya Kunjungan Tamu	6 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD														
4	2	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Penataan Rumah Tangga, Bahan Logistik, Barang Cetak dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Baku, Bahan Material dan Terselenggaranya Kunjungan Tamu	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD														
4	2	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			2 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Penataan Rumah Tangga, Bahan Logistik, Barang Cetak dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Baku, Bahan Material dan Terselenggaranya Kunjungan Tamu	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD														
4	2	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	542,962,000									100 %	0														
4	2	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			2 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan, Tersedianya Meubelair, Tersedianya Aset Tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud, dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD														
4	2	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			3 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan, Tersedianya Meubelair, Tersedianya Aset Tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud, dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD														
4	2	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan, Tersedianya Meubelair, Tersedianya Aset Tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud, dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD														
4	2	1	01.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			1 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan, Tersedianya Meubelair, Tersedianya Aset Tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud, dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD														
4	2	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			2 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan, Tersedianya Meubelair, Tersedianya Aset Tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud, dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD														
4	2	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5 Unit	542,962,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan, Tersedianya Meubelair, Tersedianya Aset Tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud, dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD														
4	2	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			150 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan, Tersedianya Meubelair, Tersedianya Aset Tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud, dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD														
4	2	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	Tahun	1 Tahun	12,874,474,728									1 Tahun	0														

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Masi Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
4	2	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa Layanan Umum Kantor 1 Tahun	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,538,975,120	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa Layanan Umum Kantor 1 Tahun	24 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	0	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa Layanan Umum Kantor 1 Tahun	12 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	96 Laporan	10,035,499,608	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa Layanan Umum Kantor 1 Tahun	96 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	6,447,513,000					100 %	0		
4	2	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	1,123,832,000	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Kendaraan Dinas, Jabatan dan Operasional, Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Rumah Jabatan serta Premi Asuransi	10 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peritinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Peritannya				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Unit	902,826,000	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Kendaraan Dinas, Jabatan dan Operasional, Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Rumah Jabatan serta Premi Asuransi	25 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Unit	0	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Kendaraan Dinas, Jabatan dan Operasional, Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Rumah Jabatan serta Premi Asuransi	80 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
											PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
4	2	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	0	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Kendaraan Dinas, Jabatan dan Operasional, Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Rumah Jabatan serta Premi Asuransi	5 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	0	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Kendaraan Dinas, Jabatan dan Operasional, Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Rumah Jabatan serta Premi Asuransi	2 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	100,000,000	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Kendaraan Dinas, Jabatan dan Operasional, Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Rumah Jabatan serta Premi Asuransi	0 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara						3 Unit					3 Unit		
4	2	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	2,791,750,000	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Kendaraan Dinas, Jabatan dan Operasional, Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Rumah Jabatan serta Premi Asuransi	10 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	1,529,105,000	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Kendaraan Dinas, Jabatan dan Operasional, Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Rumah Jabatan serta Premi Asuransi	10 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300 Unit	0	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah termasuk pendanaan Dinas, Jabatan dan Operasional, Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Rumah Jabatan serta Premi Asuransi	300 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	01.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bulan		Bulan	12 Bulan	73,793,787,800					12 Bulan	0		
4	2	1	01.15	1	Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				85 Orang/ Bulan	70,050,894,410	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD, Pakaian Dinas dan	85 Orang/ Bulan	0	SEKRETARIAT DPRD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerang Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
								Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)		dan pelayanan publik	Atribut DPRD serta Medical Check Up DPRD 1 Tahun							
											1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik								
4	2	1	01.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	2,702,372,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD, Pakaian Dinas dan Atribut DPRD serta Medical Check Up DPRD 1 Tahun	7 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	1	01.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	85 Orang	1,040,521,390	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD, Pakaian Dinas dan Atribut DPRD serta Medical Check Up DPRD 1 Tahun	85 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	1	01.16		Layanan Administrasi DPRD	% Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	8,648,625,800					100 %	0					
4	2	1	01.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	85 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keanggotaan DPRD, Terselenggaranya Fraksi DPRD, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, serta Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	85 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	1	01.16	2	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	359,305,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keanggotaan DPRD, Terselenggaranya Fraksi DPRD, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, serta Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	9 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	1	01.16	3	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5 Laporan	166,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keanggotaan DPRD, Terselenggaranya Fraksi DPRD, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, serta Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	5 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	1	01.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	5 Paket	8,022,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keanggotaan DPRD, Terselenggaranya Fraksi DPRD, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, serta Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	5 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	% Rampinga yang difasilitasi Pembahasannya, % Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah, % Cakupan DPRD yang Kompeten di Bidanganya, % Facilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat serta Facilitasi Tugas DPRD	100 %	184,958,218,696					100 %	0					
4	2	2	01.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	% Facilitasi Pembahasan Rampinga	100 %	26,436,587,500					100 %	0					
4	2	2	01.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	385,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Pembahasan Rampinga dan Peraturan DPRD (Non APBD)	12 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD			
4	2	2	01.01	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	12 Dokumen	23,231,788,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Pembahasan Rampinga dan Peraturan DPRD (Non APBD)	12 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD			
4	2	2	01.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 Dokumen	1,176,961,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Pembahasan Rampinga dan Peraturan DPRD (Non APBD)	12 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD			
4	2	2	01.01	4	Facilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	869,068,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Pembahasan Rampinga dan Peraturan DPRD (Non APBD)	6 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD			
4	2	2	01.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	773,409,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Pembahasan Rampinga dan Peraturan DPRD (Non APBD)	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD			
4	2	2	01.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	% Pemenuhan Facilitasi Pembahasan Rampinga APBD	100 %	12,615,548,400					100 %	0					
4	2	2	01.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	814,764,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran (APBD)	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD				
4	2	2	01.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	812,372,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran (APBD)	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
												Semua Kabupaten Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
4	2	2	01.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	2,856,646,600			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran (APBD)	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	01.02	4	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	2,903,940,000			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran (APBD)	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	01.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				0 Dokumen	2,687,999,400			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran (APBD)	0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen						2 Dokumen			
4	2	2	01.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	2,539,825,900			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran (APBD)	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	01.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	% Pemenuhan Fasilitas Kegiatan DPRD	%		%	100 %	22,816,592,700					100 %	0		
4	2	2	01.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				2 Laporan	1,284,167,900			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Kegiatan Komisi-Komis, Pengawasan Pengguna Anggaran serta Pembahasan LKPU	2 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	01.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2 Laporan	1,490,869,200			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Kegiatan Komisi-Komis, Pengawasan Pengguna Anggaran serta Pembahasan LKPU	2 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	01.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				2 Laporan	1,495,943,500			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Kegiatan Komisi-Komis, Pengawasan Pengguna Anggaran serta Pembahasan LKPU	2 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	01.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				2 Laporan	1,449,824,100			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Kegiatan Komisi-Komis, Pengawasan Pengguna Anggaran serta Pembahasan LKPU	2 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	01.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				2 Laporan	1,320,165,000			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Kegiatan Komisi-Komis, Pengawasan Pengguna Anggaran serta Pembahasan LKPU	2 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	01.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1,779,272,000			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Kegiatan Komisi-Komis, Pengawasan Pengguna Anggaran serta Pembahasan LKPU	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	01.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				340 Dokumen	11,735,976,000			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Kegiatan Komisi-Komis, Pengawasan Pengguna Anggaran serta Pembahasan LKPU	340 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	01.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	2,260,375,000			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Kegiatan Komisi-Komis, Pengawasan Pengguna Anggaran serta Pembahasan LKPU	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	01.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	% Anggota DPRD yang Kompeten di bidangnya	%		%	100 %	65,263,681,896					100 %	0		
4	2	2	01.04	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				85 Dokumen	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kompetensi DPRD dibidangnya, tersedianya kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Fungsional, Terselenggaranya Hubungan Masyarakat dan tersusunnya Program Kerja DPRD	85 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	3,648,178,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kompetensi DPRD dibidangnya, tersedianya kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Fungsional, Terselenggaranya Hubungan Masyarakat dan tersusunnya Program Kerja DPRD	6 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				510 Dokumen	29,824,161,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kompetensi DPRD dibidangnya, tersedianya kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Fungsional, Terselenggaranya Hubungan Masyarakat dan tersusunnya Program Kerja DPRD	510 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				15 Orang	569,857,680			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kompetensi DPRD dibidangnya, tersedianya kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Fungsional, Terselenggaranya Hubungan Masyarakat dan tersusunnya Program Kerja DPRD	15 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Pemerang Daerah Penanggung Jawab
												Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			14	15	16	17			
													Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat dan tersusunnya Program Kerja DPRD			
4	2	2	01.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Praksi	Jumlah Tenaga Ahli Praksi				18 Orang	683,829,216		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat dan tersusunnya Program Kerja DPRD	18 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				510 Dokumen	28,709,292,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat dan tersusunnya Program Kerja DPRD	510 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1,828,364,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat dan tersusunnya Program Kerja DPRD	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan Fasilitas Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%		%	100 %	43,900,407,700							100 %	0	
4	2	2	01.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	0		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				9 Dokumen	957,185,200		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	9 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	42,943,222,500		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Cakupan Fasilitas Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%		%	100 %	651,836,800							100 %	0	
4	2	2	01.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	0		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	651,836,500		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	% Cakupan Fasilitas Pembahasan Kerjasama Daerah	%		%	100 %	773,061,000							100 %	0	
4	2	2	01.07	1	Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Perseetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Perseetujuan Kerja Sama Daerah				5 Dokumen	773,061,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Pembahasan Kerjasama Daerah dan Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	5 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				12 Dokumen	0		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Pembahasan Kerjasama Daerah dan Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	12 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.08		Facilitasi Tugas DPRD	% Cakupan Fasilitas Tugas-tugas DPRD, Badan Musyawarah dan Pimpinan DPRD	%		%	100 %	12,800,533,000							100 %	0	
4	2	2	01.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				10 Dokumen	6,530,767,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Tugas-tugas DPRD	10 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Praksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	147,867,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Tugas-tugas DPRD	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.08	3	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				9 Dokumen	2,480,607,500		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Tugas-tugas DPRD	9 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	01.08	4	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD				17 Dokumen	2,611,319,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terfasilitasinya Tugas-tugas DPRD	17 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
								Kerjasama, Semua Kelurahan	DAPAT (PAD)	Dan	dan pelayanan publik								
4	2	2	01.08	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik/ekonomi Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tertfasilitasinya Tugas-tugas DPRD	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	1				PERENCANAAN				53,898,303,632						56,862,627,700				
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, %ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori minimal Baik, %Penggunaan Temuan Berdasarkan LHP	%		%	100 %	36,702,774,860			100 %	38,819,799,725				
5	1	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	%		%	100 %	630,576,528			100 %	662,105,350				
5	1	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	67,000,376	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	2 Dokumen	70,350,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	24,073,000	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	25,276,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	24,073,000	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	25,276,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	44,400,000	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	46,620,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	40,000,000	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	42,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8 Laporan	431,030,152	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/Dinas Provinsi dan Kab/Kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	8 Laporan	452,581,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	29,111,762,660				100 %	30,745,482,400			
5	1	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			194 Orang/ Bulan	28,692,872,532	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	194 Orang/ Bulan	30,305,617,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2400 Dokumen	319,290,528	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2400 Dokumen	335,255,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	99,599,600	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	12 Laporan	104,579,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	%		%	100 %	119,358,200				100 %	125,326,100			
5	1	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	21,159,900	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	2 Dokumen	22,217,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			3 Laporan	98,198,300	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	3 Laporan	103,108,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	%		%	100 %	657,036,300				100 %	689,888,100			
5	1	1	01.05	2	Pengadaan Paksiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paksiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			194 Paket	307,015,000	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik		Kantor Bappelitbangda Prov. Sulsel	194 Paket	322,365,750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
5	1	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain				215 Dokumen	127,282,200	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	215 Dokumen	133,646,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.05	9	Pendidikan dan Platihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	64,025,300	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	100 Orang	67,226,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				215 Orang	158,713,800	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	215 Orang	166,649,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%		%	100 %	1,782,484,200						100 %	1,871,608,400	
5	1	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	120,605,900	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	12 Paket	126,636,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	206,114,900	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	12 Paket	216,420,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	89,795,100	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	1 Paket	94,284,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	194,609,500	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	1 Laporan	204,339,950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	1,171,358,800	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	80 Laporan	1,229,926,750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	589,567,600						100 %	722,830,500	
5	1	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	5,197,600	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	1 Unit	109,242,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
															1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				
5	1	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	584,370,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	10 Unit	613,588,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1,100,608,312						100 %	1,155,638,790	
5	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	117,604,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	12 Laporan	123,484,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	983,004,312	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	1 Laporan	1,032,154,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	2,711,381,060						100 %	2,846,950,125	
5	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				41 Unit	726,481,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	41 Unit	762,805,050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	334,163,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	13 Unit	350,871,150	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	105,347,500	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappetihsangda Prov. Sulsel	1 Unit	110,614,875	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
5	1	1	01.09	9	Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	752,059,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeitbangda Prov. Sulsel	2 Unit	789,662,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	01.09	10	Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	793,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeitbangda Prov. Sulsel	10 Unit	832,996,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase peningkatan capaian kinerja program	%		%	0.5 %	12,997,160,980						0.5 %	13,687,013,525	
						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKUMD kedalam RKPD dan APBD	%		%	100 %							100 %		
5	1	2	01.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	%		%	100 %	3,248,321,000						100 %	3,406,169,550	
5	1	2	01.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	479,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	498,939,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	01.01	6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPUMD/RKPD)				2 Dokumen	2,768,791,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	2 Dokumen	2,907,230,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	01.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	%		%	100 %	254,417,000						100 %	267,137,850	
5	1	2	01.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1046 Masukan	254,417,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1046 Masukan	267,137,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
															1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				
5	1	2	01.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	Kab/Kota		Kab/Kota	24 Kab/Kota	9,494,422,980						24 Kab/Kota	10,013,706,125	
						% Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %							100 %		
5	1	2	01.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	8,299,840,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	2 Laporan	8,714,832,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	01.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	864,759,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	4 Laporan	952,559,150	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	01.03	4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Disalipin/Evaluasi				48 Dokumen	329,823,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	48 Dokumen	346,314,675	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINERKONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	%		%	100 %	4,198,367,792						100 %	4,355,814,450	
5	1	3	01.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Data dan Informasi		Data dan Informasi	8 Data dan Informasi	1,464,251,704						8 Data dan Informasi	1,537,464,400	
						Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rekomendasi		Rekomendasi	12 Rekomendasi							12 Rekomendasi		
5	1	3	01.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	136,571,152	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	143,399,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	01.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan				5 Perangkat Daerah	181,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	5 Perangkat Daerah	191,037,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
															1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				
5	1	3	01.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPUMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	271,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Laporan	285,285,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	01.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	287,968,952	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	302,367,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPJPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Pernakap Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
															11					12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
5	1	3	01.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				17 Perangkat Daerah	231,851,888	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	17 Perangkat Daerah	243,444,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	1	3	01.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	354,219,712	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Laporan	371,930,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	1	3	01.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang SDA	Data dan Informasi		Data dan Informasi	10 Data dan Informasi	1,148,807,480					10 Data dan Informasi	1,206,247,875			
5	1	3	01.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	150,008,476	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	157,508,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	01.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan				7 Perangkat Daerah	155,925,476	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	7 Perangkat Daerah	163,721,750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	01.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan				7 Laporan	255,372,976	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	7 Laporan	268,141,625	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	01.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	150,570,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	158,099,350	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	01.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				7 Perangkat Daerah	158,270,376	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	7 Perangkat Daerah	166,183,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	01.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJPD/RPJMD pada Bidang SDA				7 Laporan	278,659,376	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	7 Laporan	292,592,350	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	01.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Data dan Informasi		Data dan Informasi	25 Data dan Informasi	1,585,308,608					25 Data dan Informasi	1,612,102,175			
5	1	3	01.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rekomendasi		Rekomendasi	12 Rekomendasi						12 Rekomendasi				
5	1	3	01.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	198,412,752	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	208,333,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	01.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				4 Perangkat Daerah	151,690,876	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	4 Perangkat Daerah	159,275,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	01.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	662,421,952	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	4 Laporan	643,071,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	01.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	170,386,376	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	1 Dokumen	178,905,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	01.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				3 Perangkat Daerah	139,047,976	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	3 Perangkat Daerah	146,000,375	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	01.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				3 Laporan	263,348,676	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan/dinas Provinsi dan Kab/kota serta Instansi Vertikal dan Stakeholder Prov. Sulsel	3 Laporan	276,516,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2			PELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Perentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	%		%	3 %	5,343,721,220					3 %	5,315,188,100			
5	5	2	01.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rekomendasi		Rekomendasi	4 Rekomendasi	1,150,711,104					4 Rekomendasi	1,176,032,650			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mata Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9							10			11
5	5	2	01.01	1	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		1 Laporan	94,981,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Laporan	99,730,150	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	01.01	2	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		2 Laporan	355,821,152	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	2 Laporan	341,398,200	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	01.01	14	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		1 Laporan	699,908,852	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Laporan	734,904,300	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	01.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rekomendasi	Rekomendasi	4 Rekomendasi	1,120,935,852					4 Rekomendasi	1,270,771,100		
5	5	2	01.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		1 Dokumen	587,981,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Dokumen	617,380,900	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	01.02	2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1 Dokumen	240,765,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Dokumen	287,111,800	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	01.02	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		1 Dokumen	292,188,052	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Dokumen	366,278,400	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	01.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi	Rekomendasi	5 Rekomendasi	1,369,357,780					5 Rekomendasi	1,421,949,700		
5	5	2	01.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		2 Dokumen	589,581,180	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	2 Dokumen	600,307,250	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	01.03	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		1 Dokumen	273,439,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Dokumen	287,111,800	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	01.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	506,336,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Dokumen	534,530,650	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	01.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengembangkan Inovasi dan Teknologi	OPD	OPD	11 OPD	1,602,716,784					11 OPD	1,446,434,650		
5	5	2	01.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		1 Dokumen	1,109,040,102	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Dokumen	928,140,500	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	01.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		1 Laporan	139,084,954	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Laporan	145,972,850	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	01.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		3 Laporan	196,912,676	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	3 Laporan	206,758,300	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	01.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbahagan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbahagan		1 Laporan	74,049,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Laporan	77,751,650	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	01.04	5	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual		1 Laporan	83,629,852	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappellitbangda Prov. Sulsel, SKPD Prov. Sulsel, Kab./Kota, Majelis Perimbangan, Tim Pengadai Mutu, PTN/PTS, Kementerian/Lembaga yang terkait dan Stakeholder	1 Laporan	87,811,350	BADAN PERENCANAAN PEMBIANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	2				KEUANGAN				2,273,258,679,464							2,765,872,323,460		
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100 %	57,801,567,143						100 %	107,249,516,008		
						Presentase Penuntutan Temuan Berdasarkan LHP (R)	%	25 %							25 %			
						Presentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100 %							100 %			
5	2	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100 %	1,600,000,000						100 %	2,060,000,000		
5	2	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16 Dokumen	400,000,000	Kota Makassar, Semua	PENDAPATAN ASLI				0	700,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)						
5	2	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	367,920,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Dokumen	250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	132,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Dokumen	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				58 Laporan	700,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	58 Laporan	760,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	47,228,642,177						100 %	94,909,516,008	
5	2	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				137 Orang/ Bulan	46,163,641,977	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	137 Orang/ Bulan	93,024,516,008	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3077 Dokumen	129,999,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3077 Dokumen	330,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				17 Dokumen	234,995,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	17 Dokumen	250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				11 Dokumen	199,998,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	11 Dokumen	345,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				25 Laporan	500,007,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25 Laporan	960,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	220,000,000						100 %	350,000,000	
5	2	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				13 Laporan	220,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	13 Laporan	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	%		%	100 %	3,435,592,712						100 %	2,380,000,000	
5	2	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket	499,990,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Paket	650,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				435 Paket							435 Paket		
5	2	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				16 Dokumen	2,451,902,712	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	16 Dokumen	590,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	130,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	50 Orang	140,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				28 Orang	353,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	28 Orang	1,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%		%	100 %	1,299,783,000						100 %	3,300,000,000	
5	2	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				520 Paket	99,995,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	520 Paket	300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1160 Paket	300,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1160 Paket	1,050,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	400,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	600,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	499,788,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	1,350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	2	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	1,247,416,000						100 %	1,350,000,000	
5	2	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				122 Unit	1,247,416,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	122 Unit	1,350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	120,133,920						100 %	250,000,000	
5	2	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	120,133,920	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	%	%	100 %	2,649,999,334						100 %	2,650,000,000	
5	2	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinasnya			44 Unit	1,149,999,334		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	44 Unit	1,250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1,200,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	900,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			323 Unit	300,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	323 Unit	500,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyerapan Bersama Rancangan APBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	%	%	100 %	2,210,107,112,321						100 %	2,654,421,807,452	
5	2	2	01.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%	%	100 %	4,260,105,400						100 %	4,901,000,000	
5	2	2	01.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	132,967,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	145,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	17,988,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	20,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	01.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			53 Dokumen	268,655,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	53 Dokumen	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	01.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			53 Dokumen	268,655,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	53 Dokumen	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	01.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi			53 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	53 Dokumen	22,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	01.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			53 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	53 Dokumen	22,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	01.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			4 Dokumen	2,437,029,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Dokumen	2,450,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	01.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			3 Dokumen	445,242,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Dokumen	600,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	01.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			0 Dokumen	649,568,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	900,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			5 Dokumen							5 Dokumen		
5	2	2	01.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			4 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Dokumen	42,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	01.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota	%	%	100 %	2,250,865,500						100 %	3,060,000,000	
5	2	2	01.02	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			24 Laporan	347,029,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	24 Laporan	500,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	01.02	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			24 Laporan	312,235,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	24 Laporan	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	01.02	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			74 Laporan	499,986,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	74 Laporan	550,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	01.02	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi			0 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	160,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peraangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				Semua Kelurahan						4 Dokumen			
5	2	2	01.02	6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				2 Laporn	950,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				24 Dokumen	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				361 Dokumen	200,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%		%							100 %	4,790,000,000		
5	2	2	01.03	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				10 Dokumen	2,210,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.03	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				721 Dokumen	300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.03	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				8 Dokumen	650,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.03	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				13 Dokumen	400,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.03	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				28 Laporan	450,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.03	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				4 Dokumen	180,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				75 Orang	600,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%		%							100 %	3,850,000,000		
5	2	2	01.04	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				131 Dokumen	450,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.04	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				1166 Laporan	850,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.04	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				9 Dokumen	1,500,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.04	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				25 Dokumen	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				288 Orang	700,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.05		Pemungut Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pemungut Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%							100 %	2,637,820,807,452		
5	2	2	01.05	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembiayaan Cipta Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembiayaan Cipta Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				4 Laporan	4,466,445,356	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
5	2	2	01.05	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0				4 Laporn	902,000,961,011	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
														11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
5	2	2	01.05	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				4 Laporan	60,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Laporan	150,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	01.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				4 Laporan	1,525,932,742,946	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Laporan	1,581,353,401,085	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tanah Pemerintah Provinsi yang Telah bersertifikat	%		%	58 %	5,350,000,000						58 %	4,201,000,000	
						Persentase Tidak Lanjut Rencana Akit Manajemen Aset Daerah	%		%	92 %							92 %		
5	2	3	01.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	5,350,000,000						100 %	4,201,000,000	
5	2	3	01.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				6 Dokumen	450,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Dokumen	300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	01.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	21,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	01.01	3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	120,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Dokumen	150,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	01.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				191 Laporan	250,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	191 Laporan	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	01.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				55 Laporan	1,040,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	55 Laporan	1,100,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	01.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				5 Laporan	2,380,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Laporan	1,430,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	01.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	120,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	150,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	01.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Laporan	400,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	01.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				59 Dokumen	670,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	59 Dokumen	300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						164,541,834,998							194,028,986,374	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						160,406,857,298							185,689,601,110	
5	2	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						932,178,300							1,476,787,461	
5	2	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	225,999,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	334,454,362	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	214,609,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	278,066,547	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	137,134,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	163,842,773	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	144,015,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	297,246,241	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	114,719,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	279,725,622	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	53,599,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Laporan	76,453,322	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	42,100,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	46,968,594	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						132,472,015,606							188,666,296,986	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Masi Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
5	2	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					484 Orang/ Bulan	131,586,912,806	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				484 Orang/ Bulan	156,938,038,247	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	36,840,000		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	105,668,771	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	400,646,700		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	601,910,591	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	91,386,000		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	210,433,112	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	31,668,000		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	58,729,044	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	178,333,800		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	542,329,275	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	142,962,400		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	199,650,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	3,265,900		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Dokumen	9,537,946	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen								1 Dokumen		
5	2	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							347,258,000							620,994,618	
5	2	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	12,719,400		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	16,936,176	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	152,999,800		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	246,900,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	6,000,000		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	7,852,900	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				25 Laporan	5,052,000		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 Laporan	6,756,156	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	159,986,800		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	227,442,643	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	6,000,000		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	109,116,743	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4,500,000		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	5,989,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							785,364,200							1,435,647,244	
5	2	1	01.04	2	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	302,442,900		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	797,948,225	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	117,826,700		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	93,452,438	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	365,094,600		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	544,246,581	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1,197,545,300							3,631,591,062	
5	2	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				11 Unit	241,956,200		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11 Unit	733,478,259	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
5	2	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket	102,410,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	554,161,850	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				510 Paket							510 Paket		
5	2	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	207,728,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	886,752,875	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	48,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	353,957,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	250,978,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	512,967,400	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				30 Orang	11,340,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Orang	15,093,540	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.05	8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				0 Orang	6,237,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang	8,302,645	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				50 Orang							50 Orang		
5	2	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	120,547,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang	197,230,242	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				506 Orang							506 Orang		
5	2	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	6,400,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Orang	75,584,828	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	201,948,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Orang	294,061,823	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						4,365,430,850							5,663,900,262	
5	2	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				484 Paket	107,712,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				484 Paket	108,200,983	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				400 Paket	55,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400 Paket	61,226,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Paket	336,424,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Paket	874,825,039	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	2,682,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Paket	3,240,252,950	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	376,101,550	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	413,191,647	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	575,503,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	542,555,530	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	3,648,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	50,565,371	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	228,542,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	372,682,742	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,856,622,186							2,566,482,691	
5	2	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Paket	221,220,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Paket	453,673,480	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	2,287,802,186	Kota Makassar, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI				30 Unit	1,307,923,511	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Menu Rencana Tahun 2024		Penangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
														11	12				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10			14	15	16	17
												Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)						
5	2	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	266,200,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1,297,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	264,869,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				600 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				600 Unit	256,217,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				300 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300 Unit	17,569,200	BADAN PENDAPATAN DAERAH
8	2	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10,121,181,224							7,740,239,012	
5	2	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	211,990,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	501,474,758	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,718,524,376	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	6,695,499,932	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	96,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	208,947,816	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	3,094,666,848	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	334,316,506	BADAN PENDAPATAN DAERAH
8	2	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6,329,361,632							3,888,121,774	
5	2	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				155 Unit	1,114,030,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				155 Unit	1,129,989,395	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya				155 Unit	654,840,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				155 Unit	624,734,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	01.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	55,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	61,435,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit								50 Unit	
5	2	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	422,370,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	660,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120 Unit								120 Unit	
5	2	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	495,085,720	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	586,685,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				5 Unit								5 Unit	
5	2	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	3,587,535,912	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26 Unit	825,278,379	BADAN PENDAPATAN DAERAH
8	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						969,376,000							2,498,495,679	
8	2	2	01.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						575,258,800							1,597,904,593	
5	2	2	01.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	81,244,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	198,024,849	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	78,664,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	113,590,868	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	01.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	22,135,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	536,452,123	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen								1 Dokumen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
5	2	2	01.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi					1 Dokumen	24,788,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	33,933,180	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	01.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi					0 Dokumen	27,429,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	39,812,872	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi					1 Dokumen							1 Dokumen		
5	2	2	01.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi					1 Dokumen	24,720,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	36,477,719	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	01.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					0 Dokumen	66,073,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	39,276,005	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					1 Dokumen							1 Dokumen		
5	2	2	01.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					0 Dokumen	38,395,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	220,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					1 Dokumen							1 Dokumen		
5	2	2	01.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					1 Dokumen	211,805,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	380,336,977	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	01.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							394,117,200							900,591,086	
5	2	2	01.04	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					12 Laporan	338,386,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	663,211,894	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	01.04	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi					2 Dokumen	55,731,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	237,379,192	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							3,165,601,700							5,840,889,585	
5	2	4	01.01		Regangan Pengelolaan Pendapatan Daerah							3,165,601,700							5,840,889,585	
5	2	4	01.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					4 Dokumen	757,418,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	659,026,547	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah					6 dokumen	170,355,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 dokumen	638,969,177	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					0 Laporan							0 Laporan		
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					5 Laporan							5 Laporan		
5	2	4	01.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					1 Laporan	90,833,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	759,277,368	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					4 Laporan	867,120,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	948,040,485	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti					0 Laporan	361,960,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	654,158,166	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti					12 Laporan							12 Laporan		
5	2	4	01.01	9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					4 Dokumen	359,576,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	197,419,643	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti					1 dokumen	138,117,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen	496,520,366	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan					1 dokumen	319,557,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen	950,587,571	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					0 Laporan							0 Laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					4 Laporan							4 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
5	2	4	01.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	100,660,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	536,890,262	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						551,426,400							730,204,909	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						551,426,400							730,204,909	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						551,426,400							730,204,909	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	444,586,900	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Sarana dan Prasarana	680,341,738	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	15,199,600	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	14,311,312	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	17,339,900	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	20,132,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	74,300,000	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	15,419,111	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						681,846,050							760,736,483	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						681,846,050							760,736,483	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						681,846,050							760,736,483	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	472,346,150	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Sarana dan Prasarana	642,232,843	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	61,499,900	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	50,941,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	39,000,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	51,062,108	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	109,000,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						550,484,100							620,278,748	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						550,484,100							620,278,748	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						550,484,100							620,278,748	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	495,734,100	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Sarana dan Prasarana	593,468,468	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	13,000,000	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	3,256,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	300	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	12,553,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	41,450,000	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	11,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						686,268,700							1,052,635,508	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						686,268,700							1,052,635,508	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						686,268,700							1,052,635,508	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				40 Sarana dan Prasarana	458,772,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Sarana dan Prasarana	866,933,858	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	59,100,000	Kab. Gowa, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	51,601,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	38,896,700	Kab. Gowa, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	46,100,118	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	129,500,000	Kab. Gowa, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	88,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						533,372,400							723,617,808	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						533,372,400							723,617,808	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						533,372,400							723,617,808	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				40 Sarana dan Prasarana	387,642,900	Kab. Maros, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Sarana dan Prasarana	605,477,388	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	45,880,000	Kab. Maros, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	37,059,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	38,949,500	Kab. Maros, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	53,580,888	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	60,900,000	Kab. Maros, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	27,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						767,872,000							848,853,252	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						767,872,000							848,853,252	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						767,872,000							848,853,252	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				35 Sarana dan Prasarana	567,372,000	Kab. Sidenreng Rappang, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 Sarana dan Prasarana	755,298,268	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	65,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	34,781,762	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daernh				4 Dokumen Ketetapan	35,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	50,102,798	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	8,370,424	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						772,713,350							854,965,618	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						772,713,350							854,965,618	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						772,713,350							854,965,618	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	635,163,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Sarana dan Prasarana	750,110,338	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.				0 Laporan	63,600,000	Kab. Bantaeng, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	56,551,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	7,950,000	Kab. Bantaeng, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	20,803,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	66,000,000	Kab. Bantaeng, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	27,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						714,680,750							881,745,338	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						714,680,750							881,745,338	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						714,680,750							881,745,338	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	489,999,250	Kab. Luwu Utara, Sempu Kecamatan	PENDAPATAN ASLI				30 Sarana dan Prasarana	772,876,928	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasngkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	50.520.000	Semua Kelurahan (PAD) Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	42.070.802	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	52.919.500	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	50.297.608	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak				4 Dokumen SSPD	121.242.000	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	16.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						532.205.500							575.369.618	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						532.205.500							575.369.618	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						532.205.500							575.369.618	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	373.905.500	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Sarana dan Prasarana	508.084.838	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	55.300.000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	29.458.532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	40.000.000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	21.326.248	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak				4 Dokumen SSPD	63.000.000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	16.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						720.626.900							1.017.878.148	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						720.626.900							1.017.878.148	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						720.626.900							1.017.878.148	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	553.627.400	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Sarana dan Prasarana	955.427.868	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	37.499.500	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	18.931.532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	22.000.000	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	27.018.748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak				4 Dokumen SSPD	107.500.000	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	16.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						562.227.900							722.188.523	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						562.227.900							722.188.523	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						562.227.900							722.188.523	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	375.118.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Sarana dan Prasarana	652.004.363	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	37.499.900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	6.761.132	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	27.110.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	35.923.028	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak				4 Dokumen SSPD	122.500.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	27.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						497.275.340							885.655.178	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						497.275.340							885.655.178	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						497.275.340							885.655.178	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	369.475.340	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Sarana dan Prasarana	828.374.898	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasngkat Daerah Penanggung Jawab																																																										
												Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif																																																														
1					2					3								4					5					6					7					8					9					10					11					12					14					15					16					17	
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	31,800,000			Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	21,571,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	33,000,000			Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen Ketetapan	19,208,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak				4 Dokumen SSPD	63,000,000			Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																																																										
5	2				KEUANGAN						599,830,900									572,649,631																																																											
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						599,830,900									572,649,631																																																											
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						599,830,900									572,649,631																																																											
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				35 Sarana dan Prasarana	396,731,000			Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35 Sarana dan Prasarana	866,595,168	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	56,099,900			Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	43,627,595	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	76,050,000			Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen Ketetapan	45,926,868	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak				4 Dokumen SSPD	70,950,000			Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																																																										
5	2				KEUANGAN						566,184,240									575,419,468																																																											
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						566,184,240									575,419,468																																																											
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						566,184,240									575,419,468																																																											
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				35 Sarana dan Prasarana	362,381,640			Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35 Sarana dan Prasarana	866,337,218	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	75,100,000			Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	44,022,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	35,102,700			Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen Ketetapan	48,559,718	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak				4 Dokumen SSPD	93,599,900			Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																																																										
5	2				KEUANGAN						554,343,400									683,719,378																																																											
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						554,343,400									683,719,378																																																											
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						554,343,400									683,719,378																																																											
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	376,093,400			Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30 Sarana dan Prasarana	609,664,098	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	62,000,000			Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	42,251,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	13,250,000			Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen Ketetapan	20,803,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak				4 Dokumen SSPD	103,000,000			Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen SSPD	11,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																											
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																																																										
5	2				KEUANGAN						562,710,500									732,785,538																																																											
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						562,710,500									732,785,538																																																											
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						562,710,500									732,785,538																																																											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penaugkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	423,610,800	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30 Sarana dan Prasarana	645,541,258	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	34,499,900	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	24,541,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	37,999,800	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen Ketetapan	46,202,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	66,600,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						686,904,500						765,892,128		
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						686,904,500						765,892,128		
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						686,904,500						765,892,128		
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	539,195,800	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30 Sarana dan Prasarana	676,018,848	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	45,530,000	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	36,674,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	22,400,000	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen Ketetapan	36,698,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	79,778,700	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						611,165,900						713,410,413		
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						611,165,900						713,410,413		
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						611,165,900						713,410,413		
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	454,866,100	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30 Sarana dan Prasarana	664,858,083	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	28,499,800	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	2,652,082	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	48,750,000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen Ketetapan	18,400,248	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	79,050,000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen SSPD	27,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						726,860,150						869,710,073		
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						726,860,150						869,710,073		
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						726,860,150						869,710,073		
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	549,110,150	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30 Sarana dan Prasarana	765,559,673	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	50,350,000	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	41,976,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	27,500,000	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen Ketetapan	34,673,868	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	99,900,000	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen SSPD	27,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						1,695,714,201						1,880,182,827		
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						1,695,714,201						1,880,182,827		
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1,695,714,201						1,880,182,827		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penasang Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				50 Sarana dan Prasarana	1,213,742,201	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Sarana dan Prasarana	1,342,747,547	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	36,550,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	26,796,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	74,172,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	45,608,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak				4 Dokumen SSPD	371,250,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	165,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						611,314,900							684,966,374	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						611,314,900							684,966,374	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						611,314,900							684,966,374	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	488,611,300	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Sarana dan Prasarana	600,104,548	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	12,000,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	16,708,468	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	34,503,600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	46,153,358	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak				4 Dokumen SSPD	76,200,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	22,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						568,903,100							1,031,088,048	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						568,903,100							1,031,088,048	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						568,903,100							1,031,088,048	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	424,153,300	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Sarana dan Prasarana	940,279,768	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	47,249,800	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	29,271,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	33,930,000	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	39,536,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak				4 Dokumen SSPD	63,570,000	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	22,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						836,673,700							941,456,968	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						836,673,700							941,456,968	
5	2	4	01.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						836,673,700							941,456,968	
5	2	4	01.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				40 Sarana dan Prasarana	369,168,900	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Sarana dan Prasarana	797,106,408	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	63,660,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	56,617,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	38,794,800	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	54,733,028	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	01.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak				4 Dokumen SSPD	65,050,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	33,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						886,203,000							838,350,778	

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran		Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
												Target 2023		Pagu Indikatif		Lokasi				Sumber Dana				Nasional		Daerah		Target		Pagu Indikatif	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		14		15		16		17	
5	2	4				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								556,203,000													838,350,778				
5	2	4	01.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								556,203,000													838,350,778				
5	2	4	01.01	4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				30 Sarana dan Prasarana	434,429,000	Kab. Luwu Timur, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Sarana dan Prasarana	748,520,068								BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5	2	4	01.01	5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	34,450,000	Kab. Luwu Timur, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	31,086,532								BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5	2	4	01.01	7		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	35,724,000	Kab. Luwu Timur, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	47,744,178								BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5	2	4	01.01	10		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggunnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	51,600,000	Kab. Luwu Timur, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	11,000,000								BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5	2					UNSUB PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																									
5	2					KEUANGAN						842,648,850															1,344,667,878				
5	2	4				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						842,648,850															1,344,667,878				
5	2	4	01.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						842,648,850															1,344,667,878				
5	2	4	01.01	4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				50 Sarana dan Prasarana	503,640,250	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Sarana dan Prasarana	1,134,817,298									BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	2	4	01.01	5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	58,002,800	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	50,391,532									BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	2	4	01.01	7		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	59,002,800	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen Ketetapan	49,458,748									BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	2	4	01.01	10		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggunnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	222,003,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen SSPD	110,000,000									BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	3					UNSUB PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																									
5	3					KEPEGAWAIAN						25,324,666,418															0				
5	3	1				PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						21,182,334,714															96 %	0			
							Penentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	%		%	96 %																				
							Penentase penuntutan temuan berdasarkan LHP	%		%	0 %																				
							Penentase realisasi kegiatan Perangkat Daerah	%		%	100 %																				
5	3	1	01.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						191,583,100															100 %	0			
5	3	1	01.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	17,393,900	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2 Dokumen								0		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	3	1	01.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11,127,800	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen								0		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	3	1	01.01	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10,512,300	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen								0		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	3	1	01.01	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	13,132,100	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen								0		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	3	1	01.01	5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	17,740,300	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen								0		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	3	1	01.01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	8,080,000	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Laporan								0		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	3	1	01.01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	113,596,700	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Laporan								0		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	3	1	01.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18,883,802,930															100 %	0			
5	3	1	01.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/ Bulan	18,730,319,054	Kota Makassar, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	140 Orang/ Bulan									0		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
														PENDAPATAN ASLI																	

Kode					Urusan / Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
													DANA DAERAH (PAD)						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	40,899,676	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	3	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	24,900,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4,481,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	4 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8,710,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Laporn	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	8,247,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	66,244,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	49,490,676						100 %	0	
5	3	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	5,182,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemilihan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	2,400,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Laporn	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Laporn	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	8,624,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2 Laporn	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	29,783,276	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2 Laporn	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	%		%	92 %	218,047,976						92 %	0	
5	3	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	2 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				420 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	420 Paket	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	48,921,776	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	5,146,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
													PENDAPATAN ASLI						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Peraangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
													DAERAH (PAD)						
5	3	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Ewahuasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	17,199,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	18 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				600 Orang	97,479,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	600 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	3	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				450 Orang	49,300,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	450 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	%		%	100 %	895,344,328						100 %		0
5	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				115 Paket	46,964,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	115 Paket	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlingkapan Kantor yang Disediakan				110 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	110 Paket	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				55 Paket	15,814,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	55 Paket	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	6 Paket	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	150,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	30 Paket	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				110 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	110 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	5 Paket	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporn	249,993,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220 Laporan	333,763,976	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	220 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				140 Dokumen	34,684,676	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	140 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	64,123,176	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	421,984,000						100 %		0
5	3	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Paket	16,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	30 Paket	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				60 Unit	405,954,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	60 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	3 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peraungkat Daerah Penanggung Jawab
												Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)						
5	3	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	15 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	10 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	97,551,704						100 %	0	
5	3	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11000 Laporan	97,551,704	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	11000 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	12 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	424,560,000						100 %	0	
5	3	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diharapkan Pajaknya				40 Unit	357,260,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	40 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	8,700,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	50 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	58,600,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	60 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	20 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				4 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	4 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	1 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	10 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	10 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%		%	95 %	4,142,331,704						95 %	0	
						Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tertinggi	%		%	100 %							100 %		
						Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN	%		%	65 %							65 %		
5	3	2	01.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengangkatan ASN sesuai dengan rencana kebutuhan yang terapan	%		%	100 %	903,267,684						100 %	0	
5	3	2	01.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	48,668,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	67,927,852	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	2 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.01	3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK				3 Dokumen	181,697,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	3 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peraangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
5	3	2	01.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	30,580,000	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.01	5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				1 Dokumen	24,721,000	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	75,892,476	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Laporan	28,910,000	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	270,619,728	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Lembaga	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.01	9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 Dokumen	36,100,900	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	38,763,876	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	65,151,252	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	34,234,000	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN yang Objektif dan tepat waktu	%		%	100 %	1,421,885,232						100 %	0	
5	3	2	01.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administratif, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				4 Dokumen	322,473,452	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	4 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Laporan	595,726,928	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	2 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	503,654,852	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pengembangan kompetensi ASN	%		%	100 %	1,126,299,332						100 %	0	
5	3	2	01.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	140,000,200	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	100 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	526,999,804	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	47,623,476	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	51,468,100	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	26,266,900	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN				200 Orang	19,611,900	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	200 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03	7	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Laporan	16,561,000	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				550 Orang	117,678,576	Kota Makassar, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	550 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
5	3	2	01.03	9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				100 Orang	14,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	100 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informas Jabatan Fungsional ASN				1 Laporan	18,659,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				120 Orang	89,149,476	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	120 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				4 Dokumen	38,280,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	4 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase evaluasi kinerja pegawai berbasis TI	%		%	100 %	690,909,456	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 %	0	
5	3	2	01.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	120,553,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	3	2	01.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	160,637,952	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	36,499,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				30 Orang	90,086,652	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	30 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300 Orang	54,144,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	300 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1 Dokumen	32,327,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				50 Orang	114,660,252	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	50 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				23 Laporan	48,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	23 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.04	9	Pelayanan Proses Lain Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Lain Perceraian Pegawai yang Dilyani				27 Dokumen	17,999,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	27 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	01.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evahuasi Disiplin ASN				1 Laporan	15,999,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Pemprov Sulsel	1 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	4				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						26,227,679,424							44,023,858,435	
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
5	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%	100 %	25,077,679,424						100 %	37,060,715,435	
5	4	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	184,316,000						100 %	1,083,262,401	
5	4	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	140,190,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Prov.Sulsel	4 Dokumen	724,537,001	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,976,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI	Revolusi Mental dan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan	ASN Prov.Sulsel	1 Dokumen	55,159,500	BADAN PENGEMBANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Pemerang Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	4	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	8,600,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Prov.Sulsel	1 Dokumen	24,385,900	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	9,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Prov.Sulsel	1 Dokumen	95,700,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	9,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Prov.Sulsel	1 Dokumen	22,347,600	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10 Laporan	8,550,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Prov.Sulsel	10 Laporan	161,132,400	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%	100 %	21,908,737,302						100 %	26,266,704,065	
5	4	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			134 Orang/ Bulan	21,758,737,302	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN BPSDM Prov. Sulsel	134 Orang/ Bulan	25,512,384,429	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	113,400,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN BPSDM Prov. Sulsel	12 Dokumen	550,508,996	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	7,350,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN BPSDM Prov. Sulsel	12 Dokumen	38,360,410	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 Laporan	7,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN BPSDM Prov. Sulsel	2 Laporan	61,270,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2 Dokumen	7,350,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN BPSDM Prov. Sulsel	2 Dokumen	38,500,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			3 Laporan	7,200,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN BPSDM Prov. Sulsel	3 Laporan	44,902,330	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen	7,200,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN BPSDM Prov. Sulsel	0 Dokumen	20,777,900	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik, Persentase Penuntem Temuan berdasarkan LHP	%	%	100 %	138,000,000						100 %	796,779,900	
5	4	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			185 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel	185 Paket	174,735,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	138,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel	1 Dokumen	622,044,500	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	240,000,000						100 %	3,363,637,804	
5	4	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisain	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisain			5 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana Prasarana BPSDM Prov. Sulsel	5 Paket	66,000,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisain	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisain			80 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana Prasarana BPSDM Prov. Sulsel	80 Paket	2,750,000,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisain	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisain			30 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana Prasarana BPSDM Prov. Sulsel	30 Paket	59,788,300	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1 Laporan	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana Prasarana BPSDM Prov. Sulsel	1 Laporan	212,415,104	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	140,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Peningkatan Kebutuhan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana Prasarana BPSDM Prov. Sulsel	1 Laporan	275,334,400	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	100 %	0						100 %	638,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
5	4	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	sarana prasarana	1 Paket	88,000,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	sarana prasarana	1 Unit	550,000,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	2,388,462,372						100 %	2,584,153,185	
5	4	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	936,792,468	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	sarana prasarana	1 Laporn	1,739,791,900	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,451,669,904	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	sarana prasarana	1 Laporn	844,361,285	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	218,163,750						100 %	2,328,278,480	
5	4	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	119,163,750	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana	13 Unit	495,836,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya				13 Unit	24,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana	13 Unit	198,429,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana	0 Unit	114,950,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit							3 Unit		
5	4	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana	13 Unit	983,708,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				40 Unit	75,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana	40 Unit	535,355,480	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Didik Kompetensi Manajerial, Kompetensi Didik Fungsional, Kompetensi Didik Sosial Kultural	%		%	100 %	1,150,000,000						100 %	6,963,143,000	
5	4	2	01.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	%		%	100 %	150,000,000						100 %	1,983,845,600	
5	4	2	01.01	3	Pengembangan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				244 Orang	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai ASN	244 Orang	1,081,595,900	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	01.01	4	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				3 Dokumen	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai ASN	3 Dokumen	902,249,700	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	01.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	4,979,297,400	
5	4	2	01.02	1	Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai ASN	1 Dokumen	614,779,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	01.02	4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Laporan	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai ASN	1 Laporan	1,697,604,700	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	01.02	5	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				1 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai ASN	1 Dokumen	222,997,500	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	01.02	7	Pengorganisasian Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				310 Orang	1,000,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai ASN	310 Orang	1,668,328,200	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	01.02	8	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3 Dokumen	0	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai ASN	3 Dokumen	775,588,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	7				PENGLOLAAN PENGHUBUNG						19,263,462,929							19,856,376,242	

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	7	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
5	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							14,055,102,000							15,005,234,618	
5	7	1	01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,352,110,600							1,370,225,200	
5	7	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	57,609,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	63,212,100	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	199,173,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	153,300,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	146,987,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	153,300,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	173,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	173,392,800	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	174,647,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	165,136,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	255,502,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	282,117,150	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	345,112,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	379,767,150	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,240,042,869							7,240,042,592	
5	7	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			51 Orang/ Bulan	7,240,042,869		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				51 Orang/ Bulan	7,240,042,592	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						644,809,200							1,092,801,991	
5	7	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			5 Paket	72,280,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	314,767,691	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			7 Paket	55,702,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Paket	81,090,500	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			100 Orang	283,696,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	329,443,800	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48 Rapat	233,130,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				48 Rapat	367,500,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,508,606,197							2,621,798,335	
5	7	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0 Paket	768,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	807,072,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	1,739,966,197		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	1,814,726,335	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,093,758,634							1,145,445,000	
5	7	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	151,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	159,075,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	942,258,634		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	986,370,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,215,774,500							1,534,921,500	
5	7	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya			0 Unit	694,030,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	799,081,500	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 Unit	521,744,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	735,840,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG							5,208,360,929							4,851,141,624	
5	7	2	01.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						5,208,360,929							4,851,141,624	
5	7	2	01.01	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan			0 Laporan	5,208,360,929		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	4,851,141,624	BADAN PENGHUBUNG
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	1			INSPEKTORAT DAERAH						57,163,927,864							67,630,149,625	
6	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						38,341,617,864							44,721,725,010	
					% ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Sangat Baik	%		%	98 %							98 %		
					% Penurunan Temuan Berdasarkan LUP	%		%	0 %							0 %		
					% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		%	97 %							97 %		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17			
6	1	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	609,400,182	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 %	844,370,364	
6	1	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	149,900,352	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	153,750,000	INSPEKTORAT
6	1	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	20,500,000	INSPEKTORAT
6	1	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	17,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	17,937,500	INSPEKTORAT
6	1	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	67,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	153,750,000	INSPEKTORAT
6	1	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	65,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	153,750,000	INSPEKTORAT
6	1	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	124,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	175,525,292	INSPEKTORAT
6	1	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	165,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	169,157,572	INSPEKTORAT
6	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	30,956,610,128					100 %	35,755,182,343	
6	1	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				153 Orang/Bulan	30,629,935,544	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	153 Orang/Bulan	35,286,006,754	INSPEKTORAT
6	1	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	169,227,056	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen	204,481,656	INSPEKTORAT
6	1	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	128,237,528	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen	234,723,683	INSPEKTORAT
6	1	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	9,737,500	INSPEKTORAT
6	1	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	13,210,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	13,540,250	INSPEKTORAT
6	1	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	6,500,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	0 Dokumen	6,662,500	INSPEKTORAT
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen						1 Dokumen		
6	1	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	20,500,000					100 %	50,625,000	
6	1	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10,400,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	25,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				17 Dokumen	10,100,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	17 Dokumen	25,625,000	INSPEKTORAT
6	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata Rata Nilai Capaian Kinerja Bulanan Pegawai	%		%	87 %	2,281,454,352					87 %	2,215,787,160	
6	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				345 Paket	292,380,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	345 Paket	444,652,918	INSPEKTORAT
6	1	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	112,184,352	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen	161,232,977	INSPEKTORAT
6	1	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				175 Dokumen	290,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	175 Dokumen	407,048,871	INSPEKTORAT
6	1	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				59 Orang	1,586,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	59 Orang	1,202,852,394	INSPEKTORAT
6	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,194,680,000					100 %	2,179,345,890	
6	1	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,500,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI		0	1 Paket	10,762,500	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pago Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pago Indikatif			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
6	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	9,500,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		1 Paket	9,737,500	INSPEKTORAT
6	1	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					15 Paket	33,570,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		15 Paket	51,250,000	INSPEKTORAT
6	1	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	201,970,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		12 Paket	207,029,295	INSPEKTORAT
6	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	58,240,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		2 Paket	185,137,515	INSPEKTORAT
6	1	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	500	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		1 Dokumenn	51,250,000	INSPEKTORAT
6	1	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	230,400,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		12 Laporan	446,332,389	INSPEKTORAT
6	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		12 Laporan	1,217,846,691	INSPEKTORAT
6	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan	%		%		100 %	1,177,700,000							100 %	1,272,937,239	
6	1	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0						Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		0	INSPEKTORAT
6	1	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	100,000,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	1 Paket	168,226,986	INSPEKTORAT
6	1	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					100 Unit	1,077,700,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	100 Unit	1,104,710,253	INSPEKTORAT
6	1	1	01.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0						Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		0	INSPEKTORAT
6	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor	%		%		100 %	1,059,363,232							100 %	1,222,820,080	
6	1	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	5,400,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		1 Laporan	28,700,000	INSPEKTORAT
6	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	488,139,600	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		12 Laporan	546,005,260	INSPEKTORAT
6	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					192 Laporan	565,823,632	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		192 Laporan	648,114,820	INSPEKTORAT
6	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	%		%		100 %	1,041,910,000							100 %	1,180,686,934	
6	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					9 Unit	106,230,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	9 Unit	97,375,000	INSPEKTORAT
6	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 Unit	357,750,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	5 Unit	358,750,000	INSPEKTORAT
6	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					50 Unit	80,430,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	50 Unit	86,277,891	INSPEKTORAT
6	1	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara					0 Unit	0						Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	0 Unit	52,280,125	INSPEKTORAT
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara					1 Unit							1 Unit			
6	1	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi					1 Unit	497,500,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	586,003,918	INSPEKTORAT
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	% OPD yang hasil nilai SAKIPnya meningkat	%		%		100 %	14,723,830,000							100 %	16,441,114,829	
						% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	%		%		72.50 %								72.50 %		
						% Penyelesaian Tindak Lanjut Perangkat Daerah Terhadap Hasil Pemeriksaan APP	%		%		79.50 %								79.50 %		
6	1	2	01.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan Perangkat Daerah yang diawasi kinerjanya	%		%		100 %	10,212,830,000							100 %	11,815,932,069	
6	1	2	01.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					52 Laporan	688,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Kab/Kota Lingkup Prov. Sulsel	52 Laporan	2,064,819,040	INSPEKTORAT
6	1	2	01.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					52 Laporan	4,034,948,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Kab/Kota Lingkup Prov. Sulsel	52 Laporan	3,797,491,915	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mutu Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
6	1	2	01.01	3	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja				152 Laporan	517,764,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Kab/Kota Lingkup Prov. Sulsel	152 Laporan	994,555,294	INSPEKTORAT
6	1	2	01.01	4	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan				52 Laporan	608,690,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Kab/Kota Lingkup Prov. Sulsel	52 Laporan	336,612,317	INSPEKTORAT
6	1	2	01.01	5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				45 Laporan	3,212,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Kab/Kota Lingkup Prov. Sulsel	45 Laporan	3,361,238,357	INSPEKTORAT
6	1	2	01.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	138,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Kab/Kota Lingkup Prov. Sulsel	2 Kesepakatan	222,197,188	INSPEKTORAT
6	1	2	01.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP				87 Dokumen	1,011,058,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Kab/Kota Lingkup Prov. Sulsel	87 Dokumen	1,039,017,958	INSPEKTORAT
6	1	2	01.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%		%	100 %	4,811,000,000						100 %	4,625,182,760	
6	1	2	01.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				20 Laporan	159,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Kab/Kota Lingkup Pemprov Sulsel	20 Laporan	163,460,416	INSPEKTORAT
6	1	2	01.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				61 Laporan	4,352,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Kab/Kota Lingkup Pemprov Sulsel	61 Laporan	4,461,722,344	INSPEKTORAT
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	% Kebijakan Pengawasan Pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%		%	100 %	4,098,480,000						100 %	6,467,309,786	
						% Pengaduan Masyarakat Terhadap OPD yang ditindaklanjuti	%		%	100 %								100 %	
						% Pengaduan Masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	%		%	100 %								100 %	
6	1	3	01.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	% Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan pemerintah Kab/Kota	%		%	100 %	950,000,000						100 %	1,383,750,000	
6	1	3	01.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Diusun				1 Rekomendasi	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah dan Kab/Kota Lingkup Prov. Sulsel	1 Rekomendasi	1,178,750,000	INSPEKTORAT
6	1	3	01.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Diusun				1 Rekomendasi	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah dan Kab/Kota Lingkup Prov. Sulsel	1 Rekomendasi	205,000,000	INSPEKTORAT
6	1	3	01.02		Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pendampingan dan Asistensi kepada Perangkat Daerah	%		%	100 %	3,148,480,000						100 %	5,083,559,786	
6	1	3	01.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				27 Perangkat Daerah	157,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah dan Kab/Kota lingkup Prov. Sulsel	27 Perangkat Daerah	253,595,058	INSPEKTORAT
6	1	3	01.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				40 Perangkat Daerah	289,730,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah dan Kab/kota lingkup Prov. Sulsel	40 Perangkat Daerah	302,375,000	INSPEKTORAT
6	1	3	01.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah dan Kab/kota lingkup Prov. Sulsel	1 Kegiatan	4,314,045,392	INSPEKTORAT
6	1	3	01.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Perangkat Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Perangkat Integritas				3 Perangkat Daerah	201,250,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah dan Kab/Kota lingkup Prov. Sulsel	3 Perangkat Daerah	213,544,336	INSPEKTORAT
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						47,316,473,947							29,053,459,899	
8	1	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						9,400,382,733							13,944,497,994	
8	1	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						475,289,876							568,016,801	
8	1	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	134,479,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	254,507,863	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perngkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
8	1	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	264,278,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	78,476,772	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9,901,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	81,146,579	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,901,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	13,220,553	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,095,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	12,067,807	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD				21 Laporan	25,711,176	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					21 Laporan	113,756,225	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporann	30,923,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	14,841,002	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6,373,864,589							9,191,561,769	
8	1	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	6,123,865,137	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang/ Bulan	8,740,099,179	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	65,982,688	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	61,527,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	38,964,489	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	10,931,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	23,249,442	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,843,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	65,915,445	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1,996,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	994,243	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	161,063,352	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	185,493,637	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	10,636,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	70,862,646	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen							1 Dokumen		
8	1	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						51,348,000							49,942,111	
8	1	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	31,170,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	21,760,478	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20,178,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	28,181,633	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
8	1	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laponen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							88,136,782							666,746,791	
8	1	1	01.05	1	Peningkatan Sarana dan Pasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Pasarana Disiplin Pegawai					0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0 Paket	8,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	122,377,174	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					1 Paket							1 Paket		
8	1	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					12 Dokumen	52,379,776		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	57,109,562	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					12 Dokumen	27,405,976	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	52,188,779	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan					0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.05	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas					0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.05	8	Pemindahan Tugas ASN							0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang	55,235,736	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					1 Orang							1 Orang		
8	1	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					100 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	251,817,001	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	27,017,479	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							738,237,776							1,746,181,928	
8	1	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	13,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10,338,689	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	35,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	56,751,116	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Paket							0 Paket		
8	1	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					0 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	66,855,500	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI				1 Paket	113,852,859	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
												Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)						
8	1	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	19,805,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	91,571,243	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporn	176,289,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporn	296,815,829	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporn	397,833,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporn	986,355,780	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 Dokumen	22,719,899	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	28,454,776	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	166,776,513	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						802,645,800						1,004,930,196		
8	1	1	01.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	630,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	735,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	69,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	28,818,645	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29 Unit	102,915,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29 Unit	241,111,551	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						144,816,240						212,311,200		
8	1	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporn	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Laporn	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporn	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporn	21,613,983	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporn	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporn	53,842,834	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	144,816,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	136,854,383	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						726,045,000						606,808,258		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerkuat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
8	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pujaknya				23 Unit	598,545,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				23 Unit	528,658,824	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	43,408,084	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit							10 Unit		
8	1	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	97,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	34,741,350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						203,729,700							330,209,990	
8	1	2	01.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						203,729,700							330,209,990	
8	1	2	01.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				6 Dokumen	52,460,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Dokumen	113,874,029	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	01.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	93,676,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	01.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	01.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				8 Orang	57,593,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Orang	216,335,562	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	01.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						6,462,854,312							9,169,359,135	
8	1	3	01.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik						6,462,854,312							9,169,359,135	
8	1	3	01.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	5,466,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	48,925,773	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	01.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	124,161,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	208,262,739	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	01.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				200 Orang	6,264,564,112	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Orang	8,731,230,361	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
8	1	3	01.01	4	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Semua Kelurahan										
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Orang	7.630.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Orang	65.474.760	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8	1	3	01.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	115.465.502		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									1.865.211.755					
8	1	4	01.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									1.865.211.755					
8	1	4	01.01	1	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Dokumen	0		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	4	01.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	63.719.224		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	4	01.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200 Orang	1.764.226.061		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	4	01.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Orang	0		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	4	01.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	37.266.470		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									1.470.033.540					
8	1	5	01.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									1.470.033.540					
8	1	5	01.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Dokumen	0		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	5	01.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	203.875.100		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	5	01.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200 Orang	1.206.904.425		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	5	01.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200 Orang	53.635.580		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	5	01.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Laporan	5.618.435		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PERANGKATAN KONFLIK SOSIAL									2.274.147.844					
8	1	6	01.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									2.274.147.844					
8	1	6	01.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	20.413.208		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	6	01.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	39.331.446		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Praktikan Masi Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17					
					Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun						Semua Kelurahan								
8	1	6	01.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				300 Orang	29,615,891,502	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300 Orang	1,122,856,678	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	6	01.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				8 Orang	59,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Orang	177,623,716	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	6	01.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				93 Laporan	209,879,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			93 Laporan	284,968,365	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	6	01.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				12 Dokumen	66,845,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	628,954,431	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
TOTAL																				10,833,824,408,961

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah

Urusan kewenangan Pemerintah Provinsi yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023 yang secara substansi telah menjabarkan struktur kewenangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta telah berpedoman pada struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Target Belanja Daerah Rp9.392.321.315.148,42 terdiri dari dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

Tabel 4.1

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN,
DAN SUB KEGIATAN**

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.883.077.934.090	
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	2.883.077.934.090	
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	2.883.077.934.090	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.983.986.795.991	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.097.957.500	
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.811.000	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	22.688.000	
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.736.800	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.688.000	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	22.688.000	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.688.000	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.908.657.700	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.970.636.345.195	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.969.652.651.195	
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	143.880.000	
1.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.000.000	
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56.465.700	
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	715.403.300	
1.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	49.945.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.749.746.100	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.550.000	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	593.543.600	
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.872.500	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	133.195.000	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	268.450.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.135.000	
1.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.300.000.000	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.762.000	
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	40.762.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.134.735.196	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.410.775.692	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.723.959.504	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.250.000	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.750.000	
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.000.000	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000	
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	878.210.767.699	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	471.708.214.484	
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	999.000.000	
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.999.000.000	
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.999.000.000	
1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	3.999.000.000	
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	3.999.000.000	
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	3.999.000.000	
1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	3.999.000.000	
1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	3.499.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.999.000.000	
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	743.000.000	
1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir	2.999.000.000	
1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah	2.999.000.000	
1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	3.999.000.000	
1.01.02.1.01.18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	3.999.000.000	
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.199.000.000	
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.999.000.000	
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	3.499.000.000	
1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	2.999.000.000	
1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.079.000.000	
1.01.02.1.01.32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	2.499.000.000	
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	2.500.000.000	
1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.000.000.000	
1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.200.000	
1.01.02.1.01.40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	3.000.000.000	
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.694.000.000	
1.01.02.1.01.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	231.387.000	
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	400.000.000	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	600.014.100	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	900.000.000	
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	100.000.000	
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	358.593.613.384	
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	100.000.000	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	306.273.517.748	
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	3.499.000.000	
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	2.999.000.000	
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	792.000.000	
1.01.02.1.02.11	Pembangunan Fasilitas Parkir	2.999.000.000	
1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	2.499.000.000	
1.01.02.1.02.22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	3.499.000.000	
1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.679.040.000	
1.01.02.1.02.24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	3.499.000.000	
1.01.02.1.02.25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	3.499.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.01.02.1.02.26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	3.499.000.000	
1.01.02.1.02.27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	3.499.000.000	
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	3.000.000.000	
1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.984.892.300	
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.996.921.600	
1.01.02.1.02.32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	3.008.031.000	
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.200.000.000	
1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	199.998.000	
1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.000.000	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	499.900.000	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	52.711.300	
1.01.02.1.02.44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	2.999.000.000	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	101.047.400	
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	217.083.787.748	
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	101.188.400	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	100.229.035.467	
1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	999.000.000	
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	2.999.000.000	
1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.999.000.000	
1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.07	Pembangunan Asrama Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.09	Pembangunan Fasilitas Parkir	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.12	Pembangunan Ruang Laboratorium	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	1.999.000.000	
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	1.000.000.000	
1.01.02.1.03.37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.313.870.000	
1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	150.000.000	
1.01.02.1.03.39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	2.313.870.000	
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	231.387.000	
1.01.02.1.03.45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	400.000.000	
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	150.000.000	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	299.150.900	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	117.598.700	
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	23.987.158.867	
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	100.000.000	
01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	600.127.100	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	500.000.000	
1.01.03.1.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	200.000.000	
1.01.03.1.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100.000.000	
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	200.000.000	
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	100.127.100	
1.01.03.1.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	100.127.100	
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	20.000.010.000	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	20.000.010.000	
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	20.000.010.000	
01.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	280.233.300	
1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	280.233.300	
1.01.06.1.01.03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	191.598.100	
1.01.06.1.01.05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	88.635.200	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	739.974.281.610	
1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	261.234.524.081	
1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	236.559.788.802	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	75.381.961.476	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	442.434.400	
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	176.836.000	
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	18.694.500	
1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.800.000	
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.729.800	
1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	16.651.100	
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.723.000	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.468.685.171	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.116.799.771	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.253.000	
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	270.725.500	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.171.900	
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.563.000	
1.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.172.000	
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	159.999.110	
1.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	49.999.900	
1.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	109.999.210	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.807.273.892	
1.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.807.273.892	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	864.743.756	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.499.750	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	353.709.306	
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.000.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.545.900	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.988.800	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.000.000	
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	65.000.000	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.878.648	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	859.878.648	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.713.946.499	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	299.990.000	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.344.401.499	
1.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.555.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	155.824.063.526	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	123.221.467.002	
1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	114.155.556.456	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	149.997.215	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	448.600.000	
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	87.500.000	
1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	362.887.700	
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	285.958.000	
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.730.967.631	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	31.545.692.524	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.276.987.200	
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.375.640.200	
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.416.373.500	
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	258.100.000	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21.927.097.900	
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	163.600.000	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	380.495.000	
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.140.000.200	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.107.776.900	
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	169.136.000	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	15.000.000	
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	1.149.493.100	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	172.750.300	
1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	158.332.600	
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	781.609.624	
1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	53.300.000	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	191.904.000	
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	131.904.000	
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	60.000.000	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	865.000.000	
1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	740.000.000	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	125.000.000	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.677.887.000	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Provinsi	325.006.000	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	325.006.000	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.352.881.000	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	926.280.000	
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	426.601.000	
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	539.376.300	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	539.376.300	
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	475.376.300	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	64.000.000	
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.136.500.500	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	470.947.200	
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	470.947.200	
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.202.807.000	
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.202.807.000	
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	1.462.746.300	
1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1.462.746.300	
1.02.0.00.0.00.02.0003	UPT TRANSFUSI DARAH	7.755.398.478	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	862.372.490	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.000.000	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	
1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.372.490	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.372.490	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.893.025.988	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.853.814.108	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	865.000.000	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	60.000.000	
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.928.814.108	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	300.000.000	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	300.000.000	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.739.211.880	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	3.739.211.880	
1.02.0.00.0.00.02.0006	UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH	4.710.001.521	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.504.013.419	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.229.528	
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.349.976	
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	88.374.176	
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.121.176	
1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.384.200	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	396.281.560	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	134.889.000	
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	261.392.560	
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78.800.028	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.666.500	
1.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	77.133.528	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.711.176	
1.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.711.176	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.737.785	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.402.500	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.040.650	
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.946.635	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.350.000	
1.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	97.480.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.518.000	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.331.900	
1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.331.900	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.134.860.442	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	438.909.450	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.950.992	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.061.000	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	344.061.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.077.432.222	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.589.320.462	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.031.537.962	
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	557.782.500	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	231.000.000	
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	231.000.000	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	257.111.760	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	257.111.760	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	128.555.880	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	128.555.880	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	128.555.880	
1.02.0.00.0.00.02.05	UPT RSK GIGI DAN MULUT	12.209.335.280	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.100.428.012	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	8.100.428.012	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	8.100.428.012	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.009.074.268	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.899.833.800	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.899.833.800	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.109.240.468	
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.109.240.468	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	99.833.000	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	99.833.000	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	99.833.000	
1.02.0.00.0.00.06.0000	RSUD LABUANG BAJI	145.217.677.569	
1.02.0.00.0.00.06.0000	RSUD LABUANG BAJI	145.217.677.569	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	143.845.177.569	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	284.500.000	
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	65.000.000	
1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	80.000.000	
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	
1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.333.084.153	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	69.290.084.153	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.500.000	
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.000.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.127.593.416	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.127.593.416	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	70.000.000.000	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	70.000.000.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.200.000.000	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.200.000.000	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	1.200.000.000	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.500.000	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	172.500.000	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	172.500.000	
1.02.0.00.0.00.07.0000	RSUD HAJI MAKASSAR	105.661.612.828	
1.02.0.00.0.00.07.0000	RSUD HAJI MAKASSAR	105.661.612.828	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	99.514.658.488	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.632.206.565	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.632.206.565	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	46.882.451.923	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	46.882.451.923	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.525.000.000	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.420.000.000	
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.000.000.000	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	800.000.000	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	500.000.000	
1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	80.000.000	
1.02.02.1.01.19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	40.000.000	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	40.000.000	
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	40.000.000	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	65.000.000	
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	65.000.000	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.621.954.340	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.621.954.340	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.621.954.340	
1.02.0.00.0.00.08.0000	RS KHUSUS DAERAH DADI	91.590.731.080	
1.02.0.00.0.00.08.0000	RS KHUSUS DAERAH DADI	91.590.731.080	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	90.790.731.080	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.834.125.824	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.834.125.824	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.956.605.256	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.956.605.256	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	40.000.000.000	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	40.000.000.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	800.000.000	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	800.000.000	
1.02.02.1.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	428.000.000	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	372.000.000	
1.02.0.00.0.00.09.0000	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI	35.203.168.648	
1.02.0.00.0.00.09.0000	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI	35.203.168.648	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.506.609.264	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.256.609.264	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.256.609.264	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	12.250.000.000	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12.250.000.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.696.559.384	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	380.000.000	
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	380.000.000	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.316.559.384	
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.316.559.384	
1.02.0.00.0.00.10.0000	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH	31.503.557.985	
1.02.0.00.0.00.10.0000	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH	31.503.557.985	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.503.557.985	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.414.620.369	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.414.620.369	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.588.937.616	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.588.937.616	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	13.500.000.000	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	13.500.000.000	
1.02.0.00.0.00.11.00	RSUD SAYANG RAKYAT	69.563.009.419	
1.02.0.00.0.00.11.00	RSUD SAYANG RAKYAT	69.563.009.419	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	64.740.154.946	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.243.826.199	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.243.826.199	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.827.841.396	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	798.077.340	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.029.764.056	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	25.668.487.351	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.668.487.351	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.822.854.473	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4.822.854.473	
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.000.000.000	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.822.854.473	
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.119.896.527.572	
1.03.0.00.0.00.47.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.119.896.527.572	
1.03.0.00.0.00.47.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.067.286.124.273	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	72.362.068.753	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	983.332.600	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	516.154.800	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.570.000	
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	44.050.000	
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.670.000	
1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	47.060.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	135.640.000	
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.187.800	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.466.672.632	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.852.177.432	
1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.960.000	
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.600.000	
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	62.080.000	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	436.285.200	
1.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.570.000	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	507.805.600	
1.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	43.120.000	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	405.285.600	
1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	59.400.000	
1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	347.154.800	
1.03.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	320.123.800	
1.03.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	27.031.000	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.070.375.000	
1.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	966.000.000	
1.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	84.375.000	
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.486.881.933	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.796.000	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.551.196.333	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	113.114.000	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	228.500.000	
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	274.575.000	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.208.700.600	
1.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.869.562.500	
1.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	
1.03.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	1.313.000.000	
1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	200.000.000	
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	856.562.500	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.965.603.688	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.063.221.600	
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.600.000	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.781.782.088	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.664.680.000	
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.970.180.000	
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	694.500.000	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	103.482.000.200	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.024.715.800	
1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.122.000.000	
1.03.02.1.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.117.617.800	
1.03.02.1.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	767.124.000	
1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	2.059.963.200	
1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	317.127.600	
1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	346.929.600	
1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	293.953.600	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	95.457.284.400	
1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	10.299.308.000	
1.03.02.1.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	15.074.337.600	
1.03.02.1.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.568.260.400	
1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	52.361.644.000	
1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	15.077.012.200	
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	32.931.000	
1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	43.791.200	
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	52.040.782.200	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	52.040.782.200	
1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	1.869.183.600	
1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	50.049.999.800	
1.03.03.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	30.000.000	
1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	91.598.800	
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	49.999.000	
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	49.999.000	
1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	49.999.000	
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	49.999.000	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	49.999.000	
1.03.05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	49.999.000	
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	30.000.000	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	30.000.000	
1.03.06.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	30.000.000	
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	41.954.730.800	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	41.954.730.800	
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	41.837.580.800	
1.03.08.1.01.06	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	58.894.000	
1.03.08.1.01.10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	58.256.000	
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	74.016.032.920	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	74.016.032.920	
1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	853.373.400	
1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	5.717.654.320	
1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	67.050.006.000	
1.03.09.1.01.07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	394.999.200	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	719.085.323.800	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	719.085.323.800	
1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	194.912.200	
1.03.10.1.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	40.224.400	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.849.330.400	
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	128.248.539.200	
1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	409.567.324.600	
1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	97.456.908.000	
1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan	50.454.399.200	
1.03.10.1.01.18	Rehabilitasi Jembatan	1.016.420.000	
1.03.10.1.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	694.850.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.03.10.1.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	629.387.400	
1.03.10.1.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	28.933.028.400	
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.261.325.000	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	600.450.000	
1.03.11.1.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	136.140.000	
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	464.310.000	
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	116.100.000	
1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	116.100.000	
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	544.775.000	
1.03.11.1.03.02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	544.775.000	
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.953.862.600	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.371.815.000	
1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	901.200.000	
1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	470.615.000	
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	329.993.000	
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	329.993.000	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	453.918.800	
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	174.582.800	
1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	279.336.000	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	798.135.800	
1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	384.087.800	
1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	216.148.000	
1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	197.900.000	
1.03.0.00.0.00.47.0001	UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jeneberang Kabupaten Gowa	5.735.349.696	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.557.937.096	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.319.800	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.676.000	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.643.800	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.373.800	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	35.373.800	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.543.800	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24.543.800	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.532.000	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.010.000	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.522.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.441.167.696	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.582.000	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.380.585.696	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.177.412.600	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.177.412.600	
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.052.114.800	
1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	82.313.800	
1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	42.984.000	
1.03.0.00.0.00.47.0002	UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Saddang Kabupaten Pinrang	2.996.038.476	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.867.297.676	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.957.600	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	34.048.800	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.908.800	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.458.800	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.458.800	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.911.600	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	30.911.600	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.728.924	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.728.924	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.732.240.752	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.721.440.752	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.128.740.800	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.128.740.800	
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.005.584.400	
1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	80.172.400	
1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	42.984.000	
1.03.0.00.0.00.47.0003	UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae Kabupaten Wajo	4.201.133.032	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.830.096.032	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.910.800	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	57.207.600	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.703.200	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.760.000	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	59.760.000	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.391.600	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	27.391.600	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.610.000	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.080.000	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.530.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.632.423.632	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.961.400	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.615.462.232	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.371.037.000	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.371.037.000	
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.158.400.800	
1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	169.652.200	
1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	42.984.000	
1.03.0.00.0.00.47.0004	UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pompengan Larona Kota Palopo	2.681.819.475	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.548.835.675	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.800	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.000.000	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.800	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.000.000	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.277.000	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.992.000	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.285.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.428.557.875	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.915.027	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.387.642.848	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.132.983.800	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.132.983.800	
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	999.999.800	
1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	90.000.000	
1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	42.984.000	
1.03.0.00.0.00.47.0005	UPT Workshop dan Peralatan	2.546.175.474	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.546.175.474	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	840.234.200	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.195.000	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	835.039.200	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.307.000	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.307.000	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.571.800	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8.571.800	
1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.600.000	
1.03.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.600.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.871.000	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.504.000	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.367.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.745.704	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.665.200	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.080.504	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.210.845.770	
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.845.770	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.148.000.000	
1.03.0.00.0.00.47.0006	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	1.575.776.236	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	699.387.136	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.584.000	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.680.000	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.904.000	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.680.000	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.680.000	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.120.000	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.120.000	
1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	9.360.000	
1.03.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9.360.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.551.500	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.635.000	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.916.500	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.091.636	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.290.468	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.801.168	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000	
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	324.464.000	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	324.464.000	
1.03.09.1.01.07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	324.464.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	551.925.100	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	551.925.100	
1.03.10.1.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	551.925.100	
1.03.0.00.0.00.47.0007	UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Kota Palopo	5.492.366.544	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.342.182.544	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.866.800	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.256.800	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.610.000	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.900.000	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.900.000	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	143.610.000	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	143.610.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.151.200	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.033.200	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.118.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.177.654.544	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.757.600	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.105.896.944	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.150.184.000	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	4.150.184.000	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	42.984.000	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.703.600.000	
1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	403.600.000	
1.03.0.00.0.00.47.0008	UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Kabupaten Enrekang	6.488.211.786	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	940.338.786	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.294.900	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	22.440.100	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	101.854.800	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.900.000	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	44.900.000	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	202.800.000	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	202.800.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.535.000	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.537.000	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.998.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561.808.886	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.750.150	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.058.736	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	5.547.873.000	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	5.547.873.000	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	42.984.000	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.104.889.000	
1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	400.000.000	
1.03.0.00.0.00.47.0009	UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III Kota Pare-Pare	4.579.098.792	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	874.096.792	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	238.078.000	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.220.000	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	231.858.000	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.690.000	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	43.690.000	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	147.200.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	147.200.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.686.000	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.346.000	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.340.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.442.792	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.752.800	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	344.689.992	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.705.002.000	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	3.705.002.000	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	42.984.000	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.332.018.000	
1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	330.000.000	
1.03.0.00.0.00.47.0010	UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kota Makassar	5.174.721.566	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	702.606.328	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.406.000	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	19.526.000	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.880.000	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.450.000	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.450.000	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.880.000	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	30.880.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.832.000	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.864.000	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.968.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.038.328	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.925.400	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	577.112.928	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.472.115.238	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	4.472.115.238	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	42.984.000	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.130.901.168	
1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	298.230.070	
1.03.0.00.0.00.47.0011	UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Kabupaten Bone	6.904.891.300	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	861.907.400	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.000.000	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.999.900	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29.999.900	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	238.787.000	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	238.787.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.205.000	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.205.000	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	538.915.500	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.387.500	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.528.000	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.042.983.900	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	6.042.983.900	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	42.984.000	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.599.999.900	
1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	400.000.000	
1.03.0.00.0.00.47.0012	UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Kabupaten Bulukumba	4.234.820.922	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.160.871.472	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.929.100	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.283.800	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.645.300	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.708.800	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	65.708.800	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	63.747.600	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	63.747.600	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.987.500	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.987.500	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	953.498.472	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.232.400	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	895.266.072	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.073.949.450	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	3.073.949.450	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	42.984.000	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.864.920.950	
1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	166.044.500	
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40.266.052.480	
2.10.1.04.0.00.48.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	40.266.052.480	
2.10.1.04.0.00.48.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	40.266.052.480	
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.280.053.592	
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	713.120.400	
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	428.073.400	
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	64.289.000	
1.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.638.000	
1.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.146.000	
1.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.029.000	
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.850.000	
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.095.000	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.249.915.560	
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.860.280.460	
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.668.000	
1.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.794.800	
1.04.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22.334.800	
1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.169.800	
1.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	238.668.900	
1.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	11.712.500	
1.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	40.286.300	
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	108.400.800	
1.04.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	35.045.800	
1.04.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.495.000	
1.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	61.860.000	
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	368.870.000	
1.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	81.910.000	
1.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	142.495.000	
1.04.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	84.525.000	
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59.940.000	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.991.500	
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.910.500	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.028.500	
1.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.052.500	
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	
1.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	50.000.000	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.083.532	
1.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	475.083.532	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.046.671.800	
1.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	624.048.000	
1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.800.000	
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.823.800	
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	6.472.408.088	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.046.481.900	
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	594.866.000	
1.04.02.1.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	91.752.500	
1.04.02.1.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	116.375.000	
1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	126.287.400	
1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	117.201.000	
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	234.079.800	
1.04.02.1.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	71.827.000	
1.04.02.1.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	50.000.000	
1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	23.666.500	
1.04.02.1.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	8.669.000	
1.04.02.1.02.05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	27.278.000	
1.04.02.1.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	52.639.300	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	5.191.846.388	
1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	5.052.778.388	
1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	139.068.000	
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.136.586.600	
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	434.000.000	
1.04.03.1.01.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	240.000.000	
1.04.03.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	106.000.000	
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	88.000.000	
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.702.586.600	
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	282.000.000	
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.420.586.600	
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	12.715.004.200	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	12.715.004.200	
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1.116.000.000	
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	11.433.004.200	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	92.000.000	
1.04.05.1.01.05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	74.000.000	
01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	662.000.000	
1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	662.000.000	
1.04.06.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	662.000.000	
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	64.950.770.782	
1.05.0.00.0.00.12.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	48.079.541.072	
1.05.0.00.0.00.12.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	48.079.541.072	
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.813.927.922	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	403.889.200	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	279.713.300	
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.042.000	
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.036.200	
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.204.000	
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	55.073.900	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.068.800	
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.751.000	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.639.734.070	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.527.520.520	
1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	57.873.800	
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.679.000	
1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.943.750	
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24.717.000	
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.498.750	
1.05.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.442.750	
1.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.056.000	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.799.250	
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99.000.000	
1.05.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.799.250	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.858.600	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.135.000	
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.307.000	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.325.000	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.728.000	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.875.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.343.200	
1.05.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.145.400	
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	622.919.500	
1.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	51.000.000	
1.05.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	
1.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	421.919.500	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.048.443.552	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.572.000	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.028.871.552	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.785.000	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	331.980.000	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.305.000	
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.500.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.913.681.350	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.935.921.950	
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	809.474.500	
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2.201.000.000	
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	490.169.750	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	132.335.850	
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	287.125.350	
1.05.02.1.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5.731.500	
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.085.000	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	865.380.150	
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	305.832.650	
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	294.167.350	
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	265.380.150	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	112.379.250	
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	112.379.250	
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	715.712.200	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	245.314.200	
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	245.314.200	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	265.798.800	
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	265.798.800	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	204.599.200	
1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	204.599.200	
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	636.219.600	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	543.580.350	
1.05.04.1.01.04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	205.581.000	
1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	337.999.350	
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	92.639.250	
1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	92.639.250	
1.05.0.00.0.00.23.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.871.229.710	
1.05.0.00.0.00.23.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.871.229.710	
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.486.606.574	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	325.711.000	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	129.125.000	
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	69.382.000	
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	69.397.000	
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.317.000	
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.440.000	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.050.000	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.053.248.130	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.980.068.130	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	62.790.000	
1.05.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.390.000	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	272.114.000	
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.880.000	
1.05.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.734.000	
1.05.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	169.500.000	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	732.098.500	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.420.000	
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.327.000	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.576.500	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	73.440.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.335.000	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.599.234.944	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342.782.520	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.256.452.424	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.200.000	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	321.200.000	
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.000.000	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.000.000	
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8.384.623.136	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	535.470.200	
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	535.470.200	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.152.553.936	
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	336.295.000	
1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.708.286.400	
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	489.440.000	
1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	618.532.536	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.673.684.000	
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	632.180.000	
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.041.504.000	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2.022.915.000	
1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	546.254.000	
1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	169.500.000	
1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	239.645.000	
1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	1.067.516.000	
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	51.051.176.074	
1.06.0.00.0.00.13.0000	DINAS SOSIAL	51.051.176.074	
1.06.0.00.0.00.13.0000	DINAS SOSIAL	51.051.176.074	
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.144.024.574	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	633.204.200	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	401.506.000	
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.478.000	
1.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.485.000	
1.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.889.400	
1.06.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.329.400	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.516.400	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.322.276.487	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.122.246.087	
1.06.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	200.030.400	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	816.295.800	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.038.000	
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.920.000	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.441.000	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.699.000	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	92.210.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412.987.800	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.049.097.087	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	725.023.607	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.324.073.480	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.151.000	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	290.001.000	
1.06.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	33.150.000	
01.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	187.578.000	
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	187.578.000	
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	187.578.000	
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.621.788.500	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	200.000.000	
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	200.000.000	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3.495.882.500	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	2.709.890.000	
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	295.213.000	
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	101.198.000	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	200.000.000	
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	88.165.500	
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	101.416.000	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.138.406.000	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	841.250.000	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	30.000.000	
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	60.000.000	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	59.996.000	
1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	40.000.000	
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	47.180.000	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	59.980.000	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	787.500.000	
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	567.500.000	
1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	30.000.000	
1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	40.000.000	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	50.000.000	
1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	60.000.000	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	40.000.000	
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.585.700.000	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	4.585.700.000	
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.405.700.000	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.180.000.000	
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.512.085.000	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.512.085.000	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	1.808.625.000	
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	200.000.000	
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	503.460.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	37.790.270.058	
2.07.3.32.0.00.14.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	37.790.270.058	
2.07.3.32.0.00.14.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	37.790.270.058	
02.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.379.801.820	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	418.202.100	
2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	283.205.400	
2.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	17.498.900	
2.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.997.800	
2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.500.000	
2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000	
2.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	
2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.889.943.670	
2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.723.661.170	
2.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.100	
2.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	156.283.400	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190.000.000	
2.07.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	110.000.000	
2.07.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.845.600	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.365.000	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.480.600	
2.07.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.307.850	
2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.307.850	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.918.000	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	618.840.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	501.078.000	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.234.584.600	
2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.484.600	
2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	895.700.000	
2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.400.000	
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	56.442.700	
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	56.442.700	
2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	41.442.700	
2.07.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	15.000.000	
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.832.824.200	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	4.752.824.200	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	4.644.992.800	
2.07.03.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	107.831.400	
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	80.000.000	
2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	80.000.000	
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	624.784.856	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	139.772.300	
2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	39.772.300	
2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	100.000.000	
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	439.999.056	
2.07.04.1.04.03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	439.999.056	
2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	45.013.500	
2.07.04.1.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	45.013.500	
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.000.613.900	
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	67.853.400	
2.07.05.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	67.853.400	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	437.362.500	
2.07.05.1.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	64.471.400	
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	372.891.100	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	495.398.000	
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	441.160.200	
2.07.05.1.03.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	54.237.800	
02.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	895.802.582	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	895.802.582	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	598.371.332	
2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	170.597.500	
2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	126.833.750	
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.237.910.907	
2.08.2.14.0.00.15.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	15.237.910.907	
2.08.2.14.0.00.15.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	15.237.910.907	
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.416.301.375	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	574.746.200	
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.772.400	
2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.500.000	
2.08.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000	
2.08.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.525.800	
2.08.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.525.800	
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	417.922.200	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.590.270.985	
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.499.770.985	
2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.500.000	
2.08.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	45.000.000	
2.08.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.145.000	
2.08.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	106.145.000	
2.08.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	867.391.800	
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.775.000	
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.535.000	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.733.000	
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	121.700.000	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	513.584.200	
2.08.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.064.600	
2.08.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.000.000	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	845.092.390	
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.099.190	
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.050.000	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	672.943.200	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.655.000	
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	228.498.000	
2.08.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.157.000	
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	767.852.100	
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	319.999.600	
2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	51.999.800	
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	267.999.800	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	447.852.500	
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	447.852.500	
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.375.921.308	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	230.233.500	
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	150.450.000	
2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	79.783.500	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.073.727.608	
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	622.377.608	
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	451.350.000	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	71.960.200	
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	71.960.200	
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	824.889.024	
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	773.868.324	
2.08.04.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	773.868.324	
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	51.020.700	
2.08.04.1.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	51.020.700	
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	314.999.000	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	314.999.000	
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	129.999.000	
2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	185.000.000	
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	338.175.600	
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	230.175.600	
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	230.175.600	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	108.000.000	
2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	108.000.000	
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	199.772.500	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.002.000	
2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	75.002.000	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000	
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	75.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	49.770.500	
2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	49.770.500	
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	27.842.298.157	
2.09.0.00.0.00.34.00	DINAS KETAHANAN PANGAN	27.842.298.157	
2.09.0.00.0.00.34.00	DINAS KETAHANAN PANGAN	27.842.298.157	
02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.632.165.733	
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	715.924.300	
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	473.868.100	
2.09.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.915.000	
2.09.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.915.000	
2.09.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.452.000	
2.09.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	17.452.000	
2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	115.066.200	
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.256.000	
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.234.532.791	
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.929.592.791	
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.370.000	
2.09.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.060.000	
2.09.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	160.000.000	
2.09.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000	
2.09.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	59.840.000	
2.09.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	59.910.000	
2.09.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.760.000	
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.758.300	
2.09.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.980.000	
2.09.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	
2.09.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.780.000	
2.09.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.998.300	
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.560.000	
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.060.000	
2.09.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.500.000	
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	493.306.400	
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.576.900	
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.995.000	
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323.849.500	
2.09.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.885.000	
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.000.000	
2.09.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.290.823.192	
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.996.000	
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378.000.000	
2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.879.827.192	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.260.750	
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.260.750	
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	304.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.09.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	250.000.000	
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	250.000.000	
2.09.02.1.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	200.000.000	
2.09.02.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	50.000.000	
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.820.136.524	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.575.000.000	
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	120.000.000	
2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000	
2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	190.000.000	
2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	290.000.000	
2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	725.000.000	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	510.000.000	
2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	220.000.000	
2.09.03.1.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	220.000.000	
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	50.000.000	
2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	20.000.000	
2.09.03.1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	30.000.000	
2.09.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	30.000.000	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	3.705.136.524	
2.09.03.1.04.01	Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.805.136.524	
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	870.000.000	
2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	30.000.000	
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.125.003.800	
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	50.000.000	
2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.075.003.800	
2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	2.075.003.800	
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.014.992.100	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.014.992.100	
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	589.999.500	
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	
2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	119.999.500	
2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	29.993.100	
2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	50.000.000	
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	622.000.000	
2.10.1.04.0.00.48.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	622.000.000	
2.10.1.04.0.00.48.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	622.000.000	
02.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	140.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	140.000.000	
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	140.000.000	
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	147.000.000	
2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	147.000.000	
2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.000.000	
2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	98.000.000	
02.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	335.000.000	
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	335.000.000	
2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	267.000.000	
2.10.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	68.000.000	
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	23.908.712.410	
2.11.0.00.0.00.35.0000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	23.908.712.410	
2.11.0.00.0.00.35.0000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	23.908.712.410	
02.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.660.424.272	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.212.500	
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.800.000	
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.500.000	
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.500.000	
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.412.500	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.948.661.019	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.878.661.019	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	70.000.000	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	387.493.600	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.500.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.997.500	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.996.100	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	983.757.153	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	931.758.216	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.998.937	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.300.000	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.800.000	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000	
02.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	600.000.000	
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	350.000.000	
2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	350.000.000	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	250.000.000	
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000	
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.730.198.485	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.650.199.285	
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	199.999.800	
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000	
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.400.199.485	
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	79.999.200	
2.11.03.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	79.999.200	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	100.000.000	
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	100.000.000	
2.11.04.1.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	100.000.000	
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	5.549.999.754	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.549.999.754	
2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	49.999.800	
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	5.499.999.954	
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	149.997.200	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	149.997.200	
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	50.000.000	
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	99.997.200	
02.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	49.999.800	
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	49.999.800	
2.11.07.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	49.999.800	
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000	
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100.000.000	
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	149.999.900	
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	149.999.900	
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	149.999.900	
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	149.999.900	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	149.999.900	
2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	84.999.900	
2.11.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	65.000.000	
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	668.093.099	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	668.093.099	
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	500.000.000	
2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	168.093.099	
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	11.340.024.246	
2.12.0.00.0.00.20.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	11.340.024.246	
2.12.0.00.0.00.20.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	11.340.024.246	
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.090.024.246	
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	
2.12.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000	
2.12.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000	
2.12.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000	
2.12.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.12.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.500.000	
2.12.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	
2.12.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.274.219.702	
2.12.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.174.219.702	
2.12.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000	
2.12.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	
2.12.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	70.000.000	
2.12.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.472.750	
2.12.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.472.750	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.400.000	
2.12.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	
2.12.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	
2.12.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	
2.12.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.804.544	
2.12.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	
2.12.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	515.804.544	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698.127.250	
2.12.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.130.000	
2.12.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.997.250	
2.12.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000	
2.12.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	205.000.000	
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	125.000.000	
2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	75.000.000	
2.12.02.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	50.000.000	
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	5.000.000	
2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	5.000.000	
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	75.000.000	
2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	75.000.000	
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	345.000.000	
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	270.000.000	
2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	45.000.000	
2.12.03.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	150.000.000	
2.12.03.1.02.05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	75.000.000	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	75.000.000	
2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	75.000.000	
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	600.000.000	
2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	300.000.000	
2.12.04.1.01.02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	300.000.000	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100.000.000	
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50.000.000	
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	50.000.000	
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	200.000.000	
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.000.000	
2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	100.000.000	
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100.000.000	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	100.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	100.000.000	
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.886.759.215	
2.13.0.00.0.00.16.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.886.759.215	
2.13.0.00.0.00.16.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.886.759.215	
02.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.893.059.104	
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	455.723.300	
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.255.000	
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	40.881.300	
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31.633.000	
2.13.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34.094.000	
2.13.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	40.848.000	
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.012.000	
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.000.000	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.655.278.044	
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.368.592.044	
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.389.000	
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.394.000	
2.13.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	86.580.000	
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	64.323.000	
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	67.332.000	
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	67.332.000	
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.241.344.160	
2.13.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.120.352.160	
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	116.000.000	
2.13.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.992.000	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.561.600	
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.993.000	
2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.499.500	
2.13.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.700	
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000	
2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.840.000	
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.238.400	
2.13.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.490.000	
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	297.102.500	
2.13.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	188.100.000	
2.13.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	59.002.500	
2.13.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.817.500	
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.802.500	
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.391.000	
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.624.000	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.900.000	
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	325.560.000	
2.13.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.340.000	
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	
02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	99.999.700	
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	99.999.700	
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	99.999.700	
02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	499.975.700	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	499.975.700	
2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	99.996.700	
2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	99.999.300	
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	299.979.700	
02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.177.531.111	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.177.531.111	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	19.998.500	
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	67.998.700	
2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	67.999.000	
2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	19.999.400	
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	558.765.500	
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	99.996.900	
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	99.977.600	
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	67.998.400	
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	67.999.100	
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	19.997.600	
2.13.04.1.01.22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	86.800.411	
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.216.193.600	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.216.193.600	
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	99.999.700	
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	99.997.800	
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	549.995.400	
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	664.073.800	
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2.160.000	
2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	199.967.800	
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	599.999.100	
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.307.000.000	
2.08.2.14.0.00.15.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	1.307.000.000	
2.08.2.14.0.00.15.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	1.307.000.000	
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	265.000.000	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	200.000.000	
2.14.02.1.01.03	Advokasi dan Sosialisasi GIDPK	200.000.000	
2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	65.000.000	
2.14.02.1.02.06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	65.000.000	
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	242.000.000	
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	242.000.000	
2.14.03.1.01.04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	145.400.000	
2.14.03.1.01.08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	96.600.000	
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	800.000.000	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	800.000.000	
2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000	
2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyediaan Pengasuhan 1000 HPK	700.000.000	
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	43.821.328.656	
2.15.0.00.0.00.49.0000	DINAS PERHUBUNGAN	43.821.328.656	
2.15.0.00.0.00.49.0000	DINAS PERHUBUNGAN	43.821.328.656	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.238.086.749	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	349.999.800	
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	
2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.000.000	
2.15.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	
2.15.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	
2.15.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000	
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.999.800	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.348.791.157	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.298.791.157	
2.15.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	
2.15.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.894.000	
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.894.000	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	499.977.700	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.995.000	
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.993.300	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.000	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.990.400	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.184.969.164	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381.642.900	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.803.326.264	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.804.454.928	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	804.455.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.999.999.928	
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.750.673.645	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.296.185.425	
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.296.185.425	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	931.564.640	
2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	349.730.000	
2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	581.834.640	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.201.952.780	
2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	49.999.800	
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	28.929.200	
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.123.023.780	
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	21.070.800	
2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	21.070.800	
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	240.000.000	
2.15.02.1.09.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	140.000.000	
2.15.02.1.09.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	100.000.000	
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	59.900.000	
2.15.02.1.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	59.900.000	
02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.657.568.462	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas	50.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
	Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		
2.15.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000	
2.15.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	40.000.000	
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	349.992.700	
2.15.03.1.08.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	349.992.700	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1.257.575.762	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	1.257.575.762	
02.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	174.999.800	
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	74.999.800	
2.15.05.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	74.999.800	
2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000	
2.15.05.1.03.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	100.000.000	
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	58.453.081.823	
2.16.2.20.2.21.50.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	58.453.081.823	
2.16.2.20.2.21.50.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	58.453.081.823	
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.491.480.289	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	349.296.100	
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	319.999.700	
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.296.400	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.613.193.165	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.363.193.165	
2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	250.000.000	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.000.000	
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92.000.000	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.129.952.874	
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.607.250	
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.013.345.624	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.307.038.150	
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.136.998.400	
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.097.500	
2.16.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.942.250	
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	34.923.430.160	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	34.923.430.160	
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	337.000.000	
2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	522.016.880	
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	597.016.780	
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.933.776.000	
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	7.711.999.900	
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	11.346.922.900	
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.474.697.700	
02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	8.038.171.374	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	6.012.010.232	
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6.012.010.232	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.026.161.142	
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	293.674.650	
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.131.075.492	
2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	601.411.000	
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	32.781.954.573	
2.17.0.00.0.00.36.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	32.781.954.573	
2.17.0.00.0.00.36.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	32.781.954.573	
02.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.952.310.573	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	332.334.000	
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.163.000	
2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.020.000	
2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	43.300.000	
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244.851.000	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.263.893.973	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.187.958.973	
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.935.000	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	419.600.400	
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	295.675.000	
2.17.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.875.400	
2.17.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.050.000	
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.286.146.000	
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	199.346.000	
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000.000	
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.500.000	
2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.300.000	
2.17.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	396.250.000	
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	336.250.000	
2.17.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	60.000.000	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.089.996.200	
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.396.953.000	
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	693.043.200	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.090.000	
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	
2.17.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	144.090.000	
02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	123.730.000	
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	120.530.000	
2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	120.530.000	
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.200.000	
2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.200.000	
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	166.575.000	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	166.575.000	
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	166.575.000	
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	59.260.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	59.260.000	
2.17.04.1.01.01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	59.260.000	
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	962.262.000	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	962.262.000	
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	962.262.000	
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	461.190.000	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	461.190.000	
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	77.730.000	
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	383.460.000	
02.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7.715.562.000	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	7.715.562.000	
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	7.715.562.000	
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.341.065.000	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	8.341.065.000	
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	8.341.065.000	
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	23.025.368.733	
2.18.0.00.0.00.37.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	23.025.368.733	
2.18.0.00.0.00.37.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	23.025.368.733	
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.706.869.821	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	493.999.700	
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	220.000.000	
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	41.999.800	
2.18.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	32.000.000	
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	42.000.000	
2.18.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	32.000.000	
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.000.000	
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.999.900	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.579.999.755	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.410.000.055	
2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	169.999.700	
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.000.000	
2.18.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.000.000	
2.18.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	367.775.000	
2.18.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	249.775.000	
2.18.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	68.000.000	
2.18.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.478.281.750	
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.199.996.950	
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.000.000	
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.988.000	
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.106.296.800	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.894.554.416	
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	684.987.024	
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.209.567.392	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.259.200	
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.000.000	
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	
2.18.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	531.259.200	
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	738.499.900	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	223.999.900	
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	178.999.900	
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	45.000.000	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	514.500.000	
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	55.000.000	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	459.500.000	
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.269.999.800	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.269.999.800	
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	470.000.000	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	799.999.800	
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.354.999.800	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.354.999.800	
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	899.999.800	
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	225.000.000	
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	230.000.000	
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	804.999.412	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	804.999.412	
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	239.999.800	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	329.999.612	
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	235.000.000	
02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	150.000.000	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	150.000.000	
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	96.266.929.874	
2.19.0.00.0.00.17.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	96.266.929.874	
2.19.0.00.0.00.17.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	96.266.929.874	
02.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.935.044.844	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	640.000.000	
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	380.000.000	
2.19.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	85.000.000	
2.19.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	85.000.000	
2.19.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	
2.19.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	
2.19.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.360.725.468	
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.195.725.468	
2.19.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	
2.19.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.000.000	
2.19.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	
2.19.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000	
2.19.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000.000	
2.19.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.000.000	
2.19.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12.000.000	
2.19.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	105.000.000	
2.19.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	105.000.000	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.720.000	
2.19.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	93.720.000	
2.19.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.000.000	
2.19.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	
2.19.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000	
2.19.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.000.226.000	
2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	
2.19.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.596.000	
2.19.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.000.000	
2.19.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	250.000.000	
2.19.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.630.000	
2.19.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000.000	
2.19.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.956.030.876	
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	519.998.628	
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.436.032.248	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.342.500	
2.19.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240.510.000	
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	203.832.500	
2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	
2.19.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.112.712.930	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.822.712.930	
2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	77.000.000	
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	500.000.000	
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	569.950.000	
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.176.262.930	
2.19.02.1.01.06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	149.500.000	
2.19.02.1.01.08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	50.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	300.000.000	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	1.290.000.000	
2.19.02.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	150.000.000	
2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1.140.000.000	
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	73.469.172.100	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	64.100.000.000	
2.19.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	400.000.000	
2.19.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	450.000.000	
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	63.250.000.000	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	4.172.672.100	
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	4.095.172.100	
2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	500.000	
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	77.000.000	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	196.500.000	
2.19.03.1.03.01	Seleksi Atlet Daerah	50.000.000	
2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	100.000.000	
2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	46.000.000	
2.19.03.1.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	500.000	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.000.000.000	
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5.000.000.000	
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	750.000.000	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	750.000.000	
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	500.000.000	
2.19.04.1.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	50.000.000	
2.19.04.1.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	200.000.000	
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	749.998.612	
2.16.2.20.2.21.50.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	749.998.612	
2.16.2.20.2.21.50.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	749.998.612	
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	749.998.612	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	749.998.612	
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	199.999.500	
2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100.000.000	
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	124.999.800	
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	149.999.700	
2.20.02.1.01.05	Pengembangan Infrastruktur	99.999.812	
2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	74.999.800	
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	799.993.952	
2.16.2.20.2.21.50.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	799.993.952	
2.16.2.20.2.21.50.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	799.993.952	
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	799.993.952	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	642.086.752	
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	95.799.800	
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	278.169.800	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	268.117.152	
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	157.907.200	
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	157.907.200	
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	25.784.289.252	
2.22.3.26.0.00.19.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	25.784.289.252	
2.22.3.26.0.00.19.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	25.784.289.252	
02.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.020.515.362	
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.278.300	
2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.214.500	
2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.228.000	
2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.208.000	
2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.370.000	
2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.257.800	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.018.267.786	
2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.930.531.486	
2.22.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.618.000	
2.22.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.998.800	
2.22.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	35.310.900	
2.22.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	22.308.700	
2.22.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.499.900	
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113.100.000	
2.22.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	113.100.000	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	575.053.700	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.293.000	
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000	
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.803.700	
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.820.000	
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.400.000	
2.22.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	136.800.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.437.000	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.383.126.184	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	981.619.560	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.401.506.624	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	758.689.392	
2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.830.000	
2.22.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	363.087.500	
2.22.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.271.892	
2.22.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.500.000	
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	707.535.200	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	115.732.000	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	115.732.000	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	591.803.200	
2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	70.304.400	
2.22.02.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	521.498.800	
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.298.499.700	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.298.499.700	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.298.499.700	
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	84.292.400	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	84.292.400	
2.22.04.1.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	84.292.400	
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	756.552.200	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	140.520.000	
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	140.520.000	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	616.032.200	
2.22.05.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	393.000.000	
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	223.032.200	
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.916.894.390	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	3.916.894.390	
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1.189.889.450	
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.063.005.300	
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	663.999.640	
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	36.840.317.769	
2.23.2.24.0.00.18.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	36.840.317.769	
2.23.2.24.0.00.18.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	36.840.317.769	
02.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.156.196.769	
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	440.681.700	
2.23.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	196.447.500	
2.23.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	18.453.500	
2.23.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.201.000	
2.23.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.905.100	
2.23.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000	
2.23.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.358.500	
2.23.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.316.100	
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.143.527.873	
2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.927.163.873	
2.23.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000	
2.23.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.903.000	
2.23.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	76.325.000	
2.23.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	51.997.500	
2.23.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	
2.23.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35.138.500	
2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000	
2.23.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	
2.23.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.650.000	
2.23.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.000.000	
2.23.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000	
2.23.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	
2.23.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	
2.23.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.650.000	
2.23.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	611.429.800	
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93.950.000	
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.490.000	
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	
2.23.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.400.000	
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.589.800	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	853.517.396	
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	853.517.396	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.079.390.000	
2.23.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.390.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
2.23.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.000.000	
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000	
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7.850.911.000	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	7.770.511.000	
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	62.967.400	
2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	5.500.000.000	
2.23.02.1.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	5.000.000	
2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	75.000.000	
2.23.02.1.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	15.000.000	
2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.200.000.000	
2.23.02.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	30.000.000	
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	775.000.000	
2.23.02.1.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	107.543.600	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	80.400.000	
2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	75.000.000	
2.23.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	5.400.000	
02.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	833.210.000	
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	815.000.000	
2.23.03.1.02.01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	15.000.000	
2.23.03.1.02.02	Penerbitan Bibliografi Daerah	800.000.000	
2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	18.210.000	
2.23.03.1.04.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	18.210.000	
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.012.714.836	
2.23.2.24.0.00.18.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.012.714.836	
2.23.2.24.0.00.18.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.012.714.836	
02.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.050.668.336	
2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.415.000	
2.24.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.415.000	
2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.039.253.336	
2.24.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.039.253.336	
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	962.046.500	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	156.068.500	
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	12.120.000	
2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	143.948.500	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	417.662.000	
2.24.02.1.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	117.662.000	
2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300.000.000	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	388.316.000	
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	200.000.000	
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	188.316.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	82.295.580.074	
3.25.0.00.0.00.38.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	82.295.580.074	
3.25.0.00.0.00.38.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	82.295.580.074	
03.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.532.097.474	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	859.773.400	
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	267.150.300	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.919.500	
3.25.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.214.300	
3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.940.600	
3.25.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	25.838.200	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	465.717.700	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.992.800	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.745.901.430	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.597.226.230	
3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.908.900	
3.25.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.806.500	
3.25.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.066.000	
3.25.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	45.048.800	
3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	76.845.000	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.175.000	
3.25.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.325.000	
3.25.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.900.000	
3.25.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.950.000	
3.25.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	11.430.000	
3.25.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	11.430.000	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	420.138.300	
3.25.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50.260.000	
3.25.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	267.940.000	
3.25.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	19.560.100	
3.25.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	29.323.200	
3.25.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.335.000	
3.25.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9.720.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.836.995.703	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.847.600	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	927.173.103	
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.000.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.300.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.241.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	569.314.000	
3.25.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.120.000	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	200.000.000	
3.25.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	200.000.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.717.482.391	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.097.158.327	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.620.324.064	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.526.201.250	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	552.198.250	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324.003.000	
3.25.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000	
03.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	11.969.196.200	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11.585.223.200	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	175.323.200	
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11.409.900.000	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.830.000	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.830.000	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	382.143.000	
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000	
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	154.500.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
3.25.02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	27.643.000	
03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	24.121.160.300	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	15.523.425.800	
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	7.340.847.800	
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	8.182.578.000	
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	63.214.500	
3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	63.214.500	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1.440.000	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1.440.000	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	8.533.080.000	
3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	51.000.000	
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	8.382.080.000	
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	100.000.000	
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7.195.875.800	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	5.051.075.800	
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4.800.000.000	
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	69.096.800	
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	81.640.000	
3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100.339.000	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2.144.800.000	
3.25.04.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	904.800.000	
3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.240.000.000	
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.565.142.900	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.531.297.900	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	108.982.300	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	3.363.856.900	
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	19.265.000	
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	39.193.700	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	33.845.000	
3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	10.060.000	
3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	8.280.000	
3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15.505.000	
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	912.107.400	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	875.856.000	
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	200.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	675.856.000	
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	36.251.400	
3.25.06.1.03.01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	30.851.400	
3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.400.000	
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.743.359.200	
2.22.3.26.0.00.19.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	8.743.359.200	
2.22.3.26.0.00.19.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	8.743.359.200	
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.540.781.800	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	2.180.249.600	
3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2.180.249.600	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	229.746.400	
3.26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	98.746.400	
3.26.02.1.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	131.000.000	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	130.785.800	
3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	67.859.200	
3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	62.926.600	
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.131.748.200	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4.131.748.200	
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.803.608.400	
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	937.855.000	
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	199.627.600	
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	190.657.200	
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.070.829.200	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	707.331.200	
3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	191.519.400	
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	444.811.800	
3.26.05.1.01.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	71.000.000	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1.363.498.000	
3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1.363.498.000	
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	454.164.554.187	
2.09.3.27.0.00.39.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	413.988.379.921	
2.09.3.27.0.00.39.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	413.988.379.921	
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88.189.401.711	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.515.993.160	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.795.660	
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	64.910.000	
3.27.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.650.000	
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	48.417.600	
3.27.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	31.020.000	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.944.199.900	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.557.250.127	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70.757.844.527	
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	323.419.600	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	240.920.000	
3.27.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	235.066.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	538.000.000	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.000.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.578.258.424	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.731.375.600	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.846.882.824	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.900.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.900.000	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000	
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	211.419.409.350	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	61.567.396.000	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	61.567.396.000	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	149.852.013.350	
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	94.041.800	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	39.999.982.850	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	49.757.996.400	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	59.999.992.300	
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	101.283.785.360	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	101.283.785.360	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2.581.715.360	
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	500.000.000	
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	50.008.000.000	
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	39.994.000.000	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	8.200.070.000	
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	9.200.000.000	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	9.200.000.000	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	6.000.000.000	
3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.000.000.000	
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	200.000.000	
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.895.783.500	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	500.000.000	
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	250.000.000	
3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	250.000.000	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.420.783.500	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	300.000.000	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.120.783.500	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1.975.000.000	
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	300.000.000	
3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	200.000.000	
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1.475.000.000	
3.27.0.00.0.00.40.0000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	40.176.174.266	
3.27.0.00.0.00.40.0000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	40.176.174.266	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.553.887.878	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278.100.000	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.215.700	
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.514.000	
3.27.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.883.200	
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.803.400	
3.27.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	17.045.600	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.305.900	
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.332.200	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.185.523.602	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.000.178.902	
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.839.000	
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.277.500	
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.380.000	
3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	87.704.700	
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.143.500	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.611.800	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.775.000	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.447.600	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	64.620.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.769.200	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.521.981.976	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	771.000.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.750.981.976	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.670.500	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.502.500	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	5.000.000	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.168.000	
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	20.117.295.548	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	18.957.230.648	
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	18.957.230.648	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.059.997.200	
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.000.000.100	
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	59.997.100	
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	100.067.700	
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	100.067.700	
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	654.999.100	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	654.999.100	
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	579.999.800	
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	59.999.300	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	15.000.000	
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	749.992.140	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	149.992.700	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	149.992.700	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	99.999.800	
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	99.999.800	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	499.999.640	
3.27.04.1.03.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	99.999.900	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	399.999.740	
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	99.999.600	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	99.999.600	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	50.000.400	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	49.999.200	
03.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	139.172.247.582	
3.28.0.00.0.00.41.00	DINAS KEHUTANAN	139.172.247.582	
3.28.0.00.0.00.41.00	DINAS KEHUTANAN	139.172.247.582	
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	114.638.025.362	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.417.624.500	
3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	779.898.600	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	92.796.600	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	85.000.000	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	94.093.200	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	84.999.900	
3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.974.400	
3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.861.800	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.701.917.694	
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93.302.054.394	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.999.800	
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.999.900	
3.28.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	74.937.000	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	94.977.000	
3.28.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	129.999.800	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	74.949.800	
3.28.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	118.582.400	
3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.124.200	
3.28.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	59.084.200	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.637.000	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.737.000	
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	68.303.400	
3.28.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	68.303.400	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	874.771.800	
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	441.850.000	
3.28.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	72.310.000	
3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60.611.800	
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.397.920.400	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.000.000	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.001.000	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	351.652.200	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	168.720.000	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
3.28.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.999.800	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.280.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.511.613.600	
3.28.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.653.800	
3.28.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.945.963.000	
3.28.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000	
3.28.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	984.500.000	
3.28.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	49.497.000	
3.28.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	14.400.000	
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	478.896.000	
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	445.520.000	
3.28.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	54.150.000	
3.28.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000	
3.28.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.000.000	
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.863.012.168	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	601.709.880	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.255.802.288	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.249.930.000	
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.200.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	598.480.000	
3.28.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	19.000.000	
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.250.000	
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	31.200.000	
3.28.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.008.800.000	
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000	
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	13.935.525.020	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	788.716.120	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	190.000.000	
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	423.164.220	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	100.000.000	
3.28.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	75.551.900	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	190.000.000	
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	190.000.000	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	587.671.000	
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	78.146.600	
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	49.890.000	
3.28.03.1.03.03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	49.620.000	
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	60.420.000	
3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	49.594.400	
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	300.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	9.599.920.300	
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	122.383.400	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	3.267.363.800	
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	676.800.000	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	4.328.711.600	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	684.564.500	
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	68.303.400	
3.28.03.1.04.09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	451.793.600	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.899.532.000	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1.377.612.000	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	217.850.000	
3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	109.920.000	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	119.470.000	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	74.680.000	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	67.009.200	
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	67.009.200	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	127.080.000	
3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	66.890.000	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	60.190.000	
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	675.596.400	
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	99.980.000	
3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	49.930.000	
3.28.03.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih	49.930.000	
3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	49.930.000	
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	99.980.000	
3.28.03.1.09.06	Pembangunan Sumber Benih	325.846.400	
03.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	83.011.800	
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	83.011.800	
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	83.011.800	
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	10.184.262.300	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	10.184.262.300	
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	192.063.300	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	196.263.600	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	9.795.935.400	
03.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	331.423.100	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	331.423.100	
3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	75.000.000	
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	82.198.500	
3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	92.802.000	
3.28.06.1.01.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	81.422.600	
03.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	29.266.516.773	
3.29.0.00.0.00.42.0000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	29.266.516.773	
3.29.0.00.0.00.42.0000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	27.214.691.973	
03.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.340.748.073	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	436.549.300	
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	192.199.500	
3.29.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	129.534.600	
3.29.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.799.500	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
3.29.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	86.560.000	
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.455.700	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.175.615.483	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.925.244.683	
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.347.900	
3.29.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	136.909.000	
3.29.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.620.700	
3.29.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.870.300	
3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.622.900	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.742.000	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.742.000	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	732.119.190	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.022.250	
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.543.000	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.361.900	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	149.942.640	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467.249.400	
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.001.120.000	
3.29.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.001.120.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.320.304.860	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	416.657.820	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	903.647.040	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	646.297.240	
3.29.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.520.000	
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.630.000	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
3.29.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.147.240	
03.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	361.189.500	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	199.999.800	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	124.999.800	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	75.000.000	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	161.189.700	
3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	99.999.900	
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	61.189.800	
03.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	933.148.000	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	253.464.700	
3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	253.464.700	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	253.478.900	
3.29.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	163.473.400	
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	47.200.700	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
3.29.03.1.03.05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	42.804.800	
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	175.128.900	
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	175.128.900	
3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	43.142.700	
3.29.03.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	43.142.700	
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	207.932.800	
3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	207.932.800	
03.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	229.997.300	
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	229.997.300	
3.29.05.1.03.03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	229.997.300	
03.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	6.349.609.100	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	69.683.700	
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	69.683.700	
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	204.056.300	
3.29.06.1.05.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	168.286.500	
3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	35.769.800	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6.075.869.100	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	221.823.000	
3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.153.528.200	
3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	513.009.200	
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4.187.508.700	
3.29.0.00.0.00.42.0001	Cabang Dinas ESDM Wilayah I Maros	299.999.900	
03.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	78.814.900	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.610.800	
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.590.000	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	9.764.800	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.256.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.204.100	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.204.100	
03.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	48.550.000	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	48.550.000	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	48.550.000	
03.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	77.155.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	77.155.000	
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	77.155.000	
03.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	95.480.000	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	35.390.000	
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	35.390.000	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	60.090.000	
3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	60.090.000	
3.29.0.00.0.00.42.0002	Cabang Dinas ESDM Wilayah II Gowa	274.979.000	
03.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	71.149.000	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.150.000	
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.906.500	
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.998.000	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.781.500	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.464.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.999.000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.999.000	
03.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	41.800.000	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	41.800.000	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	41.800.000	
03.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	61.180.000	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	61.180.000	
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	61.180.000	
03.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	100.850.000	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	46.370.000	
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	46.370.000	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	54.480.000	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	54.480.000	
3.29.0.00.0.00.42.0003	Cabang Dinas ESDM Wilayah III Palopo	300.000.000	
03.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88.313.800	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.648.500	
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.114.000	
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.488.000	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.057.500	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.989.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.665.300	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.665.300	
03.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	46.268.000	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	46.268.000	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	46.268.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
03.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	75.716.000	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	75.716.000	
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	75.716.000	
03.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	89.702.200	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30.863.700	
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30.863.700	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	58.838.500	
3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	58.838.500	
3.29.0.00.0.00.42.0004	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bulukumba	299.999.900	
03.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	111.567.900	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.261.900	
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.983.000	
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.737.000	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.075.100	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.466.800	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.306.000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.306.000	
03.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	37.200.000	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	37.200.000	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	37.200.000	
03.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	63.064.000	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	63.064.000	
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	63.064.000	
03.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	88.168.000	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	88.168.000	
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	88.168.000	
3.29.0.00.0.00.42.0005	Cabang Dinas ESDM Wilayah V Bone	276.846.200	
03.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	71.753.200	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.811.000	
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.840.000	
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.998.000	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.973.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.942.200	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.942.200	
03.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	59.783.000	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	59.783.000	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	59.783.000	
03.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	60.690.000	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang	60.690.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
	Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	60.690.000	
03.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	84.620.000	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	39.120.000	
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	39.120.000	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	45.500.000	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	45.500.000	
3.29.0.00.0.00.42.0006	Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Pare-Pare	300.000.000	
03.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	111.568.000	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.031.400	
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.873.000	
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.139.600	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.562.800	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.456.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.536.600	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.536.600	
03.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	37.200.000	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	37.200.000	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	37.200.000	
03.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	63.064.000	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	63.064.000	
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	63.064.000	
03.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	88.168.000	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	88.168.000	
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	88.168.000	
3.29.0.00.0.00.42.0007	UPT Jasa Laboratorium	299.999.800	
03.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	299.999.800	
3.29.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	83.476.200	
3.29.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	83.476.200	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.523.600	
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.649.800	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.089.800	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.784.000	
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	21.771.000.715	
3.30.0.00.0.00.44.0000	DINAS PERDAGANGAN	21.771.000.715	
3.30.0.00.0.00.44.0000	DINAS PERDAGANGAN	21.771.000.715	
03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.112.023.405	
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.849.600	
3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.510.000	
3.30.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	34.999.800	
3.30.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.000.000	
3.30.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34.990.000	
3.30.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	29.999.800	
3.30.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.350.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.093.724.703	
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.923.724.903	
3.30.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.000.000	
3.30.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45.000.000	
3.30.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	44.999.800	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	259.240.000	
3.30.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	179.240.000	
3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	
3.30.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.064.472.560	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.998.860	
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.476.500	
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.999.600	
3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.999.600	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	699.998.000	
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	429.612.200	
3.30.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	300.000.000	
3.30.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.904.000	
3.30.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.708.200	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.152.128.092	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	697.125.860	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.455.002.232	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	794.996.250	
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.996.250	
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	490.000.000	
3.30.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000	
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	799.995.500	
3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	149.998.500	
3.30.02.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	149.998.500	
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	150.000.000	
3.30.02.1.03.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	150.000.000	
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	499.997.000	
3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	499.997.000	
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	499.936.350	
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	499.936.350	
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	249.999.550	
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	249.936.800	
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.166.998.300	
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	
3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	50.000.000	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.075.998.300	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	75.999.300	
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	999.999.000	
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	41.000.000	
3.30.04.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	41.000.000	
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.694.000.000	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.694.000.000	
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	700.000.000	
3.30.05.1.01.02	Pameran Dagang Lokal	150.000.000	
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	150.000.000	
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	120.000.000	
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	574.000.000	
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.873.908.160	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	323.993.900	
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	323.993.900	
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.949.914.260	
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	399.993.260	
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	1.349.996.000	
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	199.925.000	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	600.000.000	
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	624.139.000	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	574.139.000	
3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	574.139.000	
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	50.000.000	
3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	50.000.000	
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	42.780.123.253	
3.31.0.00.0.00.43.00	DINAS PERINDUSTRIAN	42.780.123.253	
3.31.0.00.0.00.43.00	DINAS PERINDUSTRIAN	42.780.123.253	
03.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.853.753.207	
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	762.665.500	
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	557.679.100	
3.31.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.500.000	
3.31.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.600.000	
3.31.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.440.000	
3.31.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.600.000	
3.31.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.600.000	
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.246.400	
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.107.477.519	
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.481.148.419	
3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	548.806.100	
3.31.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34.394.500	
3.31.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	43.128.500	
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	974.480.600	
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.555.000	
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	949.925.600	
3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.482.903.200	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
3.31.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	728.000.000	
3.31.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	754.903.200	
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.298.026.388	
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180.001.000	
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.113.500	
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.629.911.888	
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.228.200.000	
3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	598.200.000	
3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	
3.31.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	595.000.000	
03.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	23.304.427.524	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	23.304.427.524	
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6.049.688.700	
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10.069.678.700	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7.185.060.124	
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	1.799.767.822	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	1.799.767.822	
3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.699.776.422	
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	99.991.400	
03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	822.174.700	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	822.174.700	
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	672.181.400	
3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	50.001.100	
3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	99.992.200	
03.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	269.999.900	
2.07.3.32.0.00.14.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	269.999.900	
2.07.3.32.0.00.14.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	269.999.900	
03.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	40.000.000	
3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	40.000.000	
3.32.02.1.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	40.000.000	
03.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	139.999.900	
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	139.999.900	
3.32.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.000.000	
3.32.03.1.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	20.000.000	
3.32.03.1.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	69.999.900	
03.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	90.000.000	
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	90.000.000	
3.32.04.1.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	90.000.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	256.402.509.233	
4.01.0.00.0.00.28.0000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.677.581.992	
4.01.0.00.0.00.28.0000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.677.581.992	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.593.872.092	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.658.800	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	249.274.300	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	101.384.500	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.198.121.100	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	348.213.500	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	829.907.600	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477.582.192	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.582.192	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.510.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.710.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.400.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.400.000	
04.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.083.709.900	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	762.723.400	
4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	241.431.400	
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	200.000.000	
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	321.292.000	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.020.986.900	
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	379.999.900	
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	99.999.700	
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	540.987.300	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	299.999.600	
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	149.999.700	
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	49.999.900	
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100.000.000	
4.01.0.00.0.00.29.0000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	75.227.029.654	
4.01.0.00.0.00.29.0000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	75.227.029.654	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.298.759.498	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.240.600	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.327.600	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	29.913.000	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000	
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.000.000	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.218.100	
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.111.500	
4.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.970.000	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.136.600	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.451.000	
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.651.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.800.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.321.535	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.891.535	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.442.000	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.925.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.995.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.233.000	
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.835.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.525.000	
4.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	54.525.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526.753.263	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	151.867.056	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.666.591	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	344.219.616	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.250.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.250.000	
4.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000	
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	
04.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	73.928.270.156	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	53.815.151.056	
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	1.147.826.756	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	52.667.324.300	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	17.951.647.900	
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	17.820.696.700	
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	65.200.200	
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	65.751.000	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	2.161.471.200	
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	66.890.000	
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	47.287.000	
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	2.047.294.200	
4.01.0.00.0.00.30.0000	BIRO HUKUM	6.872.382.100	
4.01.0.00.0.00.30.0000	BIRO HUKUM	6.872.382.100	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.684.653.080	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.217.600	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.121.600	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.505.000	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.591.000	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.206.300	
4.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.206.300	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	277.738.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	188.538.000	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	89.200.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	429.143.000	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.880.800	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.640.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.946.000	
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.676.200	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	319.221.500	
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	319.221.500	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.391.680	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.391.680	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.735.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.025.000	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000	
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.710.000	
04.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	5.187.729.020	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.539.369.012	
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	627.457.100	
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	231.271.700	
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	74.999.700	
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	605.640.512	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	3.648.360.008	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	2.412.805.608	
4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1.235.554.400	
4.01.0.00.0.00.31.00	BIRO ORGANISASI	6.281.734.719	
4.01.0.00.0.00.31.00	BIRO ORGANISASI	6.281.734.719	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.946.734.719	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	319.457.200	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	224.457.200	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.000.000	
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.000.000	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.200.000	
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.200.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.553.600	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.800.000	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.250.000	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.750.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.051.800	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.701.800	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	174.200.000	
4.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	174.200.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.733.919	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	535.733.919	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.590.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	253.590.000	
4.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	
04.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.335.000.000	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1.500.000.000	
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	600.000.000	
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	400.000.000	
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	500.000.000	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	2.835.000.000	
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.300.000.000	
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	505.000.000	
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	250.000.000	
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	300.000.000	
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	480.000.000	
4.01.0.00.0.00.32.0000	BIRO UMUM	141.671.059.111	
4.01.0.00.0.00.32.0000	BIRO UMUM	141.671.059.111	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	141.671.059.111	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.558.900	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.715.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105.843.900	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.542.716.507	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.518.521.707	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.217.500	
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	546.552.100	
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	135.764.200	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	69.966.800	
4.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	77.043.800	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	68.650.400	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	978.640.500	
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	505.362.400	
4.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	42.210.900	
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.684.900	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	345.483.900	
4.01.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	42.898.400	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.433.898.244	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	503.580.000	
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.453.672.844	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	175.145.400	
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	301.500.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.170.735.135	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	917.283.500	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.548.301.335	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	368.041.100	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.711.259.300	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.529.727.900	
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	96.122.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.480.000.000	
4.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.480.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.998.972.647	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	109.230.200	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.723.070.947	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.671.500	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.064.641.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.128.065.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.333.860.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	311.916.000	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.290.800.000	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9.520.803.087	
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	137.291.809	
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	253.050.000	
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.250.000.000	
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7.880.461.278	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	13.298.093.091	
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	6.986.377.800	
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	814.716.000	
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5.496.999.291	
4.01.0.00.0.00.33.0000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	9.361.124.785	
4.01.0.00.0.00.33.0000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	9.361.124.785	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.361.124.785	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233.401.200	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	206.101.200	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.400.000	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.900.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	447.216.000	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.920.000	
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	387.296.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.306.836.200	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.305.600	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.978.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.121.552.600	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.131.200	
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	850.131.200	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.810.376.420	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	199.251.500	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.611.124.920	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.600.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	666.600.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.000.000	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.391.872.700	
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	218.154.400	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	337.920.800	
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	835.797.500	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	2.586.691.065	
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.690.915.465	
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	630.070.000	
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	265.705.600	
4.01.0.00.0.00.52.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6.641.209.920	
4.01.0.00.0.00.52.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6.641.209.920	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.127.246.920	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	326.300.000	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.000.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	297.300.000	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.000.000	
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.796.973.000	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.794.473.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363.651.408	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.651.408	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.322.512	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	295.322.512	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	
04.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.114.200.700	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.689.627.100	
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	785.000.000	
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	904.627.100	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	424.573.400	
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	424.573.400	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.000.000.200	
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1.000.000.200	
04.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	399.762.300	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	299.762.300	
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	99.762.400	
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	99.999.900	
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	100.000.000	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	
4.01.0.00.0.00.53.0000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	5.670.386.952	
4.01.0.00.0.00.53.0000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	5.670.386.952	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.909.426.752	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.575.718.900	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.697.000	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.180.071.500	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	389.950.400	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	232.000.000	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	232.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	503.166.542	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.384.350	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	484.782.192	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.541.310	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.182.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.359.310	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
04.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.760.960.200	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.284.604.700	
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.184.604.700	
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	885.942.200	
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	443.483.100	
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	385.156.400	
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	57.302.700	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	590.413.300	
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	306.455.000	
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	154.819.500	
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	129.138.800	
04.02	SEKRETARIAT DPRD	305.838.521.923	
4.02.0.00.0.00.27.00	SEKRETARIAT DPRD	305.838.521.923	
4.02.0.00.0.00.27.00	SEKRETARIAT DPRD	305.838.521.923	
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.880.303.227	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	929.765.200	
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.566.500	
4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	244.377.700	
4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	224.658.500	
4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	89.755.500	
4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	101.293.900	
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.001.400	
4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.111.700	
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.500.796.679	
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.939.705.479	
4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.711.500	
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	357.833.300	
4.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	208.334.000	
4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	170.411.500	
4.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	533.668.700	
4.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	205.945.200	
4.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	51.187.000	
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.561.500	
4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.561.500	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.101.264.000	
4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	93.775.000	
4.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	104.845.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
4.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	902.644.000	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.366.552.520	
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	148.634.000	
4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.112.000	
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	242.070.000	
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	480.960.020	
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	720.610.000	
4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	908.248.500	
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.918.000	
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	542.962.000	
4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	542.962.000	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.574.474.728	
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.538.975.120	
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.035.499.608	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.447.513.000	
4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.123.832.000	
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	902.826.000	
4.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	100.000.000	
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.791.750.000	
4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.529.105.000	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	73.793.787.800	
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	70.050.894.410	
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2.702.372.000	
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	1.040.521.390	
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	8.548.625.800	
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	359.305.800	
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	166.970.000	
4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	8.022.350.000	
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	184.958.218.696	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	26.436.557.500	
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	385.330.000	
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	23.231.788.300	
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.176.961.300	
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	869.068.400	
4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	773.409.500	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	12.615.548.400	
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	814.764.000	
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	812.372.500	
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	2.856.646.600	
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	2.903.940.000	
4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	2.687.999.400	
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2.539.825.900	
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	22.816.592.700	
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.284.167.900	
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.490.869.200	
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.495.943.500	
4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.449.824.100	
4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.320.165.000	
4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.779.272.000	
4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	11.735.976.000	
4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2.260.375.000	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	65.263.681.896	
4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	3.648.178.000	
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	29.824.161.000	
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	569.857.680	
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	683.829.216	
4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	28.709.292.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.828.364.000	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	43.900.407.700	
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	957.185.200	
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	42.943.222.500	
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	651.836.500	
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	651.836.500	
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	773.061.000	
4.02.02.1.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	773.061.000	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	12.500.533.000	
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.530.767.000	
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	147.867.000	
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.480.607.500	
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.611.319.000	
4.02.02.1.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	729.972.500	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
05.01	PERENCANAAN	53.898.303.632	
5.01.5.05.0.00.51.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	53.898.303.632	
5.01.5.05.0.00.51.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	53.898.303.632	
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.702.774.860	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	630.576.528	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.000.376	
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	24.073.000	
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.073.000	
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	44.400.000	
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	40.000.000	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	431.030.152	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.111.762.660	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.692.872.532	
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	319.290.528	
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	99.599.600	
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	119.358.200	
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	21.159.900	
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	98.198.300	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	657.036.300	
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	307.015.000	
5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	127.282.200	
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64.025.300	
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	158.713.800	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.782.484.200	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.605.900	
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	206.114.900	
5.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	89.795.100	
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	194.609.500	
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.171.358.800	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	589.567.600	
5.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	5.197.600	
5.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	584.370.000	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.608.312	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.604.000	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	983.004.312	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.711.381.060	
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	726.481.000	
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	334.163.000	
5.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	105.347.500	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	752.059.560	
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	793.330.000	
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	12.997.160.980	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.248.321.000	
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	479.530.000	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.768.791.000	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	254.417.000	
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	254.417.000	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9.494.422.980	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	8.299.840.280	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	864.759.200	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	329.823.500	
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.198.367.792	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.464.251.704	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	136.571.152	
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	181.940.000	
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	271.700.000	
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	287.968.952	
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	231.851.888	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	354.219.712	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.148.807.480	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.008.476	
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	155.925.476	
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	255.372.976	
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.570.800	
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	158.270.376	
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	278.659.376	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.585.308.608	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	198.412.752	
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	151.690.876	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	662.421.952	
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	170.386.376	
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	139.047.976	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	263.348.676	
05.02	KEUANGAN	2.454.490.971.193	
5.02.0.00.0.00.45.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.273.258.679.464	
5.02.0.00.0.00.45.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.273.258.679.464	
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57.801.567.143	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.600.000.000	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	367.920.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	132.080.000	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	700.000.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.228.642.177	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.163.641.977	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.999.300	
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	234.995.000	
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	199.998.600	
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	500.007.300	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	220.000.000	
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	220.000.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.435.592.712	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	499.990.000	
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.451.902.712	
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130.000.000	
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	353.700.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.299.783.000	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.995.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	400.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.788.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.247.416.000	
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.247.416.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.133.920	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.133.920	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.649.999.334	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.149.999.334	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.200.000.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.210.107.112.321	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.260.105.400	
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	132.967.600	
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.988.000	
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	268.655.000	
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	268.655.000	
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	20.000.000	
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	20.000.000	
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.437.029.000	
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	445.242.000	
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	649.568.800	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.250.865.500	
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	347.029.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	312.235.000	
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	499.986.100	
5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	611.623.000	
5.02.02.1.02.10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	299.994.800	
5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	179.997.600	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3.750.000.000	
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.900.000.000	
5.02.02.1.03.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	250.000.000	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	450.000.000	
5.02.02.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	370.000.000	
5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	150.000.000	
5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	130.000.000	
5.02.02.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500.000.000	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.949.964.000	
5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	299.989.700	
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	649.986.800	
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.199.998.100	
5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	299.999.600	
5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	499.989.800	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.196.896.177.421	
5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.049.717.475	
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	608.913.717.000	
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	60.000.000.000	
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.525.932.742.946	
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.350.000.000	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.350.000.000	
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	450.000.000	
5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	20.000.000	
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120.000.000	
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	250.000.000	
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.040.000.000	
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.380.000.000	
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	120.000.000	
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	300.000.000	
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	670.000.000	
5.02.0.00.0.00.46.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	181.232.291.729	
5.02.0.00.0.00.46.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	164.541.834.998	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	160.406.857.298	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	932.178.300	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	225.999.500	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	214.609.300	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	137.134.400	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	144.015.400	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	114.719.800	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.599.900	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.100.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	132.472.015.606	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	131.586.912.806	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.840.000	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400.646.700	
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	91.386.000	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.668.000	
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	178.333.800	
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	142.962.400	
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.265.900	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	347.258.000	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12.719.400	
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	152.999.800	
5.02.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6.000.000	
5.02.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.052.000	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	159.986.800	
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
5.02.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4.500.000	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	785.364.200	
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	302.442.900	
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	117.826.700	
5.02.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	365.094.600	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.197.545.300	
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	241.956.200	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	102.410.000	
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	207.728.200	
5.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	48.000.000	
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	250.978.000	
5.02.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	11.340.000	
5.02.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	6.237.900	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.547.000	
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.400.000	
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	201.948.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.365.430.850	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	107.712.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	336.424.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.682.500.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	376.101.550	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	575.503.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.648.000	
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	228.542.300	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.856.522.186	
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	221.220.000	
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.287.802.186	
5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.297.500.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.121.181.224	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	211.990.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.718.524.376	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.094.666.848	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.329.361.632	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.114.030.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	654.840.000	
5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	55.500.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	422.370.000	
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	495.085.720	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.587.535.912	
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	969.376.000	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	575.258.800	
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	81.244.900	
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	78.664.200	
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	22.135.700	
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	24.788.900	
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	27.429.900	
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	24.720.700	
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	66.073.500	
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	38.395.100	
5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	211.805.900	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	394.117.200	
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	338.386.100	
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	55.731.100	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.165.601.700	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.165.601.700	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	757.418.200	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	170.355.900	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	90.833.900	
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	867.120.400	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	361.960.400	
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	359.576.300	
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	138.117.900	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	319.557.900	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100.660.800	
5.02.0.00.0.00.46.0001	UPT Pendapatan Wilayah Pangkep	551.426.400	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	551.426.400	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	551.426.400	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	444.586.900	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	15.199.600	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	17.339.900	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	74.300.000	
5.02.0.00.0.00.46.0002	UPT Pendapatan Wilayah Barru	681.846.050	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	681.846.050	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	681.846.050	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	472.346.150	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	61.499.900	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	39.000.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	109.000.000	
5.02.0.00.0.00.46.0003	UPT Pendapatan Wilayah Selayar	550.484.100	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	550.484.100	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	550.484.100	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	495.734.100	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	13.000.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	300.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	41.450.000	
5.02.0.00.0.00.46.0004	UPT Pendapatan Wilayah Gowa	686.268.700	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	686.268.700	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	686.268.700	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	458.772.000	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	59.100.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	38.896.700	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	129.500.000	
5.02.0.00.0.00.46.0005	UPT Pendapatan Wilayah Maros	533.372.400	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	533.372.400	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	533.372.400	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	387.642.900	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	45.880.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	38.949.500	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	60.900.000	
5.02.0.00.0.00.46.0006	UPT Pendapatan Wilayah Sidrap	767.872.000	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	767.872.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	767.872.000	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	567.372.000	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	65.000.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	35.500.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	100.000.000	
5.02.0.00.0.00.46.0007	UPT Pendapatan Wilayah Bantaeng	772.713.350	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	772.713.350	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	772.713.350	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	635.163.350	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	63.600.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	7.950.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	66.000.000	
5.02.0.00.0.00.46.0008	UPT Pendapatan Wilayah Luwu Utara	714.680.750	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	714.680.750	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	714.680.750	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	489.999.250	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	50.520.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	52.919.500	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	121.242.000	
5.02.0.00.0.00.46.0009	UPT Pendapatan Wilayah Enrekang	532.205.500	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	532.205.500	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	532.205.500	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	373.905.500	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	55.300.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	40.000.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	63.000.000	
5.02.0.00.0.00.46.0010	UPT Pendapatan Wilayah Palopo	720.626.900	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	720.626.900	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	720.626.900	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	553.627.400	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	37.499.500	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	22.000.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	107.500.000	
5.02.0.00.0.00.46.0011	UPT Pendapatan Wilayah Takalar	562.227.900	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	562.227.900	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	562.227.900	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	375.118.000	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	37.499.900	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	27.110.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	122.500.000	
5.02.0.00.0.00.46.0012	UPT Pendapatan Wilayah Pare-Pare	497.275.340	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	497.275.340	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	497.275.340	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	369.475.340	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	31.800.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	33.000.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	63.000.000	
5.02.0.00.0.00.46.0013	UPT Pendapatan Wilayah Bulukumba	599.830.900	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	599.830.900	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	599.830.900	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	396.731.000	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	56.099.900	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	76.050.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	70.950.000	
5.02.0.00.0.00.46.0014	UPT Pendapatan Wilayah Pinrang	566.184.240	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	566.184.240	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	566.184.240	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	362.381.640	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	75.100.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	35.102.700	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	93.599.900	
5.02.0.00.0.00.46.0015	UPT Pendapatan Wilayah Soppeng	554.343.400	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	554.343.400	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	554.343.400	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	376.093.400	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	62.000.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	13.250.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	103.000.000	
5.02.0.00.0.00.46.0016	UPT Pendapatan Toraja Utara	562.710.500	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	562.710.500	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	562.710.500	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	423.610.800	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	34.499.900	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	37.999.800	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	66.600.000	
5.02.0.00.0.00.46.0017	UPT Pendapatan Tana Toraja	686.904.500	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	686.904.500	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	686.904.500	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	539.195.800	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	45.530.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	22.400.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	79.778.700	
5.02.0.00.0.00.46.0018	UPT Pendapatan Wilayah Wajo	611.165.900	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	611.165.900	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	611.165.900	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	454.866.100	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	28.499.800	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	48.750.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	79.050.000	
5.02.0.00.0.00.46.0019	UPT Pendapatan Wilayah Sinjai	726.860.150	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	726.860.150	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	726.860.150	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	549.110.150	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	50.350.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	27.500.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	99.900.000	
5.02.0.00.0.00.46.0020	UPT Pendapatan Wilayah Makassar I (Selatan)	1.695.714.201	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.695.714.201	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.695.714.201	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.213.742.201	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	36.550.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	74.172.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	371.250.000	
5.02.0.00.0.00.46.0021	UPT Pendapatan Wilayah Belopa	611.314.900	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	611.314.900	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	611.314.900	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	488.611.300	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12.000.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	34.503.600	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	76.200.000	
5.02.0.00.0.00.46.0022	UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto	568.903.100	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	568.903.100	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	568.903.100	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	424.153.300	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	47.249.800	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	33.930.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	63.570.000	
5.02.0.00.0.00.46.0023	UPT Pendapatan Wilayah Bone	536.673.700	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	536.673.700	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	536.673.700	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	369.168.900	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	63.660.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	38.794.800	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	65.050.000	
5.02.0.00.0.00.46.0024	UPT Pendapatan Wilayah Luwu Timur	556.203.000	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	556.203.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	556.203.000	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	434.429.000	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	34.450.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	35.724.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	51.600.000	
5.02.0.00.0.00.46.0025	UPT Pendapatan Wilayah Makassar II (Utara)	842.648.850	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	842.648.850	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	842.648.850	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	503.640.250	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	58.002.800	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	59.002.800	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	222.003.000	
05.03	KEPEGAWAIAN	25.324.666.418	
5.03.0.00.0.00.21.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	25.324.666.418	
5.03.0.00.0.00.21.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	25.324.666.418	
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.182.334.714	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	191.583.100	
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.393.900	
5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.127.800	
5.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.512.300	
5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.132.100	
5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	17.740.300	
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.080.000	
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.596.700	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.883.802.930	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.730.319.054	
5.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.899.676	
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.900.500	
5.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.481.000	
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.710.500	
5.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.247.600	
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	66.244.600	
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.490.676	
5.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.182.600	
5.03.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.400.000	
5.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.500.000	
5.03.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.624.800	
5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.783.276	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	218.047.976	
5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48.921.776	
5.03.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.146.700	
5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17.199.900	
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	97.479.600	
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.300.000	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	895.344.328	
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.964.500	
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.814.400	
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	249.993.600	
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.763.976	
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.684.676	
5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	64.123.176	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	421.954.000	
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	16.000.000	
5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	405.954.000	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.551.704	
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97.551.704	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.560.000	
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	357.260.000	
5.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	8.700.000	
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.600.000	
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.142.331.704	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	903.267.684	
5.03.02.1.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	48.668.700	
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	67.927.852	
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	181.697.900	
5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	30.580.000	
5.03.02.1.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	24.721.000	
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	75.892.476	
5.03.02.1.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	28.910.000	
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	270.619.728	
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	36.100.900	
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	38.763.876	
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	65.151.252	
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	34.234.000	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.421.855.232	
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	322.473.452	
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	595.726.928	
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	503.654.852	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.126.299.332	
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	140.000.200	
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	526.999.804	
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	47.623.476	
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	51.468.100	
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	26.266.900	
5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	19.611.900	
5.03.02.1.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	16.561.000	
5.03.02.1.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	117.678.576	
5.03.02.1.03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	20.000.000	
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	14.000.000	
5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	18.659.400	
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	89.149.476	
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	38.280.500	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	690.909.456	
5.03.02.1.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	120.553.500	
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	160.637.952	
5.03.02.1.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	36.499.600	
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	90.086.652	
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	54.144.100	
5.03.02.1.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	32.327.800	
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	114.660.252	
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	48.000.000	
5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	17.999.700	
5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	15.999.900	
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	26.227.679.424	
5.04.0.00.0.00.22.0000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	26.227.679.424	
5.04.0.00.0.00.22.0000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	26.227.679.424	
05.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.077.679.424	
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.316.000	
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.190.000	
5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.976.000	
5.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.600.000	
5.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
5.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.000.000	
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.550.000	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.908.737.302	
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.758.737.302	
5.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.400.000	
5.04.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.350.000	
5.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000	
5.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.350.000	
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.200.000	
5.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.200.000	
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.000.000	
5.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	138.000.000	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.000.000	
5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.388.462.372	
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	936.792.468	
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.451.669.904	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.163.750	
5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.163.750	
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.000.000	
5.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.150.000.000	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	150.000.000	
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	
5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Penguudinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.000.000.000	
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.000.000.000	
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.243.721.220	
5.01.5.05.0.00.51.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.243.721.220	
5.01.5.05.0.00.51.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.243.721.220	
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.243.721.220	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.150.711.104	
5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	94.981.100	
5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	355.821.152	
5.05.02.1.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	699.908.852	
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.120.935.552	
5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	587.981.800	
5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	240.765.700	
5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	292.188.052	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.369.357.780	
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	589.581.180	
5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	273.439.800	
5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	506.336.800	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.602.716.784	
5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.109.040.102	
5.05.02.1.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	139.084.954	
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	196.912.676	
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	74.049.200	
5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	83.629.852	
05.07	PENGLOLOAN PENGHUBUNG	19.263.462.929	
5.06.5.07.0.00.24.0000	BADAN PENGHUBUNG	19.263.462.929	
5.06.5.07.0.00.24.0000	BADAN PENGHUBUNG	19.263.462.929	
05.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.055.102.000	
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.352.110.600	
5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.609.000	
5.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	199.173.000	
5.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	146.987.000	
5.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	173.080.000	
5.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	174.647.000	
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	255.502.600	
5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	345.112.000	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.240.042.869	
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.240.042.869	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	644.809.200	
5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72.280.000	
5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.702.300	
5.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	283.696.000	
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.130.900	
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.508.606.197	
5.07.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	768.640.000	
5.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.739.966.197	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.093.758.634	
5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	151.500.000	
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	942.258.634	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.215.774.500	
5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	694.030.000	
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	521.744.500	
05.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.208.360.929	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.208.360.929	
5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	5.208.360.929	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
06.01	INSPEKTORAT DAERAH	57.163.927.864	
6.01.0.00.0.00.26.0000	INSPEKTORAT	57.163.927.864	
6.01.0.00.0.00.26.0000	INSPEKTORAT	57.163.927.864	
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.341.617.864	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	609.400.152	
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	149.900.352	
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.000.000	
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.500.000	
6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	67.000.000	
6.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	65.000.000	
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	124.999.800	
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.000.000	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.956.610.128	
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.629.935.544	
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	169.227.056	
6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.237.528	
6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.500.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
6.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.210.000	
6.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.500.000	
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.500.000	
6.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.400.000	
6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.100.000	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.281.454.352	
6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	292.380.000	
6.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	112.184.352	
6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	290.000.000	
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.586.890.000	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.194.680.000	
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000	
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.500.000	
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.570.000	
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201.970.000	
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.240.000	
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	500.000	
6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	230.400.000	
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.177.700.000	
6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	100.000.000	
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.077.700.000	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.059.363.232	
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000	
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.139.600	
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	565.823.632	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.041.910.000	
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.230.000	
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.750.000	
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.430.000	
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	497.500.000	
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	14.723.830.000	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	10.212.830.000	
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	688.620.000	
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4.034.948.000	
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	517.764.000	
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	608.690.000	
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	3.212.950.000	
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	138.800.000	
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.011.058.000	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4.511.000.000	
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	159.000.000	
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4.352.000.000	
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.098.480.000	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	950.000.000	
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	750.000.000	
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	200.000.000	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	3.148.480.000	
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	157.500.000	
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	289.730.000	
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.500.000.000	
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	201.250.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52.316.473.947	
8.01.0.00.0.00.25.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52.316.473.947	
8.01.0.00.0.00.25.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52.316.473.947	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.400.382.733	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	475.289.876	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.479.100	
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	264.278.600	
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.901.500	
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.901.500	
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.095.000	
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.711.176	
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.923.000	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.373.864.589	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.123.865.137	
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.527.100	
8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.931.800	
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.843.600	
8.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.996.800	
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	161.063.352	
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.636.800	
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	51.348.000	
8.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	31.170.000	
8.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.178.000	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.135.752	
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.350.000	
8.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	52.379.776	
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27.405.976	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	738.237.776	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.500.000	
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.500.000	
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.855.500	
8.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	19.805.000	
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	176.289.500	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.833.000	
8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	28.454.776	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	802.645.500	
8.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	630.000.000	
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	69.730.000	
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.915.500	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.816.240	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.816.240	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.045.000	
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	598.545.000	
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.500.000	
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	203.729.700	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	203.729.700	
8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	52.460.500	
8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	93.676.000	
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	57.593.200	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	6.462.854.312	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6.462.854.312	
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.466.500	
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	124.161.000	
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.264.564.112	
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7.630.500	
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	61.032.200	
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	106.377.800	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	106.377.800	
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	32.520.600	
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	21.961.000	
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23.567.000	
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	28.329.200	
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.187.999.200	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.187.999.200	
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	67.624.000	
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.037.033.000	
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	47.134.000	
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	36.208.200	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
1	2	3	4
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	34.955.130.202	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	34.955.130.202	
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.572.000	
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.572.000	
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	34.615.891.502	
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59.370.000	
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	209.879.200	
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	66.845.500	

4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan kegiatan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PROYEKSI
1	Belanja Operasi	5.658.346.529.007
	Belanja Pegawai	3.273.653.314.243
	Belanja Barang dan Jasa	2.065.697.795.213
	Belanja Subsidi	2.000.000.000
	Belanja Hibah	312.715.419.551
	Belanja Bantuan Sosial	4.280.000.000
2	Belanja Modal	1.630.578.496.195
	Belanja Peralatan dan Mesin	172.453.172.771
	Belanja Gedung dan Bangunan	548.554.357.228
	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	869.805.694.000
	Belanja Aset Tetap Lainnya	39.765.272.196
3	Belanja Tidak Terduga	60.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga	60.000.000.000
4	Belanja Transfer	2.043.396.289.946
	Belanja Bagi Hasil	1.525.932.742.946
	Belanja Bantuan Keuangan	517.463.547.000
	Total	9.392.321.315.148

4.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2023, rencananya Belanja Pegawai dialokasikan anggaran sebesar Rp3.273.653.314.243,00.

4.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai,

pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2023, rencananya Belanja Barang dan Jasa dialokasikan anggaran sebesar Rp2.065.697.795.213,00

4.2.3 Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2.4 Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh

badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2023, rencananya Belanja Subsidi dialokasikan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00.

4.2.5 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. badan

dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan. 4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan 5) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Pada Tahun Anggaran 2023, rencananya Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp316.996.419.551,00.

4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa komponen Belanja Modal terdiri atas Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2023, rencananya Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp 1.630.578.496.195,00

4.3.1 Belanja Tanah

Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap pakai.

4.3.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pada Tahun Anggaran 2023, rencananya Belanja Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp172.453.172.771,00.

4.3.3 Belanja Bangunan dan Gedung

Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pada Tahun Anggaran 2023, rencananya Belanja Bangunan dan Gedung dialokasikan sebesar Rp548.554.357.228,00

4.3.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pada Tahun Anggaran 2023, rencananya Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dialokasikan sebesar Rp869.805.694.000,00.

4.3.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pada Tahun Anggaran 2023, rencananya Belanja Aset Tetap Lainnya dialokasikan sebesar Rp39.765.272.196,00.

4.4 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah

dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2023, rencananya Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp60.000.000.000,00.

4.5 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa sebesar Rp2.043.396.289.946,00. Belanja transfer terdiri atas:

4.5.1 Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2022 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

Pada Tahun Anggaran 2023, rencananya dialokasikan dana sebesar Rp1.525.932.742.946,00.

4.5.2 Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan

sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas: bantuan keuangan antar Daerah provinsi; bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota; bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya; bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pada Tahun Anggaran 2023, rencananya dialokasikan dana sebesar Rp517.463.547.000,00.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Bab II huruf E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun sebagian besar bersumber dari: **1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)** harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran

2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan; **2) Pencairan Dana Cadangan** digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; **3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan** dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya; **4) Penerimaan Pinjaman Daerah** didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; **5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah** digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan **6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2023, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;

5.1.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran dimaksud dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- 2) Penyertaan Modal Daerah;
- 3) Pembentukan Dana Cadangan;
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

1. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT.Bank Sulselbar setiap tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT. Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan berikut :

Tabel 5.1.
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	3
	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	135.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	135.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(135.000.000.000,00)

BAB VI

PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pedoman pelaksanaan RAPBD Tahun Anggaran 2023 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan. PPAS berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, yang merupakan panduan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Selain hal-hal yang tercantum dalam kebijakan di atas, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan dan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) untuk APBD Tahun 2023;
2. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan penyesuaian tanpa melakukan perubahan atas Nota Kesepakatan bersama Penetapan PPAS Tahun Anggaran 2023 antara Gubernur Sulawesi Selatan dan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Dengan disepakatinya dokumen PPAS Tahun Anggaran 2023 yang akan menjadi dasar dalam proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sampai dengan

tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan

4. Diharapkan kepada unsur pemerintah daerah dan pimpinan DPRD bersama pemangku kepentingan ikut bertanggung jawab dalam menjadikan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.